



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Atas rahmat dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Sumatera Selatan telah dapat memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bahwa telah disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, menggunakan Sistematika yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selanjutnya memperhatikan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.7/989/OTDA tanggal 12 Februari 2026 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

Kami beserta Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat dengan harapan kiranya berkenan memberikan masukan yang bersifat membangun guna mewujudkan Sumsel Maju Terus Untuk Semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 13 Maret 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



D A F T A R I S I

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025

	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Profil Daerah	I-3
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	I-3
b. Data Geografis Wilayah	I-6
c. Informasi Umum data Kependudukan	I-9
d. Jumlah Kab/Kota	I-11
e. Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	I-12
f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap perangkat daerah	I-15
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I-30
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I-42
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-42
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	I-44
c. Program Pembangunan Daerah	I-50
d. Kegiatan Pembangunan Daerah	I-59
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-77
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1



2.1	Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..	II-2
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-3
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	II-62
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-73
a.	Target kinerja dalam perjanjian kinerja	II-73
b.	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	II-75
c.	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	II-87
d.	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	II-100
e.	Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	II-136
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.	III-1
3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi	III-2
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-2
3.3	Permasalahan dan kendala	III-18
3.4	Saran dan Tindak Lanjut	III-19
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1	Urusan Pendidikan	IV-1
a.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
b.	Target Pencapaian	IV-10
c.	Alokasi Anggaran	IV-26
d.	Dukungan Personil	IV-29
e.	Realisasi	IV-37
f.	Permasalahan dan Solusi	IV-41
4.2	Urusan Kesehatan	IV-42



a. Jenis Pelayanan Dasar	IV-42
b. Target Pencapaian	IV-47
c. Alokasi Anggaran	IV-48
d. Dukungan Personil	IV-49
e. Realisasi	IV-51
f. Permasalahan dan Solusi	IV-65
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	IV-68
a. Jenis Pelayanan Dasar	IV-68
b. Target Pencapaian	IV-68
c. Alokasi Anggaran	IV-68
d. Dukungan Personil	IV-69
e. Realisasi	IV-69
f. Permasalahan dan Solusi	IV-70
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	IV-73
a. Jenis Pelayanan Dasar	IV-73
b. Target Pencapaian	IV-73
c. Alokasi Anggaran	IV-73
d. Dukungan Personil	IV-74
e. Realisasi	IV-75
f. Permasalahan dan Solusi	IV-76
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-77
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan	IV-77
a. Jenis Pelayanan Dasar	IV-77
b. Target Pencapaian	IV-77
c. Alokasi Anggaran	IV-78
d. Dukungan Personil	IV-80
e. Realisasi	IV-80
f. Permasalahan dan Solusi	IV-84
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan	IV-85



a. Jenis Pelayanan Dasar	IV-85
b. Target Pencapaian	IV-86
c. Alokasi Anggaran	IV-86
d. Dukungan Personil	IV-87
e. Realisasi	IV-88
f. Permasalahan dan Solusi	IV-89
4.2 Urusan Sosial	IV-91
a. Jenis Pelayanan Dasar	IV-91
b. Target Pencapaian	IV-91
c. Alokasi Anggaran	IV-92
d. Dukungan Personil	IV-92
e. Realisasi	IV-92
f. Permasalahan dan Solusi	IV-98
BAB V PENUTUP	V-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun setiap tahun dan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan tahapan penting dalam proses pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berfungsi sebagai dokumen resmi yang memuat informasi komprehensif mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran. Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan memuat data, informasi, dan analisis atas pelaksanaan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi bahan utama dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, objektivitas, dan keterukuran kinerja, serta didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian informasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mencerminkan tingkat capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan secara nasional.

Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi yang memiliki wilayah luas, potensi sumber daya alam yang besar, serta dinamika pembangunan yang terus berkembang, menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah yang efektif dan berbasis kinerja, yang salah satunya diwujudkan melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara tepat waktu, akurat, dan komprehensif.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Gubernur kepada Pemerintah Pusat atas pelaksanaan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Selain itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga berfungsi sebagai sarana evaluasi internal bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengidentifikasi capaian, permasalahan, serta



faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan, diharapkan dokumen ini dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat, sekaligus menjadi pijakan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

1.1.1 Penjelasan Umum, memuat informasi tentang profil daerah meliputi :

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem



Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024



Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 18);
20. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33).

b. Data Geografis Wilayah

Pada Tahun 1950 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan telah dibentuk Provinsi Otonomi Sumatera Selatan, yang wilayahnya meliputi Daerah Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka Belitung dengan Ibukotanya berkedudukan di Kota Palembang.

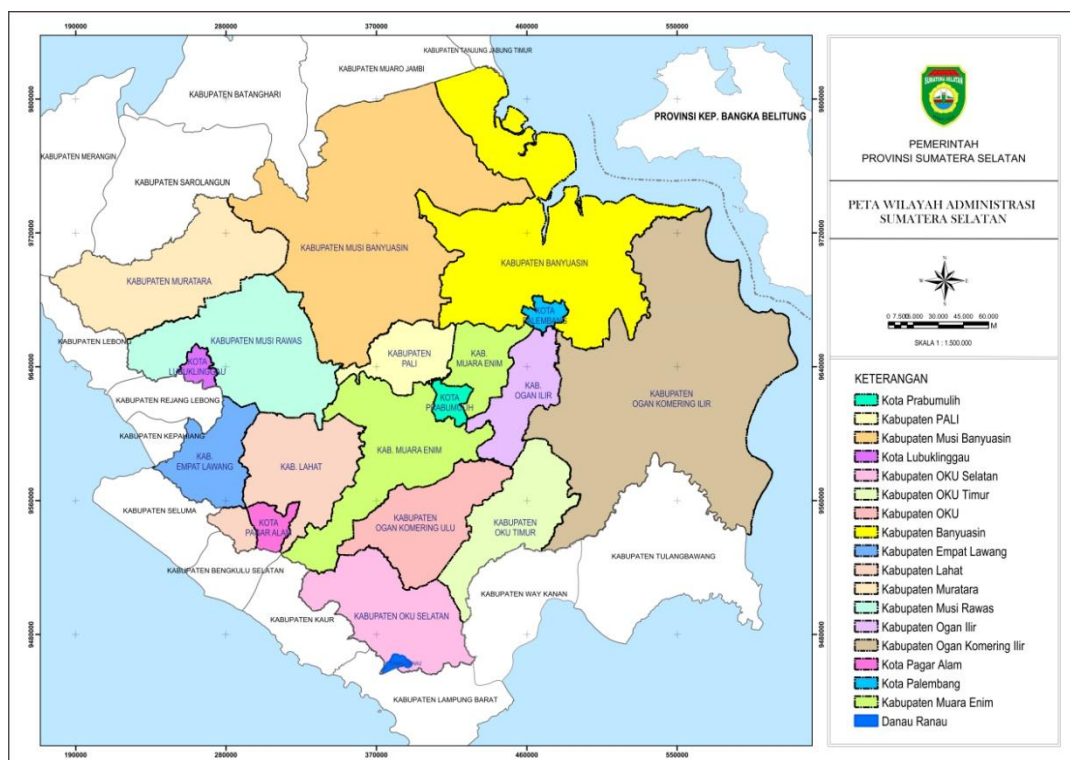
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tanggal 26 Juni 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang.

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1° - 4° Lintang Selatan dan 102° - 106° Bujur Timur dengan batas administrasi:

- Di sebelah Utara dengan Provinsi Jambi.
- Di sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung
- Di sebelah Timur dengan Provinsi Bangka Belitung
- Di sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu.

Adapun peta administrasi Provinsi Sumatera Selatan seperti tertera pada gambar berikut :

Gambar
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan



Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 91.592,43 Km² dengan rincian sebagai berikut :



Tabel
Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH KM²
1	OGAN KOMERING ULU	4.797,06
2	OGAN KOMERING ILIR	18.359,04
3	MUARA ENIM	7.383,90
4	LAHAT	5.311,74
5	MUSI RAWAS	6.350,10
6	MUSI BANYUASIN	14.266,26
7	BANYUASIN	11.832,99
8	OKU TIMUR	3.370,00
9	OKU SELATAN	5.493,94
10	OGAN ILIR	2.666,09
11	EMPAT LAWANG	2.256,44
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1.840,00
13	MUSI RAWAS UTARA	6.008,55
14	PALEMBANG	369,22
15	PAGAR ALAM	633,66
16	LUBUK LINGGAU	401,50
17	PRABUMULIH	251,94

Kawasan timur sampai garis pantai bagian daratan di dominasi rawa-rawa dan lebak yang dipengaruhi pasang surut. Di bagian tengah dan makin ke barat merupakan dataran rendah dan lembah-lembah luas. Bagian Barat Sumatera Selatan terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang merupakan mata rantai dari Bukit Barisan yang membentang di Pulau Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung. Puncak-puncak Bukit

Barisan di Sumatera Selatan diantaranya adalah Gunung Dempo (3,159 M) Gunung Seminung (1.954 M), Gunung Patah (2.107 M), Gunung Bungkok (2.125 M). Di kaki Gunung Seminung terdapat Danau Ranau yang luasnya 128 km² dengan panorama alam yang indah dan juga ideal untuk olahraga air seperti ski, menyelam, renang dan kano. Kawasan pegunungan dan perbukitan tersebut sebagian besar masih diselimuti hutan lebat sampai ke dataran rendah, umumnya berada pada ketinggian 900-1.200 M di atas permukaan laut. Kawasan ini juga merupakan sumber mata air utama dari sungai-sungai besar di Sumatera Selatan yang sebagian besar bermuara di Selat Bangka.

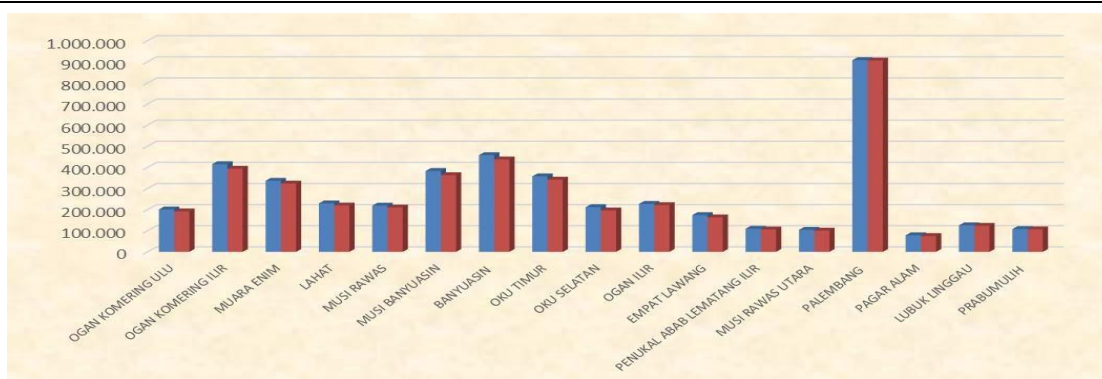
c. Informasi Umum Data Kependudukan

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 91.592,43 Km² dengan jumlah penduduk Sumatera Selatan untuk Semester I Tahun 2025 (30 Juni 2025) sebanyak 9.135.317 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.650.980 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.484.337 jiwa atau dengan kata lain bahwa penduduk Sumatera Selatan didominasi dengan jenis kelamin laki-laki, demikian pula di Kabupaten/Kota. Apabila ditinjau dari jumlah penduduk, maka Kota Palembang merupakan daerah yang penduduknya terbanyak, yakni sebanyak 1.814.716 jiwa dan Kota Pagar Alam merupakan daerah yang penduduknya paling sedikit, yakni sebanyak 153.984 jiwa. Data kependudukan memegang peranan penting dalam mengambil kebijakan, peranan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan baik pemerintah maupun pihak lainnya terutama dunia usaha.



REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PENDUDUK		
				LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	200.981	191.668	392.649
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	415.585	394.042	809.627
3	MUARA ENIM	22	255	336.990	323.543	660.533
4	LAHAT	24	378	230.016	219.935	449.951
5	MUSI RAWAS	14	199	219.396	210.274	429.670
6	MUSI BANYUASIN	15	242	383.488	363.247	746.735
7	BANYUASIN	21	313	458.253	437.939	896.192
8	OKU TIMUR	20	312	357.783	342.544	700.327
9	OKU SELATAN	19	259	211.787	196.493	408.280
10	OGAN ILIR	16	241	227.476	221.739	449.215
11	EMPAT LAWANG	10	156	174.316	163.262	337.578
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	109.614	106.486	216.100
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	104.437	100.929	205.366
14	PALEMBANG	18	107	908.115	906.601	1.814.716
15	PAGAR ALAM	5	35	78.745	75.239	153.984
16	LUBUK LINGGAU	8	72	125.820	123.753	249.573
17	PRABUMULIH	6	45	108.178	106.643	214.821
	JUMLAH	241	3.258	4.650.980	4.484.337	9.135.317



SUMBER DATA : HASIL KONSOLIDASI DARI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

**d. Jumlah Kabupaten/Kota**

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota, terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten yakni : Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk Kota terdapat 4 (empat) Kota yaitu : Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Prabumulih. Jumlah Kecamatan pada Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 241 Kecamatan, sedangkan jumlah desa/kelurahan sebanyak 3.258 desa/kelurahan

Jumlah penduduk Sumatera Selatan untuk Semester I Tahun 2025 (30 Juni 2025) sebanyak 9.135.317 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.650.980 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.484.337 jiwa atau dengan kata lain bahwa penduduk Sumatera Selatan didominasi dengan jenis kelamin laki-laki, demikian pula di Kabupaten/Kota. Apabila ditinjau dari jumlah penduduk, maka Kota Palembang merupakan daerah yang penduduknya terbanyak, yakni sebanyak 1.814.716 jiwa dan Kota Pagar Alam merupakan daerah yang penduduknya paling sedikit, yakni sebanyak 153.984 jiwa.

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN PENDUDUK
DAN KEPADATAN HASIL KONSOLIDASI
DARI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER I (30 JUNI 2025)

KODE WILAYAH	KABUPATEN/ KOTA	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	KEPADATAN PENDUDUK (KM2)
1601	Ogan Komering Ulu	4.797,06	392.649	0,67	104,03
1602	Ogan Komering Ilir	18.359,04	809.627	1,07	47,43
1603	Muara Enim	7.383,90	660.533	1,04	97,66
1604	Lahat	5.311,74	449.951	0,40	103,84
1605	Musi Rawas	6.350,10	429.670	0,46	70,18
1606	Musi Banyuasin	14.266,26	746.735	1,34	51,32



1607	Banyuasin	11.832,99	896.192	0,89	73,08
1608	Oku Timur	3.370,00	700.327	0,79	205,21
1609	Oku Selatan	5.493,94	408.280	0,33	93,44
1610	Ogan Ilir	2.666,09	449.215	0,72	195,07
1611	Empat Lawang	2.256,44	337.578	0,24	151,10
1612	Penukal Abab Lematang Ilir	1.840,00	216.100	0,61	117,28
1613	Musi Rawas Utara	6.008,55	205.366	0,82	34,59
1671	Palembang	369,22	1.814.716	0,74	5.148,04
1672	Pagar Alam	633,66	153.984	0,47	246,02
1673	Lubuk Linggau	401,50	249.573	0,82	678,69
1674	Prabumulih	251,94	214.821	0,61	480,25
	Jumlah	91.592,43	9.135.317	0,78	105,28

SUMBER DATA : HASIL KONSOLIDASI DARI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Rincian Penyusunan Organisasi Oriental dan Fungsi Perangkat Daerah

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 55 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2019
2	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 8 Tahun 2026 Perubahan ketiga Pergub Nomor 11 Tahun 2013
3	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 2 Tahun 2020
4	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 11 Tahun 2023



5	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 76 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Pergub Nomor 5 Tahun 2026
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 66 Tahun 2016
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 46 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 13 Tahun 2020
8	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 44 Tahun 2016
9	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 43 Tahun 2016
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 40 Tahun 2016
11	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 72 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2021
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 82 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 7 Tahun 2017
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 63 Tahun 2016
14	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 59 Tahun 2016
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 81 Tahun 2016
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 69 Tahun 2016
17	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 53 Tahun 2016
18	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 41 Tahun 2016
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 79 Tahun 2016



20	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 70 Tahun 2016
21	Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 64 Tahun 2016
22	Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 61 Tahun 2016
23	Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 51 Tahun 2016
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 6 Tahun 2024 Perubahan atas Pergub Nomor 11 Tahun 2023
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 49 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah Nomor 5 Tahun 2017
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 75 Tahun 2016
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 67 Tahun 2016
28	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 80 Tahun 2016
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 25 Tahun 2018
30	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 45 Tahun 2016
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 39 Tahun 2016
32	BRIDA Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 26 Tahun 2025 Perubahan kedua Pergub Nomor 11 Tahun 2023
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 68 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 26 Tahun 2018
34	Badan Pendapatan Daerah Provinsi	Pergub Nomor 74 Tahun 2016



	Sumatera Selatan	
35	Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 86 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 46 Tahun 2020
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 2 Tahun 2021
37	Badan Penganggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 37 Tahun 2010
38	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 47 Tahun 2016

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

• **Rekapitulasi Jumlah PNS Berdsarkan Unit Kerja dan Jenis Jabatan**

Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Unit Kerja/Jenis Jabatan & Eselon Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan: 31 Desember 2025)

NO	UNIT KERJA	JML	Pimpinan Tinggi/Eselon I-II								Administrator/ Eselon III				Pengawas/Eselon IV				Pelaksana		Fungsional	
			I.a		I.b		II.a		II.b		III.a		III.b		IV.a		IV.b		JFU		JFT	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	SEKRETARIAT DAERAH	8	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	6	0	0	4	1	0	0
3	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	54	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	7	2	0	0	19	23	0	0
4	BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	22	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	7	0	0	4	8	0	0
5	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	31	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	4	0	0	10	10	0	0
6	BIRO ORGANISASI	22	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	6	0	0	4	5	0	0
7	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI	30	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	7	2	0	0	11	6	0	0



NO	UNIT KERJA	JML	Pimpinan Tinggi/Eselon I-II								Administrator/ Eselon III				Pengawas/Eselon IV				Pelaksana		Fungsional	
			I.a		I.b		II.a		II.b		III.a		III.b		IV.a		IV.b		JFU		JFT	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	DAERAH																					
8	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	65	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	2	6	0	0	4	4	27	18
9	BIRO PEREKONOMIAN	25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3	6	0	0	2	10	0	0
10	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	6	0	0	42	18	1	0
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	67	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0	7	6	0	0	17	22	3	6
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	8	2	0	0	8	8	0	0
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	423	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	28	0	75	30	0	0	132	152	0	0
14	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	49	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5	2	0	0	6	10	6	15
15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	83	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0	0	10	5	0	0	26	36	0	0
16	BADAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	72	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	4	8	0	0	18	14	11	11
17	BADAN PENGHUBUNG	37	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	17	16	0	0
18	BADAN PERENCANA AN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	98	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	10	5	0	0	16	26	16	19
19	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	91	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	8	0	21	13	0	0	23	16	3	2
20	DINAS KEARSIPAN	42	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	11	0	0	1	1	9	13
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	84	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	12	7	0	0	25	31	1	2
22	DINAS KEHUTANAN	262	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	10	1	38	11	0	0	98	39	38	23
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	88	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	2	0	11	11	1	0	30	10	6	11
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA	28	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	4	7	0	0	7	5	0	0



NO	UNIT KERJA	JML	Pimpinan Tinggi/Eselon I-II								Administrator/ Eselon III				Pengawas/Eselon IV				Pelaksana		Fungsional	
			I.a		I.b		II.a		II.b		III.a		III.b		IV.a		IV.b		JFU		JFT	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	N SIPIL																					
25	DINAS KESEHATAN	476	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0	1	10	11	0	0	38	67	49	29 3
26	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	116	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	3	0	11	14	0	0	16	26	12	26
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	46	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	9	6	0	0	11	12	2	1
28	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	45	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0	0	6	9	0	0	14	8	0	1
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	62	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	10	11	0	0	9	13	4	7
30	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG	216	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	2	2	23	11	0	0	85	61	12	9
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	24	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	3	7	0	0	6	3	0	0
32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	38	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	0	7	9	0	0	8	8	0	0
33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	62	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	7	4	0	0	24	15	3	3
34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	63	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7	11	19	23
35	DINAS PENDIDIKAN	7,346	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	0	13	6	0	0	252	307	2236	4525
36	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	83	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	16	2	0	0	28	31	0	0
37	DINAS PERDAGANGAN	39	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	6	5	0	0	12	6	0	6
38	DINAS PERHUBUNGAN	130	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	1	0	15	7	0	0	68	29	0	2
39	DINAS PERINDUSTRIAN	31	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	5	9	0	0	4	7	0	0
40	DINAS PERKEBUNAHAN	51	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	8	10	0	0	8	11	2	5



NO	UNIT KERJA	JML	Pimpinan Tinggi/Eselon I-II								Administrator/ Eselon III				Pengawas/Eselon IV				Pelaksana		Fungsional	
			I.a		I.b		II.a		II.b		III.a		III.b		IV.a		IV.b		JFU		JFT	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
41	DINAS PERPUSTAKAAN	53	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	0	5	7	0	0	5	9	9	12
42	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	223	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	2	8	15	0	0	73	47	28	44
43	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	105	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0	0	13	5	0	0	46	33	1	0
44	DINAS SOSIAL	73	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	3	18	5	0	0	14	20	2	3
45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	132	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	0	11	10	0	0	35	18	37	12
46	INSPEKTORAT	128	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	0	0	3	0	0	0	14	3	36	65
47	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	52	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	9	0	0	0	5	25	2	5
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	140	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	11	0	0	0	20	4	94	6
49	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	90	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	6	6	0	0	48	25	1	0
50	RSUD SITI FATIMAH	350	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	5	10	18	0	0	12	18	62	214
51	UPTD RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR	285	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	5	7	0	0	13	15	49	188
JUMLAH		12,261	0	0	1	0	32	5	6	2	151	65	79	18	488	359	1	0	1400	1303	2781	5570

• **Rekapitulasi Jumlah PPPK Berdsarkan Unit Kerja dan Jenis Jabatan**

Tabel Jumlah PPPK Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan: 31 Desember 2025)

NO	UNIT KERJA	JML	GOLONGAN																
			XV II	XV I	X V	XI V	XI II	X I I	XI	X	IX	VII I	VI I	VI	V	IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
2	BIRO HUBUNGAN	37	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	4	0	18	0	0	0	0

BAB I Pendahuluan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

	MASYARAKAT DAN PROTOKOL																	
3	BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	5	0	0	0
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	26	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	3	0	2	0	0	0
5	BIRO ORGANISASI	23	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	11	0	0	0
6	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	26	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	0	9	0	0	0
7	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	28	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	7	0	8	0	0	0
8	BIRO PEREKONOMIAN	32	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	24	0	0	0
9	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	89	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	6	0	52	0	0	0
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	13	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	2	0	0	0
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	0	4	0	0	0
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	188	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	98	0	39	0	0	0
13	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	67	0	0	0	0	0	0	0	2	38	0	1	0	20	0	0	6
14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	72	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	10	0	3	0	0	2
15	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	46	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	18	0	0	0
16	BADAN PENGHUBUNG	34	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	0	11	0	0	6
17	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	91	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	1	0	18	0	0	0
18	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	5
19	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	74	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	6	0	17	0	0	0
20	DINAS KEARSIPAN	41	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	3	0	12	0	0	0
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	242	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	22	0	98	0	5	14
22	DINAS KEHUTANAN	261	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	7	0	116	0	0	0
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	93	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	10	0	14	0	0	0
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	30	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	2	0	11	0	0	0
25	DINAS KESEHATAN	187	0	0	0	0	0	0	0	12	85	0	68	0	22	0	0	0
26	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	104	0	0	0	0	0	0	0	1	75	0	9	0	16	0	1	2
27	DINAS KOMUNIKASI	58	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	15	0	14	0	0	0

BAB I Pendahuluan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

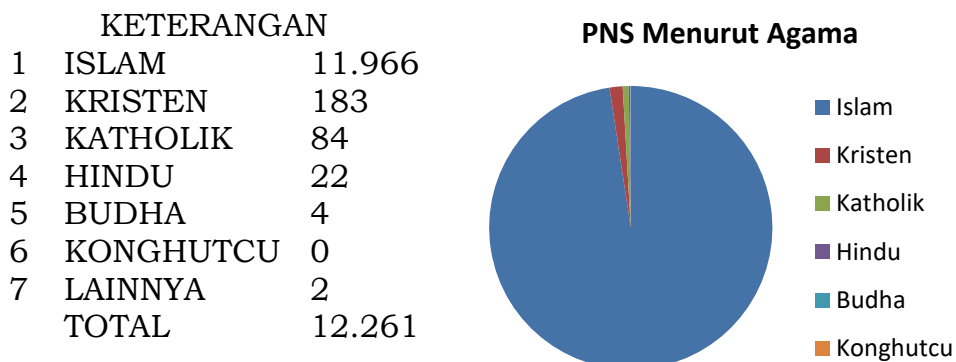
	DAN INFORMATIKA																		
28	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	43	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	2	0	16	0	1	0	0
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	59	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	3	0	15	0	0	0	3
30	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG	78	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	27	0	11	0	0	0	2
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7	0	7	0	2	0	0
32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	4	0	0	0	2	0	0
33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	108	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	10	0	43	0	0	0	2
34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	58	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	1	0	6	0	0	0	0
35	DINAS PENDIDIKAN	8,403	0	0	0	0	0	0	0	1	7,791	0	13	0	574	0	0	0	24
36	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	68	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	11	0	21	0	0	0	0
37	DINAS PERDAGANGAN	110	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	10	0	54	0	0	0	0
38	DINAS PERHUBUNGAN	92	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	12	0	26	0	0	0	0
39	DINAS PERINDUSTRIAN	27	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	3	0	2	0	0	0	0
40	DINAS PERKEBUNAN	68	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	6	0	25	0	0	0	1
41	DINAS PERPUSTAKAAN	88	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	11	0	19	0	0	0	2
42	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	146	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	13	0	48	0	1	0	3
43	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	126	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	13	0	27	0	0	0	1
44	DINAS SOSIAL	90	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	10	0	22	0	0	0	0
45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	98	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	4	0	29	0	0	0	0
46	INSPEKTORAT	19	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	0	7	0	0	0	0
47	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	61	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	8	0	17	0	0	0	0
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	63	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	11	0	17	0	0	0	0
49	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	72	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	14	0	24	0	0	0	0
50	UPTD RSUD SITI FATIMAH	490	0	0	0	0	0	0	0	108	87	0	284	0	11	0	0	0	0



5	UPTD RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR	111	0	0	0	0	0	0	0	8	30	0	48	0	25	0	0	0	0
1		12,4	0	0	0	0	0	0	0	13	9,78	0	81	0	1,61	0	12	0	73
	Jumlah	28								2	2		6		3				

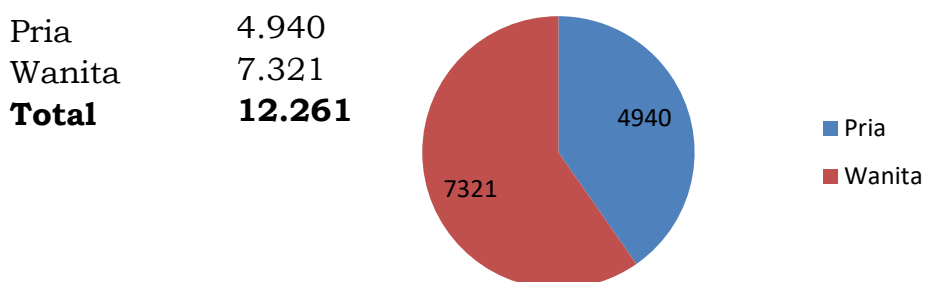
• **Stastistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Agama**

Grafik Jumlah PNS Menurut Agama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan: 31 Desember 2025)



• **Stastistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin**

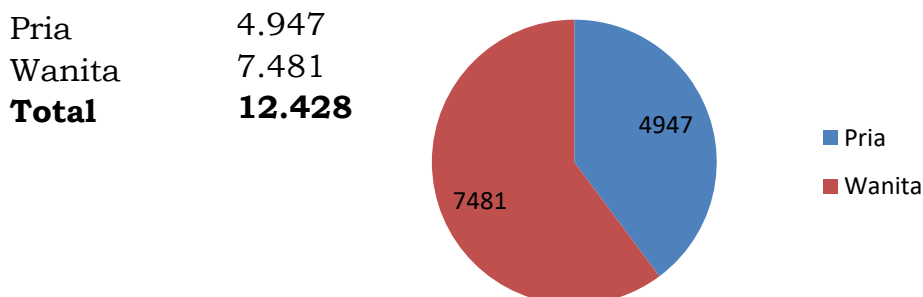
Grafik Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan: 31 Desember 2025)





- **Statistik PPPK Menurut Jenis Kelamin**

Grafik Jumlah PPPK Menurut Jenis Kelamin Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan: 31 Desember 2025)



- **Statistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang**

Grafik Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan: 31 Desember 2025)

JURU MUDA	I/a	0
JURU MUDA TK.I	I/b	0
JURU	I/c	1
JURU TK.I	I/d	18
JUMLAH GOLONGAN I		19
PENGATUR MUDA	II/a	27
PENGATUR MUDA TK.I	II/b	22
PENGATUR	II/c	138
PENGATUR TK.I	II/d	351
JUMLAH GOLONGAN II		538
PENATA MUDA	III/a	581
PENATA MUDA TK.I	III/b	1292
PENATA	III/c	1424
PENATA TK.I	III/d	3767
JUMLAH GOLONGAN III		7.064
PEMBINA	IV/a	2340
PEMBINA TK.I	IV/b	1434
PEMBINA UTAMA MUDA	IV/c	826
PEMBINA UTAMA MADYA	IV/d	32
PEMBINA UTAMA	IV/e	8
JUMLAH GOLONGAN IV		4.640
TOTAL		12.261



- **Statistik Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon/Struktural**

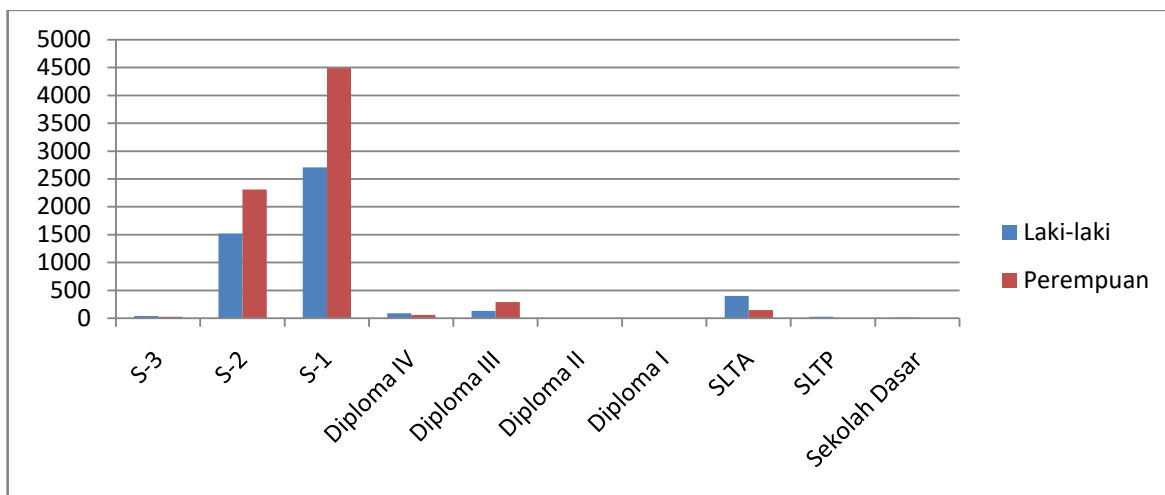
Grafik Jumlah PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan: 31 Desember 2025)

ESELON I.A	0	ESELON III.A	216
ESELON I.B	1	ESELON III.B	97
JUMLAH	1	JUMLAH	313
ESELON II.A	37	ESELON IV.A	847
ESELON II.B	8	ESELON IV.B	1
JUMLAH	45	JUMLAH	848
JUMLAH TOTAL			1.207

- **Statistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Umum**

Grafik Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Umum Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan: 31 Desember 2025)

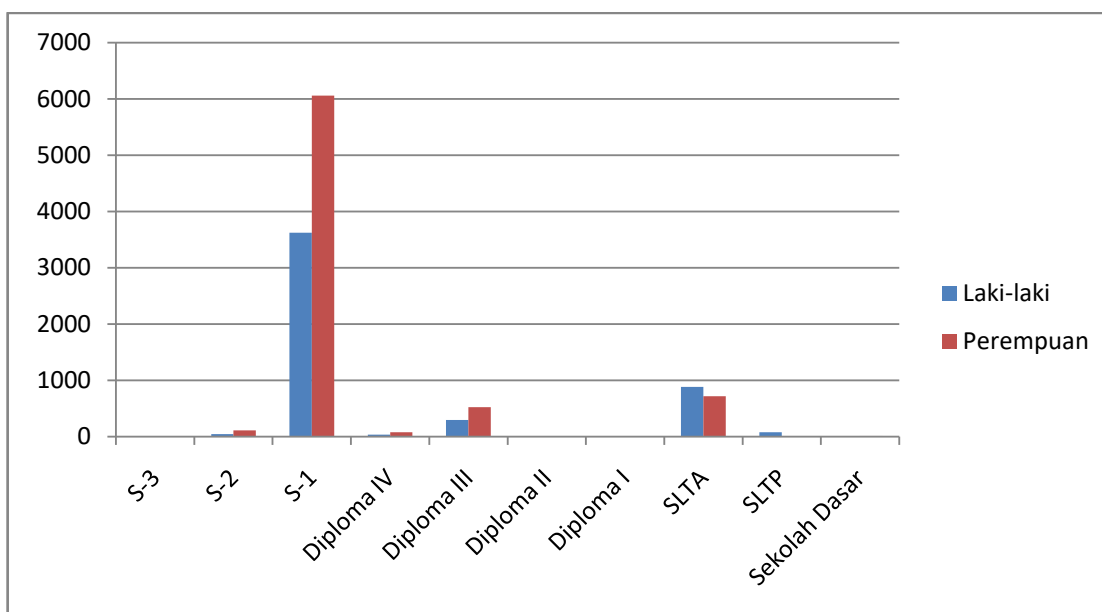
SD	17	DIPLOMA II	6
SLTP	39	DIPLOMA III	555
SLTP KEJURUAN	1	DIPLOMA IV	143
SLTA	558	S-1/SARJANA	7.658
SLTA KEJURUAN	49	S-2/PASCA SARJANA	3.640
SLTA KEGURUAN	1	S-3/DOKTOR	59
DIPLOMA I	3	JUMLAH	12.729
SD	15	DIPLOMA II	6
SLTP	33	DIPLOMA III	422
SLTP KEJURUAN	0	DIPLOMA IV	146
SLTA	546	S-1/SARJANA	7197
SLTA KEJURUAN	0	S-2/PASCASARJANA	3827
SLTA KEGURUAN	0	S-3/DOKTOR	67
DIPLOMA I	2	JUMLAH	12.261



• Statistik PPPK Menurut Tingkat Pendidikan Umum

Grafik Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan Umum Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan: 31 Desember 2025).

SD	10	DIPLOMA II	0
SLTP	77	DIPLOMA III	812
SLTP KEJURUAN	0	DIPLOMA IV	107
SLTA	1596	S-1/SARJANA	9679
SLTA KEJURUAN	0	S-2/PASCASARJANA	147
SLTA KEGURUAN	0	S-3/DOKTOR	0
DIPLOMA I	0	JUMLAH	12.428



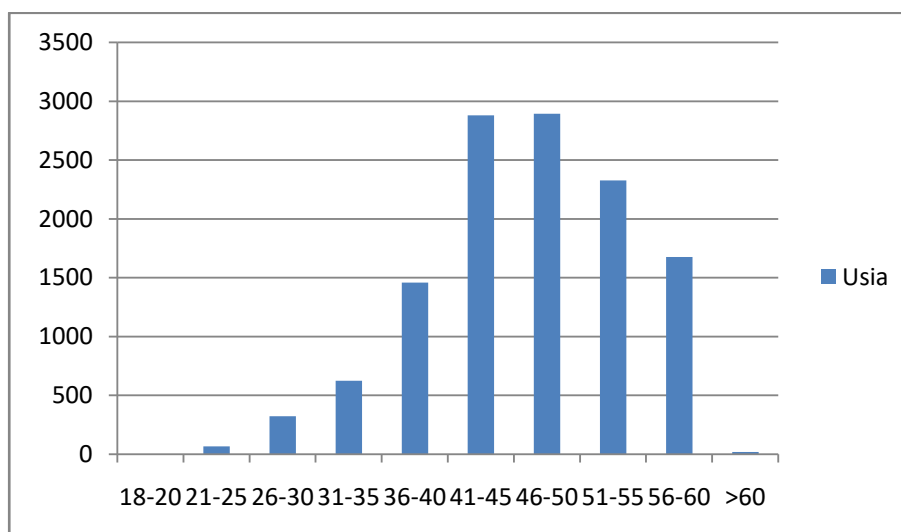


- **Statistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Kelompok Umur**

Grafik Jumlah PNS Menurut Kelompok Umur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan: 31 Desember 2025)

18 - 20 Tahun	0	41 - 45 Tahun	2880
21 - 25 Tahun	66	46 - 50 Tahun	2892
26 - 30 Tahun	323	51 - 55 Tahun	2325
31 - 35 Tahun	623	56 - 60 Tahun	1676
36 - 40 Tahun	1457	>60 Tahun	19
JUMLAH TOTAL			12.261

Jumlah Pegawai Menurut Usia



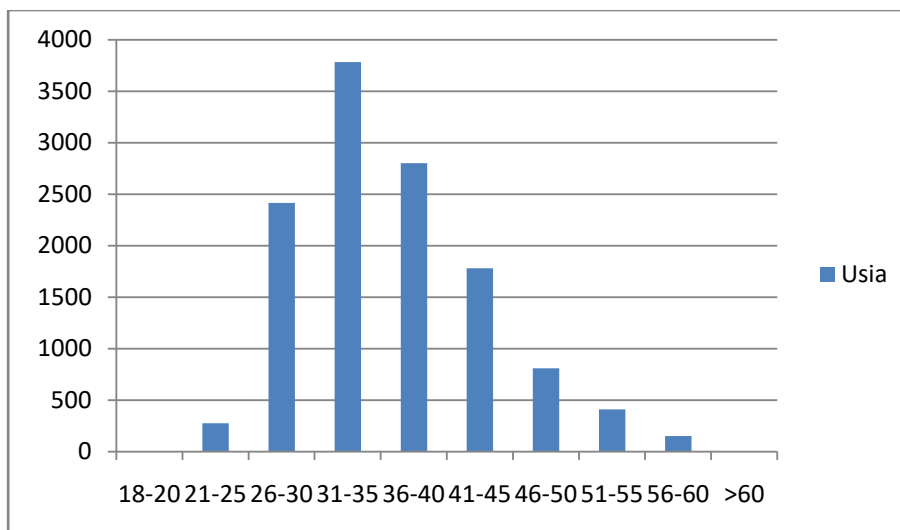
- **Statistik PPPK Menurut Kelompok Umur**

Grafik Jumlah PPPK Menurut Kelompok Umur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan: 31 Desember 2025).

18 - 20 Tahun	0	41 - 45 Tahun	1780
21 - 25 Tahun	275	46 - 50 Tahun	809
26 - 30 Tahun	2415	51 - 55 Tahun	409
31 - 35 Tahun	3783	56 - 60 Tahun	151



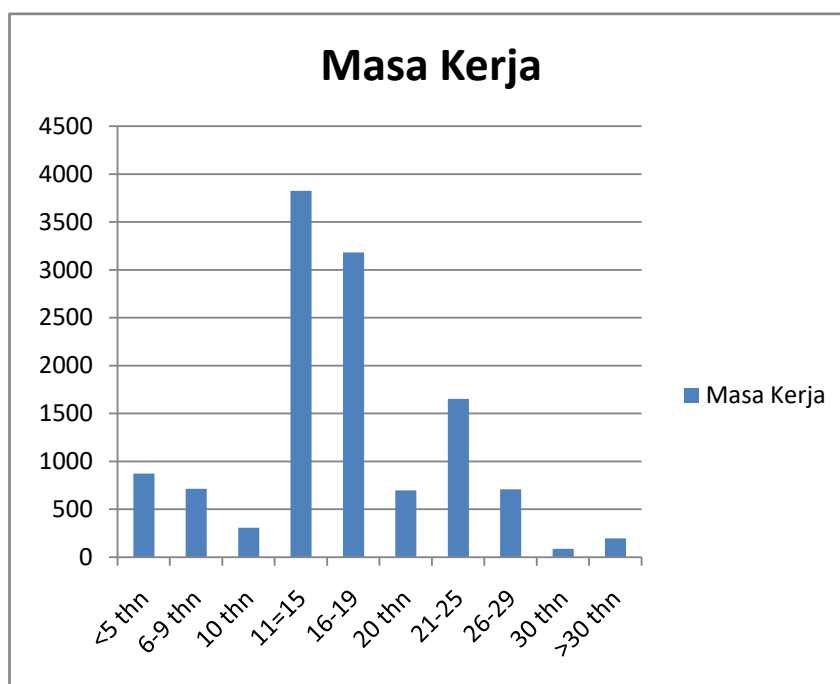
36 - 40 Tahun	2800	>60 Tahun	6
JUMLAH TOTAL			12.428



• **Statistik Pegawai Negeri Sipil Menurut Masa Kerja**

Grafik Jumlah PNS Menurut Masa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan:31 Desember 2025)

< 5 thn	875
6-9 thn	716
10 thn	310
11-15 thn	3826
16-19 thn	3182
20 thn	700
21-25 thn	1653
26-29 thn	711
30 thn	90
>30 thn	198





• **DATA UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMROV SUMSEL**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dirinci Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan 31 Desember 2025).

**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIRINCI MENURUT ESELON JENIS KELAMIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEADAAN : 31 DESEMBER 2025**

NO	ESELON	JABATAN YANG TERISI / JENIS KELAMIN		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	V.a	0	0	0
2	V.b	0	0	0
3	IV.a	488	359	847
4	IV.b	1	0	1
5	III.a	151	65	216
6	III.b	79	18	97
7	II.a	32	5	37
8	II.b	6	2	8
9	I.a	0	0	0
10	I.b	1	0	1
JUMLAH		758	449	1.207



- **Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dirinci Menurut Golongan Ruang / Status Pegawai dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemeintah di Provinsi Sumatera Selatan (Keadaan 31 Desember 2025) :**

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIRINCI MENURUT
GOLONGAN RUANG/STATUS PEGAWAI DAN JENIS KELAMIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEADAAN DATA : 31 DESEMBER 2025

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	STATUS PEGAWAI/ JENIS KELAMIN					
		CPNS			PNS		
		PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5	7	8	9
I/a	0	0	0	0	0	0	0
I/b	0	0	0	0	0	0	0
I/c	1	0	0	0	1	0	1
I/d	18	0	0	0	18	0	18
JUMLAH GOLONGAN I	19	0	0	0	19	0	19
II/a	27	2	2	4	21	2	23
II/b	22	0	0	0	22	0	22
II/c	138	3	1	4	77	57	134
II/d	351	0	0	0	190	161	351
JUMLAH GOLONGAN II	538	5	3	8	310	220	530
III/a	581	33	55	88	253	240	493
III/b	1,292	7	10	17	565	710	1,275
III/c	1,424	0	0	0	612	812	1,424
III/d	3,767	0	0	0	1,394	2,373	3,767
JUMLAH GOLONGAN III	7,064	40	65	105	2,824	4,135	6,959
IV/a	2,340	0	0	0	782	1,558	2,340
IV/b	1,434	0	0	0	550	884	1,434
IV/c	826	0	0	0	382	444	826
IV/d	32	0	0	0	24	8	32
IV/e	8	0	0	0	4	4	8
JUMLAH GOLONGAN IV	4,640	0	0	0	1,742	2,898	4,640
JUMLAH	12,261	45	68	113	4,895	7,253	12,148



- **Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dirinci Menurut Pendidikan Umum dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan. (Keadaan 31 Desember 2025)**

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIRINCI MENURUT
PENDIDIKAN UMUM DAN JENIS KELAMIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	5
1	Sekolah Dasar	15	14	1
2	SLTP	33	30	3
3	SLTA	546	400	146
4	Diploma I	2	0	2
5	Diploma II	6	4	2
6	Diploma III/Sarjana Muda	422	134	288
7	Diploma IV	146	89	57
8	S-1/Sarjana	7,197	2,707	4,490
9	S-2	3,827	1,520	2,307
10	S-3/Doktor	67	42	25
JUMLAH		12,261	4,940	7,321

JUMLAH PPPK DIRINCI MENURUT PENDIDIKAN UMUM DAN JENIS KELAMIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEADAAN DATA : 31 DESEMBER 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	6
1	S-3/Doktor	0	0	0
2	S-2	147	41	106
3	S-1/Sarjana	9,679	3,622	6,057
4	Diploma IV	107	34	73
5	Diploma III/Sarjana Muda	812	293	519
6	Diploma II	0	0	0
7	Diploma I	0	0	0
8	SLTA	1,596	883	713
9	SLTP	77	74	3
10	Sekolah Dasar	10		10
JUMLAH		12,428	4,947	7,481

**g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan penerimaannya sebesar Rp. 11.129.125.002.891,00 dan sampai akhir tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 10.064.162.585.499,30 atau 90,43%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai target yang telah ditetapkan atau 94,35%. Sebagian besar komponen PAD mencapai target yang telah ditetapkan seperti pajak daerah yang menjadi tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tercapai sebesar 102,48%, penerimaan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 107,43%, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 61,37%, dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 63,44%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PATDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN S.D 31 DESEMBER 2025**

URAIAN		TARGET APBD	REALISASI	(%)
PENDAPATAN DAERAH		11.129.125.002.891,00	10.064.162.585.499,30	90,43
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.838.287.154.591,00	4.564.918.691.338,32	94,35
A	Pendapatan Pajak Daerah	3.833.367.486.607,00	3.928.697.653.142,13	102,49
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	771.441.317.847,00	782.917.796.664,00	101,49
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	797.803.083.370,00	671.258.239.000,00	84,14
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.473.535.793.624,00	1.719.421.356.419,29	116,69
	Pajak Air Permukaan (PAP)	26.540.973.333,00	45.797.244.612,29	172,55
	Pajak Rokok	730.171.774.938,00	692.337.957.922,00	94,82
	Pajak Alat Berat (PAB)	6.000.000.000,00	-	-
	Opsen MBLB	27.874.543.495,00	16.965.058.524,55	60,86
B	Pendapatan Retribusi	5.110.991.800,00	5.490.993.411,00	107,43
C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	173.213.785.434,00	106.316.886.488,21	61,38
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	826.594.890.750,00	524.413.158.296,98	63,44
PENDAPATAN TRANSFER PUSAT		6.286.774.924.300,00	5.495.180.970.161,00	87,41
I.	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	6.286.774.924.300,00	5.495.180.970.161,00	87,41
	A. Dana Perimbangan	6.286.774.924.300,00	5.495.180.970.161,00	87,41
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00
A.	Pendapatan Hibah :	4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00
	- Jasa Raharja	4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00
TOTAL PENDAPATAN		11.129.125.002.891,00	10.064.162.585.499,30	90,43

Data Belum Audit BPK



Penerimaan pendapatan daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 901.125.639.435,58 atau 8,22% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2024, seperti tabel berikut :

Tabel
Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumsel Tahun 2024 Dan 2025

No	Uraian	Realisasi		Tambah/Kurang	(%)
		2024	2025		
1	Pendapatan Asli Daerah	5.312.548.123.255,90	4.564.918.691.338,32	(747.629.431.917,58)	(14,07)
2	Pendapatan Transfer	5.648.721.133.679,00	5.495.180.970.161,00	(153.540.163.518,00)	(2,72)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.018.968.000,00	4.062.924.000,00	43.956.000,00	1,09
Jumlah Pendapatan Daerah		10.965.288.224.934,90	10.064.162.585.499,30	(901.125.639.435,58)	(8,22)

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov. Sumsel tahun 2025 terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan sebesar Rp.4.838.287.154.591,00 sampai akhir tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.564.918.691.338,32 atau 94,35% Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp.5.312.545.304.230,45 mengalami penurunan sebesar Rp. 747.629.431.917,58 atau 14,07%.

Penerimaan PAD dibandingkan tahun 2025 mengalami penurunan Nilai pertumbuhan pendapatan bernilai negatif dikarenakan pada tahun ini diberlakukannya opsen pajak yang menyebabkan penyesuaian tarif persentase

dalam perhitungan pembagian ke daerah yang menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah untuk Provinsi Sumsel

2. Pendapatan Transfer

Bagian Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus. Pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 6.286.774.924.300,00 terealisasi sebesar Rp. 5.495.180.970.161,00 atau 87,41%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp. 5.648.721.133.679,00 realisasi penerimaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 153.540.163.518,00 atau 2,72%.hal ini disebabkan penundaan penyaluran realisasi anggaran dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah..

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun anggaran 2025, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.4.062.924.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.062.924.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp. 4.018.968.000,00 namun di tahun 2025 realisasi penerimaan hibah mengalami peningkatan sebesar Rp. 43.956.000,00 atau 1,09 %, dikarenakan peningkatan penerimaan dana hibah Jasa Raharja. dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.



Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja dan Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3) x 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	11.129.125.002.891,00	10.064.162.585.499,30	90,43	10.965.288.224.934,90
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.838.287.154.591,00	4.564.918.691.338,32	94,34	5.312.548.123.255,90
4.1.01	Pajak Daerah	3.833.367.486.607,00	3.928.697.626.142,13	102,48	4.744.701.180.376,87
4.1.02	Retribusi Daerah	5.110.991.800,00	5.490.993.411,00	107,43	8.225.836.940,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	173.213.785.434,00	106.316.886.488,21	61,37	138.824.929.544,35
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	826.594.890.750,00	524.413.185.296,98	63,44	420.796.176.394,68
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.838.287.154.591,00	4.564.918.691.338,32	94,34	5.312.548.123.255,90
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	6.286.774.924.300,00	5.495.180.970.161,00	87,40	5.648.721.133.679,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	5.642.095.592.679,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	2.645.802.349.840,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	1.806.673.215.634,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	236.102.516.086,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	953.517.511.119,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.329.910.647.300,00	2.480.132.510.400,00	74,48	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.765.321.372.000,00	1.830.641.652.620,00	103,70	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.185.053.612.000,00	1.177.917.514.141,00	99,39	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	6.280.285.631.300,00	5.488.691.677.161,00	91,26	5.642.095.592.679,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.489.293.000,00	6.489.293.000,00	100,00	6.625.541.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	6.489.293.000,00	6.489.293.000,00	100,00	6.625.541.000,00
	TOTAL PENDAPATAN	6.286.774.924.300,00	5.495.180.970.161,00	87,40	5.648.721.133.679,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025 $\frac{5}{(4/3)} \times 100$	REALISASI 2024
1	2	3	4		6
	TRANSFER				
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00	4.018.968.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00	4.018.968.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00	4.018.968.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	11.129.125.002.891,00	10.064.162.585.499,30	90,43	10.965.288.224.934,90
5	BELANJA DAERAH	11.237.619.654.098,00	9.690.237.627.574,89	86,23	10.908.424.497.431,90
5.1	BELANJA OPERASI	5.871.201.714.734,00	5.244.601.274.731,23	89,32	5.308.864.484.748,94
5.1.01	Belanja Pegawai	3.039.234.426.438,00	2.818.913.305.275,00	92,75	2.529.375.704.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.428.156.911.406,00	2.116.245.294.647,23	87,15	2.205.615.578.219,94
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	2.786.684.555,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	402.510.376.890,00	309.442.674.809,00	76,87	561.105.467.074,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	9.981.050.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.871.201.714.734,00	5.244.601.274.731,23	89,32	5.308.864.484.748,94
5.2	BELANJA MODAL	1.563.653.825.172,00	1.327.146.154.482,36	84,87	1.303.072.011.451,71
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.819.000.000,00	1.336.164.000,00	34,98	701.091.453,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.274.664.866,00	298.998.222.053,00	84,87	272.576.659.179,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	279.346.525.609,00	252.573.109.777,36	90,41	260.181.034.813,71
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	848.422.192.332,00	703.198.894.988,00	82,88	699.678.969.706,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	73.731.188.000,00	66.409.406.979,00	90,06	96.149.063.496,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.060.254.365,00	4.630.356.685,00	76,40	3.785.192.804,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.563.653.825.172,00	1.327.146.154.482,36	84,87	1.303.072.011.451,71
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.144.517.180,00	33.448.110,00	0,11	82.301.295,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	29.144.517.180,00	33.448.110,00	0,11	82.301.295,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	29.144.517.180,00	33.448.110,00	0,11	82.301.295,00
5.4	BELANJA TRANSFER	3.773.619.597.012,00	3.118.456.750.251,30	82,63	4.296.405.699.936,25
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.048.080.940.377,00	1.906.130.908.101,00	93,06	2.399.428.901.098,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan	1.667.538.656.635,00	1.155.245.842.150,30	69,27	1.896.976.798.838,25



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = \frac{(4/3) \times 100}{100}$	6
	Kuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	58.000.000.000,00	57.080.000.000,00	98,41	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	3.773.619.597.012,00	3.118.456.750.251,30	82,63	4.296.405.699.936,25
	JUMLAH BELANJA	11.237.619.654.098,00	9.690.237.627.574,89	86,23	10.908.424.497.431,90
	SURPLUS/DEFISIT	(108.494.651.207,00)	373.924.957.924,43	(344,64)	56.863.727.503,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	108.494.651.207,00	108.494.651.207,36	100,00	51.630.923.704,36
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.494.651.207,00	108.494.651.207,36	100,00	154.808.628.910,91
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.494.651.207,00	108.494.651.207,36	100,00	154.808.628.910,91
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.494.651.207,00	108.494.651.207,36	100,00	154.808.628.910,91
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	103.177.705.206,55
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	103.177.705.206,55
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	103.177.705.206,55
	PEMBIAYAAN NETTO	108.494.651.207,00	108.494.651.207,36	100,00	51.630.923.704,36
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	482.419.609.131,79	0,00	108.494.651.207,36

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

Pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA) Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik itu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditahun 2025 ditargetkan penerimaannya sebesar Rp. 11.129.125.002.891,00 terealisasi sebesar Rp.

10.064.162.585.499,30 atau 90,43%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar Rp. 4.838.287.154.591,00 terealisasi sebesar Rp. 4.564.918.691.338,32 atau 94,34%. Penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan Lain-lain PATDA yang sah belum mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi dalam batas yang wajar sesuai dengan realisasi penerimaan pemerintah pusat.

Beberapa kendala yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target Pendapatan Daerah Tahun 2025 antara lain :

- 1) Diberlakukannya Opsen Pajak yang menyebabkan Penyesuaian tarif persentase dalam perhitungan pembagian ke daerah yang menyebabkan berkurangnya pendapatan untuk Prov. Sumatera Selatan.
- 2) Secara umum, pengendalian inflasi di Sumatera Selatan masih memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah.
- 3) Perubahan kebijakan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dengan program Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
- 4) Perkembangan BUMD belum menggembirakan, sehingga kontribusi yang diberikan terhadap PAD belum optimal.
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan Informasi Teknologi.
- 6) Belum Optimalnya Pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- 7) Sarana dan prasarana pemungutan pajak daerah masih belum memadai dan perlu ditingkatkan lagi.
- 8) Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja terkait upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah Prov. Sumsel.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan

Dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

Badan Pendapatan Daerah melakukan berbagai kebijakan strategis sebagai berikut :

a. Pajak Daerah:

- 1) Memberikan program pemutihan pajak dari 17 Agustus s.d. 17 Desember 2025 berupa keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, pembebasan bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor, dan pembebasan sanksi administratif bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya serta pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor tahun 2025.
- 2) Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS, mobile dan internet banking, mesin ATM.
- 3) Optimalisasi pendapatan daerah melalui program *door to door service*, operasi kepatuhan.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda Prov. Sumsel melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap.
- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB baru.
- 6) Terus membangun sinergitas dengan mitra kerja (Tim Pembina Samsat Prov. Sumsel) :
 - Kerjasama dengan Ditlantas dan Jasa Raharja melalui kegiatan razia kendaraan bermotor;
 - Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah;
 - Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan;
 - Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data;
 - Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuato akses data kependudukan.

- 7) Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin.
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB.
- 9) Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- 10) Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya.
- 11) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- 12) Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah.
- 13) Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru.
- 14) Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern.
- 15) Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel.
- 16) Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan.
- 17) Meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD), antara lain :
 - Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

- Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
- Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasif;
- Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
- Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia, mempercepat proses layanan.

b. Retribusi Daerah:

- 1) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi;
- 2) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah;
- 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi

daerah.

- 5) Melakukan Inovasi dengan sistem pembayaran retribusi secara online (Non tunai).

c. Bagian Penerimaan Hasil Laba BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- 1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
- 2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membentuk Tim kerja terpadu yang bertugas melakukan upaya – upaya strategis dan sistematis untuk meningkatkan kinerja perusahaan seluruh BUMD.

d. Bagian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- 1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
- 2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam menggali pendapatan asli daerah.

PENDAPATAN TRANSFER

Mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor penerimaan Pendapatan Transfer, baik komponen penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Adapun upaya- upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
- 2) Meningkatkan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
- 3) Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis terkait syarat salur Dana Bagi Hasil yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya - upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain :



- 1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Pembangunan yang telah dilakukan pada dua dekade lalu tidak sepenuhnya dapat dicapai dan sesuai dengan keinginan semua masyarakat, dan bahkan menjadi permasalahan pembangunan di masa yang akan datang. Permasalahan pembangunan tidak saja bersumber dari internal akan tetapi juga berasal dari eksternal. Sementara itu, isu strategis merupakan tantangan dan peluang bagi daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan ke I I-272 | RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 depan. Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis akan menghasilkan kebijakan yang antisipatif dan solutif bagi keberlangsungan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka panjang sangat penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya pembangunan disusun dengan

baik, dilaksanakan secara efektif, serta dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan. Hal ini akan membantu untuk menyelaraskan tujuan, sekaligus mengelola risiko, dan pada akhirnya dapat membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini yaitu :

Tabel
Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis
1.	Kerentanan dan risiko kondisi geografi	Kemiskinan dan stunting yang masih tinggi
2.	Pengelolaan sumberdaya air belum berkelanjutan	Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal
3.	Tingginya alih fungsi lahan dan gambut	Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal
4.	Pengembangan potensi ekonomi daerah belum optimal	Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal
5.	Kerentanan ketahanan pangan	Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal
6.	Kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih tinggi	Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
7.	Kualitas sumber daya manusia masih rendah	Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
8.	Transformasi ekonomi belum optimal	Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan
9.	Ancaman stabilitas daerah masih tinggi	Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
10.	Reformasi birokrasi yang belum optimal.	



b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Perumusan Visi Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi RPJMN 2025-2029. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah :

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.064.690 jiwa pada tahun 2024. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di Utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di Selatan dan Provinsi Bengkulu di Barat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada



abad ke- 7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah seluas 86.771,918 km² atau 4,6 persen dari total luas Indonesia.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkesinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup pembangunan manusia di berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya kesehatan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik dari sisi jasmani dan rohani, memiliki produktivitas yang tinggi, berpendidikan, dan profesional sehingga memiliki kompetensi yang baik dan mampu berdaya saing.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM.
- 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan.
- 3) Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan.
- 4) Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tujuan 2. Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. Terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan persaingan baik di tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan ekonomi sektor unggulan daerah.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah.
- 2) Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah.
- 3) Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Tujuan 3. Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air.

Keterkaitan antara ketahanan pangan, energi dan kedaulatan air saling mendukung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketahanan pangan diwujudkan melalui tersedianya kebutuhan pangan, dapat diakses dan terjangkau, dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manajemen pengelolaan sumber daya air dilakukan untuk memastikan pasokan air bersih yang cukup.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi, dan Air.
- 2) Meningkatnya Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan).

Tujuan 4. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga memastikan kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup di masa depan, utamanya penurunan emisi gas rumah kaca dan timbunan persampahan.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Tujuan 5. Meningkatnya kualitas konektivitas daerah

Kualitas infrastruktur diperlukan untuk memperkuat hubungan antar wilayah, mempermudah mobilitas barang dan jasa serta meningkatkan aksesibilitas layanan. Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan yang baik memungkinkan distribusi barang jasa menjadi lebih efisien antar daerah, utamanya wilayah desa dan kecamatan. Dalam Era digitalisasi keberadaan layanan internet sangat penting sehingga akses internet di area remote perlu ditingkatkan.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas

Tujuan 6. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat

Peningkatan akses infrastruktur dasar masyarakat di wilayah terpencil sangat penting agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Akses infrastruktur yang baik akan dapat mengurangi beban hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sasaran:

- 1) Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi
- 2) Meningkatkan Akses Hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Tujuan 7. Meningkatnya Pengelolaan Bencana

Pengelolaan bencana untuk meminimalkan dampak dan risiko bencana terhadap masyarakat, sehingga memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sistem pengelolaan bencana yang baik dilakukan dengan mitigasi bencana dan memperhatikan wilayah-wilayah yang rentan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain lain.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan

Tujuan 8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat
Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja dengan kontribusi UMKM yang cukup sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang layak. Kesejahteraan sosial diupayakan dengan memperkuat sistem perlindungan sosial yang baik, utamanya bagi masyarakat yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

Sasaran

- 1) Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha
- 2) Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan (government governance) merupakan struktur dan proses tata kelola yang terdapat dalam instansi pemerintah. Peningkatan tata kelola pemerintahan diperlukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang meliputi peningkatan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan kapabilitas dan integritas aparatur pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Tujuan 10. Terwujudnya Stabilitas Sosial

Stabilitas sosial sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan mencegah terjadi konflik yang dapat mengganggu kehidupan sosial ekonomi. Harmoni antar kelompok dengan meningkatkan toleransi antar kelompok sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di tengah keragaman sosial, budaya dan agama diperlukan untuk menciptakan rasa saling menghargai sehingga dapat mengurangi potensi konflik.

Sasaran

- 1) Memperkuat Ketentraman di Masyarakat
- 2) Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan integratif tentang bagaimana pemerintah daerah

mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang integratif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dan arah kebijakan daerah memiliki peran yang sangat penting. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Selatan tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
1.	Isu 3 : Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal Isu 1 : Kemiskinan dan <i>stunting</i> masih tinggi	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan	1. Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Kuratif, Preventif dan Promotif	1. Melanjutkan Program Berkat Plus (berobat dengan KTP + rumah singgah)
			2. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan	2. Mengembangkan program Sumbang Rawat (layanan kesehatan langsung ke rumah warga miskin)
				3. Meningkatkan kualitas kesehatan perempuan dan anak
				1. Meningkatkan kualitas serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
		kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing	sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. 3. Meningkatkan akses, partisipasi, dan motivasi masyarakat atau peserta didik dalam menempuh pendidikan 4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kurikulum, dan sarana- prasarana pendidikan 5. Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional 6. Meningkatkan kualitas kompetensi pemuda	2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan 3. Meningkatkan Program Sekolah Gratis yang Berkeadilan 4. Penguatan Pendidikan Karakter dan Keterampilan Hidup 1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Fasilitas Pendidikan 3. Mengembangkan Kurikulum Berbasis Lokal sesuai potensi daerah 4. Meningkatkan Tata Kelola dan Sistem Informasi Pendidikan 5. Meningkatkan kerja sama daerah, perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan lainnya dalam riset dan inovasi 1. Meningkatkan Tingkat Kegemaran Membaca 1. Mendorong lembaga-lembaga berorientasi pertanian untuk melahirkan agripreneur untuk kemajuan daerah.
2.	Isu 2 : Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal Isu 6 : Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal Isu 7 : Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah	Misi 2 : Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.	1 Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani 2 Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 Peningkatan Penerimaan dan Pendapatan Daerah dari Sektor ESDM 4 Peningkatan Kemudahan Berinvestasi 5 Meningkatkan Promosi Penanaman Modal 6 Peningkatan Ekspor ke Luar Negeri	1. Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan 2. Meningkatkan Akses Permodalan dan Sarana Pertanian 1. Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 1. Meningkatkan Produksi Minerba 2. Optimalisasi Tata Kelola mineral dan batubara 1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) 2. Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1. Meningkatkan Sistem Informasi Penanaman Modal 2. Meningkatkan Penguatan Strategi Promosi 1. Meningkatkan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Ekspor 2. Diversifikasi dan Peningkatan Kualitas Produk Ekspor 3. Meningkatkan Akses Pasar Ekspor



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
			7 Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah	1. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang
			8 Upaya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	2. Meningkatkan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
				3. Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk
				1. Meningkatkan Penguatan Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan Harga
			9 Peningkatan Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	2. Meningkatkan Penguatan Sistem Distribusi dan Logistik
				3. Meningkatkan Kapasitas dan Ketahanan Pasokan Barang Strategis
			10 Optimalisasi upaya Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan	1. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kebijakan Pengendalian Inflasi
				2. Meningkatkan Kapasitas TPID dalam Analisis dan Perumusan Kebijakan
				1. Meningkatkan Penguatan Peran Perbankan dan Lembaga Keuangan
				2. Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan
3.	Isu 2 : Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal Isu 8 : Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan	Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (<i>nexus</i>) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan	3. Meningkatkan Pengembangan Inovasi dan Digitalisasi Keuangan
				4. Meningkatkan Penguatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
			2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan	1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan
				2. Meningkatkan Efisiensi Distribusi dan Rantai Pasok Pangan
			3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan	1. Meningkatkan Pengendalian Harga Komoditas Pangan
				2. Meningkatkan Upaya pengurangan Disparitas Harga Antar wilayah
			4. Peningkatan Ketersediaan Energi	1. Meningkatkan Kecukupan Konsumsi Pangan
				2. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pangan Bergizi dan Berkualitas
				1. Meningkatkan Upaya Efisiensi Energi
			5. Peningkatan Aksesibilitas Energi	2. Meningkatkan Upaya Peningkatan Konservasi Energi
				3. Pengurangan Ketergantungan terhadap Energi Fosil
				1. Meningkatkan Upaya Peningkatan Cakupan Jaringan Distribusi Energi
				2. Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
				(EBT) di Daerah Terpencil
			6. Peningkatan Keterjangkauan Energi	1. Meningkatkan Upaya Penurunan Harga Energi
				2. Meningkatkan Subsidi dan Insentif energi untuk Kelompok Rentan
			7. Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air	1. Meningkatkan Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis
				2. Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berkelanjutan
				3. Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Konservasi Tanah dan Air
			8. Peningkatan Pendayagunaan Air	1. Meningkatkan Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
				2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Irigasi
				3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi
			9. Peningkatan Kemitraan dalam Hilirisasi	1. Meningkatkan Promosi Terkait Potensi Hilirisasi
				2. Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri
			10. Peningkatan Fasilitas Pendukung Industri Hilir	1. Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Fasilitas Pendukung Hilirisasi
				2. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi
			11. Peningkatan Daya Saing Produk Hilir	1. Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk
				2. Meningkatkan Penguatan Riset dan Inovasi Produk
			12. Peningkatan Akses Pasar Produk Hilir	1. Meningkatkan Penguatan Promosi dan Branding Produk
				2. Meningkatkan Pengembangan Jaringan Distribusi Produk
			13. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan kedaulatan air di Sumatera Selatan	1. Meningkatkan tata kelola aspek konservasi Sumber Daya Air terutama menurunkan luasan lahan kritis dan menurunkan laju deforestasi pada kawasan Hulu (OKU Selatan, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim)
				2. Meningkatkan tata kelola aspek pendayagunaan Sumber Daya Air terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, ketahanan pangan, dan industri di 17 Kabupaten/Kota



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
				3. Meningkatkan tata kelola aspek pengendalian daya rusak air terutama pada pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan banjir dan longsor di 17 Kabupaten /Kota
				4. Meningkatkan tata kelola pemberdayaan masyarakat dan lembaga dalam pengelolaan sumber daya air di 17 Kabupaten/kota
				5. Meningkatkan tata kelola sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di 17 Kabupaten/kota
				1. Meningkatkan kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut pada kawasan Hulu dan pesisir (OKU Selatan, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Ogan Ilir dan Musi Banyuasin).
				2. Meningkatkan kualitas air dan udara melalui penerapan baku mutu pencemaran air dan udara berdasarkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat, penegakkan hukum lingkungan dan pengawasan dalam penerapan baku mutu pencemaran air dan udara di 17 kabupaten/Kota
				3. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip keadilan ekologis, dan keadilan bagi generasi mendatang di 17 kabupaten/Kota
				4. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang kuat dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang sehat di 17 kabupaten/Kota
			1. Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas yang terintegrasi antar kawasan untuk mendukung pergerakan orang dan barang dalam rangka meningkatkan	1. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan kewenangan Provinsi di 16 Kabupaten/Kota kecuali Kota Prabumulih
				2. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur simpul
4.	Isu 4 : Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal Isu 5 :	Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan		



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
	Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal	ramah lingkungan	perekonomian dan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan	transportasi darat (Terminal tipe B di Lubuk linggau, Palembang, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Timur dan OKU Selatan)
				3. Mewujudkan pembangunan pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin
				4. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur integrasi multi moda angkutan umum (Metropolitan Patungraya Agung)
				5. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur keselamatan transportasi darat dan sungai
				6. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
				7. Mendorong beroperasionalnya jalan khusus angkutan batubara
			2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat.	1. Mendorong kerjasama antar daerah dalam rangka penyediaan air minum skala regional (Metropolitan Patungraya Agung)
				2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Akses Air Minum di 17 kabupaten/kota
				3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Akses Pengelolaan Air Limbah di 17 Kabupaten/kota
				4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Persampahan di 17 Kabupaten/kota
				5. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan, serta lingkungan di Kawasan strategis Daerah Provinsi dan kawasan prioritas di 17 Kabupaten/Kota
				6. Memberikan hunian yang layak bagi masyarakat antara lain dengan melanjutkan program bedah rumah guna memberikan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu, mendukung program penyediaan 3 juta rumah di 17 kabupaten/kota



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
			3. Meningkatkan kualitas tata kelola bencana dan ketahanan daerah	7. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pedesaan di 14 Kabupaten/kota
				1. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana di 17 Kabupaten/Kota
				2. Meningkatkan penyediaan Sarana dan Prasarana Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana di 17 Kabupaten/Kota
				3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, serta meningkatkan desa tangguh bencana di 17 Kabupaten/Kota
5.	Isu 1 : Kemiskinan dan Stunting yang masih tinggi	Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan	1. Memperluas Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja	1. Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan, permodalan, dan kemudahan berusaha
				2. Meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja
				3. Meningkatkan kerja sama pemerintah dan pelaku bisnis untuk melahirkan pemula usaha serta peningkatan iklim investasi dengan kemudahan birokrasi
				4. Meningkatkan pengembangan infrastruktur pendukung usaha seperti transportasi, listrik, dan internet
				5. Meningkatkan kemampuan pemasaran dan branding pelaku usaha, khususnya UMKM, agar produk dan layanan mereka lebih kompetitif dan dikenal luas
				6. Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing usaha.
			2. Memperkuat Perlindungan Sosial yang Terintegrasi dan Berkesinambungan	1. Mengembangkan Sistem Informasi Terpadu serta mengoptimalkan DT SEN sebagai basis data penyaluran bantuan
				2. Meningkatkan Kapasitas Institusional melalui pelatihan SDM pelayanan sosial
				3. Meningkatkan dan memperluas akses layanan sosial bagi semua kelompok rentan (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
				4. Memperkuat peran komunitas (masyarakat) dalam perlindungan sosial 5. Mendorong kebijakan untuk peningkatan upah minimum regional yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah
			3. Meningkatkan Intervensi Terpadu untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting	1. Meningkatkan kualitas program pengurangan beban penduduk miskin 2. Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas dan integrasi program untuk pemberdayaan penduduk miskin 3. Mendorong percepatan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar 4. Meningkatkan Koordinasi Multisektoral melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi. 5. Meningkatkan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting 6. Meningkatkan implementasi intervensi gizi spesifik dan sensitif
6.	Isu 9 : Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial	Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	1. Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik 2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital	1. Meningkatkan transformasi digital, pengembangan jaringan, keamanan <i>cyber</i> dan pengembangan sumber daya manusia digital 2. Melakukan percepatan reforma agrarian tingkat daerah 3. Memperluas pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi 4. Mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE) 1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik 2. Meningkatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum 3. Memperluas peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik 4. Mendorong dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
				berpendapat serta memperkuat peran pers dan masyarakat sipil
			3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi	1. Meningkatkan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terutama untuk pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan di 17 Kabupaten/Kota
				2. Meningkatkan transformasi digital melalui pengembangan jaringan, keamanan <i>cyber</i> dan pengembangan sumber daya manusia digital di 17 Kabupaten/Kota
				3. Meningkatkan kualitas pengelolaan satu data melalui pengelolaan data berbasis spasial dan non spasial untuk mendukung pembangunan di 17 Kabupaten/Kota
7.	Isu 9 : Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial	Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal	1. Penguatan Identitas Budaya dan Moderasi Keagamaan	1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait fungsi Rumah Tahfiz sebagai basis pendidikan agama bagi anak-anak
				2. Melakukan pengembangan toleransi kehidupan beragama
				3. Mendorong Pembangunan Sarana dan Prasarana Budaya dan Agama dalam penguatanmoderasi beragam dan pengembangan seni budaya lokal
			2. Revitalisasi Seni dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal	1. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan melalui program penguatan Pancasila, nilai-nilai simbur cahaya, dan kearifan lokal
				2. Melakukan revitalisasi seni budaya melalui aksara ulu sebagai identitas budaya Sumatera Selatan
				3. Mendorong pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Sumsel (ISBI Sumsel)

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut :



Tabel
Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Angka Partisipasi Sekolah 2. Persentase SPM Pendidikan 3. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 4. Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	1. Jumlah pengembangan Kurikulum 2. Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum	DISDIK
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Persentase PTK berkualifikasi S-1 2. Persentase Guru yang memiliki sertifikasi pendidik	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	DISDIK
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Program Pembinaan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Angka Partisipasi Sekolah 2. Persentase SPM Pendidikan 3. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 4. Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	1. Jumlah pengembangan Kurikulum 2. Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum	DISDIK
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Persentase PTK berkualifikasi S-1 2. Persentase Guru yang memiliki sertifikasi pendidik	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	DISDIK
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Program Pembinaan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi 2. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINAS KESEHATAN



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar 2. Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan 3. Angka Kematian Ibu (AKI) 4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN RSUD SITI FATIMAH RSK GIGI DAN MULUT RSK MATA RS ERNALDI BAHAR
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1. Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidp yang Aktif 2. Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	1. Rasio Wirausaha Pemuda	Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISPORA
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPA
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	1. Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/ atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPPPA
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	1. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	DPPPA
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPA
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	1. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	DPPPA
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan Anak	1. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPA



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan 4. Luas Pengembangan Komoditi Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B 2. Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam : Padi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Persentase penanganan bencana pertanian 2. Persentase penanganan DPI terhadap pertanian 3. Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi - Tanaman Pangan - Hortikultura	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi 3. Jumlah Kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya 4. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 5. Jumlah kemitraan usaha tani	Program Penyuluhan Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	1. Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan 2. Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISBUDPAR
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Wisatawan Mancanegara 2. Jumlah Wisatawan Nusantara	Program Pemasaran Pariwisata	DISBUDPAR
Meningkatnya kualitas melalui ekosistem kreatif	1. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DISBUDPAR
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DISBUDPAR
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan: - Jumlah Produksi Daging - Jumlah Produksi Telur	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan (ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	DINAS PERKEBUNAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Persentase realisasi pembangunan prasarana perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	DINAS PERKEBUNAN
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	1. Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DINAS PERKEBUNAN
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	DINAS PERKEBUNAN
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) 2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan 3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERINDUSTRIAN
Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	1. Persentase terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara di Wilayah Provinsi 2. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah 3. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	DINAS ESDM
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	1. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Program Pengelolaan Hutan	DINAS KEHUTANAN
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	1. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	1. Indeks Keanekaragaman Hayati	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DINAS KEHUTANAN
Meningkatnya Kemudahan	1. Realisasi Total Terhadap Target Investasi (%)	Program Pengembangan Iklim	DPMPTSP



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Berinvestasi		Penanaman Modal	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	1. Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	1. Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	1. Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	DINAS PERDAGANGAN
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DINAS PERDAGANGAN
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DINAS PERDAGANGAN
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DINAS PERDAGANGAN
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DISKOP UKM
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	DISKOP UKM
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	DISKOP UKM
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	DISKOP UKM
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DISKOP UKM



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	BIRO PEREKONOMIAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan 4. Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B 2. Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam: Padi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi 3. Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya 4. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 5. Jumlah kemitraan usaha tani	Program Penyuluhan Pertanian	DINAS PERTANIAN TPH
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Udara 2. Indeks Kualitas Air 3. Indeks Kualitas Lahan 4. Indeks Kualitas Air Laut	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHP
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Program Pengelolaan Persampahan	DLHP
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	1. Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHP
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DLHP
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLHP
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	1. Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin lingkungan Dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan	DLHP



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
		Hidup	
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	1. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	1. Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLHP
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	1. Persentase Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	DLHP
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 3. Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DINAS PSDA
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1. Persentase jumlah cadangan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPP
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	1. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	1. Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	DINAS ESDM
Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	1. Jumlah Dokumen dan Laporan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 2. Rasio Elektrifikasi	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	DINAS ESDM
Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	1. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	DISLUTKAN
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISLUTKAN
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	1. Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DISLUTKAN
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	1. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DINAS PERINDUSTRIAN
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	1. Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DINAS PERINDUSTRIAN
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	1. Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHP
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Lahan (IKL) 4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLHP
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati (IPKH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati	DLHP
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Persentase limbah B3 yang terkelola	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLHP
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	1. Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHP



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang lingkungan Hidup	1. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	1. Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkunga Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLHP
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Program Pengelolaan Persampahan	DLHP
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1. Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	DINAS PUBMTR
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	1. Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Program Pengelolaan Perkeretaapian	DISHUB
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	1. Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1. Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota 2. Persentase Akses Air Minum Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DISPERKIM
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	1. Persentase Cakupan infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman	DISPERKIM
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	1. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) 2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DISPERKIM
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	1. Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	DISPERKIM



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi warga negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	DISPERKIM
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	DISPERKIM
Meningkatnya Penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) Permukiman	1. Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DISPERKIM
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	1. Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	DISPERKIM
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	1. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	DISPERKIM
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	1. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DISPERKIM
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	1. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DISPERKIM
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	1. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	1. Persentase Penanganan Pasca Bencana 2. Persentase Penanganan Pra Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DINAS PSDA



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
irigasi	dilayani oleh jaringan irigasi 3. Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)		
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKERTR ANS
Terkelolanya informasi tenaga kerja	1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	DISNAKERTR ANS
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya 2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTR ANS
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak- Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial	DISNAKERTR ANS
Terlindunginya Hak-Hak Pekerja	1. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	DISNAKERTR ANS
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	1. Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTR ANS
Meningkatnya Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi	1. Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTR ANS
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTR ANS
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DISKOP UKM
Meningkatnya daya saing UMKM	1. Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	DISKOP UKM
Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 2. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	DINAS SOSIAL
Meningkatnya Rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
	4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin 2. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 3. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DINAS SOSIAL
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial 2. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	DINAS SOSIAL
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	1. Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINAS SOSIAL
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	1. Indeks Kematangan Organisasi	Program Penataan Organisasi	BIRO ORGANISASI
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	1. Efektivitas Administrasi Pembangunan Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	BIRO ADPEM
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	1. Persentase fasilitasi pembinaan mental spiritual, pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti 2. Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	BIRO KESRA
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	1. Tingkat Kematangan UKPBJ	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	BIRO PBJ
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	1. Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah	BKD
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	1. Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah	BKD



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	1. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah	BKD
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	1. Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Program Kepegawaian Daerah	BKD
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDMD
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	1. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDMD
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDMD
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	1. Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDMD
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan, Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur 3. Persentase Penurunan SILPA 4. Persentase laporan keuangan tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	1. Persentase penambahan nilai aset tetap 2. Asset Management 1) Apakah ada daftar aset tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
	2) Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap 3) Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan 4) Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran		
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	1. Persentase Fasilitas Penataan Desa	Program Penataan Desa	DPMD
Meningkatnya kerjasama desa	1. Persentase fasilitas kerjasama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMD
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase fasilitas tata kelola desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
Meningkatnya Kapasitas Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	1. Persentase fasilitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) 2. Persentase fasilitas pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	1. Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	DINAS KEARSIPAN
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	1. Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DINAS KEARSIPAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1. Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Program Perizinan Penggunaan Arsip	DINAS KEARSIPAN
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan 2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	1. Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah 2. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	1. Persentase fasilitas pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi/Kab/Kota, penyelesaian hukum, dan penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	BIRO HUKUM



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	1. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	KESBANGPOL
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	1. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas penanganan Konflik Sosial	KESBANGPOL
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	1. Pemanfaatan Data Kependudukan 2. Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	1. Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	DLHP
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	1. Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DLHP
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	DLHP



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	1. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	DLHP
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	1. Persentase Tanah Kosong yang dikelola	Program Pengelolaan Tanah Kosong	DLHP
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	1. Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Program Penatagunaan Tanah	DLHP
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	1. Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah 2. Indeks SPBE 3. Indeks Pemdi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DISKOMINFO
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFO
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DISKOMINFO
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan dalam perencanaan pembangunan	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BRIDA
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan	1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BRIDA
pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	1. Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 2. Jumlah Potensi unggulan daerah yang dikembangkan dari inovasi		
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BRIDA



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	1. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BRIDA
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	1. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	BRIDA
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	BRIDA
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	BRIDA
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	1. Persentase Fasilitasi Pembinaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	BRIDA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Provinsi	Program Penyelenggaraan penataan Ruang	Dinas PUMTR
Meningkatnya etika dan budaya politik	1. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	KESBANGPOL
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	1. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	1. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP



Outcome (4)	Indikator (5)	Program Prioritas (6)	Ket (7)
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan 2. Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan 3. Angka Kumulatif Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	Program Pengembangan Kebudayaan	DISBUDPAR
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	1. Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni 2. Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISBUDPAR
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Program Pembinaan Sejarah	DISBUDPAR
Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	1. Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 2. Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan 3. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISBUDPAR
Meningkatnya Tata Kelola Museum	1. Jumlah Kunjungan Museum 2. persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	Program Pengelolaan Permuseuman	DISBUDPAR
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	1. Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	DINAS PERPUSTAKAAN

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyusunan SPM Tahun 2020 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 59 Tahun 2021, selanjutnya pada Pasal 23 ayat (1) bahwa Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan SPM telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2025 tentang pedoman standar pelayanan minimal bahwa salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal, selanjutnya Pemerintah Provinsi dapat menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diperlukan pedoman percepatan, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Tujuan penerapan standar pelayanan minimal ini adalah:

- a. terjaminnya mutu dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. menjadi dasar dalam menentukan alokasi anggaran bagi pelayanan dasar bagi masyarakat;

Laporan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4)



Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan 6) Sosial.

- (1) Jenis SPM Pelayanan Dasar, terdiri atas SPM:
 - a. SPM Pendidikan;
 - b. SPM Kesehatan;
 - c. SPM Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
 - d. SPM Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. SPM Sosial.
- (2) Materi muatan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Hasil
 - b. Kendala, dan
 - c. Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
 - d. Rekapitulasi penerapan SPM daerah Kab/Kota
- (3) Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar.

SPM Pendidikan

- (1) SPM Pendidikan mencakup SPM Pendidikan Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Provinsi terdiri atas:
 - a. pendidikan menengah; dan
 - b. pendidikan khusus.
- (3) Mutu minimal pelayanan dasar memuat jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia
- (4) Penerima pelayanan dasar yaitu :
 - a. Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah
 - b. Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus

- c. Rata-rata kemampuan literasi dan numerisasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional

SPM Kesehatan

- (1) SPM Kesehatan mencakup SPM Kesehatan Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Provinsi terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi; dan
 - b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi.
- (3) Mutu minimal pelayanan dasar memuat jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan
- (4) Penerima pelayanan dasar yaitu :
 - a. Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
 - b. Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan

SPM Pekerjaan Umum

- (1) SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Provinsi terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Mutu minimal pelayanan dasar memuat jumlah barang dan jasa
- (4) Penerima pelayanan dasar yaitu :
 - a. Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota



- b. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota

SPM Perumahan Rakyat

- (1) SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Provinsi terdiri atas :
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Mutu pelayanan dasar memuat jumlah barang dan jasa:
- (4) Penerima pelayanan dasar yaitu :
 - a. Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
 - b. Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- (1) SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mencakup SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.
- (3) Mutu minimal pelayanan dasar memuat jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia.

- (4) Penerima pelayanan dasar yaitu jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi

SPM Sosial

- (1) SPM Sosial mencakup SPM Sosial Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial Provinsi terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi.
- (3) Mutu minimal pelayanan dasar memuat jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia
- (4) Penerima pelayanan dasar yaitu :
 - a. Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - b. jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar anak terlantar di dalam panti;
 - c. jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar lanjut usia di dalam panti;
 - d. jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi social dasar tuna social di dalam panti;
 - e. Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Tabel

Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)*
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,84	74,76	1,25%
2	Persentase penduduk miskin	10,51	9,85	-6,28%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	3,69	-4,40%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,03	5,35	6,36%
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	75,13	80,66	7,36%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,331	0,298	-9,97%

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENDIDIKAN (Dinas Pendidikan Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1a1	Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan menengah}}{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$= \frac{411.493}{467.870} \times 100\%$ $= 87,95\%$	-	Dinas Pendidikan Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1a2	Pendidikan	Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan khusus $\frac{\text{Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan khusus}}{\text{Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$= \frac{3.228}{4.444} \times 100\%$ $= 72,64\%$	-	Dinas Pendidikan Prov. Sumsel	

3) IKK Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1a3	Pendidikan	Jumlah toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik $\frac{\text{Jumlah toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh toilet}} \times 100\%$	$= \frac{3.060}{5.353} \times 100\%$ $= 57,16\%$	-	Dinas Pendidikan Prov. Sumsel	



4) IKK Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1a4	Pendidikan	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas ,Sekolah Menengah Kejuruan , Sekolah Dasar Luar Biasa ,Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa , Sekolah Menengah Atas Luar Biasa ,Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik _____ x 100% Jumlah seluruh ruang kelas	= $\frac{6.723}{12.319} \times 100\%$ = 54,57%	-	Dinas Pendidikan Prov. Sumsel	



INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KESEHATAN
(Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan)

1) IKK Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1b1	Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi}}{\text{Jumlah Penduduk provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{10.718}{9.135.113} \times 100\%$ $= 1.17\%$	-	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi paripurna

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1b2	Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi i Paripurna}}{\text{Jumlah Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi}} \times 100\%$	$= \frac{4}{4} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	

3) IKK Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1b3	Kesehatan	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana ^{dan} atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun $\frac{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana}} \times 100\%$	$= \frac{248.927}{248.927} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	

4) IKK Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1b4	Kesehatan	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$	$= \frac{29.671}{29.671} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	



INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1c1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)}} \times 100\%$	$= \frac{29.079}{67.622} \times 100\%$ $= 43.00$	-	Dinas PSDA Prov. Sumsel	

2) IKK Tingkat kemantapan jalan

(Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1c2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi (Km)}}{\text{(panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang)}} \times 100\%$	$= \frac{1.170,3}{1.779,27} \times 100\%$ $= 65,77\%$	-	Dinas BM dan Tata Ruang Prov. Sumsel	

3) **IKK Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel)**

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1c3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir kewenangan provinsi (Ha) $\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir kewenangan provinsi (Ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir kewenangan provinsi (Ha)}} \times 100\%$	$= \frac{1.684,95}{129.547} \times 100\%$ $= 130\%$	-	Dinas PSDA Prov. Sumsel	

4) **IKK Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel)**

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1c4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota pada tahun N $\left(\frac{L}{s}\right)$ $\frac{\text{Jumlah kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota pada tahun N } \left(\frac{L}{s}\right)}{\text{Jumlah kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di provinsi bersangkutan pada tahun N (non kumulatif) (L/s)}} \times 100\%$	$= \frac{0}{100} \times 100\%$ $= 0\%$	Belum Ada SPAM Regional di Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perkim Prov. Sumsel	

5) **IKK Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional**
(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1c5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional}}{\text{Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional}} \times 100\%$	$= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0$	Belum Ada SPALD Regional di Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perkim Prov. Sumsel	

6) **IKK Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli**
(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1c6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja ahli konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{306}{350} \times 100\%$ $= 87,43\%$	-	Dinas Perkim Prov. Sumsel	

7) **IKK Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi**
(Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1c7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun x 100	$= \frac{0}{1} \times 100$ $= 0\%$	Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun sampai saat ini Pemerintah Provinsi belum pernah menerbitkan KKPR karena fitur penerbitan untuk kewenangan Pemerintah Provinsi belum tersedia pada sistem OSS, sehingga Indikator Kinerja Kunci (IKK) Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan KKPR yang telah diterbitkan di Provinsi belum dapat disajikan karena belum terdapat data penerbitan KKPR oleh Pemerintah Provinsi.	Dinas PU BM dan Tata Ruang Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1d1	Perumahan Rakyat	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N Jumlah rencana warga negara korban bencana provinsi yang akan ditangani pada tahun N x 100%	Tidak dapat dilaksanakan	Pada tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan tidak ada kejadian bencana yang ditetapkan sebagai bencana skala provinsi oleh Kepala Daerah	Dinas Perkim Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1d2	Perumahan Rakyat	Jumlah warga negara terkena relokasi program provinsi yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun N Jumlah rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun N x 100%	$= \frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Perkim Prov. Sumsel	



3) IKK Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani
(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1d3	Perumahan Rakyat	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10–15 Ha yang ditangani tahun N (Ha)}}{\text{Target luas kawasan kumuh 10–15 Ha pada tahun N}} \times 100\%$	$= \frac{37.573}{37.573} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Perkim Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1e1	Trantibumlinmas	$\frac{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah provinsi = 3}} \times 100\%$	$= \frac{3}{3} \times 100\%$ $= 100\%$	-	BPBD Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1e2	Trantibumlinmas	$\frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan}} \times 100\%$	$= \frac{4}{4} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Sat Pol PP Prov. Sumsel	

3) IKK Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
(Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1e3	Trantibumlinmas	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan _____ x 100% Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	$= \frac{12}{12} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Sat Pol PP Prov. Sumsel	

4) IKK Persentase penanganan pra bencana
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1e4	Trantibumlinmas	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana pada tahun N _____ x100% Jumlah target kab/kota di provinsi yang direncanakan penanganan pra bencana dan terdapat pada rencana kerja perangkat daerah pada tahun N	$= \frac{17}{17} \times 100\%$ $= 100\%$	-	BPBD Prov. Sumsel	

5) **IKK Persentase penanganan tanggap darurat bencana**
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1e5	Trantibumlinmas	$\frac{\text{Jumlah kab/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah kab/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\%$	$= \frac{17}{17} \times 100\%$ $= 100\%$	-	BPBD Prov. Sumsel	

6) **IKK Persentase penanganan pasca bencana**
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1e6	Trantibumlinmas	$\frac{\text{Jumlah } \frac{\text{kabupaten}}{\text{kota}} \text{ yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana}}{\text{Jumlah } \frac{\text{kabupaten}}{\text{kota}} \text{ di wilayah provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\%$	$= \frac{17}{17} \times 100\%$ $= 100\%$	-	BPBD Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN SOSIAL
(Dinas Sosial Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
(Dinas Sosial Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1f1	Sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen}} \times 100\%$	$= \frac{25}{25} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Sosial Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
(Dinas Sosial Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1f2	Sosial	$\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen}} \times 100\%$	$= \frac{130}{130} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Sosial Prov. Sumsel	

3) IKK Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

(Dinas Sosial Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1f3	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen}} \times 100\%$	$= \frac{200}{200} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Sosial Prov. Sumsel	

4) IKK Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

(Dinas Sosial Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1f4	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\frac{\text{Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen}} \times 100\%$	$= \frac{180}{180} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Sosial Prov. Sumsel	



5) IKK Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi
(Dinas Sosial Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1f5	Sosial	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\frac{\text{Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{5.091}{5.091} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Sosial Prov. Sumsel	

6) IKK Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar
(Dinas Sosial Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
1f6	Sosial	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar $\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar}}{\text{Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{228}{228} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Sosial Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI TENAGA KERJA
(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2a1	Tenaga Kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah $\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{24}{27} \times 100\%$ $= 88,89\%$	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2a2	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak $\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	$= \frac{3.422}{3.553} \times 100\%$ $= 96,31\%$	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel	

3) IKK Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan
(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2a3	Tenaga Kerja	$\frac{\sum \text{Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun N}}{\sum \text{Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun N}} \times 100\%$	$= \frac{3.422}{5.530} \times 100\%$ $= 61,88\%$	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel	

4) IKK Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2a4	Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi}}{\text{Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{22.390}{23.043} \times 100\%$ $= 97,17\%$	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2b1	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak	$\frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}} \times 100\%$	$= \frac{65}{65} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas PPPA Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2b2	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak	$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang}} \times 100$	$= \frac{30}{30} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas PPPA Prov. Sumsel	



INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN
(Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2c	Pangan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{740,96}{885,73} \times 100\%$ $= 83,66\%$	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN
(Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase ditetapkan hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah
(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2d1	Pertanahan	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah daerah _____ x 100% Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah	$= \frac{27.277.267,31}{110.464.332} \times 100\%$ $= 24,69\%$	-	BPKAD Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2d2	Pertanahan	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada kondisi eksisting _____ x 100% Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	$= \frac{3.834.992,04}{4.917.834} \times 100\%$ $= 77,98\%$	-	Dinas PU BM dan Tata Ruang Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
(Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel)

- 1) **IKK Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2e	Lingkungan Hidup	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan ,izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang –undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung x 100%	$= \frac{18}{25} \times 100\%$ $= 72,00\%$	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel)

1) IKK Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2f1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah data kependudukan yang disusun dan dipublikasikan $\frac{\text{Jumlah data kependudukan yang disusun dan dipublikasikan}}{2 \text{ (dua) Dokumen}} \times 100\%$	$= \frac{2}{2} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel	

2) IKK Pemanfaatan data kependudukan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2f2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{2}{2} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2g1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri tahun N} - \text{Jumlah desa mandiri tahun N-1}}{\text{Jumlah desa mandiri tahun N-1}} \times 100\%$	$= \frac{233}{568} \times 100\%$ $= -58,98\%$	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase fasilitasi kerja sama desa

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2g2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	$\frac{\text{Jumlah kerja sama desa yang di tindaklanjuti}}{\text{Jumlah kerja sama antar desa lintas kabupaten kota di wilayah provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{0}{1} \times 100$ $= 0\%$	Kerjasama antar desa lintas kabupaten tidak ada. Sehingga datanya 0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(Kemendukbangga/BKKBN Prov. Sumsel dan Dinas Kesehatan Prov. Sumsel)

1) IKK Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 tahun

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2h1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	$\frac{\text{Total Fertility Rate/TFR provinsi}}{\text{Target Fertility rate/TFR provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap provinsi yang bersangkutan}}$	$= \frac{2,29}{2,32} \times 100\%$ $= 98,71\%$	-	Kemendukbangga/BKKBN /Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	

2) IKK Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2h2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur usia 15 – 49 tahun}} \times 100\%$	$= \frac{907.261}{1.307.269} \times 100\%$ $= 69,40\%$	-	Kemendukbangga/BKKBN/Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	



3) IKK Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2h3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber – Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) provinsi $\frac{\text{Persentase kebutuhan ber – Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) provinsi}}{\text{Target persentase kebutuhan ber – Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$= \frac{71.227}{1.307.269} \times 100\%$ $= 5,45\%$	-	Kemendukbangga/BKKBN /Dinas Kesehatan Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERHUBUNGAN
(Dinas Perhubungan Prov. Sumsel)

1) IKK Rasio konektivitas provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2i1	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ - IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}$ - IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu	$= (0,36 \times 0,7) + (1 \times 0,3)$ $= (0,25 + 0,3)$ $= 0,55$	-	Dinas Perhubungan Prov. Sumsel	

		Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5				

2) IKK V/C Ratio di Jalan Provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2i2	Perhubungan	V/C ratio di jalan Provinsi <u>Cara menghitung :</u> $IKK = VCR \text{ ruas } 1 + VCR \text{ ruas } 2 + VCR \text{ ruas } 3 + \dots + VCR \text{ ruas } n$ $VCR \text{ ruas } n = VCR \text{ ruas } n \times C \text{ ruas } n$ $C \text{ ruas } n = CO \times FC \text{ w} \times FC \text{ spb} \times FC \text{ sf}$ <u>Ket :</u> $V \text{ ruas } n = \text{Volume lalu lintas jalan pada jam puncak di ruas jalan (n) (smp/jam)}$ $C \text{ ruas } n = \text{kapasitas jalan di ruas jalan (n) (smp/jam)}$ $CO = \text{kapasitas dasar jalan (smp/jam)}$ $FC \text{ w} = \text{factor penyesuaian lebar jalan}$ $FC \text{ spb} = \text{factor penyesuaian pemisah jalan (hanya untuk jalan tak terbagi)}$ $F \text{ csf} = \text{factor penyesuaian hambatan samping bahu jalan/kerb}$	0,357	-	Dinas Perhubungan Prov. Sumsel	

3) IKK Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2i3	Perhubungan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan $\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata}} \times 100\%$	$= \frac{7}{15} \times 100\%$ $= 46,67\%$	-	Dinas Perhubungan Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2j1	Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah}} \times 100\%$	$= \frac{9}{48} \times 100\%$ $= 18,75\%$	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2j2	Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$	$= \frac{6}{8} \times 100\%$ $= 75\%$	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel	



3) IKK Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2j3	Komunikasi dan Informatika	<i>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi</i> <i>Jumlah penduduk</i> x 100%	$= \frac{3.471.300}{6.140.231} \times 100\%$ $= 56,53\%$	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2k1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	$\frac{(\sum \text{Volume usaha koperasi tahun berjalan} - \sum \text{Volume usaha koperasi tahun sebelumnya})}{\sum \text{Volume usaha koperasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$= \frac{69.448.471.794}{59.160.849.817} \times 100\%$ $= 17,39\%$	-	Dinas Koperasi UKM Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2k2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	$\frac{\sum \text{Usaha kecil yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)}}{\sum \text{Usaha kecil keseluruhan}} \times 100\%$	$= \frac{516}{2700} \times 100\%$ $= 19,11\%$	-	Dinas Koperasi UKM Prov. Sumsel	



3) IKK Persentase proporsi ekspor dari usaha kecil

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2k3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang telah melakukan ekspor}}{\text{Jumlah usaha kecil}} \times 100\%$	$= \frac{5}{2700} \times 100\%$ $= 0,19\%$	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL
(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase peningkatan investasi di provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
211	Penanaman Modal	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) \text{ di provinsi}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{62.668.051.138.154}{70.920383.354.095} \times 100\%$ $= -11,64$	Terjadinya perlambatan investasi di tahun 2025 sebesar - 11,63%, disebabkan oleh menurunnya persentase pertumbuhan Realisasi investasi PMA - 54,83% dibandingkan dengan tahun 2024 lalu yang disebabkan siklus proyek beberapa Investor PMA yang telah menyelesaikan fase padat	Dinas PM PTSP Prov. Sumsel	

				modalnya di tahun 2024 lalu sehingga di tahun 2025 berada pada fase produksi yang nilai investasinya tidak terlalu tinggi. Sedangkan realisasi PMDN meningkat sebesar 28,89% di tahun 2025.		

2) IKK Persentase realisasi investasi terhadap target investasi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
212	Penanaman Modal	$\frac{\text{Total realisasi investasi provinsi}}{\text{Target investasi provinsi yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada provinsi yang bersangkutan} \times 100\%}$	$= \frac{62.668.051.138.154}{78.850.000.000.000} \times 100$ $= 79,48\%$	Capaian realisasi investasi hanya tercapai 79.49% dari target yg ditetapkan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya realisasi PMA yang hanya berkontribusi sekitar 24,7% terhadap total	Dinas PM PTSP Prov. Sumsel	



				realisasi investasi di tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh siklus proyek beberapa Investor PMA yang telah menyelesaikan fase padat modalnya di tahun 2024 lalu sehingga di tahun 2025 berada pada fase produksi yang nilai investasinya tidak terlalu tinggi. Sementara PMDN memberikan kontribusi dominan sebesar 75,3 % yang menjadi penyangga nilai realisasi investasi Sumsel di tahun 2025.		

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2m1	Kepemudaan dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16–30) tahun yang berwirausaha di provinsi}}{\text{Jumlah target pemuda usia (16–30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{820}{820} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2m2	Kepemudaan dan Olahraga	$\frac{(\text{Jumlah pemuda (16–30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi})}{\text{Jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) di provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{250}{2.188.426} \times 100\%$ $= 0,01\%$	-	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel	



3) IKK Persentase atlet yang masuk pemusatan latihan nasional

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2m3	Kepemudaan dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah atlet daerah yang masuk Pemusatan Latihan Nasional}}{\text{Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat Provinsi (Komite Olahraga Nasional Indonesia ,Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar ,Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah ,Induk Cabang Olahraga)}} \times 100\%$	$= \frac{15}{244} \times 100\%$ $= 6,15\%$	-	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel	

4) IKK Persentase jumlah atlet berprestasi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2m4	Kepemudaan dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah atlet peraih medali}}{\text{Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional}} \times 100\%$	$= \frac{35}{35} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel	



INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK
(Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2n	Statistik	$\frac{\text{Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah}}{\text{Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah}} \times 100\%$	$= \frac{270}{329} \times 100\%$ $= 82,07\%$	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel	



INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN
(Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2o	Persandian	$\frac{\text{Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi}}{\text{Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)}} \times 100\%$	$= \frac{446}{918} \times 100\%$ $= 48,58\%$	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel	



INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN
(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase warisan budaya yang dilestarikan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2p	Kebudayaan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi ,dikembangkan dan dimanfaatkan _____ X 100% Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	$= \frac{72}{72} \times 100\%$ $= 100$	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN
(Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel)

1) IKK Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2q1	Perpustakaan	TKM = $((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	$= (0,15 \times 56,08) + (0,50 \times 60,59) + (0,35 \times 63,10)$ $= 60,86$ (rendah)	-	Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel	

2) IKK Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2q2	Perpustakaan	IPLM = $((0,30 \times \text{dimensi kepatuhan}) + (0,70 \times \text{dimensi kinerja})) \times 100$	$= (0,30 \times 0,473) + (0,70 \times 0,439) \times 100$ $= 37,81$	-	Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEARSIPAN
(Dinas Kearsipan Prov. Sumsel)

- 1) IKK Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
2r	Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$= \frac{89,76+100+100+100}{4}$ $= 97,44\%$	-	Dinas Kearsipan Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase produksi perikanan tangkap dan budidaya

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3a1	Kelautan dan Perikanan	$\frac{\text{Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)}}{\text{Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)}} \times 100\%$	$= \frac{428.526,21}{455.769} \times 100\%$ $= 94,02\%$	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di wilayah provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3a2	Kelautan dan Perikanan	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahun N - Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahun N-1}}{\text{Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahun N-1}} \times 100\%$	$= \frac{3.348}{3.206} \times 100\%$ $= 4,43\%$	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	



3) IKK Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3a3	Kelautan dan Perikanan	$\frac{\text{Pelaku usaha yang patuh}}{\text{Pelaku usaha yang diawasi}} \times 100\%$	$= \frac{39}{45} \times 100\%$ $= 86,67\%$	pada IKK 3.a.3 persentase tingkat Kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terdiri dari pelaku usaha di Bidang perikanan tangkap, pelaku Usaha di Bidang Perikanan Budidaya dan pelaku Usaha Perikanan Bidang Pengolahan, tetapi untuk Pelaku Usaha Perikanan budidaya Kewenangan untuk menerbitkan Izin atau rekomendasi perizinan bukan pada Pemerintah Provinsi melainkan ada di Kementerian kelautan sehingga data tidak dapat kami sajikan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PARIWISATA
(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3b1	Pariwisata	$\frac{\text{Jumlah wisatawan asing tahun N} - \text{Jumlah wisatawan asing tahun N-1}}{\text{Jumlah wisatawan asing tahun N-1}} \times 100\%$	$= \frac{4.767 - 2.004}{2.004} \times 100\%$ $= \frac{4.767}{2.004} \times 100\%$ $= 137,87\%$	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3b2	Pariwisata	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun N} - \text{Jumlah wisatawan tahun N-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun N-1}} \times 100\%$	$= \frac{26.065.520 - 18.143.118}{18.143.118} \times 100\%$ $= \frac{26.065.520}{18.143.118} \times 100\%$ $= 43,67\%$	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel	



3) IKK Rasio Produk Domestik Regional Bruto penyediaan akomodasi, makan, minum

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3b3	Pariwisata	$\frac{\text{Nilai tambah penyediaan akomodasi makan minum}}{\text{Nilai Produk Domestik Regional Bruto provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{14.973}{720.205} \times 100\%$ $= 2,08\%$	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANIAN
(Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase peningkatan produksi tanaman pangan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3c1	Pertanian	$\frac{\text{Produksi tanaman pangan tahun N} - \text{Produksi tanaman pangan tahun N-1}}{\text{Produksi tanaman pangan tahun N-1}} \times 100\%$	$= \frac{4.260,177,11}{3.743.363,88} \times 100\%$ $= 13,81\%$	-	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase peningkatan produksi hortikultura

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3c2	Pertanian	$\frac{\text{Produksi hortikultura tahun N} - \text{Produksi hortikultura tahun N-1}}{\text{Produksi hortikultura tahun N-1}} \times 100\%$	$= \frac{24.535,14}{17.588,46} \times 100\%$ $= 39,50\%$	-	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel	



3) IKK Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan
(Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3c3	Pertanian	$\frac{\text{Produksi komoditas peternakan tahun N} - \text{Produksi komoditas peternakan tahun N} - 1}{\text{Produksi komoditas peternakan tahun N} - 1}$	$= \frac{412315,15 - 399214,36}{399214,36} \times 100\%$ $= \frac{412.315,15}{399.214,36} \times 100\%$ $= 3,28\%$	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel	



INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN
(Dinas Kehutanan Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3d1	Kehutanan	$\frac{\text{Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi}}{\text{Luas target tahunan rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara dalam 1 provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{512,45}{13.505,3} \times 100\%$ $= 3,79\%$	-	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3d2	Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan (Ha) Luas target tahunan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan (Ha)	$= \frac{1.721,78}{5.000} \times 100\%$ $= 34,44\%$	--	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel	

3) IKK Persentase penurunan kerusakan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3d3	Kehutanan	Luas hutan yang rusak tahun N-1 – Luas hutan yang rusak tahun N Luas hutan yang rusak tahun N-1 X 100%	$= \frac{5.728,87}{10.086,11} \times 100\%$ $= 43,20\%$	1. Data Luas hutan rusak Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada data perubahan tutupan lahan Tahun 2023–2024. Hal ini dikarenakan data tutupan lahan memiliki jeda waktu (time lag) dalam proses pengolahan, verifikasi, dan penetapan, sehingga pada Tahun 2025 data terbaru yang tersedia dan tervalidasi	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel	



				adalah data perubahan tutupan lahan hingga Tahun 2024. 2. Data luas hutan rusak Tahun 2024 masih menggunakan referensi data perubahan tutupan lahan Tahun 2022–2023. Hal ini dikarenakan data tutupan lahan bersifat time lag (mengalami keterlambatan rilis), sehingga data terbaru yang tersedia dan tervalidasi secara resmi saat ini adalah data perubahan tutupan lahan Tahun 2023. Dengan demikian, analisis kondisi kerusakan hutan Tahun 2024 disusun berdasarkan data terakhir yang telah dipublikasikan		

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel)

1) IKK Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3e1	Energi dan Sumber Daya Mineral	Ada/Tidak Ada Penetapan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi	Ada	-	Dinas ESDM Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3e2	Energi dan Sumber Daya Mineral	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang –undangan}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi}} \times 100\%$	$= \frac{318}{318} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Dinas ESDM Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI PERDAGANGAN
(Dinas Perdagangan Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase penanganan pengaduan konsumen per provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3f1	Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani pada tahun N}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang masuk pada tahun N}} \times 100\%$	$= \frac{55}{56} \times 100\%$ $= 98,21\%$	-	Dinas Perdagangan Prov. Sumsel	

2) IKK Nilai ekspor barang per provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3f2	Perdagangan	$\frac{\text{Nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun}}{\text{Target nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun}} \times 100\%$	$= \frac{6.334,31}{6.862} \times 100\%$ $= 92,31\%$	-	Dinas Perdagangan Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI PERINDUSTRIAN
(Dinas Perindustrian Prov. Sumsel)

- 1) **IKK Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto provinsi 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas provinsi**

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3g1	Perindustrian	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan $\frac{\text{---}}{\text{jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\%$	82,83%	-	Dinas Perindustrian Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase kepatuhan pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3g2	Perindustrian	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional}}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha industri besar}} \times 100\%$	$= \frac{119}{173} \times 100\%$ $= 68,79\%$	-	Dinas Perindustrian Prov. Sumsel	

3) IKK Persentase Pertambahan jumlah industri besar di provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3g3	Perindustrian	$\frac{\text{Jumlah industri besar tahun N} - \text{Jumlah industri besar tahun N-1}}{\text{Jumlah industri besar tahun N-1}} \times 100\%$	$= \frac{173}{151} \times 100\%$ $= 14,57\%$	-	Dinas Perindustrian Prov. Sumsel	



4) IKK Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3g4	Perindustrian	$\frac{\text{Nilai investasi sektor industri}}{\text{Total investasi seluruh sektor}} \times 100\%$	$= \frac{20.384.861.110.642}{62.668.051.138.154} \times 100\%$ $= 32,53\%$	-	Dinas Perindustrian Prov. Sumsel	



INDIKATOR KINERJA KUNCI TRANSMIGRASI
(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel)

1) IKK Tidak ada kewenangan provinsi

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
3h	Transmigrasi	Tidak ada kewenangan provinsi	100	Tidak Ada	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumsel)

1) IKK Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4a	Perencanaan	Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden	$= \frac{17}{17} \times 100\%$ $= 100\%$	-	BAPPEDA Prov. Sumsel	

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
(Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel)

- 1) **IKK Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, Tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya**

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4b1	Keuangan	$\frac{\text{Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)}}{\text{Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah}} \times 100\%$	$= \frac{2.369.001.909.039}{11.237.619.654.098} \times 100\%$ $= 21,08\%$	-	BPKAD Prov. Sumsel	

- 2) **IKK Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah (Bapenda Prov. Sumsel)**

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4b2	Keuangan	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$	$= \frac{4.564.918.691.338,32}{10.064.162.585.499,3} \times 100\%$ $= 45,36\%$	-	Bapenda Prov. Sumsel	



3) IKK Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4b3	Keuangan	$\frac{\text{Realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N}}{\text{Alokasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N}} \times 100\%$	$= \frac{4.037.023.860.288,94}{5.244.085.538.092} \times 100\%$ $= 76,98\%$	-	BPKAD Prov. Sumsel	

4) IKK Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4b4	Keuangan	$\frac{\text{Alokasi belanja infrastruktur pelayanan public}}{\text{Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa}} \times 100\%$	$= \frac{2.543.900.359.692,5}{7.464.000.057.086} \times 100\%$ $= 34,08\%$	-	BPKAD Prov. Sumsel	

**INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
(KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)
(Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel)**

1) IKK Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4c	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $\times 100\%$ Seluruh jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$= \frac{6.510}{8.591} \times 100\%$ $= 75,78\%$	-	BKD Prov. Sumsel	



**INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
(PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)
(Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sumsel)**

1) IKK Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4d	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah $\times 100\%$ Jumlah produk inovasi yang Dihasilkan oleh perangkat daerah	$= \frac{90}{113} \times 100\%$ $= 79,65\%$	-	BRIDA Prov. Sumsel	



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
(FUNGSI PENGAWASAN)
(Inspektorat Daerah Prov. Sumsel)

1) IKK Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Inspektorat Daerah Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4e1	Pengawasan	Nilai 1/2/3/4/5	5	Pada pengisian data dukung masih menggunakan hasil evaluasi BPKP tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2025 BPKP tidak melakukan evaluasi SPIP pemerintah daerah	Inspektorat Prov. Sumsel	

2) IKK Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) (Inspektorat Daerah Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4e2	Pengawasan	Nilai 1/2/3/4/5	5	Sesuai dengan Perban BPKP No. 6 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP, sehingga evaluasi terhadap KAPIP pada Pemerintah Daerah Sumatera Selatan masih dalam tahap evaluas. Data dukung masih menggunakan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya	Inspektorat Prov. Sumsel	

3) IKK Outcome : Manajemen resiko indeks (Inspektorat Daerah Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4e3	Pengawasan	Level1 / level 2 / level 3 / level 4 / level 5	4	Pada pengisian data dukung masih menggunakan hasil evaluasi BPKP tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2025 BPKP tidak melakukan evaluasi SPIP/MRI pemerintah daerah	Inspektorat Prov. Sumsel	

4) IKK Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun anggaran N-1 (Inspektorat Daerah Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4e4	Pengawasan	$\frac{\text{Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1}}{\text{Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1}} \times 100\%$	$= \frac{181}{181} \times 100\%$ $= 100\%$	-	Inspektorat Prov. Sumsel	

NDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)
(Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Sumsel)

1) IKK Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4f1	Pengadaan	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	40	-	Biro PBJ Prov. Sumsel	

2) IKK Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4f2	Pengadaan	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	19,9	-	Biro PBJ Prov. Sumsel	



3) IKK Pemanfaatan sistem pengadaan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4f3	Pengadaan	Skor pemanfaatan sistem pengadaan	21,29	-	Biro PBJ Prov. Sumsel	

**INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
(HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH)
(BPKAD Prov. Sumsel dan Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel)**

1) IKK Ketepatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N (BPKAD Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4g1	Hubungan dengan perwakilan daerah	1. Tepat 2. Tidak Tepat	Tepat	-	BPKAD Prov. Sumsel	

2) IKK Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N (Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel)

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4g2	Hubungan dengan perwakilan daerah	$\frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N}}{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N}} \times 100\%$	$= \frac{8}{9} \times 100\% = 88,89\%$	Terdapat 1 (satu) Ranperda yang belum ditetapkan menjadi Perda yaitu Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukan Air Irigasi hal ini disebabkan terdapat dinamika pada saat penyusunan Ranperda terkait ketidaksepakatan substansi materi muatan sehingga perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh Tim Penyusun (Sekretariat DPRD) dan saat ini Ranperda tersebut diusulkan kembali oleh DPRD dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026	Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel	



**DIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
(PELAYANAN PUBLIK)
(Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel)**

1) IKK Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Permasalahan	Sumber Data	Ket
4h	Pelayanan Publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	80	Tindak lanjut laporan hasil penilaian (LHP) Ombudsman RI tahun 2025 adalah RSUD Siti Fatimah sedang Proses Penyelesaian Maladministrasi ini	Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel	



2.1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024 s.d 2026 berlaku pada (Januari s.d September) dan diselaraskan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 telah menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang telah berlaku dimulai dari triwulan IV (Oktober s.d Desember). Perkembangan capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada periode pertama laporan sesuai RPJMD, dibawah ini perbandingan pencapaian kinerja Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berdasarkan RPD 2024 s.d 2026 dan RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2026

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian 2025	Target Terhadap 2026	% Capaian
1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi							
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,5	5,35	100,94	6,25	85,6
1.2	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Juta Rp/Kapita	73,33	80,66	110,00	75,00	107,55
1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,39	6,31	98,75	6,03	104,64
1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,090	2,331	111,53	2,083	111,91
2. Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan							
2.1	Nilai Tukar Petani	%	109,56	130,00	118,66	110,00	118,18
3. Meningkatnya Ekosistem Inovasi							
3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73	2,73	100	2,74	99,64
4. Terkendali Laju Inflasi Daerah							
4.1	Tingkat Infalsi Daerah	%	2,5±1	2,91	100	3±1	100
5. Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan							
5.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,37-10,37	9,85	105,01	10,58	106,90
5.2	Gini Ratio	Indeks	0,316-0,320	0,298	93,13	0,308	96,75
6. Menurunnya Tingkat Pengangguran							
6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93	3,69	103,40	3,75	101,60
7. Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan							
7.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96	74,76	103,89	72,29	103,42
7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,5	93,22	98,68	95,53	97,58
7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	72,5	53,67	74,03	75	71,56
7.4	Prevalensi Stunting	%	13,3	15,90	80,45	12,2	70,49
8. Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan menurunkan Risiko Bencana							



Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian 2025	Target Terhadap 2026	% Capaian
8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,98	75,15	104,40	72,01	104,36
8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,66	32,00	369,52	9,29	345,57
8.3	Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	136,01	139,67	97,31	135,50	96,92
9. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan							
9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,25 (B)	74,54	107,70	71 (BB)	104,99
10. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah							
10.1	Nilai SAKIP	Nilai	80,55	76,23	94,64	81,21	93,86
11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	91,81	103,96	A	103,96

Keterangan :

Warna Ungu : persentase Capaian > 100%
 Warna Kuning : persentase Capaian > 75% - 100%
 Warna Biru : persentase Capaian > 50% - 75%
 Warna Coklat : persentase Capaian ≤ 50%
 Warna Hijau : Capaian tidak terealisasi (0%)

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2029

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian 2025	Target Terhadap 2029	% Capaian
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia							
1.1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54	0,52	96,30	0,57	91,23
1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,4	74,76	104,48	76,04	98,32
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan							
2.1	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	%	14,8	15,8	92,57	11,30	60,18
3. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak							
3.1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,465	0,479	103,01	0,416	115,14
4. Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah							
4.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30-5,50	5,35	100,94	7,4-8,1	72,30
4.2	PDRB per Kapita	Rp (juta)	79,90	81,50	102,00	127,10	64,12
4.3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,48	3,53	101,44	3,60	100,83
5. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah							
5.1	Tingkat Inflasi	%	1,5-3,5	2,91	100	1,3-3,2	100
6. Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air							
6.1	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,22	n/a	-	63,89	-
6.2	Indeks ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	20,19	19,14	94,80	27,39	69,88
7. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan							
7.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,19	75,15	110,21	69,20	108,60
7.2	Penurunan Intesitas Emisi GRK	%	69,97	69,29	99,03	80,74	85,82
8. Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi dan Air							
8.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,52	79,31	102,31	86,69	91,46
9. Meningkatnya Pengelolaan Bencana							
9.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	130,41	139,67	107,10	127,88	109,22
10. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat							
10.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,37-10,37	9,85	105,01	6,05-7,05	60,28



Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian 2025	Target Terhadap 2025	% Capaian
10.2	Rasio Gini	Indeks	0,316-0,320	0,298	93,13	0,294-0,298	100
12. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha							
12.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93	3,69	103,40	3,29-3,67	103,40
13. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan							
13.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (75-76)	74,58	99,44	BB (79-80)	94,41

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤	Sangat Tinggi
2.	76% ≤	Tinggi
3.	66% ≤	Sedang
4.	51% ≤	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan RPD Tahun 2025-2026 ada 11 Sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan dari Januari s.d September, ada fase transisi yang telah disahkan pada bulan oktober berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 ada 13 Sasaran sebagaimana terlampir pada tabel Capaian diatas sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan melalui tabel Sebelum Perubahan dan sesudah perubahan sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

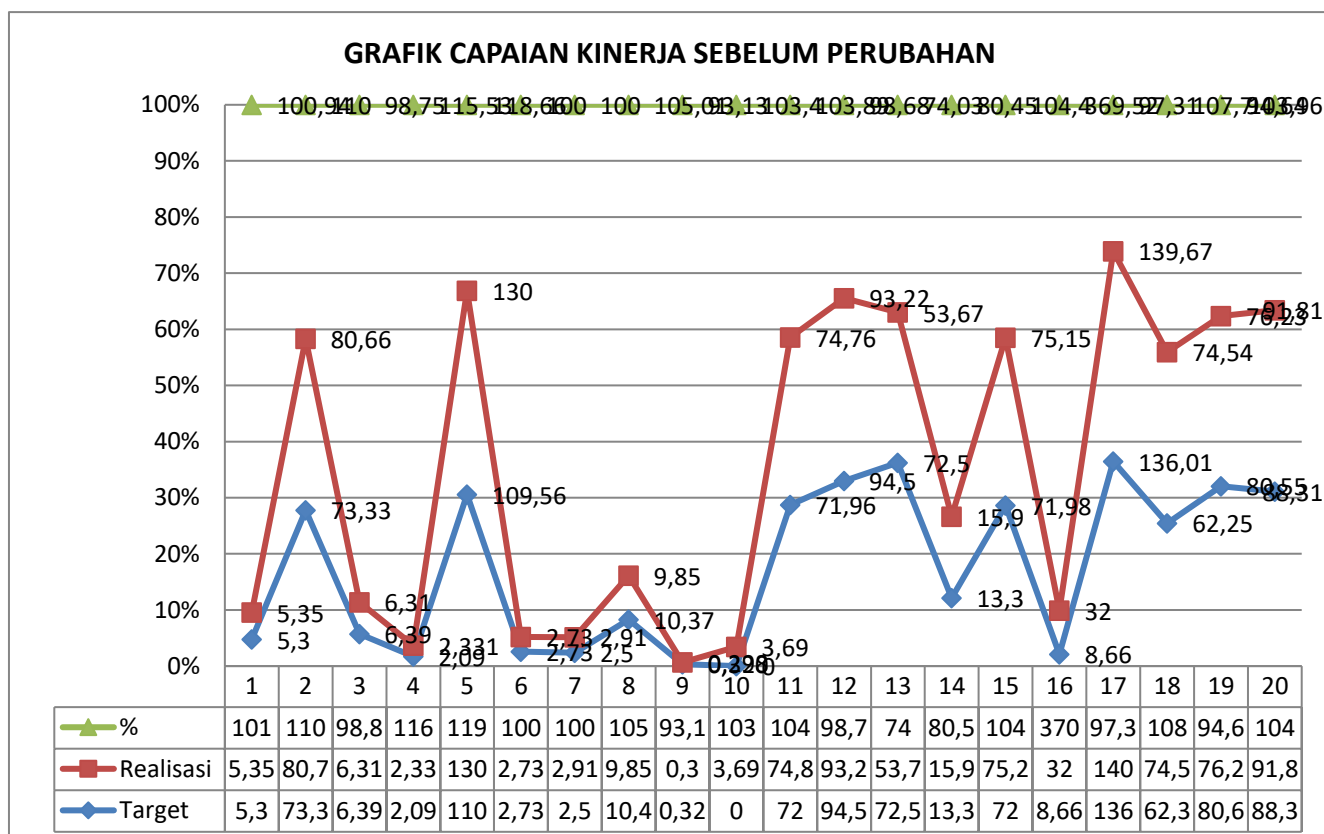
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Kriteria
				Satuan	Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,5	5,35	100,94	Sangat Tinggi
		1.2	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Juta Rp / Kapita	73,33	80,66	110,00	Sangat Tinggi
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,39	6,31	98,75	Sangat Tinggi



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Kriteria
				Satuan	Target	Realisasi	%	
		1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,090	2,331	115,53	Sangat Tinggi
2.	Meningkat Perekonomian Sektor Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani	%	109,56	130,00	118,66	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73	2,73	100	Sangat Tinggi
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Infalsi Daerah	%	2,5±1	2,91	100	Sangat Tinggi
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,37-10,37	9,85	105,01	Sangat Tinggi
		5.2	Gini Ratio	Indeks	0,316-0,320	0,298	93,13	Sangat Tinggi
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93	3,69	103,40	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Perluasab Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96	74,76	103,89	Sangat Tinggi
		7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,5	93,22	98,68	Sangat Tinggi
		7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	72,5	53,67	74,03	Tinggi
		7.4	Prevalensi Stunting	%	13,3	15,90	80,45	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Resiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,98	75,15	104,40	Sangat Tinggi
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,66	32,00	369,52	Sangat Tinggi
		8.3	Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	136,01	139,67	97,31	Sangat Tinggi
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,25 (B)	74,54	107,70	Sangat Tinggi
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	Nilai	80,55	76,23	94,64	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	91,81	103,96	Sangat Tinggi



Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebelum perubahan pada periode kedua berdasarkan RPD bisa dilihat dari tabel diatas sudah memenuhi target yang telah ditetapkan pada TW I s.d TW III dengan kriteria Sangat Tinggi dari 19 indikator dan 1 indikator dengan kriteria Tinggi yaitu Indeks Pembangunan Pemuda.



Pencapaian Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Kriteria	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perekembangan Ekonomi	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,5	5,35	100,94	Sangat Tinggi	Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 dengan target 5,3-5,5 dengan realisasi 5,35 capaian 100,94 menunjukkan Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh impresif, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11%. Pertumbuhan ini ditopang oleh sector pertanian, perdagangan, industry pengolahan dan real estate menjadikan salah satunya yang tertinggi di Sumatera. Sektor pertambangan dan akomodasi juga memberikan kontribusi signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai sector, tidak hanya bergantung pada komoditas, menjadi faktor kunci keberhasilan Ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025.
		1.2	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Juta Rp / Kapita	73,33	80,66	110,00	Sangat Tinggi	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB pada tahun 2025 ditargetkan 73,33 dengan realisasi 80,66 capaian 110,00, keberhasilan ini didorong oleh posisi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi (batubara, minyak, gas) dan optimalisasi sector pertanian serta kinerja ekonomi : pertumbuhan pada triwulan II-2025 tercatat sebagai yang tertinggi ke 4 tahun terakhir. Sektor Utama pendorong ekonomi adalah pengadaan listrik dan gas (tumbuh 11,39%) serta ekspor barang dan jasa yang meningkat signifikan.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Kriteria	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%		
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,39	6,31	98,75	Sangat Tinggi	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada tahun 2025 ditargetkan 6,39 dengan realisasi 6,31 capaian 98,75, IPEI merupakan alat ukur alat ukur komprehensif (skala 0-10) untuk memantau seberapa merata pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, serta akses peluang bagi masyarakat di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. IPEI didasarkan pada 3 pilar utama: pertumbuhan ekonomi, pemerataan / pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses. Perhitungan IPEI Sumatera Selatan 6,31 sudah dengan kategori bagus karena Sumatera Selatan sudah berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pengurangan ketimpangan social dan wilayah.
		1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,090	2,331	115,53	Sangat Tinggi	Indeks Entropi Theil tahun 2025 target 2,090 dengan target 2,331 capaian 115,53 keberhasilan ini tidak terlepas dari gambaran ekonomi sumatera selatan tahun 2025, tingkat kemiskinan turun satu digit menjadi 9,85% (per awal 2026) dan IPM mencapai 83,27 dan juga digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah atau antar kelompok dalam suatu wilayah yang bisa dilihat dari data BPS.
2.	Meningkatkan Sektor Perekonomian Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani	%	109,56	130,00	118,66	Sangat Tinggi	Nilai Tukar Petani pada tahun 2025 target 109,56 dengan realisasi 130 capaian 118,66 kondisi ini menunjukkan bahwa petani mengalami surplus karena pendapatan petani lebih besar dari pengeluaran sehingga keberhasilan capaian ini salah satunya didukung oleh program/kegiatan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025				Kriteria	Keterangan
			Satuan	Target	Realisasi	%		
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	3.1 Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73	2,73	100	Sangat Tinggi	Indeks ekosistem Sistem pada tahun 2,73 dengan realisasi 2,73 capaian 100 keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah poin-poin keberhasilan terkait indeks ekosistem dan pembangunan Sumsel tahun 2025: Peringkat Kualitas Pembangunan Tertinggi: Sumsel berhasil menduduki peringkat ke-7 dalam kualitas pembangunan di tingkat nasional pada September 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sangat Tinggi: IPM Kota Palembang (sebagai ibu kota provinsi) mencapai 83,27 pada tahun 2025, masuk dalam kategori "Sangat Tinggi" dengan pertumbuhan 1,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja Ekosistem Digital (ETPD): Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah Sumatera Selatan meningkat pesat, menunjukkan penguatan ekosistem digital dalam tata kelola keuangan daerah. Ekosistem Energi dan Pertanian: Sumsel memperkuat perannya sebagai lumbung energi (batubara, migas) dan pangan nasional. Target cetak sawah mencapai 37 ribu hektar pada akhir 2025, dengan capaian gabah kering giling mencapai 600 ribu ton pada September 2025. Penguatan Ekosistem Keuangan: OJK Provinsi Sumsel aktif berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, didukung dengan inisiatif digitalisasi



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Kriteria	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%		
									di sektor UMKM dan pariwisata. Visi 2025: Capaian ini sejalan dengan visi "Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025", yang berfokus pada penggerak ekonomi regional, ketahanan pangan/energi, dan kualitas hidup masyarakat.
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1	2,91	100	Sangat Tinggi	Tingkat Inflasi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kestabilan ekonomi yang baik, meskipun sempat mengalami fluktuasi bulanan karena kenaikan harga komoditas seperti emas, beras dan cabai tetapi pemerintah tetap mengupayakan menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah bersama pihak terkait memperkuat sinergi untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok agar inflasi tetap terkendali, terutama saat permintaan di akhir tahun meningkat.
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,37-10,37	9,85	105,01	Sangat Tinggi	Secara Umum Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan dalam periode maret 2014- September 2025 menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan menurun dari 1.100,83 ribu orang di Maret 2014 menjadi 898,24 ribu orang pada September 2025. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 13,91% menjadi 9,85%. Berikut adalah poin-poin penting keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Sumsel tahun 2025:



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Kriteria	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%		
									Pencapaian Satu Digit: BPS mencatat penurunan persentase penduduk miskin menjadi 9,85% pada September 2025, yang merupakan rekor pertama kali di bawah 10% sejak 2014. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin: Sebanyak 21,4 ribu orang berhasil keluar dari garis kemiskinan dibandingkan periode Maret 2025 (898,24 ribu orang pada September). Pertumbuhan Ekonomi Tinggi: Ekonomi Sumsel 2025 tumbuh 5,35%, ditopang oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan. Faktor Pendorong: Penurunan kemiskinan didorong oleh produktivitas pertanian yang baik, kenaikan harga komoditas ekspor, serta intervensi bansos pemerintah. Pedesaan dan Perkotaan: Angka kemiskinan di wilayah perkotaan turun menjadi 8,91%, sementara di pedesaan turun menjadi 10,43%. Peran Kota Palembang: Kota Palembang berkontribusi pada penurunan tersebut dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,04% pada Maret 2025.
		5.2	Gini Ratio	Indeks	0,316-0,320	0,298	93,13	Sangat Tinggi	Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren positif yang mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin rata. Berikut adalah poin-poin keberhasilan Gini Ratio dan indikator ketimpangan di Sumsel tahun 2025:



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025				Kriteria	Keterangan
			Satuan	Target	Realisasi	%		
								Gini Ratio September 2025: Angka ketimpangan pengeluaran penduduk Sumsel tercatat sebesar 0,298. Penurunan Ketimpangan: Nilai ini menunjukkan perbaikan (penurunan) sebesar 0,013 poin dibandingkan dengan Gini Ratio bulan September 2024 yang berada di angka 0,331. Perbaikan Kualitas: Penurunan Gini Ratio ke level 0,298 mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Sumatera Selatan semakin merata, yang searah dengan tren penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Konteks Pertumbuhan Ekonomi: Keberhasilan ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi Sumsel yang kuat, mencapai 5,35% pada tahun 2025, melampaui rata-rata nasional.
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93	3,69	103,40	Sangat Tinggi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan menunjukkan tren keberhasilan yang positif pada tahun 2025 dengan penurunan yang konsisten, hingga agustus 2025, TPT turun menjadi 3,69% (sekitar 170 ribu orang) yang menandakan perbaikan pasar tenaga kerja. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian, kehutanan, perikanan diikuti oleh konstruksi yang meningkat pesat. Penurunan angka pengangguran ini dukung oleh pertumbuhan ekonomi positif dan perluasan kesempatan kerja di sector formal maupun informal.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025				Kriteria	Keterangan
			Satuan	Target	Realisasi	%		
7.	Meningkatnya Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1 Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96	74,76	103,89	Sangat Tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 menunjukkan keberhasilan signifikan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang melesat ke angka 74,76. Berikut adalah poin-poin keberhasilan IPM Sumsel tahun 2025: Peningkatan Signifikan: IPM Sumsel tumbuh 0,92 poin atau naik 1,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 73,84. Peningkatan Kualitas Hidup: Peningkatan ini mencerminkan perbaikan nyata di seluruh aspek pembangunan manusia, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Capaian Kota Palembang: Di tingkat kota, IPM Kota Palembang pada tahun 2025 mencapai 83,27 (kategori Sangat Tinggi) dengan pertumbuhan 1,19 persen dan Angka Harapan Hidup mencapai 76,26 tahun.
		7.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,5	93,22	98,68	Sangat Tinggi	IPG tahun 2025 ditargetkan 94,5 dengan realisasi 93,22 capaian 98,68. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sumatera Selatan menunjukkan kemajuan yang positif dan stabil, menandakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang semakin setara dengan laki-laki dalam dimensi umur panjang, pengetahuan dan standar hidup layak.
		7.3 Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	72,5	53,67	74,03	Tinggi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun ditargetkan 72,5 dengan 53,67 capaian 74,03. IPP masih berada dibawah target yang ditetapkan kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Kriteria	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%		
									peningkatan kualitas pemuda yang bersifat multidimensi, sehingga diperlukan penguatan efektivitas program, peningkatan sinergi lintas sektor, serta penajaman intervensi pada domain IPP yang masih lemah.
		7.4	Prevalensi Stunting	%	13,3	15,90	80,45	Sangat Tinggi	Prevalensi Stunting tahun 2025 ditargetkan 13,3 dengan realisasi 15,90 capaian 80,45, Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan progress percepatan yang sangat positif, faktor keberhasilan ini didorong oleh kolaborasi lintas sektor yang kuat, program komprehensif, serta intervensi spesifik dan sensitif yang intensif.
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Resiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,98	75,15	104,40	Sangat Tinggi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025 ditargetkan 71,98 dengan realisasi 75,15 capaian 104,40, keberhasilan IKLH di Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun masih menghadapi tantangan besar terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,66	32,00	369,52	Sangat Tinggi	Persentase Penurunan Emisi GRK pada tahun 8,66 dengan realisasi 32,00 capaian yang tinggi 369,52, pencapaian GRK menunjukkan komitmen kuat dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui serangkaian langkah strategis dalam pembangunan rendah karbon dan pengendalian perubahan iklim. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mengejar target <i>net zero emission</i> .



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Kriteria	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%		
		8.3	Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	136,01	139,67	97,31	Sangat Tinggi	Indeks Resiko Bencana Sumsel tahun 2025 ditargetkan 136,01 dengan realisasi 139,67 capaian 97,31. Kenaikan ini mencerminkan adanya perubahan dinamika risiko bencana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya bahaya, kerentanan, menurunnya kapasitas daerah, dan frekuensi kejadian bencana alam, tekanan pembangunan di wilayah rawan bencana, serta bertambahnya tingkat keterpaparan masyarakat dan aset terhadap ancaman bencana.
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,25 (B)	74,54	107,70	Sangat Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 ditargetkan 62,25 dengan realisasi 74,54 (angka sementara tahun 2024) karena penilaian Indeks Reformasi Birokrasi masih tahap penilaian dan masa sanggah. Dilihat dari pencapaian dari Indeks RB sudah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan dukungan dari perangkat daerah dan melalui kegiatan asistensi.
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	Nilai	80,55	76,23	94,64	Sangat Tinggi	Nilai SAKIP tahun 2025 ditargetkan 80,55 dengan realisasi 76,23 capaian 94,64. Nilai SAKIP tahun 2025 belum mencapai nilai target yang dicapai hal ini masih dalam pemenuhan target spesifik di beberapa instansi.
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	91,81	103,96	Sangat Tinggi	Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 ditargetkan nilai A (83,23) realisasi sebesar 91,81 capaian 103,96 menunjukkan tren yang positif dengan tingkat kepuasan yang tinggi.



C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun (2023), 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja pada tabel dibawah ini berdasarkan RPD 2024 s.d 2026 dan penjelasan indikator ini untuk periode ke dua yang dilaksanakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,08	%	5,74	5,07	87,41	5,3-5,5	5,35	100,94	Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun 2023 s.d 2025 Mengalami Peningkatan. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 tumbuh sebesar 5,35%, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,66%, sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang tumbuh sebesar 4,91%. Sepanjang tahun 2025, kinerja ekonomi Sumatera Selatan didukung oleh permintaan domestik dan impor yang cenderung meningkat sehingga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi. Tahun 2023 (Stabil) : ekonomi Sumatera Selatan tumbuh kuat sebesar 5,08% secara keseluruhan, melampaui pertumbuhan nasional (5,05%). Pertumbuhan tertinggi ada pada sector penyediaan akomodasi dan makanan. Tahun 2024 (Kosisten) : ekonomi tumbuh 5,03%, menandakan konsistensi pertumbuhan di angka 5% meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan regional.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		1.2	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	75	Juta Rp / Kapita	71,67	75,13	104,83	73,33	80,66	110,00	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar Rp. 80,66 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp. 75,13 Juta. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, hal ini terjadi karena masyarakat Sumatera Selatan mengalami peningkatan pada sisi pendapatan di tahun tersebut. Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai 720,21 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp. 81,50 Juta. Pertumbuhan Perkapita PDRB/ADHB menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2023 hingga proyeksi awal 2025/2026.
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,95	Indeks	6,00	6,31	105,17	6,39	6,31	98,75	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dari tahun 2024 s.d 2025 masih pada nilai 6,31 sama dengan realisasi tahun 2024, IPEI mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Kinerja ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,35 persen secara keseluruhan, melampaui rata-rata nasional (5,11 persen). Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja ekonomi yang inklusif, dengan kontribusi merata dari berbagai sektor usaha dan UMKM. IPEI Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan positif dari tahun 2023 s.d 2025.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		1.4	Indeks Entropi Theil	2,240	Indeks	2,097	2,331	111,16	2,090	2,331	115,53	Indeks Entropi Theil dari tahun 2023 s.d 2025 peningkatan. Indeks Entropi Theil salah satu metode mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah, termasuk di Sumatera Selatan, Indeks Entropi Theil digunakan untuk menganalisis tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah, mengidentifikasi wilayah dengan kesenjangan ekonomi tertinggi dan terendah, serta mengukur ketimpangan antar wilayah di Sumatera Selatan. Dari hasil perhitungan indeks ini, dapat kita lihat bahwa ketimpangan Provinsi Sumatera Selatan, jika dilihat pada tahun 2022 hingga 2025 cukup mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2022 Indeks Entropi Theil Intra Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,003, kemudian sedikit menurun menjadi 0,992 di tahun 2023 dan mengalami peningkatan tahun 2025 sebesar 2,331 Artinya dalam rentang tahun 2022-2025 terjadi peningkatan Indeks Theil Intra Wilayah sebesar 1,339 poin.
2.	Meningkat Perekonomian Sektor Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani		%	109,11	120,83	110,74	109,56	130,00	118,66	Capaian NTP Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa persentase indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Petani di tahun 2025 mengalami keuntungan dibandingkan dengan tahun 2021 s.d 2024. Capaian NTP dipengaruhi oleh



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
												fluktuasi capaian NTP pada berbagai sub sektor pendukung. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata indeks harga yang diterima petani tanaman pangan dan hortikultura dibandingkan dengan indeks biaya konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modal. Capaian NTP tahun 2023 s.d 2025 menunjukkan tren peningkatan positif.
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	3.1	Indeks Ekosistem Inovasi		Indeks	2,72	3,38	124,26	2,73	2,73	100	Perbandingan Indeks ekosistem Sistem dari Tahun 2023 s.d 2025 menunjukkan angka yang relative stabil. Indeks Ekosistem Inovasi Pada tahun 2024 capaian indikator Indeks Ekosistem Inovasi sebesar 3,38 dan tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,73 (target pada RPD 2024-2026) sementara capaian tahun 2025 sebesar 2,73 (data sementara) , dikarenakan data Ekosistem Inovasi belum dirilis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (<i>rilis pada bulan Maret tahun 2026</i>). Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya (tahun 2024) skor indeks ekosistem inovasi dalam pilar kapabilitas inovasi terhadap capaian nasional berada di atas angka nasional, maka angka kapabilitas inovasi nasional mencapai 3,10 (<i>angka sementara</i>) sementara pemerintah provinsi Sumatera Selatan berada pada skor 3,38. Berdasarkan data tabel di atas, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, target tahun 2025 pada indikator indeks Ekosistem pilar kapabilitas



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
												inovasi (sebesar 3,35), lebih tinggi 0.65 dari tahun sebelumnya (sebesar 2,7), Hal ini didorong oleh penguatan pada komponen-komponen pembentuk ekosistem inovasi dalam kerangka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) .
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Inflasi Daerah	31,7	%	2,5±1	1,20	100	2,5±1	2,91	100	Perkembangan tren inflasi di Sumatera Selatan dari tahun 2023 hingga awal 2026 menunjukkan fluktuasi, dengan tekanan meningkat pada awal 2026. Perkembangan angka inflasi Sumatera Selatan secara Year on Year (yoy) dari Bulan Januari s.d Desember 2025 mengalami kenaikan. Tren yang sama juga terjadi di tingkat Nasional mengalami kenaikan. Pada Bulan November 2025 dan Desember 2025 angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan sama sebesar 2,91% secara yoy dan menurun terhadap angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan Bulan Oktober 2025 sebesar 3,49%. Namun demikian angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada Bulan Desember 2025 dibawah angka inflasi Nasional sebesar 2,91% secara yoy, sedangkan angka inflasi Nasional sebesar 2,92%. Selain itu kalau dilihat dari laju kenaikan angka inflasi Sumatera Selatan yang tajam mulai Bulan Maret 2025 sebesar 1,77% terhadap Bulan Februari 2025 sebesar 0,49% yang disebabkan pada Bulan Januari dan Februari 2025 adanya subsidi tarif listrik yang diberikan oleh pemerintah secara nasional dan mulai Bulan Maret 2025 subsidi tarif Listrik tersebut tidak diberikan



BAB II
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
												lagi dan kenaikan laju inflasi tersebut juga terjadi secara Nasional. Meskipun angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan menaik pada Bulan Januari 2025 sebesar 0,92% menjadi 2,91% pada Bulan Desember 2025 yoy sedangkan angka inflasi Nasional pada Bulan Januari 2025 sebesar 0,76% menjadi 2,92% yoy, namun kenaikan angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan mulai Bulan Maret 2025 masih dalam rentang angka acuan nasional sebesar $2,5 \pm 1$ (1,5%-3,5%). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Selatan masih relatif terjaga dan stabil.
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	11,78	%	10,95	10,51	104,02	9,37-10,37	9,85	105,01	Tingkat kemiskinan pada Pada Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan, di tahun 2023 sebesar 11,78% sedangkan di tahun 2024 sebesar 10,51% mengalami penurunan capaian sebesar 1,27%. Sama halnya pada tahun 2025 persentase kemiskinan sebesar 9,85% kembali mengalami penurunan sebesar 0,66% bila dibandingkan persentase kemiskinan pada tahun 2024. Jika dilihat dari grafik capaian persentase angka kemiskinan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan.
		5.2	Gini Ratio	0,338	Indeks	0,324	0,331	102,16	0,316-0,320	0,298	93,13	Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan pada kurun waktu dari tahun 2023-2025 mengalami penurunan fluktuasi,dalam satu tahun terakhir atau pada periode Maret 2023-September 2023 Gini Ratio



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
												Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,338 keadaan Maret 2023 menjadi 0,331 keadaan September 2024 atau turun 0,007 poin, sedangkan penurunan yang cukup besar juga terjadi untuk periode September 2025 yaitu sebesar 0,033 poin terhadap periode sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Provinsi Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat direalisasikan semakin baik di masyarakat.
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,11	%	4,14	3,86	106,76	3,82-3,93	3,69	103,40	Tingkat Pengangguran Terbuka dilihat dari tabel disamping mengalami penurunan dari tahun 2023 s.d 2025, pada tahun 2023 dan 2024 TPT 3,86% dengan jumlah pengangguran turun menjadi 179.710 orang atau turun sebanyak 8.800 orang, pada tahun 2025 TPT Sumatera Selatan sebesar 3,69% atau 172.360 orang, angka ini turun sebanyak 7.350 orang jika dibandingkan dengan tahun 2024 hal ini disebabkan adanya dukungan pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran di Sumatera Selatan dengan melaksanakan Job Fair Sumsel serta melaksanakan pelatihan berbasis computer.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
7.	Meningkatnya Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1	Indeks Pembangunan Manusia	73,18	Indeks	71,63	73,84	103,09	71,96	74,76	103,89	Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi tahun 2025 mencapai 74,74, meningkat 0,92 poin atau 1,25% dibandingkan tahun sebelumnya 73,84. Selama 2020-2025, IPM Provinsi Sumatera Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,86% per tahun. Pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan.
		7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,25	Indeks	93,94	93,25	99,27	94,5	93,22	98,68	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang cukup stabil meningkat pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 93,25 serta mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar 93,22, upaya terus menerus dalam mengurangi kesenjangan gender di berbagai sektor.
		7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	6,24	Indeks	70	54	77,14	72,5	53,67	74,03	Perbandingan IPP Tahun 2023 s.d 2025 mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan penurunan dari tahun 2024 s.d 2025. Pada tahun 2025 Target dan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 capaian IPP sebesar 54,00 masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 70,00, namun telah menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi capaian terbaik dalam lima tahun terakhir. Memasuki Tahun 2025, target IPP ditetapkan lebih tinggi, yaitu 72,50, sebagai bagian dari upaya akselerasi pencapaian sasaran jangka menengah sesuai RENSTRA dan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
												RPD. Namun demikian, realisasi IPP Tahun 2025 tercatat sebesar 53,67, yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dan relatif stagnan dibandingkan capaian Tahun 2024 dan 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan kualitas pemuda yang bersifat multidimensi, sehingga diperlukan penguatan efektivitas program, peningkatan sinergi lintas sektor, serta penajaman intervensi pada domain IPP yang masih lemah. Hasil perbandingan ini menjadi bahan evaluasi penting dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode selanjutnya agar target IPP dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan.
		7.4	Prevalensi Stunting	18,6	%	14,3	1,20	191,61	13,3	15,8	81,20	Perbandingan Prevalensi Stunting dari tahun 2023 s.d 2025 mengalami tren penurunan signifikan dan konsisten. Berdasarkan data prevalensi turun dari 20,3 (2023) menjadi 15,9% pada tahun 2024, 2025 angka ini dibawah rata-rata standar nasional. Prevalensi Stunting bila dilihat pada samping menunjukkan perfoma yang sangat positif dalam menekan angka stunting. Prevalensi rata-rata provinsi terus mengalami penurunan yang konsisten , yakni dari 1,5% (2023) menjadi 1,2% (2024) , dan mencapai angka 1,0% pada tahun 2025 . Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi gizi dan program kesehatan di tingkat provinsi berjalan efektif secara kolektif.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Resiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,69	Indeks	71,93	72,69	101,06	71,98	75,15	104,40	Perbandingan IKLH dari tahun 2023 s.d 2025 mengalami tren peningkatan signifikan. Jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada Tahun 2024 yaitu 72.69, capaian IKLH di Tahun 2025 yaitu 75.15, terjadi peningkatan capaian. Esensi dari nilai IKLH di atas adalah sebagai berikut : a. Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan memiliki angka 78.26. Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 90.25 maka terjadi penurunan sebesar 11.97. b. Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka 72.87 Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2025 bila dibandingkan tahun 2024 sebesar 59.54 maka terjadi peningkatan sebesar 13.33. c. Indeks Kualitas Lahan secara perhitungan berdasarkan website Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menunjukkan angka 68.65. bila dibandingkan tahun 2024 sebesar 44.52 maka terjadi peningkatan sebesar 24,13. d. Indeks Kualitas Air Laut berdasarkan perhitungan memiliki angka 78,24, apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Air Laut pada Tahun 2024 adalah sebesar 79,71 maka terjadi penurunan sebesar 1.47.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	127,67	%	8,04	20,20	251,24	8,66	32,00	369,52	Perbandingan penurunan emisi GRK dari tahun 2023 s.d 2026 mengalami tren peningkatan walau target yang ditentukan sangat beda jauh dengan realisasi. Saat ini, realisasi capaian persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Tahun 2025 masih menggunakan realisasi tahun 2024 karena data capaian tersebut baru dilakukan proses pengolahan, perhitungan, dan verifikasi pada Tahun 2026 melalui Aplikasi AKSARA Bappenas. Berdasarkan mekanisme yang berlaku, hasil realisasi tersebut diperkirakan akan tersedia pada periode Februari sampai dengan Agustus 2026, setelah seluruh tahapan input data, verifikasi, dan validasi selesai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
		8.3	Indeks Resiko Bencana Sumsel	80,6	Indeks	136,53	131,24	103,87	136,01	139,67	97,31	Perbandingan Indeks Resiko Bencana Sumsel pada tabel disamping Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil menurunkan risiko bencana, adanya penurunan tahun 2023 dan 2024 Nilai IRBI namun ditahun 2025 mengalami peningkatan dari 131,05 menjadi 139,67. Kenaikan ini mencerminkan adanya perubahan dinamika risiko bencana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya bahaya, kerentanan, menurunnya kapasitas daerah, dan frekuensi kejadian bencana alam, tekanan pembangunan di wilayah rawan bencana, serta bertambahnya tingkat keterpaparan masyarakat dan aset terhadap ancaman bencana.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	69,40	Indeks	67,5(B)	69,14	102,43	62,25 (B)	74,54	107,70	Perbandingan nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 s.d 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan 2024 tetapi penurunan tahun 2025 masih dalam proses sanggah nilai kepusat. Indeks Reformasi Birokrasi dilihat dari tabel disamping mengalami peningkatan pada tahun 2023, 2024, namun ada penurunan pada tahun 2025, nilai RB tahun 2025 masih dalam proses sanggah.
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	77,10	Nilai	80,55	77,53	96,25	80,55	76,23	94,64	Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2023 s.d 2025 mengalami penurunan setiap tahun, Nilai SAKIP bisa dilihat pada tabel disamping mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar 76,23 turun 1,3 poin dibandingkan tahun 2024 dan 2023 disebabkan ada belum mengupload LPPD maupun laporan kinerja sebagian OPD ke website, menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya, Meningkatkan kualitas LPPD dan laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Capaian Tahun 2024				Capaian Tahun 2025			Keterangan
					Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
												Selanjutnya, memastikan laporan kinerja tersebut selaras dengan kinerja yang diperjanjikan
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,91	Indeks	A	89,99	110,74	A	91,81	103,96	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2023 s.d 2025 mengalami tren positif peningkatan. Indeks Kepuasan Masyarakat dilihat pada tabel disamping mengalami tren peningkatan selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan disebabkan oleh adanya tindak lanjut berupa surat ke Perangkat Daerah untuk penguatan pengumpulan data per triwulan, adanya sistem aplikasi yang selalu memantau perkembangan dari aplikasi SKM.



D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja Target RPJMD Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Target Terhadap 2026	% Capaian	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%			
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perekembangan Ekonomi	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,5	5,35	100,94	6,25	85,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi terealisasi sebesar 5,35% bila dibandingkan dengan target jangka menengah masih belum mencapai target yang ditetapkan. Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk kedepan laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang meningkat dari sisi produksi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, ekspor barang dan jasa.
		1.2	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Juta Rp / Kapita	73,33	80,66	110,00	75,00	107,55	Pendapatan per Kapita PDRB ADHB pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mencapai target yang telah ditentukan dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu meningkatkan dari sisi produksi, perdangan, penguatan lapangan usaha lainnya.
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,39	6,31	98,75	6,03	104,64	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sudah tahun 2025 sebesar 6,31 sudah melampaui target jangka menengah sebesar 6,03. Pembangunan inklusif diluncurkan untuk memonitor agar manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan seluruh masyarakat, serta memandu kebijakan inklusif dan berkelanjutan.
		1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,090	2,331	115,53	2,083	111,91	Indeks Entropi Theil untuk Provinsi Sumatera Selatan belum dirilis secara public data yang digunakan angka sementara dari tahun 2024, jika dilihat dari tabel disampil realisasi indeks entropi theil sudah melampaui target RPJMD hal ini disebabkan untuk ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Target Terhadap 2026	% Capaian	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%			
2.	Meningkat Perekonomian Sektor Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani	%	109,56	130,00	118,66	110,00	118,18	Nilai Tukar Petani pada tahun 2025 telah melebihi target RPD. Untuk capaian ditahun 2025 tersebut, maka target NTP tahun 2026 perlu ditinjau kembali. NTP yang diperoleh tersebut dipengaruhi oleh naik turunnya NTP dari berbagai sub sector, yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya).
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73	2,73	100	2,74	99,64	Indeks Ekosistem Inovasi bila dilihat dari tabel diampin belum mencapai target jangka menengah sebesar 2,74 atau kurang 1 poin untuk meningkatnya, tapi Peemrintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk meningkatkan Indeks Ekosistem Inovasi dengan Ketersediaan Metadata yang terukur, pendamping terstruktur ke daerah, komitmen pimpinan dan budaya kerja, kinerja pilar kapabilitas yang kompetitip, integrasi dalam dokumen perencanaan dan partisipasi dalam ajang nasional.
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1	2,91	100	3±1	100	Tingkat Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari laju kenaikan angka inflasi Sumatera Selatan yang tajam mulai Bulan Maret 2025 sebesar 1,77% terhadap Bulan Februari 2025 sebesar 0,49% yang disebabkan pada Bulan Januari dan Februari 2025 adanya subsidi tarif listrik yang diberikan oleh pemerintah secara nasional dan mulai Bulan Maret 2025 subsidi tarif Listrik tersebut tidak diberikan lagi dan kenaikan laju inflasi tersebut juga terjadi secara Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Selatan masih relatif terjaga dan stabil, diharapkan target terhadap RPD tetap masih stabil.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Target Terhadap 2026	% Capaian	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%			
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,37-10,37	9,85	105,01	10,58	106,90	Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berhasil mencapai rekor satu digit, turunmenjadi 9,85% pada akhir periode. Capaian ini menunjukkan perbaikan signifikan dari angka 10,15% pada maret 2025, dengan jumlah penduduk miskin turun menjadi 919,6 ribu,diharapkan pada akhir target 2026 mengalami penurunan kembali 1 digit.
		5.2	Gini Ratio	Indeks	0,316-0,320	0,298	93,13	0,308	96,75	Gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025 tercatat 0,298. Angka ini menunjukkan kategori ketimpangan rendah dan mengalami penurunan dari posisi maret 2025 yang berada di angka 0,311, yang berarti distribusi pendapatan di sumsel semakin merata sebnading dengan target RPD tahun 2026 diharapkan terjadi penurunan untuk menunjukkan perbaikan Ketimpangan
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93	3,69	103,40	3,75	101,60	Tingkat Pengguran Terbuka Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan target tahun 2026 3,75, Pemerintah Provinsi Sumatera berupaya bisa menurunkan angka pengangguran ditarget akhir. Penurunan angka pengangguran ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja dan angkatan kerja di wilayah.
7.	Meningkatnya Perluasab Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96	74,76	103,89	72,29	103,42	Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025 terealisasi 74,76 melebihi target 2026, pencapaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan manusia dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak di sumatera.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Target Terhadap 2026	% Capaian	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%			
		7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,5	93,22	98,68	95,53	97,58	Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2025 93,22 dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 95,53 berbeda 2,31 poin, upaya terus menerus dalam mengurangi kesenjangan gender di berbagai sektor.
		7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	72,5	53,67	74,03	75	71,56	Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2025 terealisasi 53,67 dibandingkan tahun 2026 sebesar 75 belum mencapai
		7.4	Prevalensi Stunting	%	13,3	15,90	80,45	12,2	69,67	Prevalensi Stunting berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis pada tahun 2025, prevalensi stunting di Sumatera Selatan turun signifikan menjadi 15,9%. Angka ini turun dari 20,3% di tahun sebelumnya, menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan penurunan tertinggi kedua nasional namun dibandingkan dengan target terhadap tahun 2026 sebesar 12,2 Provinsi Sumatera Selatan berupaya akan tetap menurunkan angka prevalensi stunting untuk kedepannya.
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Resiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,98	75,15	104,40	72,01	104,36	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025 telah melebihi target RPD tahun 2026 sebesar 72,01, hal ini dikarenakan esensi dari Nilai IKLH didapat dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,66	32,00	369,52	9,29	345,57	Persentase Penurunan Emisi GRK pada tahun 2025 terealisasi sebesar 32% telah melampaui target tahun 2026 sebesar 9,26%. Keberhasilan ini didorong adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, peningkatan efisiensi energi pada sektor industri, transportasi, dan perkantoran turut berkontribusi dalam menurunkan jumlah emisi yang dihasilkan per unit kegiatan ekonomi. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya serap karbon. Di samping itu, mulai berkembangnya pemanfaatan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Target Terhadap 2026	% Capaian	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%			
										energi baru terbarukan dan meningkatnya kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup menjadi faktor pendukung dalam upaya penurunan intensitas emisi GRK.
		8.3	Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	136,01	139,67	97,31	135,50	96,92	Indeks Resiko Bencana Sumsel tahun 2025 terealisasi 139,67 telah melebihi dari target tahun 2026 sebesar 135,50 hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kenaikan ini mencerminkan adanya perubahan dinamika risiko bencana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya bahaya, kerentanan, menurunnya kapasitas daerah, dan frekuensi kejadian bencana alam, tekanan pembangunan di wilayah rawan bencana, serta bertambahnya tingkat keterpaparan masyarakat dan aset terhadap ancaman bencana.
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,25 (B)	74,54	107,70	71 (BB)	104,99	Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 nilainya sebesar 74,54 (nilai sementara tahun 2024) namun dibandingkan dengan target RPD tahun 2026 sebesar 71 telah melampaui target yang telah ditentukan, namun nilai pada tahun 2025 masih dalam proses sanggah.
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	Nilai	80,55	76,23	94,64	81,21	93,86	Nilai SAKIP mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar 76,23 turun 1,3 poin disebabkan ada belum mengupload LPPD maupun laporan kinerja sebagian OPD ke website, menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya, Meningkatkan kualitas LPPD dan laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, memastikan laporan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Target Terhadap 2026	% Capaian	Keterangan
				Satuan	Target	Realisasi	%			
										kinerja tersebut selaras dengan kinerja yang diperjanjikan bila dibandingkan dengan target 2026 nilai SAKIP belum memenuhi target yang telah ditentukan, upaya yang dilakukan kedepan dengan mengadakan BIMTEK dan asistensi SAKIP.
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	91,81	103,96	A	103,96	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 sebesar 91,81 telah melampaui target 2026, hal ini tidak lepas dari peran Perangkat Daerah mengumpulkan Data tepat waktu, asistensi langsung dan pengumpulan data setiap per triwulan.



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perekembangan Ekonomi	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,35	5,39	99,28	Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 terealisasi 5,35% belum mencapai standar nasional sebesar 5,39%. Upaya kedepan laju pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan bisa meningkat melalui sektor pertanian, pertambangan dan peningkatan konsumsi rumah tangga.
		1.2	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Juta Rp / Kapita	80,66	83,7	96,38	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB realisasi tahun 2025 sebesar 80,66 bila dibandingkan dengan standar nasional 83,7 belum mencapai standar nasional, diharapkan upaya kedepan Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB.
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,31	6,0	105,17	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada tahun 2025 yaitu 6,31 sudah melebihi standar nasional yang telah ditetapkan, nilai IPEI terakhir dikeluarkan oleh BAPPENAS pada tahun 2023, karena indikator IPEI belum ada nilai update terbaru.
		1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,331	2,331	100	Indeks Entropi Theil tahun 2025 sebesar 2,331 sudah sama dengan nilai indeks nasional hal ini disebabkan fokus ketimpangan pengeluaran diukur menggunakan gini ratio (rasio gini), bukan secara spesifik indeks entropi theil dalam rilis utamanya. Tren Ketimpangan pengeluaran penduduk (rasio gini) menunjukkan penurunan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan selama kurun waktu September 2024 hingga maret 2025.
2.	Meningkat Perekonomian Sektor Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani	%	130,00	124,05	104,80	Nilai Tukar Petani pada tahun 2025 terealisasi 230,00 jika dibandingkan dengan standar nasional tahun 2025 telah melampaui NTP Sumatera Selatan, hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani, kenaikan ini didorong oleh indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,08% melampaui indeks harga yang dibayar petani sebesar 1,02%
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73	3,43	79,60	Indeks Ekosistem Inovasi pada tahun 2025 sebesar 2,73 belum mencapai target nasional sebesar 3,43, harapan kedepan Indeks Ekosistem Inovasi bisa melebihi standar nasional.
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,91	2,92	100	Perkembangan angka inflasi Sumatera Selatan secara Year on Year (yoy) dari Bulan Januari s.d Desember 2025 mengalami kenaikan. Tren yang sama juga terjadi di tingkat Nasional mengalami kenaikan. Pada Bulan November 2025 dan Desember 2025 angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan sama sebesar 2,91% secara yoy dan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian	Keterangan
								menurun terhadap angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan Bulan Oktober 2025 sebesar 3,49%. Namun demikian angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada Bulan Desember 2025 dibawah angka inflasi Nasional sebesar 2,91% secara yoy, sedangkan angka inflasi Nasional sebesar 2,92%. Selain itu kalau dilihat dari laju kenaikan angka inflasi Sumatera Selatan yang tajam mulai Bulan Maret 2025 sebesar 1,77% terhadap Bulan Februari 2025 sebesar 0,49% yang disebabkan pada Bulan Januari dan Februari 2025 adanya subsidi tarif listrik yang diberikan oleh pemerintah secara nasional dan mulai Bulan Maret 2025 subsidi tarif Listrik tersebut tidak diberikan lagi dan kenaikan laju inflasi tersebut juga terjadi secara Nasional. Meskipun angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan menaik pada Bulan Januari 2025 sebesar 0,92% menjadi 2,91% pada Bulan Desember 2025 yoy sedangkan angka inflasi Nasional pada Bulan Januari 2025 sebesar 0,76% menjadi 2,92% yoy, namun kenaikan angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan mulai Bulan Maret 2025 masih dalam rentang angka acuan nasional sebesar 2,5±1 (1,5%-3,5%). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Selatan masih relatif terjaga dan stabil.
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,85	8,25	80,61	Tingkat Kemiskinan provinsi sumatera selatan tahun 2025 sebesar 9,85 dibanding dengan standar nasional sudah mengalami tren penurunan.
		5.2	Gini Ratio	Indeks	0,298	0,363	82,09	Gini Ratio tahun 2025 sebesar 0,298 dibandingkan dengan standar nasional sebesar 0,363 Provinsi mengalami tren penurunan dibandingkan dengan standar nasional menandakan perbaikan ketimpangan pengeluaran.
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,69	4,74	122,15	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 3,69 telah mengalami penurunan dibandingkan dengan standar nasional, hal inidisebabkan membaiknya penyerapan tenaga kerja dengan baik tercatat penurunan 0,17 berdasarkan data BPS Sumatera Selatan
7.	Meningkatnya Perluasab Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,76	75,90	98,49	Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025 sebesar 74,76 meningkat 0,92 poin dibandingkan dengan standar nasional sebesar 75,90 atau 1,14 poin, pencapaian ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup manusia di sumatera selatan dengan peningkatan signifikan pada dimensi umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
		7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,22	91,85	101,49	Secara nasional, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Selatan termasuk kelompok provinsi dengan kategori IPG 90-100 dan Pada Tahun 2025 berada diurutan ke 10 dari 38 Provinsi. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 93,22%. Capaian tersebut menempatkan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian	Keterangan
								Provinsi Sumatera Selatan berada di atas angka nasional yaitu sebesar 91,85% atau nomor 10 tertinggi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa gap pembangunan manusia perempuan dan laki-laki di Sumatera Selatan membaik, dimana prestasi pembangunan manusia perempuannya relatif besar dibandingkan laki-laki.
		7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,67	56,98	94,19	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 53,67 bila dibandingkan dengan standar nasional 56,98, Untuk mendukung pencapaian indikator IPP, subkegiatan difokuskan pada koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha muda, serta pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda. Pendekatan ini menekankan pada peningkatan kapasitas dan peran aktif pemuda sebagai subjek pembangunan.
		7.4	Prevalensi Stunting	%	15,8	19,8	119,70	Prevalensi Stunting Tahun 15,8 Provinsi Sumatera Selatan mencatat prestasi signifikan di kancah nasional dengan meraih penghargaan sebagai Terbaik II Tingkat Nasional dalam penurunan prevalensi stunting pada November 2025, dibandingkan dengan standar nasional sebesar 19,8
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Resiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,15	76,49	98,25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 75,15 dibandingkan dengan standar nasional 76,49, Namun pada akhir tahun 2025 (desember) Sumatera Selatan memiliki kualitas udara terburuk di Indonesia dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai 97, tapi Provinsi Sumatera Selatan tetap berupaya untuk bisa memperbaiki kualitas udara, dan lingkungan dengan mengurangi polusi udara, air.
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	32,00	31,52	101,52	Persentase Penurunan Emisi GRK terealisasi sebesar 32% jika dibandingkan dengan standar nasional sudah melampaui target. Berbagai strategis mitigasi (seperti pengelolaan lahan gambut, restorasi dan efisiensi industri) berkontribusi pada target pengurangan emisi nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu : pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penerapan industri hijau dan efisiensi energi, Pengembangan energy terbarukan dan pengelolaan sampah. Pada tahun 2025, IKLH menargetkan emisi GRK dari lima sektor utama NDC mencapai 26,67% secara nasional.
		8.3	Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	139,67	39,80	(150,93)	Indeks Resiko Bencana Sumsel masuk dalam kategori tinggi dengan skor 139,67 terdapat kenaikan sebesar 8,62, Berdasarkan hasil pemutakhiran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2025, Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan adanya peningkatan nilai risiko bencana dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa potensi ancaman bencana di wilayah Sumatera Selatan semakin meningkat dan memerlukan perhatian serta penanganan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian	Keterangan
								yang lebih serius dan terencana. Peningkatan indeks risiko ini juga mencerminkan adanya tantangan dalam aspek kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kapasitas penanggulangan bencana yang perlu terus diperkuat. Oleh karena itu, hasil IRBI 2025 menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berwawasan kebencanaan dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Bila dibandingkan target nasional sebesar 39,80, Provinsi Sumatera masih harus bisa lebih beupaya untuk menurunkan resiko bencana untuk kedepannya.
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,54	90	82,82	Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 sebesar 74,54 (Angka Sementara) karena nilai RB 2025 masih dalam proses sanggah jika dibandingkan dengan standar nasional masih belum melampaui, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk meningkatkan nilai RB dengan meningkatkan kualitas layanan, komitmen anti korupsi diberbagai satuan kerja.
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	Nilai	76,23	AA	82,85	Nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 76,23 dibandingkan dengan standar nasional masih belum mencapai dengan kategori AA, namun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berusaha untuk memperbaiki kualitas laporan, pengukuran kinerja, perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja dengan menjawab tindak lanjut dari KEMENPAN RB RI
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,81	88,31	100	Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 91,81 telah melampaui standar penilaian pusat 88,31 hal ini terbukti dari tindak lanjut Provinsi dalam proses penyusunan SKM dan mengolah data.



Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perekembangan Ekonomi	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,5	5,35	100,94	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan struktur ekonomi yang semakin tangguh dan inklusif, tidak hanya bergantung pada satu sektor, serta menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu kontributor ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ditopang oleh kinerja inklusif di berbagai sektor, terutama pertambangan, industri pengolahan dan pertanian serta didukung peningkatan konsumsi rumah tangga.	
		1.2	Pendapatan Kapita/PDRB ADHB per	Juta Rp / Kapita	73,33	80,66	110,00	PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 tercatat mencapai Rp80,66 juta per tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,35% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini di dorong oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Secara total, PDRB Sumatera Selatan tahun 2025 tercatat mencapai Rp. 720,21.	
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,39	6,31	98,75	Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) dan perkembangan ekonomi Sumsel, berikut adalah indikator-indikator utama yang menggambarkan pembangunan ekonomi inklusif di Sumatera Selatan pada tahun 2025: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (2025): Perekonomian Sumatera Selatan tahun 2025 diproyeksikan tumbuh solid sebesar 5,35%, melampaui rata-rata nasional. Pertumbuhan ini dinilai inklusif karena didorong oleh kinerja merata di berbagai sektor usaha (tidak hanya satu sektor)	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
								serta peningkatan konsumsi dan investasi. • Peningkatan Kualitas Hidup (IPM 2025): Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mencapai 74,76. Angka ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi komponen penting dalam inklusivitas ekonomi (pendidikan, kesehatan, standar hidup layak). • Penurunan Angka Kemiskinan: Angka kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan, tercatat sebesar 10,15% pada Maret 2025. • Fokus Pemerataan: Gubernur Sumsel menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh sektor adalah fokus utama untuk memastikan hasil pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat. Secara keseluruhan, indikator 2025 menunjukkan tren perbaikan ekonomi yang lebih inklusif dengan pertumbuhan ekonomi yang solid dan penurunan kemiskinan.	
		1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,090	2,331	115,53	Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, berikut adalah indikator ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Selatan (Sumsel) untuk tahun 2025: • Gini Ratio September 2025: Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Selatan yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,298. • Tren Ketimpangan: Angka tersebut menunjukkan penurunan ketimpangan sebesar 0,013 poin dibandingkan periode sebelumnya.	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
								Konteks Kemiskinan: Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan pada Maret 2025 tercatat sebesar 10,15 persen, yang kemudian berhasil diturunkan menjadi 9,85 persen pada periode berikutnya (awal 2026). Data spesifik mengenai <i>Indeks Entropi Theil</i> untuk tahun 2025 tidak disebutkan secara eksplisit dalam rilis berita resmi utama BPS Sumsel yang tersedia, di mana fokus utama ketimpangan adalah pada Gini Ratio (0,298). Indeks Theil adalah ukuran alternatif untuk mengukur ketimpangan yang lebih sensitif terhadap perubahan di ujung distribusi pendapatan, namun BPS umumnya merilis Gini Ratio sebagai indikator utama	
2.	Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani	%	109,56	130,00	118,66	capaian NTP baik tanaman pangan maupun hortikultura berfluktuatif setiap bulannya. NTP untuk sub sektor tanaman pangan lebih besar dibandingkan dengan NTP sub sektor hortikultura. Hal ini menunjukkan bahwa petani usaha tani pangan lebih menguntungkan dibandingkan dengan usahatani hortikultura. Kondisi ini didukung juga dengan prioritas Program Pemerintah Swasembada Pangan. NTP tanaman pangan mengalami penurunan terendah di bulan Januari, sedangkan nilai tertinggi di bulan November. Sedangkan sebaliknya, NTP hortikultura mengalami penurunan terendah di bulan Juni dan nilai tertinggi di bulan Desember. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tetap melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap para petani, meskipun adanya efisiensi dana yang bersumber dari APBD	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
								dan APBN. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura guna menunjang usahatani tersebut melalui Program dan Kegiatan yang didanai oleh Dana APBD, meskipun tidak berpengaruh secara langsung kepada capaian NTP tahun 2025 yang belum mencapai target sehingga petani harus swadaya dalam berusaha tani dan tetap dalam pembinaan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan.	
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73	2,73	100	Keberhasilan Indeks ekosistem Inovasi didukung oleh 4 hal yaitu kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan melalui kegiatan Pendampingan dan Pembinaan OPD Kabupaten/kotaTahun 2025, Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dan Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.	
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1	2,91	100	Dilihat dari laju kenaikan angka inflasi Sumatera Selatan yang tajam mulai Bulan Maret 2025 sebesar 1,77% terhadap Bulan Februari 2025 sebesar 0,49% yang disebabkan pada Bulan Januari dan Februari 2025 adanya subsidi tarif listrik yang diberikan oleh pemerintah secara nasional dan mulai Bulan Maret 2025 subsidi tarif Listrik tersebut	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
								tidak diberikan lagi dan kenaikan laju inflasi tersebut juga terjadi secara Nasional. Meskipun angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan menaik pada Bulan Januari 2025 sebesar 0,92% menjadi 2,91% pada Bulan Desember 2025 yoy sedangkan angka inflasi Nasional pada Bulan Januari 2025 sebesar 0,76% menjadi 2,92% yoy, namun kenaikan angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan mulai Bulan Maret 2025 masih dalam rentang angka acuan nasional sebesar $2,5 \pm 1$ (1,5%-3,5%). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Selatan masih relatif terjaga dan stabil.	
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,37-10,37	9,85	105,01	Keberhasilan penurunan persentase angka kemiskinan merupakan kerja sama bersama antara seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Sosial tapi dari seluruh aspek stakeholder yang ada. Penurunan persentase angka kemiskinan ini salah satunya didukung melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup. Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah yang ikut berperan dalam penurunan angka kemiskinan disamping instansi terkait lainnya	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		5.2	Gini Ratio	Indeks	0,316-0,320	0,298	93,13	Adapun Penyebab keberhasilan menurunnya Gini ratio antara lain : 1. Perluasan jangkauan dan penambahan jumlah penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin/rentan. 2. Penambahan indeks bantuan sosial bagi penerima PKH dan Program Sembako, Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH, Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) khusus bagi Ibu Hamil dan Anak Balita. 3. Penambahan indeks bantuan untuk program sembako.	
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93	3,69	103,40	Penyebab Keberhasilan menurunkan pengangguran di Sumatera Selatan ini merupakan akumulasi beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pasca Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan upaya untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan dengan mendidik tenaga terampil dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perluasan kesempatan kerja, sehingga pengurangan pengangguran dari tahun ke tahun dapat direalisasikan.	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
7.	Meningkatnya Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96	74,76	103,89	Keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didorong oleh peningkatan kualitas tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), serta standar hidup layak (ekonomi). Faktor utama pendukungnya meliputi peningkatan angka harapan hidup rata-rata lama sekolah , dan pertumbuhan pendapatan per kapita .	
		7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,5	93,22	98,68	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2025 merupakan indikator kunci keberhasilan pembangunan manusia yang adil antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data dan tren terkini, berikut adalah potensi penyebab keberhasilan maupun kegagalan/penurunan IPG Sumsel di tahun 2025: Faktor Keberhasilan (Potensi Peningkatan IPG 2025) Peningkatan Akses Pendidikan Perempuan: Keberhasilan tercapai jika angka partisipasi sekolah (rata-rata lama sekolah) perempuan meningkat, memperkecil jurang dengan laki-laki. Perbaikan Kesehatan Ibu dan Anak: Menurunnya angka kematian ibu dan meningkatnya angka harapan hidup perempuan di Sumsel berkontribusi positif pada IPG. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan dalam berbagai sektor ekonomi.	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
								Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG): Komitmen pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan anggaran yang responsif gender (termasuk di tingkat kabupaten/kota seperti Ogan Ilir yang mencatat IPG tinggi). Perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Umum: Dengan IPM Sumsel yang meningkat menjadi 74,76 pada tahun 2025, perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan mendukung kenaikan IPG. Faktor Kegagalan (Potensi Penurunan atau Stagnai IPG 2025) Kesenjangan Gender Antar wilayah: Ketimpangan yang signifikan antara kabupaten/kota yang maju dengan yang tertinggal (misal: perbedaan IPG antara Ogan Ilir dan Musi Banyuasin). Kerentanan Perempuan terhadap Faktor Ekonomi: Dampak ekonomi atau penurunan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja profesional. Masalah Kesehatan (Wasting/Stunting): Dampak wasting pada balita yang menghambat kualitas sumber daya manusia perempuan di masa depan. Kurangnya Optimalisasi Pengarusutamaan Gender: Lemahnya komitmen pada dinas/lembaga tertentu dalam mengimplementasikan kebijakan yang sensitif gender. Pandemi/Krisis Kesehatan/Sosial: Faktor eksternal yang meningkatkan risiko kerentanan perempuan dan memperburuk ketimpangan gender.	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
								Pada April 2025, dilaporkan bahwa IPG di Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan positif, namun tantangan dalam mengurangi kesenjangan antara kabupaten/kota masih menjadi fokus utama.	
		7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	72,5	53,67	74,03	Berdasarkan laporan terbaru, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sumatera Selatan memang masih menghadapi tantangan untuk mencapai target yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa poin terkait capaian IPP dan pembangunan di Sumatera Selatan: Tren Capaian IPP (2020-2023): Data dari Bappenas menunjukkan IPP Sumatera Selatan mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2023 tercatat di angka 65,47 poin, meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun terdapat peningkatan dari tahun ke tahun (62,46 pada 2020), capaian ini perlu konsistensi tinggi untuk mencapai target ambisius, mengingat kompetisi antar daerah yang ketat. Fokus Peningkatan IPP 2025: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) menyadari hal ini dan memasukkan peningkatan IPP sebagai prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Domain IPP yang Menjadi Perhatian: Peningkatan IPP Sumatera Selatan difokuskan pada lima domain utama, yaitu: (1) Pendidikan(2) Kesehatan dan Kesejahteraan(3) Lapangan dan Kesempatan Kerja(4) Partisipasi dan Kepemimpinan, serta (5) Gender dan Diskriminasi.	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
								Indikator yang Perlu Ditingkatkan: Laporan menunjukkan perlunya perbaikan pada beberapa indikator spesifik seperti persentase pemuda yang merokok dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.	
		7.4	Prevalensi Stunting	%	13,3	15,90	80,45	Prevalensi stunting di Sumatera Selatan (Sumsel) berdasarkan data SSGI 2024 yang dirilis pada 2025 tercatat sebesar 15,9%. Angka ini turun drastis dari tahun sebelumnya (20,3%), menjadikan Sumsel sebagai salah satu provinsi dengan penurunan tercepat (terbaik II nasional). Sebanyak 117.905 balita di Sumsel tercatat mengalami stunting. Poin Penting Prevalensi Stunting Sumsel 2025 (data 2024) : Tren Positif: Angka stunting konsisten menurun dari 24,8% (2021) menjadi 18,6% (2022) dan 15,9% (2024), menurut data yang dirilis pada 2025. Peringkat Nasional: Sumatera Selatan berhasil menempati posisi Terbaik II Nasional dalam penurunan stunting, dengan penurunan 4,4%. Target: Capaian ini menunjukkan Sumsel berhasil menekan angka stunting di bawah rata-rata nasional (19,8%). Intervensi: Pemerintah fokus pada intervensi spesifik, terutama pada remaja putri dan ibu hamil	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Resiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,98	75,15	104,40	Faktor Pendorong : Tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan (area gambut dan minertal) yang mengakibatkan udara ambien dalam kondisi baik serta curah hujan yang cukup tinggi sehingga meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Faktor Penghambat : Masih tingginya pencemaran air Sungai dari sektor pertambangan di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin sehingga terjadi penurunan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Masih tingginya kadar DO di muara Sungai Musi dan muara Sungai Musi Ildi Daerah Sungsang sehingga nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menurun.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur izin lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,66	32,00	369,52	Faktor Pendorong : adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, peningkatan efisiensi energi pada sektor industri, transportasi, dan perkantoran turut berkontribusi dalam menurunkan jumlah emisi yang dihasilkan per unit kegiatan ekonomi. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya serap karbon. Di samping itu, mulai berkembangnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan	Dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi, serta peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan pendanaan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan juga



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
								meningkatnya kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup menjadi faktor pendukung dalam upaya penurunan intensitas emisi GRK. Faktor Penghambat :masih tingginya ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil yang merupakan sumber utama emisi GRK. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi pada periode tertentu turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi. Keterbatasan anggaran dan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program mitigasiperubahan iklim, serta keterbatasan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, juga menjadi kendala. Selain itu, aktivitas ekonomi yang masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam berpotensi menghasilkan emisi yang cukup besar apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang optimal.	perlu ditingkatkan. Di samping itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian target penurunan intensitas emisi GRK secara optimal dan berkelanjutan.
		8.3	Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	136,01	139,67	97,31	Indeks Resiko Bencana Sumsel tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 131,05 menjadi 139,67. Kenaikan ini mencerminkan adanya perubahan dinamika risiko bencana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : Meningkatnya Bahaya, Kerentanan, menurunnya kapasitas daerah, dan frekuensi kejadian bencana alam tekanan pembangunan di wilayah rawan bencana, serta bertambahnya tingkat keterpaparan masyarakat dan asset terhadap ancaman bencana.	Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan strategi penanggulangan bencana, melalui koordinasi lintas sector, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan data dan teknologi kebencanaan serta partisipasi aktif masyarakat, risiko bencana diharapkan dapat ditekan secara bertahap. Dengan langkah-langkah tersebut, peningkatan nilai IRBI tidak hanya menjadi indikator risiko, tetapi juga menjadi pemicu



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
									untuk memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dimasa mendatang.
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,25 (B)	74,54	107,70	Indeks Reformasi Birokrasi Berhasil mencapai target yang telah ditentukan tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan yang berkualitas.	
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	Nilai	80,55	76,23	94,64	Belum Mencapainya keberhasilan nilai SAKIP yang telah ditetapkan tidak terlepas dari peran serta dari 3 pilar yang mendorong untuk peningkatan penilaian SAKIP, capaian ini mencerminkan untuk tetap konsisten pada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja.	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai ini : 1. Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 difokuskan pada penguatan budaya kerja berorientasi hasil, transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan perbaikan tata kelola, evaluasi dan penyusunan strategi terukur. 2. Perencanaan Berorientasi hasil dan penyusunan RPJMD 2025-2029 3. Penguatan pengukuran dan pengumpulan data kinerja (e-SAKIP) 4. Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (TPMP/APIP). 5. Transformasi Pelayanan Publik 6. Komitmen Pimpinan dan Budaya Kinerja.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	91,81	103,96	Keberhasilan indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tren positif terutama Provinsi Sumatera Selatan. Keberhasilan ini didorong oleh perbaikan dalam beberapa unsur pelayanan antara lain : 1. Prosedur Pelayanan yang semakin mudah. 2. Kejelasan persyaratan dan Petugas pelayanan. 3. Kecepatan dan keramahan petugas dalam melayani.	

Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari enam belas sasaran, terdapat sepuluh sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA % CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
1	2	4	5	6	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	104,50	98,95	5,55	Efisien
2.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	112,50	97,37	15,13	Efisien
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	100	91,37	8,63	Efisien
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	100	83,45	16,55	Efisien
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	99,07	90,44	8,63	Efisien
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	103,40	82,22	21,18	Efisien
7.	Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	89,26	97,49	0,24	Efisien
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	190,41	96,62	93,79	Efisien
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	107,70	92,43	15,27	Efisien
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	94,64	73,38	21,26	Efisien
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	103,96	92,20	11,76	Efisien

Efisiensi anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

Tabel Penjelasan Analisis Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perekembangan Ekonomi	1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	Berikut adalah poin-poin penting efisiensi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan 2025: Pertumbuhan Kuat Meski Efisiensi: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan mencatat ekonomi Sumsel 2025 tumbuh 5,35 persen. Efisiensi anggaran pemerintah tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Penggerak Utama: Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga, belanja masyarakat, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 20,76% (yoy) hingga triwulan III-2025. Sektor Andalan: Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan/penggalan menjadi motor penggerak utama. Efisiensi Fiskal & Optimalisasi Aset: Optimalisasi aset negara dan penyelesaian piutang meningkatkan PNBPN hingga 129,8% dari target. Infrastruktur & Digitalisasi: Pembangunan proyek strategis nasional (jalan tol) berlanjut, didukung digitalisasi di sektor pelabuhan (KSOP Palembang) untuk efisiensi logistik. Kinerja Koperasi: Terbentuknya 3.258 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Sumatera Selatan, meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat. Kinerja APBD dan APBN di Sumatera Selatan pada 2025 dinilai stabil, tangguh dan efisien menjadikannya modal penting untuk pertumbuhan berkesinambungan ditahun-tahun berikutnya.
		1.2 Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Berikut adalah poin-poin efisiensi sumber daya dan indikator PDRB per kapita Sumsel tahun 2025: Pertumbuhan PDRB & Efisiensi: Ekonomi Sumsel tahun 2025 tumbuh 5,35 persen (y-on-y), didukung oleh kontribusi merata dari sektor barang dan jasa. Pertumbuhan per Triwulan: Pertumbuhan ekonomi menunjukkan ketahanan, dengan capaian 5,22% pada Triwulan I-2025 dan menguat ke 5,42% pada Triwulan II-2025. PDRB Per Kapita (Kabupaten/Kota): Meskipun angka total provinsi untuk akhir tahun 2025 belum dirilis secara final dalam satu dokumen, data triwulanan menunjukkan Kabupaten Muara Enim mencatatkan PDRB per kapita tertinggi mencapai 11.477,9 US\$ pada Triwulan II-2025. Faktor Pendorong Efisiensi: Pertumbuhan didukung oleh peningkatan nilai investasi (PMTB) dan percepatan proyek strategis nasional (PSN), termasuk hilirisasi sawit, pengembangan energi, dan <i>food estate</i>. Optimalisasi Sumber Daya: Terdapat upaya optimalisasi melalui rencana tenaga kerja 2025-2029 untuk memaksimalkan potensi daerah. Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Sumsel pada 2025 menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional (5,11% secara nasional) dan penurunan tingkat kemiskinan yang berlanjut.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Keterangan
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Berdasarkan data terkini tahun 2025, Sumatera Selatan menunjukkan upaya peningkatan efisiensi sumber daya dan pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan sumber daya manusia dan hilirisasi SDA. Berikut adalah poin-poin pentingnya: Peningkatan IPM (Kualitas Sumber Daya Manusia): Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan, mencapai 74,76. Angka ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup manusia (kesehatan dan pendidikan) yang signifikan di tahun 2025. Penurunan Kemiskinan: Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan berhasil diturunkan menjadi satu digit, yaitu 9,85 persen per Februari 2026, yang mencerminkan hasil dari pembangunan ekonomi inklusif periode sebelumnya. Tingkat kemiskinan ekstrem juga terus menurun, mencapai 0,59% pada tahun 2024. Hilirisasi dan Efisiensi Sumber Daya: Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Sumsel berfokus pada hilirisasi komoditas kelapa sawit, pengembangan <i>food estate</i>, dan proyek <i>Biorefinery</i> Pertamina di Musi Banyuasin. Selain itu, terdapat prioritas pada pengembangan energi ramah lingkungan (pengolahan sampah menjadi energi listrik). Kinerja Ekonomi 2025: Meskipun menghadapi ketidakpastian global dan penurunan investasi asing (PMA) pada triwulan II 2025, ekonomi Sumsel diprediksi tetap tangguh. Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan stabil di angka 5,0% pada tahun 2025. Tantangan Efisiensi: Terdapat tantangan dalam efisiensi belanja modal (infrastruktur) baik dari APBN maupun APBD yang sempat mengalami kontraksi pada semester I 2025, sehingga memerlukan percepatan realisasi proyek strategis.
		1.4	Indeks Entropi Theil	Efisiensi Sumber Daya Indeks Entropi Theil yaitu : Indeks Entropi Theil (Ketimpangan): Indeks Entropi Theil digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Sumsel. Dokumen perencanaan menunjukkan adanya perhatian serius terhadap angka indeks ini, yang tercatat dalam paparan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan publikasi BPS terkait ketimpangan pembangunan tahun 2024-2025. Efisiensi Sumber Daya Alam (SDA): Sumatera Selatan memperkuat efisiensi pemanfaatan SDA, khususnya pada sektor energi (batubara, minyak, dan gas bumi) untuk menopang pertumbuhan ekonomi regional. Ketimpangan Berkurang: Penurunan tingkat kemiskinan ke level satu digit (9,85% per Februari 2026) menunjukkan upaya efisiensi ekonomi dan distribusi hasil pembangunan mulai menunjukkan hasil.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Keterangan
2.	Meningkat Perekonomian Sektor Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani	Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2025, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera Selatan mengalami fluktuasi namun menunjukkan ketahanan yang didorong oleh sektor perkebunan. Kenaikan NTP pada beberapa bulan di tahun 2025 menunjukkan potensi efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk produksi, meskipun ada bulan-bulan di mana NTP turun akibat kenaikan biaya produksi. Berikut adalah gambaran NTP dan efisiensi sumber daya petani di Sumsel tahun 2025: Fluktuasi NTP Sumsel 2025: NTP Sumsel sempat mengalami penurunan pada April 2025 sebesar 7,12 persen, Juni (turun 2,10 persen), dan Juli (turun 1,54 persen). Namun, NTP kembali menunjukkan kenaikan pada bulan-bulan berikutnya, contohnya pada November 2025 yang naik 0,21 persen. Sektor Perkebunan Penopang Utama: Perkebunan, khususnya karet, kelapa sawit, dan kopi, tetap menjadi penopang utama daya beli petani di Sumsel. Pada awal 2025 (Januari-Maret), NTP subsektor perkebunan rakyat menguat signifikan. Efisiensi Sumber Daya & Indeks Biaya (Ib): Pada Agustus 2025, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) di tingkat nasional (yang juga memengaruhi Sumsel) hanya naik tipis sebesar 0,01 persen, sementara indeks konsumsi rumah tangga naik 0,51 persen. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam biaya produksi (pupuk/alat) relatif terjaga dibandingkan kenaikan harga kebutuhan hidup. Penurunan NTP pada Juni 2025 terutama dipicu oleh penurunan harga komoditas (harga yang diterima), bukan semata-mata kenaikan biaya produksi. Daya Beli Petani (NTP): Kenaikan NTP pada beberapa periode menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani dari penjualan hasil panen masih lebih tinggi dibandingkan biaya produksi dan biaya konsumsi yang mereka bayarkan. Secara umum, petani di Sumsel pada 2025 menghadapi tantangan fluktuasi harga komoditas perkebunan, namun masih mampu mempertahankan tingkat kesejahteraan (NTP) melalui efisiensi dalam penggunaan input produksi meskipun harga kebutuhan rumah tangga meningkat.
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan inovasi daerah dan efisiensi sumber daya untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Sumsel menargetkan diri menjadi daerah yang unggul dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan manusia secara kreatif. Berikut adalah poin-poin penting efisiensi sumber daya dan inovasi di Sumatera Selatan tahun 2025 yaitu : 1. Inovasi Ekosistem & Daya Saing Peningkatan Inovasi Daerah: Pemprov Sumsel aktif memperkuat ekosistem inovasi melalui Panduan Pemilihan Inovator Sumsel 2025, yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan. Peningkatan Daya Saing: Sumsel menargetkan peningkatan kualitas pembangunan, dengan fokus pada sinergi antar lembaga dan peningkatan efisiensi untuk mendorong inovasi sektor bisnis dan pelayanan publik. Apresiasi Inovasi: Kemendagri mendorong pengukuran Indeks Inovasi Daerah melalui Innovative Government Award (IGA) 2025, yang menjadi acuan bagi Sumsel dalam mengukur efektivitas inovasi daerah.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Keterangan
				2. Efisiensi Sumber Daya dan Energi Optimalisasi Energi: Sumsel memperkuat perannya sebagai lumbung energi nasional (batubara, minyak, gas bumi) dan mulai mengarah pada pemanfaatan energi terbarukan seperti panas bumi, biomassa, dan gambut. Prioritas PSN: Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumsel difokuskan pada biorefinery, hilirisasi sawit, dan pengolahan sampah menjadi energi listrik (Waste-to-Energy) yang ramah lingkungan. Manajemen SDM & Tata Kelola: Peningkatan efisiensi dilakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan (pelayanan, perizinan) untuk mengelola SDM dan SDA secara produktif, sejalan dengan visi "Sumsel Unggul dan Terdepan".
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Inflasi Daerah	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tingkat inflasi daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai nilai stabil pada tahun 2025 dengan tetap menjaga harga barang relatif stabil, peningkatan aktivitas ekonomi baik Sektor industri maupun konsumsi masyarakat dengan solusi yang dilakukan yaitu : • Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. • Peningkatan Kualitas SDM: Investasi pada pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. • Diversifikasi Industri: Pengembangan sektor industri yang beragam dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja. Kebijakan yang Mendukung Pasar Kerja: Kebijakan yang mendukung fleksibilitas pasar kerja, seperti deregulasi dan insentif bagi pengusaha, dapat meningkatkan.
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	Efisiensi Sumber Daya dan Faktor Pendukung: Penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor efisiensi dan kebijakan strategis: 1. Optimalisasi Anggaran: APBN dan APBD di Sumatera Selatan tercatat tangguh hingga akhir 2025, dengan pendapatan yang tumbuh kuat dan optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD). 2. Strategi Pengentasan Kemiskinan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan langkah strategis khusus di tahun 2025, termasuk peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan penanganan kemiskinan ekstrem. 3. Hilirisasi dan Investasi: Pemanfaatan potensi sumber daya alam (food estate, hilirisasi sawit, dan biorefinery) yang diproyeksikan dalam PSN (Proyek Strategis Nasional) di Sumatera Selatan berpotensi memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi daerah.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Keterangan
				Penurunan Kemiskinan Ekstrem: Rata-rata penurunan kemiskinan ekstrem di Sumsel cukup signifikan, mencerminkan efisiensi intervensi pada kelompok masyarakat paling rentan.
		5.2	Gini Ratio	Efisiensi Sumber Daya dan Ekonomi (2025) • Perekonomian: Ekonomi Sumatera Selatan menunjukkan performa positif dengan pertumbuhan 5,20% (yoy) hingga Oktober 2025. • Investasi: Pada triwulan II 2025, total realisasi investasi (PMA dan PMDN) tercatat sebesar Rp12,59 triliun, yang menunjukkan penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya. • Fokus Sumber Daya: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berfokus pada peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk energi dan pangan yang berkelanjutan, serta pengembangan hilirisasi komoditas sawit dan pengembangan sampah menjadi energi listrik. • Efisiensi SDA: Dokumen perencanaan menunjukkan adanya upaya efisiensi dalam eksploitasi sumber daya alam (SDA) untuk mendukung pertumbuhan yang seimbang.
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Efisiensi penggunaan sumber daya mempunyai peran krusial dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan cara meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru melalui inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya yang efisien, baik alam maupun manusia, memungkinkan sektor industri dan UMKM untuk tumbuh lebih kompetitif tanpa harus meningkatkan biaya input secara drastis. Salah satu upaya yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) - Akses Pendidikan dan Kesehatan yang lebih baik meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang secara signifikan menurunkan tingkat pengangguran. - Program Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi (PBK). 2. Efisiensi dalam Sektor Industri 3. Optimalisasi Investasi dan Pengeluaran Pemerintah - Investasi yang diarahkan pada peningkatan efisiensi dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja. - Pengalihan anggaran yang kurang efisien (misalnya biaya perjalanan dinas) ke program prioritas seperti UMKM dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Keterangan
				4. Efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) Eksplorasi sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan (seperti pada sektor pertanian/perkebunan) membantu mengurangi pengangguran di daerah. Efisiensi penyesuaian anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.983.610.876 semula APBD Induk 2025 anggaran Disnakertrans sebesar Rp. 33.250.593.000 menjadi Rp. 30.266.982.124 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Efisiensi ini berasal dari anggaran Perjalanan Dinas, Alat Tulis Kantor, Baju Dinas, Cetak Penggandaan Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang salah satu tujuan dan sasaran pembangunan makro daerah adalah mengurangi pengangguran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan akan terus mendorong program-program kegiatan yang mengarah kepada penurunan angka pengangguran.
7.	Meningkatnya Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1	Indeks Pembangunan Manusia	Efisiensi Sumber Daya IPM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025: • Peningkatan Efisiensi Pembangunan: Efisiensi IPM penting untuk memastikan anggaran daerah yang terbatas dapat menghasilkan dampak maksimal pada kesehatan (harapan hidup), pengetahuan (pendidikan), dan pengeluaran riil per kapita. • Target "Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan 2025": Efisiensi IPM menjadi salah satu alat ukur utama dalam mewujudkan visi pembangunan Sumsel tahun 2005-2025, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kapasitas manajemen pemerintahan. • Penurunan Angka Kemiskinan: Peningkatan IPM yang efisien berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan, yang tercatat berhasil turun ke level satu digit (9,85 persen) per Februari 2026. • Pendorong Pertumbuhan Ekonomi: IPM yang tinggi mencerminkan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi regional. • Kualitas Hidup Berkelanjutan: Peningkatan IPM Sumsel pada 2025 tidak hanya dari sisi angka, tetapi juga mencakup perbaikan standar hidup layak dan umur harapan hidup yang lebih baik.
		7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif dengan adanya stabilitas kesetaraan gender. Berikut adalah beberapa poin terkait efisiensi sumber daya dan pembangunan gender di Sumatera Selatan untuk proyeksi 2025 : 1. Peningkatan Kesetaraan Gender : IKG Sumatera Selatan mengalami perbaikan stabil, menunjukkan upaya peningkatan efisiensi pembangunan manusia berbasis gender dalam dimensi kesehatan, pendidikan dan partisipasi ekonomi. 2. Perencanaan Tenaga Kerja 2025-2029 : Pemerintah Sumatera Selatan telah membentuk Tim Penyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah yang bertujuan memotret situasi ketenagakerjaan, persediaan tenaga kerja dan partisipasi angkatan kerja, yang krusial untuk efisiensi sumber daya manusia.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Keterangan
				3. Pembangun kesetaraan gender ini berfokus pada penurunan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.
		7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Berdasarkan dokumen perencanaan dan laporan kinerja terbaru, fokus Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, yang secara langsung berkaitan dengan efisiensi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Berikut adalah poin-poin terkait efisiensi sumber daya dan IPP Sumatera Selatan 2025 : Peningkatkan IPP melalui Fokus Pembangunan Pemuda: Sumsel menekankan peningkatan kualitas sumber daya pemuda dalam lima domain IPP (pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi, dan gender/inklusi). Target IPP dalam RPJMD 2025-2029: Pembangunan pemuda menjadi bagian integral dari RPJMD Sumsel 2025-2029, di mana efisiensi penggunaan sumber daya diarahkan pada peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan memperkuat daya saing SDM. Peningkatkan Kapasitas Pemuda: Efisiensi sumber daya diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam kerangka kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.
		7.4	Prevalensi Stunting	Poin-poin utama terkait efisiensi dan capaian stunting di Sumatera Selatan yaitu : 1. Capaian Prevalensi Stunting Posisi di Bawah Nasional: Angka stunting di Sumsel tercatat berada di bawah rata-rata nasional. Secara spesifik, prevalensi stunting di Sumsel telah berhasil ditekan hingga menyentuh angka 15,9% pada akhir 2025. Penurunan Historis: Selama enam tahun terakhir, Sumsel menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari angka 31,7% di tahun 2018. Tim Percepatan Penurunan Stunting +3 2. Strategi Efisiensi Sumber Daya Efisiensi dalam penanganan stunting di Sumsel dicapai melalui beberapa strategi kunci: Kolaborasi Lintas Sektor: Keberhasilan ini didasari oleh strategi kolaborasi antara berbagai instansi, bukan hanya sektor kesehatan saja. Optimalisasi Anggaran: Meskipun terdapat tantangan berupa efisiensi atau <i>refocusing</i> anggaran di tingkat kementerian (seperti Ditjen Kesehatan Primer), Sumsel tetap fokus pada pemenuhan gizi secara berkelanjutan dan intervensi spesifik. Pemanfaatan SDM: Penguatan kapasitas SDM pengelola program gizi di tingkat kabupaten/kota melalui monitoring dan evaluasi rutin menjadi prioritas untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata pada target balita. 3. Target dan Fokus 2025 Visi "Sumsel Unggul": Penurunan stunting merupakan bagian dari visi RPJPD Sumsel 2005-2025 untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas di tahun 2025. Intervensi Pelayanan: Fokus tahun 2025 meliputi transformasi pelayanan kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat guna mencapai target nasional yang ditetapkan di angka 18,8% untuk tahun 2025.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Keterangan
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Resiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Efisiensi sumber daya dalam konteks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sumatera Selatan tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pemanfaatan potensi SDA secara optimal. Beberapa poin terkait efisiensi sumber daya dan IKLH Sumatera Selatan 2025 yaitu : Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Optimalisasi Energi, Sinergi Lingkungan Hidup. Pada Tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan efisiensi tersebut berdampak pada adanya pengurangan pagu anggaran pada beberapa program dan kegiatan, sehingga tidak seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan secara optimal. Efisiensi anggaran ini mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami penundaan, pengurangan volume kegiatan, maupun tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Selain itu, keterbatasan anggaran yang tersedia menyebabkan prioritas pelaksanaan kegiatan difokuskan pada program dan kegiatan yang bersifat utama dan mendukung pencapaian target prioritas daerah, sehingga kegiatan lainnya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya kinerja pelaksanaan kegiatan, melainkan lebih kepada adanya penyesuaian kebijakan anggaran yang harus diikuti oleh perangkat daerah. Dengan demikian, tidak tercapainya sebagian target kinerja pada Tahun 2025 merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sumatera Selatan, pemerintah daerah tersebut telah menetapkan target penurunan intensitas emisi yang diselaraskan dengan target nasional (Enhanced NDC) hingga tahun 2030. Berikut adalah perbandingan dan detail penurunan Intensitas Emisi GRK di Sumatera Selatan: • Jangka Waktu: Target penurunan emisi umumnya diukur dari tahun dasar (baseline) tertentu menuju target tahun 2030, dengan rencana aksi yang telah didorong sejak tahun 2012. • Target Penurunan: Sumatera Selatan menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 11,79% dari <i>Business As Usual</i> (BAU) hingga tahun 2030. • Sektor Utama: Penurunan intensitas emisi ini berfokus pada sektor energi, kehutanan, lahan gambut, serta pertanian. • Komitmen Energi Bersih: Dalam rencana umum energi daerah, target penurunan emisi dari sektor bauran energi adalah 23% pada tahun 2025.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Keterangan
				Target Panjang: Sejalan dengan target nasional, Sumatera Selatan berkomitmen menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sebagai catatan, sebagai provinsi dengan potensi energi yang melimpah (batubara, gas, gambut), Sumatera Selatan fokus pada mitigasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau.
		8.3	Indeks Resiko Bencana Sumsel	efisiensi sumber daya dalam penanggulangan bencana di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi fokus utama menyusul tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi. Berikut adalah ringkasan situasi indeks risiko bencana dan pengelolaan sumber daya di Sumsel untuk tahun 2025: 1. Profil Risiko Bencana Sumsel 2025 Tingkat Bencana: BPBD mencatat 284 bencana terjadi di Sumsel sepanjang tahun 2025, dengan banjir sebagai bencana paling dominan. Status Siaga: BMKG menyatakan lima kabupaten di Sumsel berstatus waspada bencana hidrometeorologi pada Oktober 2025, yang kemudian meningkat menjadi siaga banjir-longsor di beberapa daerah pada Desember 2025. Risiko Tinggi: Sumsel memiliki indeks risiko bencana yang fluktuatif, dipengaruhi oleh kerentanan dan kapasitas daerah. Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2025 mencatat bahwa penurunan indeks risiko bencana salah satunya bergantung pada peningkatan upaya keterlibatan masyarakat dan kapasitas pemerintah. 2. Efisiensi dan Pengelolaan Sumber Daya (2025) Optimalisasi Anggaran: Pendanaan penanggulangan bencana tahun 2025-2029 bertumpu pada APBN dan sumber lain yang sah, diatur dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB). Sumber Daya Manusia (SDM): Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen mengelola potensi SDM yang memadai untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan. Efisiensi Kinerja: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menekankan sinergitas dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sektor Kesehatan: Sumber Daya Kesehatan (SDK) di Sumsel disesuaikan dengan standar rawan bencana/resiko tinggi berdasarkan rencana operasi dan mitigasi. 3. Fokus 2025 Mitigasi Hidrometeorologi: Fokus pada pemantauan potensi banjir dan kekeringan (Januari–Desember 2025) untuk efisiensi respon cepat. Energi dan Lingkungan: Mengingat Sumsel adalah lumbung energi (batubara, minyak, gas), efisiensi sumber daya juga diarahkan pada penanganan dampak tambang dan reklamasi.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Keterangan
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi di Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2025 difokuskan pada peningkatan efisiensi sumber daya melalui implementasi sistem merit yang lebih substantif, digitalisasi pelayanan, dan manajemen pengeluaran yang lebih ketat. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih kapabel, berkinerja tinggi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut adalah poin-poin utama terkait efisiensi sumber daya dalam reformasi birokrasi Sumsel 2025: Implementasi Sistem Merit dan Penyederhanaan Birokrasi: Pemerintah Provinsi Sumsel menegaskan komitmen penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi sistem merit substantif, merujuk pada Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2025 yang mengubah cara pengelolaan ASN untuk lebih efisien. Efisiensi Anggaran dan Manajemen Pengeluaran: Dilakukan evaluasi rutin terhadap pengeluaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran. Terdapat upaya pengurangan biaya operasional yang tidak perlu. Strategi peningkatan pendapatan daerah juga dilakukan melalui optimalisasi aset, seperti menyewakan fasilitas milik pemerintah daerah. Digitalisasi dan Kinerja Pelayanan Publik: Pemerintah daerah ditargetkan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penguatan Akuntabilitas (Renja 2025): Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada capaian kinerja tahun 2025 yang lebih optimal. Tantangan dan Perbaikan: Berdasarkan analisis, birokrasi di Sumatera Selatan masih dihadapkan pada tantangan hierarkis dan lamban. Oleh karena itu, reformasi 2025 menekankan pada penguatan <i>reward and punishment</i> dan peningkatan inovasi untuk mengatasi inefisiensi.
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	Berikut adalah poin-poin penting terkait efisiensi sumber daya SAKIP Sumsel 2025: Optimalisasi Anggaran dan Perencanaan: Dokumen Renja 2025 menekankan penggunaan anggaran yang efektif, di mana penunjang urusan pemerintah daerah diarahkan untuk pelayanan administrasi perkantoran dengan target efisiensi tinggi. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Instansi Vertikal/Daerah): Pengadilan Tinggi Palembang 2025 menargetkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya melalui analisis LKJIP.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Keterangan
				Penguatan SAKIP/LAKIP: BPK Perwakilan Sumatera Selatan melakukan pemutakhiran informasi dan penggunaan aplikasi SiPTL untuk meningkatkan efisiensi tindak lanjut laporan pemeriksaan, yang merupakan bagian integral dari tata kelola SAKIP. Sumber Daya Manusia: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mengelola potensi SDM yang memadai dan didukung organisasi yang terstruktur untuk mengelola sumber daya alam. Secara umum, efisiensi pada 2025 di Sumatera Selatan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kinerja dengan sumber daya yang ada (memadai) guna mendukung visi Sumsel Unggul.
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Fokus Efisiensi Sumber Daya dan IKM Provinsi Sumatera Selatan yaitu : 4. Peningkatan IKM dan Layanan: pentingnya penggunaan sumber daya dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2025 untuk meningkatkan nilai kepuasan. 5. Optimalisasi Sumber Daya Aparatur : Efisiensi difokuskan pada pengelolaan anggaran, pengadaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang guna mendukung pelayanan. 6. Kinerja Pelayanan Darat : menunjukkan target efisiensi organisasi ditargetkan mencapai 85% untuk meningkatkan kepercayaan public. 7. Perencanaan Jangka Menengah (2025-2029) : Pemerintah Sumatera Selatan menekankan efisiensi dalam RPJMD 2025-2029 untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan akuntabel guna mendukung pelayan.



E. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perekembangan Ekonomi	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	100,94	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	Program Kegiatan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2025 Program Cetak Sawah (Swasembada Pangan): Program ini menjadi salah satu pilar utama untuk mendorong sektor pertanian dan menjamin ketahanan pangan. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP): Lanjutan program strategis untuk kemandirian pangan tingkat rumah tangga. Program Makan Bergizi (MBG): Implementasi program pemerintah pusat yang bersinergi dengan ekonomi lokal. Sriwijaya Economic Forum 2025 (SERU



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								Sriwijaya): Forum untuk mendorong sinergi dan inovasi, terutama dalam penguatan UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. • Akselerasi Investasi & Infrastruktur: Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan memfasilitasi kemudahan investasi untuk sektor energi, batubara, serta industri hilirisasi. • Program Magang dan Pemberdayaan SDM: Paket Ekonomi 2025 yang mencakup delapan program akselerasi, termasuk kerja sama dengan sektor industri untuk penyerapan tenaga kerja fresh graduate. Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								tetap tangguh dan mampu bertahan meskipun terdapat efisiensi anggaran, didukung oleh fondasi sektor komoditas dan pertanian yang kuat.
		1.2	Pendapatan Kapita/PDRB ADHB per	110,00	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan Pembangunan Daerah	94,29	Program Peningkatan Pendapatan per Kapita 2025 Pemerintah Provinsi Sumsel menjalankan beberapa program strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat: • Pengembangan Industri Hilirisasi: Fokus pada peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan (seperti sawit dan karet) agar tidak hanya menjual bahan mentah. • Penguatan Swasembada Pangan: Program untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian (padi dan jagung) untuk menjaga stabilitas harga dan pendapatan petani. • Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif: Mendorong UMKM untuk masuk ke ekosistem



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								digital (go-digital) guna memperluas pasar. • Peningkatan SDM dan Ketenagakerjaan: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (2025-2029) untuk memotret dan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, serta menciptakan lapangan kerja baru yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi. • Optimalisasi Akses Keuangan (TPAKD): Sumsel meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terbaik, yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan kemudahan modal bagi pelaku usaha lokal. Secara keseluruhan, pendapatan per kapita Sumsel 2025 diperkirakan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, penurunan kemiskinan yang signifikan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								(khususnya kemiskinan ekstrem), dan realisasi investasi yang kuat.
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	98,75	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	88,00	Program berfokus pada perencanaan, pengendalian Pembangunan Ekonomi Inklusif Sumatera Selatan pada pemerataan pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan dan penurunan ketimpangan melalui berbagai program strategis. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas.
		1.4	Indeks Entropi Theil	115,53	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan Pembangunan Daerah	94,29	Indeks Entropi Theil yaitu program perencanaan pengendalian dan pembangunan daerah pemerintah daerah yang berkesinambungan dan menyusun program prioritas yang berbasis data untuk memperkecil anar wilayah, sejalan dengan visi "Sumatera Selatan Unggul dan terdepan 2025".
2.	Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani	118,66	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyuluhan Pertanian	1. Pengawasan Peredaran sarana peratni terkait penyediaan sarana pengembangan tanaman padi untuk penyediaan sarana produksi benih. 2. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian dengan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani melalui pemberdayaan dan fasilitasi tenaga pendampingan	98,20	Peningkatan Nilai Tukar Petani didukung oleh program dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan 1 desa 1 penyuluh pertanian melalui Program Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) yang mampu mendukung petani didalam meningkatkan produksi pangan.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
						Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP).		
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	100	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan di Bidang teknologi dan Inovasi. - Uji coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi. - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Bersifat Inovatif. - Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil kelitbang. - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.	81,62	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilakukan untuk menunjang penelitian dan perekayasaan teknologi inovasi, penerapan inovasi melalui program yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga membantu mencapai target yang akan dilaksanakan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Inflasi Daerah	100	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	95,92	Provinsi Sumatera Selatan berharap apa yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Pusat baik baik Upaya Pengendalian Inflasi Daerah melalui TPID, maupun program Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat didukung implementasinya. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Dengan adanya program pengelolaan kebijakan dan koordinasi



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								perekonomian dapat memfasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro.
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	105,01	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. - Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	83,93	Berikut ini beberapa program kegiatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama terkait Penurunan Persentase Angka Kemiskinan : I. Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Provinsi. II. Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut : • Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia terlantar di dalam panti. • Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti. • Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti. III. Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut : • Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi. • Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. • Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota. • Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. IV. Program Penanganan Bencana dengan Kegiatan sebagai berikut : • Penyediaan Permakanan dan Sandang. • Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi. • Penanganan Khusus



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								Bagi Kelompok Rentan. • Pelayanan Dukungan Psikososial. V. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Kegiatan sebagai berikut : Pemeliharaan dan PengamananTaman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
		5.2	Gini Ratio	93,13	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	99,42	Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangkan menurunkan angka ketimpangan pendapatan yang ada di daerah melalui program dan kegiatan yang bertujuan mengurangi/menurunkan angka kemiskinan yang terjadi. Harapan kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan melalui Dinas Sosial dapat semakin menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	103,40	Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	1. Penyusunan Renana Kerja (RTK). 2. Pelaksanaan Pelatihan Kerja berdasarkan klaster kompetensi. 3. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota. 4. Penghasilan Informasi Pasar kerja. 5. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	90,53	Program Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengurangan pengangguran antara lain sebagai berikut : 1. Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk memperluas Kesempatan Kerja.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
						Provinsi		2. Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang bertujuan untuk menjadikan para peserta magang menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Tenaga kerja magang yang bekerja dengan sangat baik maka pihak perusahaan disarankan untuk merekrutnya sebagai karyawan tetap. 3. Penempatan Tenaga Kerja AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKA (Antar Kerja Antar Negara). 4. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal. 5. Pengelolaan informasi pasar kerja melalui kegiatan Job/Bursa kerja.
7.	Meningkatnya Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1	Indeks Pembangunan Manusia	103,89	Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96,64	Program dan Fokus Kegiatan IPM Sumatera Selatan 2025 : Peningkatan Kualitas Kesehatan: Fokus pada perbaikan Angka Harapan Hidup (AHH) untuk meningkatkan komponen



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								kesehatan. • Peningkatan Layanan Pendidikan: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk menaikkan rata-rata lama sekolah. • Peningkatan Daya Beli (Ekonomi): Program pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan untuk meningkatkan pengeluaran riil per kapita. • Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan: Penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui <i>jobfit</i> dan peningkatan layanan publik. • Sinergi Perencanaan: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
		7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,68	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Gender	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) PAda Lembaga Kewenangan Provinsi	81,36	Pencapaian pernyataan kinerja DPPPA Provinsi Sumatera Selatan pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								berorientasi pada penguatan pengarusutamaan gender, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan responsif gender. Program fasilitasi pengarusutamaan gender, pembinaan perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta kegiatan advokasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dukungan kebijakan daerah dan komitmen lintas sektor turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								IPG. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, variasi tingkat komitmen dan kapasitas perangkat daerah dalam penerapan pengarusutamaan gender, serta faktor eksternal yang memengaruhi capaian indikator pembentuk IPG. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya peningkatan nilai IPG sebagaimana target yang ditetapkan. Sebagai tindak lanjut, DPPPA Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyempurnaan perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan agar kontribusi terhadap pencapaian IPG pada periode berikutnya dapat lebih optimal.
		7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	74,03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.	100	Adapun program/kegiatan yang mendukung IPP yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan kegiatan penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								provinsi Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan kualitas pemuda yang bersifat multidimensi, sehingga diperlukan penguatan efektivitas program, peningkatan sinergi lintas sektor, serta penajaman intervensi pada domain IPP yang masih lemah. Hasil perbandingan ini menjadi bahan evaluasi penting dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode selanjutnya agar target IPP dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan.
		7.4	Prevalensi Stunting	80,45	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Fasilitasi dan Pendampingan Pencatatan dan Pelaporan melalui Aplikasi Surveilans Gizi dan KIA. - Pertemuan Pengukuran dan Publikasi Data Stunting. - Workshop Teknis Pemanfaatan Aplikasi Gizi dan KIA. - Rapat Koordinasi Teknis Gizi dan KIA. - Workshop Edukasi Gizi 1000 HPK. - Pertemuan Workshop Pemberian MPASI dan PMT Lokal. - Pertemuan Workshop Pemberian MPASI dan PMT Lokal.	98,43	Dalam rangka mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan 11 Program Intervensi yang difokuskan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pelaksanaan program intervensi tersebut menjadi salah satu instrumen utama dalam menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								Pada tahun 2025, pelaksanaan Program Intervensi Kementerian Kesehatan dalam pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan capaian yang secara umum baik dan progresif , dengan sebagian besar indikator berhasil mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan , meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan penguatan lebih lanjut.
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Resiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	104,40	Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	85,39	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai. Capaian Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui Sumber APBD.
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	369,52	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. - Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. - Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK Pencegahan Persentase terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - Persentase terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	86,18	Program Penurunan Intesitas Emisi GRK dengan Programpengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pencegahan kerusakan lingkungan ini dengan begitu peningkatan penurunan intesitas Emsi GRK akan mengalami tren positif.
		8.3	Indeks Resiko Bencana Sumsel	97,31	Program Penanggulangan Bencana	- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi. - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. - Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana. - Penataan Sistem Penanggulangan Bencana.	100	Berdasarkan hasil pencarian, berikut adalah informasi terkait program, kegiatan, dan kondisi kebencanaan di Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2025 yang melibatkan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan mitra relawan:



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								1. Fokus Kegiatan Kebencanaan Sumsel 2025 • Dominasi Bencana Banjir: Sepanjang 2025, BPBD mencatat ratusan kejadian bencana di Sumsel, dengan banjir menjadi jenis bencana terbanyak. • Kolaborasi Kesiapsiagaan: PLN UID S2JB melakukan kolaborasi dengan BPBD Sumsel di awal 2025 untuk memperkuat kesiapsiagaan darurat bencana. • Pengurangan Risiko Bencana (PRB): Fokus pada pemetaan dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) yang



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								kolaboratif. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025: Kegiatan nasional yang didukung di tingkat daerah, termasuk sosialisasi kesiapsiagaan dan sekolah aman bencana. 2. Program Utama (Konteks Rencana Aksi 2025) Penyusunan dan Pemutakhiran IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia): IRBI digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Pada 2025, dilakukan rapat koordinasi (contoh: di



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								BPBD Kota Palembang) untuk membahas hasil IRBI. • Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025: Dperingati pada 26 April, difokuskan pada latihan evakuasi mandiri. • Penguatan Relawan: Melibatkan ikatan relawan/mahasiswa dalam penanganan bencana (respons solidaritas). 3. Mitigasi dan Antisipasi • Penanganan Darurat: Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas (Satgas) untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor, yang operasionalnya didukung anggaran APBD.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
								Modifikasi Cuaca: Upaya ini dilakukan untuk mengatasi cuaca ekstrem yang memicu bencana. Secara umum, kegiatan IRBI di Sumsel pada 2025 mengarah pada pembaruan data kajian risiko untuk menentukan tingkat ancaman bencana, serta memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	107,70	Program Penataan Organisasi	Kegiatan Tatalaksana Pemerintahan	92,65	Program/kegiatan yang membantu keberhasilan dari kegiatan Indeks RB yaitu kegiatan tatalaksana pemerintahan yang mana selalu mengadakan asistensi secara berkala,serta sosialisasi kepada Perangkat Daerah.
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	94,64	Program Penataan Organisasi	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	89,54	Program/ kegiatan yang membantu Nilai Sakip mengikuti tren posisi dengan selalu diadakan monev SAKIP serta asistensi kepada seluruh Perangkat Daerah tentang mekanisme SAKIP



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Penjelasan
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,96	Program Penataan Organisasi	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik	95,07	Program /kegiatan yang membuat nilai IKM meningkat adanya asistensi Perangkat Daerah, ketepatan pada waktu mengumpul data dan supporting dari Perangkat Daerah.



Tabel Pencapaian Kinerja Sesudah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Kriteria
				Satuan	Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54	0,52	96,30	Sangat Tinggi
		1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,4	74,76	100,48	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	2.1	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	%	14,8	15,90	92,57	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	3.1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.465	0,479	103,01	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah	4.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30-5,50	5,35	100,94	Sangat Tinggi
		4.2	PDRB per Kapita	Rp (Juta)	79,90	81,50	102,00	Sangat Tinggi
		4.3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,48	3,53	101,44	Sangat Tinggi
5.	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	5.1	Tingkat Inflasi	%	1,5-3,5	2,91	100	Sangat Tinggi
6.	Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air	6.1	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,22	N/a	-	Nilai Belum Dikeluarkan Pusat
		6.2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	20,19	19,14	94,80	Sangat Tinggi
7.	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan	7.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,19	75,15	110,21	Sangat Tinggi
		7.2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	69,97	69,29	99,03	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi dan Air	8.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,52	79,31	102,31	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya Pengelolaan Bencana	9.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	130,41	139,67	107,10	Sangat Tinggi



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025				Kriteria
				Satuan	Target	Realisasi	%	
10.	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,37-10,37	9,85	105,01	Sangat Tinggi
		10.2	Rasio Gini	Indeks	0,316-0,320	0,298	93,13	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	11.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93	3,69	103,40	Sangat Tinggi
12.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	12.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (75-76)	74,58	99,44	Sangat Tinggi

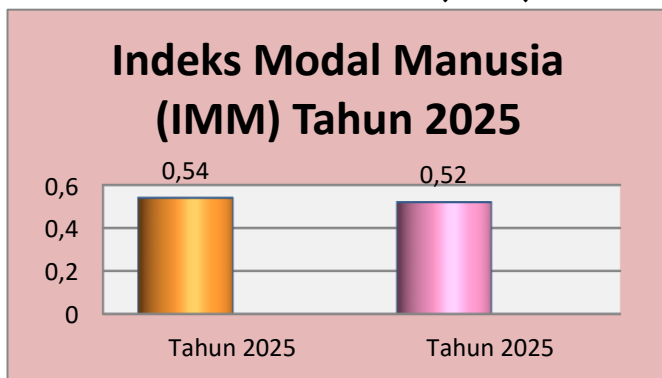
Tabel Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diatas merupakan capaian indikator sesudah perubahan pada periode pertama berdasarkan RPJMD Tahun 2025 s.d 2029 yang merupakan masa transisi dari perubahan RPD 2024 s.d 2026 ke RPJMD terbaru yang telah disahkan pada oktober tahun 2025. Ada sebagian dari indikator Kinerja mengalami perubahan, penyesuaian serta nilai Indikator tersebut. Indikator kinerja tersebut sebagian sudah di jelaskan pada TW I s.d TW III yang mempunyai indikator sama dengan TW IV.

MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia ada 2 indikator adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54	0,52	96,30
2.	Ineks Pembangunan Manuasia (IPM)	Indeks	74,4	74,76	100,48

1. Indeks Modal Manusia (IMM)



Grafik 1.1 Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia (IMM) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,54 dengan realisasi 0,52 atau sebesar (96,30). Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) adalah alat ukur yang diluncurkan oleh Bank Dunia untuk mengukur kontribusi kesehatan

dan pendidikan terhadap produktivitas generasi pekerja mendatang. HCI menilai potensi ekonomi dengan melihat probabilitas hidup, kualitas pendidikan, dan kesehatan (termasuk *stunting*) di suatu negara.

Perbandingan Indeks Modal Manusia (IMM) dari tahun 2023 s.d 2025 mengalami tren peningkatan positif, arah investasi manusia Sumatera Selatan ditargetkan memiliki kualitas penduduk yang merata baik dalam pendidikan, kesehatan, sikap dan etos kerja hingga kreativitas dan penguasaan teknologi. Indeks Modal Manusia (HCI) sumsel diharapkan bisa meningkat menjadi 0,73 pada tahun 2045.

Perbandingan Indeks Modal Manusia (IMM) dengan target jangka menengah yaitu 0,57 target 2025 belum mencapai target jangka menengah karena masih banyak mentata ulang dalam berbagai sub sektor bisa. Berikut adalah detail penting mengenai Indeks Modal Manusia:

Tujuan utama: Mengukur potensi ekonomi dan profesional warga negara serta mendorong investasi pada manusia untuk pertumbuhan ekonomi.

Komponen Pengukuran:

1. **Bertahan hidup:** Probabilitas anak bertahan hidup hingga usia 5 tahun.
2. **Sekolah:** Jumlah tahun sekolah yang diharapkan dan kualitas pembelajaran (tes yang diselaraskan).
3. **Kesehatan:** Tingkat kelangsungan hidup orang dewasa dan pencegahan *stunting* pada anak.

4. **Skala** : Indeks berkisar antara 0 hingga 1, dimana skor 1 berarti potensi maksimum (kesehatan dan pendidikan penuh) telah tercapai.

Pentingnya Indeks: HCI membantu negara menilai berapa banyak pendapatan yang hilang karena kurangnya investasi di bidang kesehatan dan pendidikan.

- **Konteks Indonesia:** Skor HCI Indonesia pada 2020 adalah 0,54, artinya anak yang lahir saat itu hanya akan mencapai 54% dari produktivitas maksimalnya dibandingkan jika mereka mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang lengkap.
- **Perbedaan dari IPM:** Indeks Modal Manusia (HCI) lebih fokus pada produktivitas masa depan (generasi mendatang), sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) mengukur pencapaian rata-rata.

Secara ringkas, HCI adalah kompas bagi pemerintah untuk berinvestasi lebih baik dalam kualitas kesehatan dan pendidikan guna meningkatkan daya saing bangsa. Adapun penyebab belum mencapai target IMM yaitu bisa dilihat poin penting dan tren apa yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

Poin Penting dan Tren Tahunan HCI:

- **Komponen Utama:** HCI mencakup kelangsungan hidup (survival), kualitas/kuantitas pendidikan, dan kesehatan (seperti isu *stunting*).
- **Tujuan:** Mengukur berapa banyak modal manusia yang hilang akibat intervensi kesehatan dan pendidikan yang kurang maksimal.
- **Tren Indonesia:**
 - **2018:** HCI Indonesia berada di skor 0,53, peringkat 87 dari 157 negara.
 - **2020:** HCI Indonesia meningkat menjadi 0,54, namun peringkat turun ke 96 dari 174 negara.
 - **2022/2024:** Skor stabil di 0,54, menunjukkan potensi produktivitas tenaga kerja baru mencapai setengah dari kapasitas ideal.
- **Posisi ASEAN:** Indonesia masih di bawah Vietnam, Malaysia, dan Thailand



dalam peringkat HCI.

- **Pentingnya HCI:** HCI digunakan negara untuk mengidentifikasi kesenjangan sumber daya manusia (SDM) dan merancang program peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

Solusi alternatif yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai target IMM yaitu dengan Meningkatkan kualitas hidup, produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk bisa bersaing dengan dunia luar.

Efisiensi penggunaan sumber daya sangat krusial untuk Indeks Modal Manusia (IMM). Alokasi sumber daya yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan dan menghambat pertumbuhan, sementara efisiensi yang baik memicu inovasi, produktivitas, dan peningkatan daya saing.

- **Pentingnya Efisiensi:**
 - **Alokasi Sumber Daya:** Efisiensi berarti menggunakan sumber daya (tenaga kerja, modal, teknologi, dll) dengan cara yang paling optimal untuk menghasilkan output maksimum.
 - **Pemborosan:** Alokasi sumber daya yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan, yang berarti sumber daya digunakan tanpa menghasilkan output yang memadai.
 - **Pertumbuhan Ekonomi:** Efisiensi yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit untuk menghasilkan lebih banyak.
- **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi:**
 - **Infrastruktur:** Infrastruktur yang baik (transportasi, energi, telekomunikasi) sangat penting untuk efisiensi karena memfasilitasi mobilitas sumber daya dan aktivitas ekonomi.
 - **Kualitas Sumber Daya Manusia:** Tenaga kerja yang terampil dan produktif adalah kunci untuk efisiensi, karena mereka dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik.
 - **Inovasi dan Teknologi:** Inovasi dan adopsi teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya.



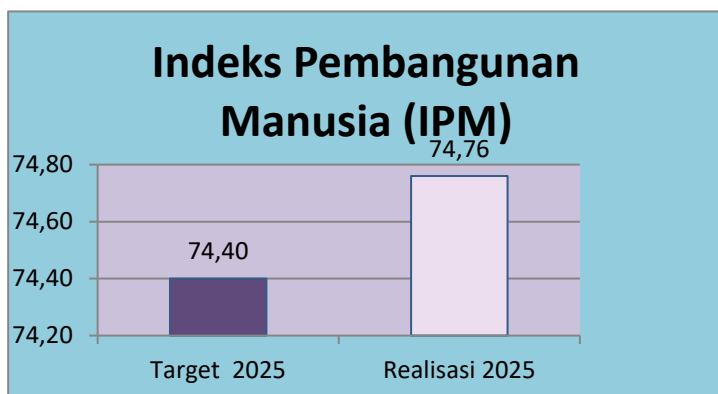
- **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah yang mendukung efisiensi (misalnya, deregulasi, pengurangan pajak, investasi infrastruktur) dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi efisiensi dan pertumbuhan Indeks Modal Manusia (IMM).

Salah satu cara utama Sumatera Selatan (Sumsel) meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025 adalah dengan memprioritaskan anggaran belanja daerah pada sektor kesehatan dan pendidikan. Berikut adalah rincian strategi peningkatannya:

- **Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kerja:** Pemprov Sumsel menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (2025-2029) yang fokus pada penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja.
- **Optimalisasi Layanan Kesehatan:** Melalui peningkatan indikator kesehatan seperti angka harapan hidup (yang mencapai 76,26 tahun di Palembang).
- **Program "GENIUS" (Generasi Emas Tahun 2045):** Pj Gubernur Sumsel meluncurkan program GENIUS untuk mendukung peningkatan kualitas SDM secara terintegrasi.
- **Fokus pada Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi:** Melalui peluncuran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sanitasi pada tahun 2025 untuk meningkatkan taraf hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Grafik 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 ditargetkan 74,4 terealisasi sebesar 74,76 (100,48). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

mencapai 74,76, meningkat 0,92 poin atau 1,25% dibanding tahun

sebelumnya yang sebesar 73,84. Selama 2020 – 2025, IPM Provinsi Sumatera Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,86% per tahun. Pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan.

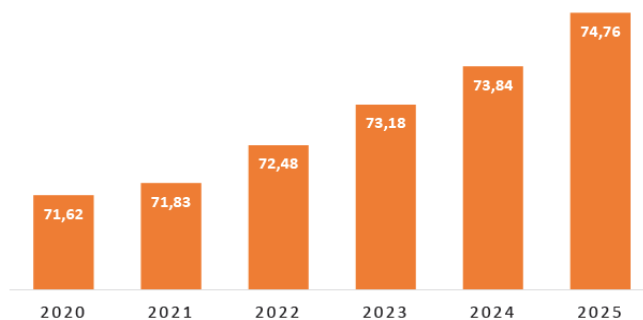
Pembangunan

Manusia di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan.

Selama 2020-2025, IPM Sumatera Selatan rata-rata

meningkat sebesar 0,8% per

tahun, dari 71,62 pada 2020 menjadi 74,76 pada 2025, bisa dilihat pada grafik disamping.



Grafik 1.3 Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2025

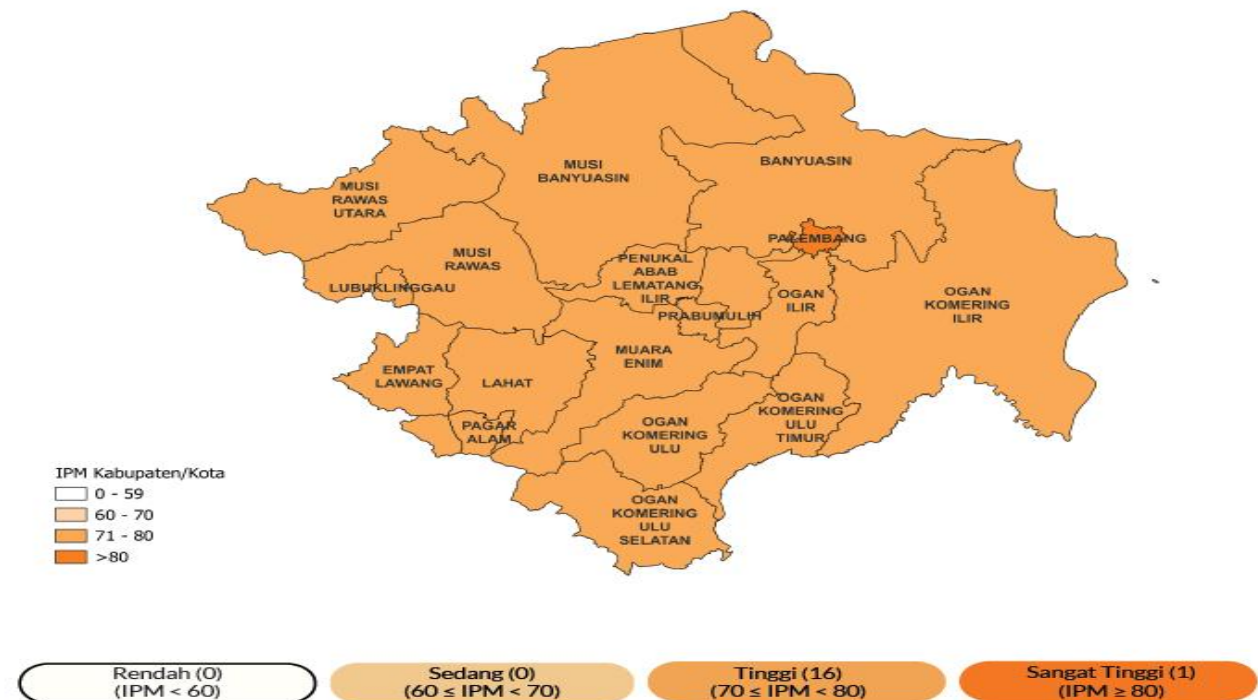
Peningkatan IPM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya. Seluruh indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 3,34%, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 3,97%, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,08%, dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 0,43%. Perkembangan dimensi penyusun IPM selama 2020–2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Dimensi Penyusunannya 2020 – 2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	73,39	73,47	73,76	74,04	74,26	74,58
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,45	12,54	12,55	12,63	12,64	12,65
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,24	8,30	8,37	8,50	8,57	8,91
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	10.652	10.662	11.109	11.472	12.015	12.416

Pada tahun 2025, status pembangunan manusia di Kabupaten Empat Lawang dan Penukal Abab Lematang Ilir meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi” dengan capaian IPM masing-masing sebesar 70,56 dan 70,55. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, maka 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sedangkan Kota Palembang sebagai ibukota provinsi Sumatera Selatan memiliki status pembangunan manusia “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).



Gambar 5 IPM Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2025

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 74,76 dengan target RPJMD sebesar 76,58 perbandingan hanya 1,82 berharap Provinsi Sumatera Selatan akan menunjukkan tren positif dan terus mendekati atau melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Secara umum, Sumatera Selatan berhasil melampaui target tahunan dan bergerak menuju target jangka panjang 2025 dengan peningkatan kualitas hidup manusia yang merata pada seluruh dimensinya



Tabel. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan Menurut
Komponen Pembentuk dan Kabupaten/Kota, 2023-2025

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup saat Lahir* (tahun)			Harapan Lama Sekolah (tahun)			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ogan Komering Ulu	73,44	73,59	73,97	12,99	13,00	13,01	8,85	8,86	9,07
Ogan Komering Ilir	74,09	74,23	74,47	11,97	11,98	11,99	7,08	7,19	7,49
Muara Enim	74,29	74,49	74,82	12,01	12,02	12,03	8,14	8,27	8,45
Lahat	73,36	73,58	73,93	12,44	12,45	12,46	8,56	8,69	9,03
Musi Rawas	73,96	74,16	74,45	12,22	12,23	12,43	7,56	7,57	7,61
Musi Banyuasin	74,22	74,42	74,72	12,31	12,33	12,34	7,68	7,95	8,29
Banyu Asin	74,29	74,47	74,73	12,09	12,34	12,54	7,46	7,48	7,65
Ogan Komering Ulu Selatan	73,21	73,44	73,74	11,79	11,82	12,02	8,05	8,25	8,48
Ogan Komering Ulu Timur	74,31	74,51	74,80	12,47	12,49	12,66	8,07	8,08	8,13
Ogan Ilir	73,20	73,43	73,78	12,41	12,42	12,43	8,08	8,09	8,16
Empat Lawang	70,81	70,93	71,14	12,10	12,11	12,12	7,66	7,68	8,02
Penukal Abab Lematang Ilir	73,84	74,02	74,33	12,49	12,50	12,69	7,08	7,27	7,42
Musi Rawas Utara	73,01	73,17	73,46	11,70	11,90	12,07	7,50	7,51	7,80
Kota Palembang	75,37	75,77	76,26	14,45	14,46	14,47	10,92	10,93	11,25
Kota Prabumulih	74,58	74,87	75,33	13,31	13,41	13,42	10,35	10,36	10,37
Kota Pagar Alam	73,61	73,88	74,18	13,49	13,50	13,51	9,43	9,44	9,78
Kota Lubuklinggau	74,67	74,97	75,46	13,55	13,69	13,88	9,93	9,94	10,15
Sumatera Selatan	74,04	74,26	74,58	12,63	12,64	12,65	8,50	8,57	8,91

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah)			IPM		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Ogan Komering Ulu	10.859	11.339	11.700	73,17	73,70	74,47
Ogan Komering Ilir	11.736	12.305	12.547	70,80	71,48	72,20
Muara Enim	11.683	12.291	12.646	72,33	73,10	73,77
Lahat	10.811	11.255	11.620	72,15	72,83	73,75
Musi Rawas	10.429	11.058	11.407	70,52	71,21	71,92
Musi Banyuasin	10.862	11.424	11.790	71,30	72,27	73,17
Banyu Asin	10.731	11.277	11.638	70,67	71,55	72,42
Ogan Komering Ulu Selatan	9.176	9.680	10.010	69,05	70,00	70,98
Ogan Komering Ulu Timur	12.046	12.623	13.154	73,05	73,64	74,42
Ogan Ilir	11.456	12.093	12.445	72,01	72,67	73,21
Empat Lawang	10.375	10.889	11.315	69,07	69,63	70,56
Penukal Abab Lematang Ilir	9.139	9.604	9.965	68,78	69,63	70,55
Musi Rawas Utara	10.631	11.198	11.460	69,63	70,45	71,39
Kota Palembang	15.592	16.150	16.725	81,72	82,29	83,27
Kota Prabumulih	13.494	13.982	14.342	78,07	78,68	79,17
Kota Pagar Alam	9.683	10.245	10.610	73,25	74,00	74,92
Kota Lubuklinggau	14.211	14.672	15.090	78,36	78,98	79,94
Sumatera Selatan	11.472	12.015	12.416	73,18	73,84	74,76



Efisiensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2025 memiliki arti strategis yang krusial untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas hidup manusia (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup) tercapai dengan alokasi sumber daya yang optimal.

Berdasarkan data terkini, IPM Sumsel menunjukkan peningkatan signifikan, menjadi **74,76** pada tahun 2025, naik 0,92 poin (1,25 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai Efisiensi Sumber Daya IPM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025:

- **Peningkatan Efisiensi Pembangunan:** Efisiensi IPM penting untuk memastikan anggaran daerah yang terbatas dapat menghasilkan dampak maksimal pada kesehatan (harapan hidup), pengetahuan (pendidikan), dan pengeluaran riil per kapita.
- **Target "Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan 2025":** Efisiensi IPM menjadi salah satu alat ukur utama dalam mewujudkan visi pembangunan Sumsel tahun 2005-2025, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kapasitas manajemen pemerintahan.
- **Penurunan Angka Kemiskinan:** Peningkatan IPM yang efisien berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan, yang tercatat berhasil turun ke level satu digit (9,85 persen) per Februari 2026.
- **Pendorong Pertumbuhan Ekonomi:** IPM yang tinggi mencerminkan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
- **Kualitas Hidup Berkelanjutan:** Peningkatan IPM Sumsel pada 2025 tidak hanya dari sisi angka, tetapi juga mencakup perbaikan standar hidup layak dan umur harapan hidup yang lebih baik.

Data Pendukung IPM Sumsel 2025:

IPM Sumsel 2025: 74,76 (naik dari 73,84 pada 2024).

IPM Kota Palembang 2025: 83,27 (Kategori Sangat Tinggi).



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru (2024-2025), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan

peningkatan yang konsisten, namun masih berada di bawah angka rata-rata nasional. IPM Sumsel masuk dalam kategori "**Tinggi**" (70-80), namun secara nasional Indonesia sudah mencapai kategori "Tinggi" dengan poin yang lebih tinggi.

Berikut adalah perbandingan IPM Sumsel dan Standar Nasional:

Perbandingan Angka IPM (terbaru)

PM Nasional 2025: Mencapai **75,90**.

IPM Sumsel 2025: Mencapai **74,76** (tumbuh 1,25%).

Selisih: IPM Sumsel masih lebih rendah sekitar **1,14 poin** di bawah rata-rata nasional pada tahun 2025.

Analisi Dimensi Pembangunan

Walaupun di bawah nasional, pertumbuhan IPM Sumatera Selatan menunjukkan percepatan, terutama dibidang standar hidup layak (pengeluaran per kapita).

Poin Kunci Perbandingan

- **Kategori:** Keduanya masuk dalam kategori "Tinggi" (skor 70–79,9), namun Sumsel berada di kelompok bawah-menengah kategori Tinggi, sementara Nasional (didongkrak provinsi seperti DKI Jakarta/Yogyakarta) berada di kelompok atas.
- **Tren:** Pertumbuhan IPM Sumsel tergolong cepat, menunjukkan upaya mengejar ketertinggalan dengan standar nasional.
- **Disparitas Internal:** IPM Sumsel di bawah nasional dipengaruhi oleh perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan (misal: Palembang dengan IPM di atas 80-83 kategori sangat tinggi) dan beberapa wilayah kabupaten lain.



Efisiensi dalam IPM memastikan bahwa pertumbuhan IPM yang diraih benar-benar mencerminkan peningkatan nyata pada kualitas hidup penduduk, bukan sekadar angka administratif, sekaligus mendukung visi Sumsel sebagai salah satu penggerak ekonomi regional.

Berikut adalah factor-faktor pendukung peningkatan IPM Sumatera Sleatan 2025 :

- **Dimensi Kesehatan (Umur Panjang dan Hidup Sehat):** Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan kenaikan Angka Harapan Hidup (UHH). Ini didukung oleh program seperti Sumsel BERKAT untuk mempermudah akses layanan kesehatan dengan KTP.
- **Dimensi Pengetahuan (Pendidikan):** Adanya peningkatan pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
- **Dimensi Standar Hidup Layak (Ekonomi):** Peningkatan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan, menunjukkan daya beli dan ekonomi masyarakat yang membaik.
- **Program Pembangunan Pemerintah:** Fokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta komitmen dalam RPJPD Sumatera Selatan 2005-2025 untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas.
- **Penurunan Pengangguran:** Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan pada tahun 2025.

Pertumbuhan positif ini menunjukkan keberhasilan komprehensif pada seluruh indikator pembentuk IPM di Sumatera Selatan. IPM Sumatera Selatan tahun 2025 tercatat mencapai 74,76 (kategori Tinggi), tumbuh 1,25% dari 2024, didukung perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Faktor utamanya adalah peningkatan Angka Harapan Hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, serta program inisiatif Pemprov seperti optimalisasi layanan kesehatan dan infrastruktur.

Program dan Fokus Kegiatan IPM Sumatera Selatan 2025 :

- **Peningkatan Kualitas Kesehatan:** Fokus pada perbaikan Angka Harapan Hidup (AHH) untuk meningkatkan komponen kesehatan.
- **Peningkatan Layanan Pendidikan:** Peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk menaikkan rata-rata lama sekolah.
- **Peningkatan Daya Beli (Ekonomi):** Program pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan untuk meningkatkan pengeluaran riil per kapita.
- **Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan:** Penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jobfit dan peningkatan layanan publik.
- **Sinergi Perencanaan:** Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan ada 1 indikator adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
2.1	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	%	14,8	15,90	92,57

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat pendek) pada Balita (%)



Grafik 1.4 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)

Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) di Sumatera Selatan tercatat sebesar 15,90% atau setara 117.905 balita. Tren Penurunan : Mengalami tren positi dari 24,8% (2021) menjadi 18,6% (2022) dan 15,90%. Kinerja Sumatera Selatan diakui salah satu daerah dengan

penurunan stunting tertinggi kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan, perkembangan kognitif, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menempatkan penanganan stunting sebagai bagian integral dari pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas generasi masa depan.

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif, produktivitas, serta daya saing generasi mendatang. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting merupakan isu strategis yang membutuhkan intervensi terintegrasi, berkelanjutan, dan lintas sektor.

Sejalan dengan Visi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Sumatera Selatan Maju untuk Semua, visi ini mekankan pada kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Gubernur berkomitmen untuk menjadikan provinsi ini sebagai daerah yang berdaya saing, modern dan adil dengan memanfaatkan pengetahuan dan inovasi yang



berakar pada budaya lokal dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Upaya penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam pembangunan bidang kesehatan. Hal ini tercermin dalam Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada mewujudkan masyarakat yang berkualitas yaitu fokus pada peningkatan kesehatan, pendidikan dan ketrampilan sumber daya manusia agar lebih produktif dan berakhlak.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, penurunan prevalensi stunting telah ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama pembangunan kesehatan. Target tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional percepatan penurunan stunting melalui pendekatan promotif dan preventif, didukung intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara konvergen hingga tingkat desa dan keluarga. Dalam RPJMD tersebut ditargetkan prevalensi stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) sebesar 14,9% pada tahun 2025 dibandingkan target jangka menengah 2029 sebesar 11,3% Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perfoma yang sangat positif dalam menekan angka stunting.

Dalam mendukung pencapaian target RPJMD tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran strategis dengan tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang indikator kinerja nya adalah Prevalensi Stunting, dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan universal indikator kinerja yang mendukung yaitu Angka Kematian Ibu yang diukur melalui indikator kinerja kunci antara lain Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Persentase Lanjut Usia Mandiri, Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemantaun ibu hamil KEK, Persentase Kabupaten/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri, Persentase Kabupaten/Kota Yang melaksanakan skrining kesehatan pada calon pengantin, Persentase Kabupaten/Kota Yang melaksanakan ANC 6 kali (K6), Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan, Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan



Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar, Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan KB Pasca Persalinan.

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan Balita, Persentase kabupaten/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan Persentase Kabupaten/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi Suplementasi Gizi pada Ibu hamil. Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur utama efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan stunting.

Pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, khususnya melalui kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan status gizi masyarakat, penguatan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga berperan dalam penguatan sistem surveilans gizi dan pemanfaatan data e-PPGBM sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Upaya tersebut didukung dengan intervensi sensitif yang dilaksanakan bersama perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya, antara lain melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, perbaikan pola asuh, penguatan edukasi gizi masyarakat, serta percepatan penurunan kemiskinan.

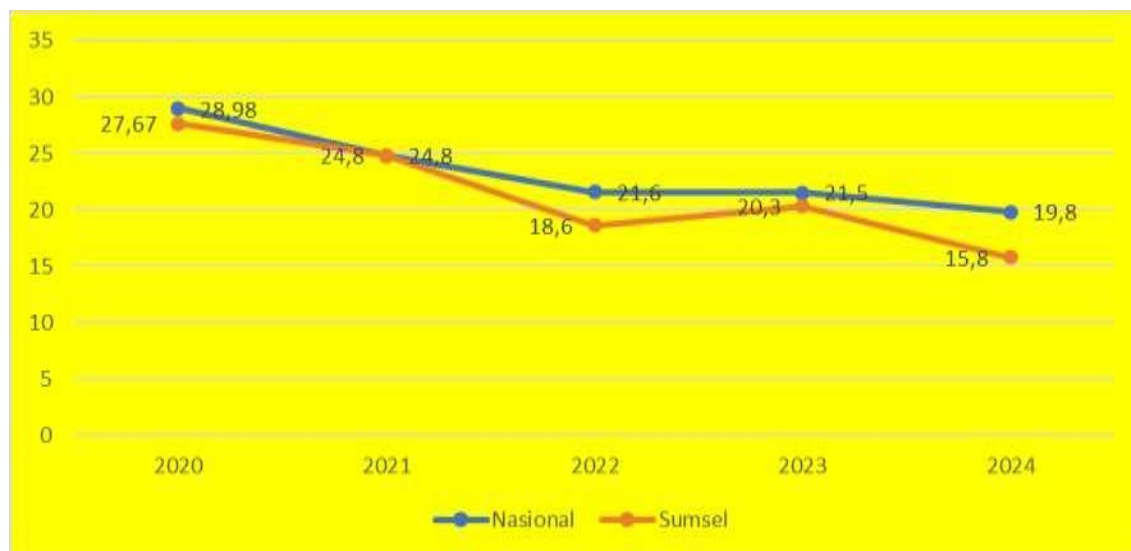
Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan selaras dengan target RPJMD Tahun 2025, diharapkan prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Selatan dapat terus menurun secara signifikan. Capaian ini menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan produktif sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja program dan kegiatan tersebut secara langsung berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mencapai target indikator kinerja tahunan merupakan bagian integral dari pencapaian

target RPJMD Tahun 2025 dan menjadi wujud akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berikut grafik capaian Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir (berdasarkan data survei : SSGBI, SKI, SSGI).

Grafik. Tren Prevalensi Stunting Sumsel dan Nasional 2020 – 2024



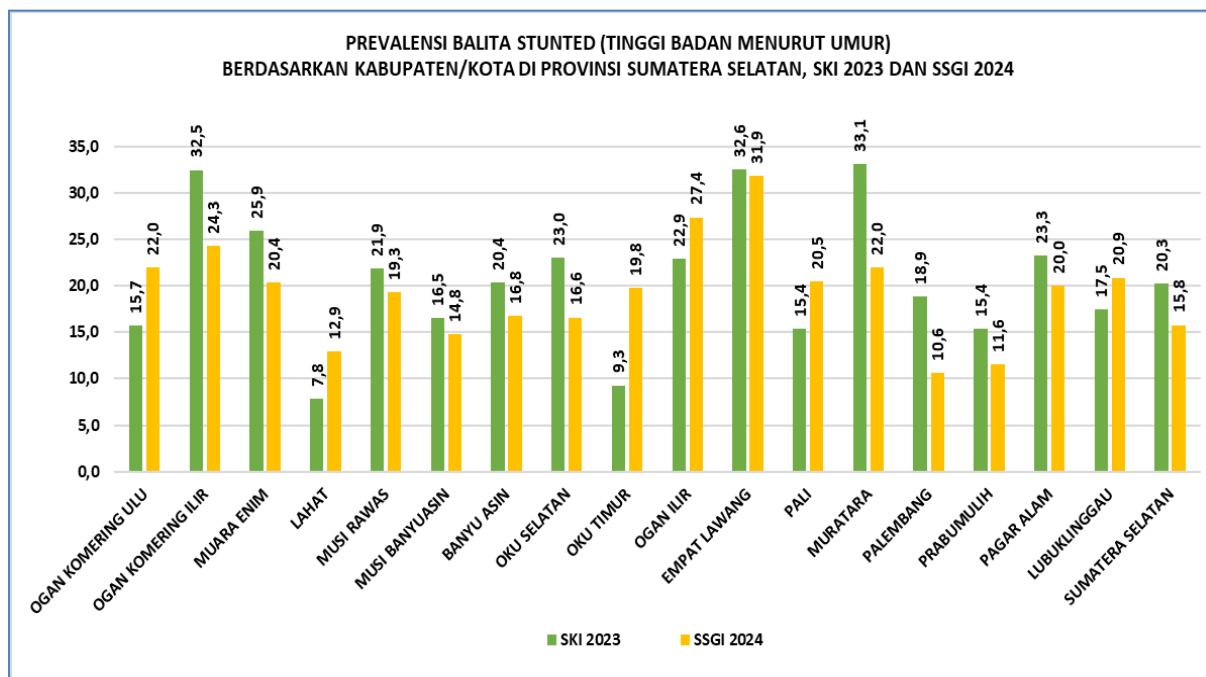
Sumber : SSGBI 2021-2022, SKI Tahun 2023, SSGI Tahun 2024

Berdasarkan hasil Survei Nasional Prevalensi Stunting 2025 dengan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perfoma yang lebih baik (lebih rendah) dibandingkan dengan rata-rata nasional. Berikut adalah perbandingannya :

- **Prevalensi Stunting Sumatera Selatan 2025:** Tercatat sebesar 15,9%. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dan menempatkan Sumsel sebagai salah satu provinsi dengan penurunan stunting terbaik di Indonesia.
- **Target Nasional 2025:** Pemerintah menetapkan target penurunan stunting nasional sebesar 18,8% untuk tahun 2025.
- **Status Realisasi Nasional (Data 2024):** Secara nasional, prevalensi stunting berada di angka 19,8% (berdasarkan data akhir 2024 yang dirilis Kemenkes), yang berarti angka di Sumatera Selatan saat ini sudah berada di bawah rata-rata nasional.

Sumatera Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Terbaik II Nasional dalam Percepatan Penurunan **Prevalensi Stunting** Karena mampu menekan angka tersebut secara signifikan dibawah rata-rata nasional.

Grafik. Tren Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan 2024



Batas maksimal toleransi angka stunting WHO yaitu 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh. Rata-rata angka stunting Indonesia adalah 19.8%, Rata-rata Stunting di Provinsi Sumatera Selatan 15.9%. Terdapat 13 Kabupaten/kota yang prevalensi stunting nya di atas capaian provinsi yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Rawas, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam dan Lubuk Linggau. Prevalensi Balita Stunting yang dibawah capaian Sumatera Selatan, ada 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lahat (12,9%), Kabupaten Musi Banyuasin (14,8%), Kota Palembang (10,6%) dan Kota Prabumulih (11,6%). Pada tabel dibawah ini ada tabel keterangan Prevalensi Balita Stunted) Tinggi Badan Menurut Umur tahun 2023 s.d 2025.



**Tabel. Prevalensi Balita Stunted (Tinggi Badan Menurut Umur)
Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan
e-PPGBM 2023 s.d 2025**

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi Stunting 2023	Prevalensi Stunting 2024	Rerata Prevalensi Stunting 2025
1	OKU	2,2	1,7	1,7
2	OKI	0,8	0,7	0,5
3	MUARA ENIM	2,1	1,2	1,1
4	LAHAT	1,8	1,5	1,9
5	MUSI RAWAS	5,1	5,0	5,4
6	MUSI BANYUASIN	0,9	0,9	0,7
7	BANYU ASIN	2,8	1,5	1,0
8	OKU SELATAN	2,0	2,0	1,2
9	OKU TIMUR	0,3	0,2	0,1
10	OGAN ILIR	3,1	2,0	1,7
11	EMPAT LAWANG	0,8	0,8	1,0
12	PALI	0,5	0,5	1,1
13	MURATARA	3,0	2,5	3,0
14	PALEMBANG	0,5	0,3	0,2
15	PRABUMULIH	0,6	0,4	0,4
16	PAGAR ALAM	1,3	0,9	0,9
17	LUBUKLINGGAU	1,5	1,1	0,8
	SUMSEL	1,5	1,2	1,0

Sumber Data : Eppgbm Tahun 2023, 2024 dan 2025

Berdasarkan data e-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) untuk Provinsi Sumatera Selatan periode 2023 hingga 2025, berikut adalah analisis naratif mengenai prevalensi balita stunted (pendek):



1. Tren Keseluruhan Provinsi (Sumatera Selatan)

Secara umum, Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan performa yang sangat positif dalam menekan angka stunting. Prevalensi rata-rata provinsi terus mengalami penurunan yang konsisten, yakni dari 1,5% (2023) menjadi 1,2% (2024), dan mencapai angka 1,0% pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi gizi dan program kesehatan di tingkat provinsi berjalan efektif secara kolektif.

2. Daerah dengan Performa Terbaik (Prevalensi Terendah)

Beberapa wilayah berhasil mencatatkan angka stunting yang sangat rendah, jauh di bawah rata-rata provinsi:

- OKU Timur: Menjadi daerah dengan angka terendah secara konsisten, bahkan menyentuh angka 0,1% di tahun 2025 dari angka 0,3% di tahun 2023.
- Kota Palembang: Sebagai ibu kota provinsi, Palembang menunjukkan progres luar biasa dengan menekan angka stunting hingga 0,2% pada tahun 2025.
- Kota Prabumulih: Berhasil menjaga stabilitas di angka rendah, yaitu 0,4% dalam dua tahun terakhir.

3. Wilayah dengan Penurunan Signifikan

Ada beberapa kabupaten yang menunjukkan komitmen tinggi dengan penurunan angka yang cukup tajam:

- Banyuasin: Mencatatkan salah satu penurunan paling drastis, dari 2,8% (2023) turun menjadi 1,0% (2025).
- Muara Enim: Berhasil memangkas angka stunting hampir separuhnya, dari 2,1% ke 1,1% dalam kurun waktu tiga tahun.
- Ogan Ilir: Menunjukkan tren penurunan yang stabil dari 3,1% menjadi 1,7%.

4. Wilayah yang Memerlukan Perhatian Khusus (Anomali & Tantangan)

Meskipun tren provinsi menurun, terdapat beberapa wilayah yang justru mengalami stagnasi atau kenaikan:

- Musi Rawas: Memiliki prevalensi tertinggi di Sumatera Selatan dan cenderung mengalami kenaikan dari 5,1% (2023) menjadi 5,4% (2025).



Wilayah ini membutuhkan evaluasi mendalam terkait intervensi gizi di lapangan.

- Muratara: Angka stunting di wilayah ini fluktuatif dan kembali ke angka 3,0% pada tahun 2025 setelah sempat turun di tahun sebelumnya.
- PALI: Menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, di mana prevalensi melonjak dua kali lipat dari 0,5% menjadi 1,1% pada tahun 2025.
- Lahat: Sempat turun di 2024 (1,5%), namun naik kembali menjadi 1,9% di 2025

Data e-PPGBM 2023-2025 menggambarkan bahwa Sumatera Selatan berada di jalur yang tepat dalam penanganan stunting dengan mayoritas daerah (13 dari 17 kabupaten/kota) berhasil menekan angka prevalensi. Namun, Musi Rawas, Muratara, dan PALI menjadi catatan penting yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah agar ketimpangan capaian antar wilayah tidak semakin melebar.

Faktor-Faktor Penghambat Penurunan Prevalensi Stunting pada Balita

Faktor-faktor yang menghambat percepatan penurunan prevalensi stunting pada balita di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Status Gizi Ibu dan Anak

Masih ditemukannya ibu hamil dengan risiko kekurangan energi kronis (KEK) dan anemia berdampak pada berat badan lahir rendah serta meningkatkan risiko stunting pada balita. Selain itu, praktik pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI yang belum sesuai standar gizi masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah.

2. Keterbatasan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di daerah terpencil, perairan, dan wilayah dengan keterbatasan transportasi, masih belum merata. Keterbatasan tenaga kesehatan, sarana



prasarana, serta kesinambungan pelayanan juga memengaruhi efektivitas intervensi pencegahan stunting.

3. Kunjungan Ibu Hamil Untuk ANC Ke Puskesmas Kurang Optimal;
Pelayanan Antenatal Care (ANC) di Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara terencana dan berkesinambungan guna menjamin kesehatan ibu dan janin serta mendukung pencegahan komplikasi kehamilan, termasuk upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan.
4. Kualitas Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Gizi
Akurasi dan kelengkapan data status gizi balita, termasuk melalui aplikasi Sigizi Kesga, masih perlu ditingkatkan. Perbedaan kualitas pencatatan dan pelaporan antar Kabupaten/Kota memengaruhi ketepatan perencanaan intervensi dan evaluasi capaian penurunan stunting.
5. Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan
Faktor sosial ekonomi keluarga, seperti rendahnya pendapatan, tingkat pendidikan orang tua, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, menjadi determinan penting yang berkontribusi terhadap tingginya risiko stunting pada balita.
6. Akses Air Minum dan Sanitasi Layak yang Belum Merata
Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum aman dan sanitasi layak meningkatkan risiko penyakit infeksi, seperti diare dan kecacingan, yang berpengaruh terhadap status gizi dan pertumbuhan balita.
7. Belum Optimalnya Konvergensi dan Koordinasi Lintas Sektor
Pelaksanaan intervensi sensitif stunting yang melibatkan perangkat daerah terkait belum sepenuhnya terintegrasi dan terkonvergensi secara optimal hingga tingkat desa dan kelurahan, sehingga dampak terhadap penurunan stunting belum maksimal.
8. Perubahan Perilaku dan Pola Asuh yang Belum Konsisten
Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait gizi seimbang, pola asuh anak, serta perilaku hidup bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan, terutama pada keluarga berisiko stunting.



Strategi Tindak Lanjut dan Rekomendasi Penurunan Prevalensi Stunting

Sebagai upaya mengatasi berbagai faktor penghambat penurunan prevalensi stunting pada balita di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan strategi tindak lanjut dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Status Gizi Ibu dan Anak

Strategi Tindak Lanjut :

- Penguatan intervensi gizi spesifik pada ibu hamil dan balita melalui pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.
- Peningkatan cakupan suplementasi tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil.
- Penguatan edukasi gizi seimbang, ASI eksklusif, dan MP-ASI sesuai standar melalui kelas ibu hamil dan kelas balita.

2. Keterbatasan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Strategi Tindak Lanjut:

- Peningkatan pemerataan tenaga kesehatan, khususnya bidan dan nutrisisionis.
- Penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dasar dalam penanganan gizi balita sesuai standar pelayanan minimal.

3. Kualitas Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Gizi

Strategi Tindak Lanjut:

- Penguatan validasi, verifikasi, dan pemutakhiran data SigiziKesga secara berkala.
- Peningkatan kapasitas petugas pencatatan dan pelaporan gizi di tingkat Kabupaten/Kota dan Puskesmas.

4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Strategi Tindak Lanjut:

- Penguatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait dalam integrasi program perlindungan sosial dan ketahanan pangan keluarga berisiko stunting.
- Dukungan intervensi gizi bagi keluarga miskin dan rentan melalui pendekatan konvergensi.



5. Akses Air Minum dan Sanitasi Layak yang Belum Merata

Strategi Tindak Lanjut:

- Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam percepatan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak di wilayah prioritas stunting.
- Penguatan promosi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

6. Belum Optimalnya Konvergensi dan Koordinasi Lintas Sektor

Strategi Tindak Lanjut:

- Penguatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan intervensi stunting lintas perangkat daerah.
- Sinkronisasi program dan anggaran berbasis lokus prioritas stunting.

7. Perubahan Perilaku dan Pola Asuh yang Belum Konsisten

Strategi Tindak Lanjut:

- Penguatan komunikasi perubahan perilaku melalui media KIE yang terarah dan berkelanjutan.
- Pelibatan tokoh masyarakat, kader, dan lintas sektor dalam edukasi gizi dan pola asuh.
- Pendekatan keluarga berisiko stunting secara intensif dan berkelanjutan.

Berbagai Upaya yang telah dilakukan dalam Penanggulangan Stunting yaitu :

1. Intervensi bagi bayi/Balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berupa pemberian makanan tambahan dan layanan kesehatan. Jumlah Ibu Hamil KEK sebanyak 8.486 bumil dan yang mendapatkan makanan tambahan sebanyak 6.946 bumil (81,9%).
2. Pengadaan Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil, dari jumlah 138.403 Ibu hamil, yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah dan MMS minimal 180 tablet sampai bulan ini sebanyak 96.144 orang (98,7%).
3. Pengadaan Tabel Tambah Darah bagi Remaja Putri, dari jumlah 459.535



remaja putri, yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah lengkap sebanyak 340.094 orang (74,0%).

4. Pengadaan Vitamin dan Pelatihan Manajemen Tata Laksana Gizi Buruk, dari jumlah kasus gizi buruk sebanyak 158 balita, sebanyak 158 balita (100%) mendapat pelayanan tata laksana gizi.
5. Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting antara Provinsi Sumatera Selatan dengan pusat.

Dalam rangka mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan 11 Program Intervensi yang difokuskan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pelaksanaan program intervensi tersebut menjadi salah satu instrumen utama dalam menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tabel. Program Intervensi Spesifik Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Program Intervensi Kemenkes	Target		Capaian Sumatera Selatan	
		2024	2025	2024	2025
Remaja Putri	1. Skrining anemia remaja putri	90%	75%	80,3%	85,7%
	2. Remaja putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58%	65%	73,5%	74,0%
Ibu Hamil	3. Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali	100%	80%	87,9%	86,7%
	4. Ibu hamil mengkonsumsi TTD/MMS selama kehamilan	80%	65%	94,4%	98,7%
	5. Ibu hamil KEK/Risiko KEK mendapat tambahan asupan gizi	90%	85%	93,8%	81,9%
Balita	6a. Pemantauan pertumbuhan balita (D/S)	90%	80%	92,3%	93,8%



Sasaran	Program Intervensi Kemenkes	Target		Capaian Sumatera Selatan	
		2024	2025	2024	2025
	6b. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita	85%	50%	94,0%	93,8%
	7. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	80%	73%	79,1%	92,1%
	8. Anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (MP ASI) beragam	80%	73%	91,6%	93,8%
	9a. Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	90%	65%	95,8%	80,0%
	9b. Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90%	91%	96,1%	100%
	10. Baduta memperoleh imunisasi lengkap	90%	70%	98,1%	95,5%
Masyarakat	11. Kabupaten/Kota bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)*	90% (Desa)	260 (Kab/Kota)	89,2%	6 (Kab/Kota)

Pada tahun 2025, pelaksanaan Program Intervensi Kementerian Kesehatan dalam pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan capaian yang secara umum baik dan progresif, dengan sebagian besar indikator berhasil mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan penguatan lebih lanjut.

Pada kelompok remaja putri, capaian skrining anemia mencapai 85,7%, melampaui target tahun 2025 sebesar 75%, sementara capaian konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) mencapai 74,0%, sedikit melampaui target 65%. Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya upaya pencegahan stunting sejak pra-kehamilan melalui peningkatan status gizi remaja putri.



Pada kelompok ibu hamil, capaian pemeriksaan kehamilan (ANC) minimal enam kali tercatat 86,7%, telah melampaui target 80%, demikian pula capaian konsumsi TTD/MMS selama kehamilan sebesar 98,7%, telah melampaui target 65%. Sementara itu, capaian ibu hamil dengan KEK atau berisiko KEK yang memperoleh tambahan asupan gizi mencapai 81,9%, sedikit di bawah target 85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi pada ibu hamil telah berjalan, namun masih memerlukan peningkatan akses, kepatuhan, dan kualitas pendampingan.

Pada kelompok balita, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Pemantauan pertumbuhan balita (D/S) mencapai 93,8%, dan pemantauan pertumbuhan serta perkembangan balita mencapai 93,8% juga, jauh melampaui target. Capaian ASI eksklusif sebesar 92,1% dan MP-ASI sebesar 93,8% juga melampaui target tahun 2025, menunjukkan keberhasilan intervensi gizi dan penguatan pola asuh pada periode awal kehidupan.

Capaian balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi mencapai 80,0%, melampaui target 65%, sedangkan capaian balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana sesuai standar sebesar 100% telah mencapai target 91%. Untuk indikator baduta yang memperoleh imunisasi lengkap telah mencapai 95,5% telah mencapai target 75% .Serta, terdapat 6 Kabupaten/Kota dari 17 Kabupaten/Kota bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Sumatera Selatan.

Secara keseluruhan, capaian Program Intervensi Kementerian Kesehatan Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pencegahan dan penurunan stunting, khususnya melalui penguatan intervensi gizi pada remaja putri dan balita. Ke depan, peningkatan cakupan dan kualitas layanan pada kelompok ibu hamil, penguatan tata laksana gizi buruk, serta perbaikan ketersediaan dan ketepatan data lintas sektor menjadi fokus utama untuk memastikan pencapaian target penurunan stunting secara berkelanjutan.

Upaya yang Telah Dilakukan dalam Penanggulangan
Stunting Intervensi Spesifik

SASARAN	Program Intervensi Kemenkes	URAIAN KEGATAN
Remaja Putri	1. Skrining anemia remaja putri	Pendampingan Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja melalui Penguatan UKS/MI dan Puskesmas PKPR sebagai Upaya penanggulangan Cakupan Konsumsi TTD Rematri yang Rendah di Kab/Kota
	2. Remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Kajian Pengoptimal Aksi Bergizi Sekolah dalam Meningkatkan Konsumsi TTD Remaja melalui Peran UKS/MI dan Posyandu remaja Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
Ibu Hamil	3. Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali	- PONEK di RS - Supervisi Fasilitatif Maternal Neonatal ke Kab/Kota - Analisis Pemanfaatan Buku KIA di Kab/Kota dalam Penurunan AKI dan AKB - Fasilitasi ANC Terpadu Ke Kab/Kota
	4. Ibu hamil mengonsumsi TTD/MMS selama kehamilan	Workshop dan Implementasi Kelas Ibu Pekerja Tingkat Provinsi Sumsel dalam Rangka HKN
	5. Ibu hamil KEK/Risiko KEK mendapat tambahan asupan gizi	Pertemuan Workshop Pemberian MPASI dan PMT Lokal
Balita	6a. Pemantauan pertumbuhan balita (D/S)	- Fasilitasi dan Pendampingan Pencatatan dan Pelaporan melalui Aplikasi Surveilans Gizi dan KIA - Pertemuan Pengukuran dan Publikasi data Stunting - Workshop Tehnis Pemanfaatan Aplikasi Gizi dan KIA



SASARAN	Program Intervensi Kemenkes	URAIAN KEGATAN
	6b. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita	- Pendampingan Program Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak PraSekolah sesuai Standard di Kab/Kota - Fasilitasi Pasca Pelatihan Program Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Praseolah - Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi
	7. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Workshop Edukasi Gizi 1000HPK
	8. Anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (MP ASI) beragam	Konsultasi Pusat Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	9a. Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	Rapat Koordinasi Tehnis Gizi dan KIA
	9b. Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	-
	10. Baduta memperoleh imunisasi lengkap	Asistensi Teknis Pelaksanaan Imunisasi Kejar



Upaya yang akan dilakukan dalam Penanggulangan Stunting Intervensi Sensitif

No.	Indikator yang diintervensi	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Kontribusi iuran jaminan kesehatan bagi kepesertaan PBI- JK	Pembayaran kontribusi iuran PBI-JK (masyarakat di wilayah Sumatera Selatan yang masuk dalam Desil 1 - Desil 5) sesuai hasil Rekonsiliasi antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Pusat dan ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Palembang. Adapun jumlah kepesertaan PBI-JK per 01 Desember 2025 sebanyak 3.597.676 jiwa. Pembayaran tagihan kontribusi iuran PBI-JK periode Januari - Desember 2025 telah lunas dibayar.



No.	Indikator yang diintervensi	Uraian Kegiatan	Keterangan
		Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBU dan BP Kelas 3	Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran PBU dan BP Kelas 3 yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Tahun 2025, per 01 Desember 2025 jumlah kepesertaannya sebanyak 284.717 jiwa yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota.
		Advokasi kepesertaan PBI-JK di Kab/Kota	Kegiatan koordinasi ke BPJS Kesehatan Cabang (Palembang, Prabumulih & Lubuk Linggau) dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
		Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS di Kab/Kota	Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program JKN di Kabupaten/Kota dengan menggali permasalahan yang ada dan melakukan kroscek pelaporan pelaksanaan program di daerah
2.	Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar	E Monev Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan telah dilaksanakan



No.	Indikator yang diintervensi	Uraian Kegiatan	Keterangan
	Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) Target thn 2024 : 70%	Konsultasi ke Pusat; Verifikasi Program STBM Provinsi	
3.	Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan hidup sehat) Target thn 2025 : 30%	Pembinaan, penilaian dan pendampingan desa/kelurahan PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	Kegiatan dilaksanakan
		Penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi perilaku hidup sehat melalui media cetak (koran, Baliho)	Kegiatan telah dilaksanakan



REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Analisis Kendala

Bagian ini memotret tantangan nyata di lapangan yang menghambat pencapaian target 100%

Aspek	Kendala yang Dihadapi
Data & Akurasi	Masih ditemukannya disparitas antara data hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dengan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) akibat belum maksimalnya kalibrasi alat ukur (antropometri) di seluruh Puskesmas/Posyandu.
Geografis	Aksesibilitas layanan kesehatan di wilayah perairan dan daerah terpencil (3T) di Sumatera Selatan masih sulit dijangkau, sehingga distribusi makanan tambahan (PMT) dan pemantauan rutin sering terlambat.
Konvergeni	Sinkronisasi program antara intervensi spesifik (kesehatan) dan intervensi sensitif (non-kesehatan seperti air bersih/sanitasi) di tingkat desa/kelurahan belum sepenuhnya selaras dalam satu fokus sasaran (lokasi fokus).
Sosial Budaya	Masih rendahnya tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) serta pola asuh tradisional yang belum mendukung pemberian ASI Eksklusif dan MPASI berkualitas.



Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kendala di atas, berikut adalah rekomendasi strategis untuk tahun anggaran berikutnya:

A. Penguatan Data dan Digitalisasi

- **Audit Antropometri:** Melakukan standardisasi dan kalibrasi alat ukur secara berkala di seluruh Posyandu serta memberikan pelatihan intensif bagi kader dalam teknik pengukuran yang presisi.
- **Integrasi Dashboard:** Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh lintas sektor untuk memantau progres balita stunting secara real-time.

B. Optimalisasi Intervensi Spesifik (Dinkes)

- **Gerakan Serentak TTD:** Menggalakkan program pemberian Tablet Tambah Darah di sekolah-sekolah (Remaja Putri) dan memastikan pendampingan minum obat di tingkat desa untuk mencegah anemia sejak dini.
- **Peningkatan Kapasitas PMT Lokal:** Mendorong penggunaan bahan pangan lokal (seperti ikan air tawar khas Sumsel) sebagai sumber protein tinggi dalam pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis).

C. Penguatan Konvergensi Lintas Sektor

- **Realisasi Anggaran Desa:** Mendorong penguatan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar alokasi Dana Desa untuk stunting benar-benar tepat sasaran pada intervensi sensitif (seperti jamban sehat dan air bersih).
- **Duta Stunting :** Memberdayakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai komunikator perubahan perilaku (BCC) untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya pernikahan dini dan pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak ada 1 indikator yaitu :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,465	0,479	103,01

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Indeks Ketimpangan Gender

Kesenjangan gender (gender equality) sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang. Ketimpangan gender di dunia diukur dengan Gender Inequality Indeks (GII), sementara di Indonesia diukur dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki yang diukur dari:

1. Aspek Kesehatan Reproduksi yang terdiri dari 2 indikator yaitu: a) Proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan, b) Proporsi perempuan 15-49 tahun saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun (MHPK20).
2. Aspek Pemberdayaan yang terdiri dari 2 indikator yaitu: a) Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA; b) Persentase anggota legislatif.



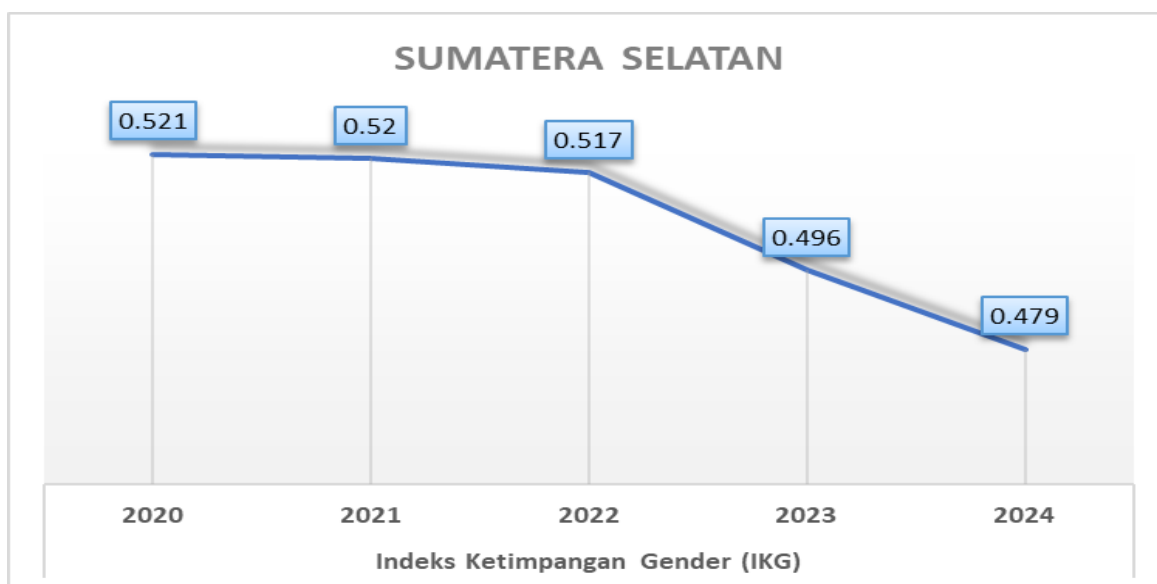
3. Aspek Akses dalam Pasar Tenaga Kerja dengan 1 indikator yaitu tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tujuan utama dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah untuk memberikan gambaran sejauh mana kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang dalam mendukung pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin rendah IKG maka semakin baik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan begitu juga sebaliknya. IKG dibagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) rendah ($< 0,399$); 2) menengah Bawah ($0,400-0,449$); 3) Menengah Atas ($0,450-0,499$); 4) Tinggi ($> 0,500$).

Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat. Indeks Ketimpangan Gender akan optimal apabila kesehatan reproduksi perempuan baik, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki setara.

Capaian indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan yang dilaporkan pada tahun 2025 merupakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Untuk data capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berlaku $n-1$, karena nilai yang didapat merupakan komposit dari beberapa komponen yang memerlukan waktu proses penghitungan. Perkembangan capaian Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 dapat di lihat pada grafik di bawah ini.

Grafik. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender
Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2025

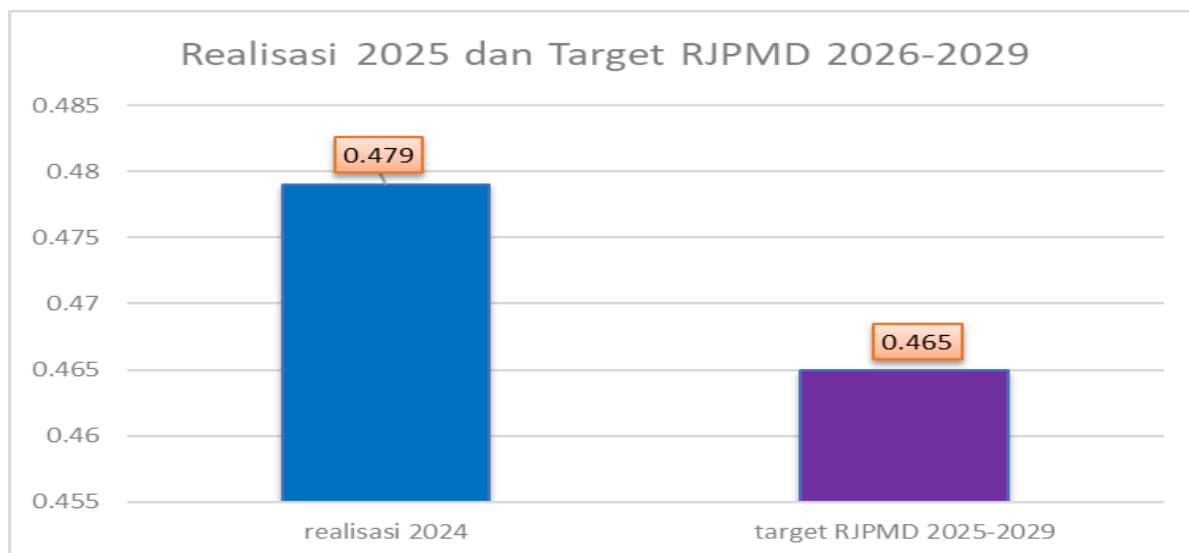


Sumber: BPS RI, 2026

Periode tahun 2020-2024, angka IKG Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan secara konsisten sebesar 0,042 poin dari angka 0,521 di tahun 2020 menjadi 0,479 di tahun 2024. Angka tersebut masih di atas angka IKG Nasional yaitu 0,421, namun mengalami penurunan kategori dari kategori “tinggi” menjadi kategori “menengah atas”.

Realisasi capaian IKG tahun 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2025 berdasarkan RJPMD 2025-2029 yaitu sebesar 0,465. Perlu upaya guna menurunkan angka IKG sebesar 0,014 dalam kurun waktu 1 tahun. Penurunan angka IKG secara konsisten pada semua aspek dalam 3 komponen IKG (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan akses dalam pasar tenaga kerja).

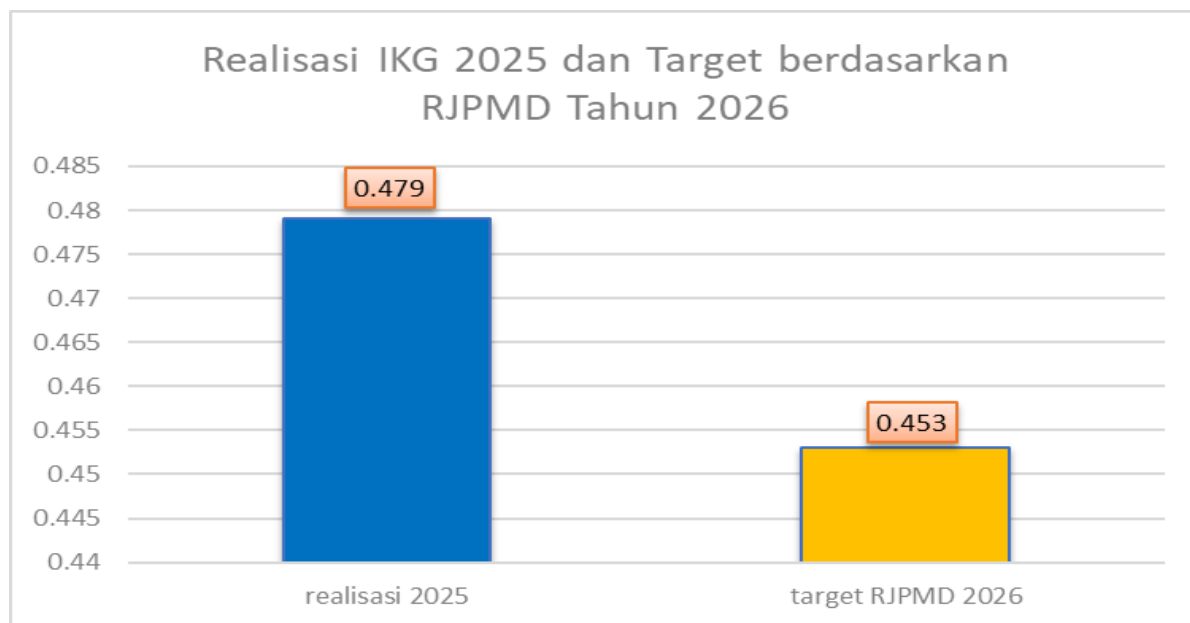
Grafik. Realisasi Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dan Target RJPMD 2025-2029.



Sumber: BPS RI, 2026

Dikaitkan dengan target IKG berdasarkan RJPMD tahun 2026 sebesar 0,453, artinya perlu adanya upaya penurunan angka IKG sebesar 0,026 pada tahun berikutnya. Komitmen pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender, dukungan OPD lintas sektor, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam ruang publik perlu dioptimalkan. Upaya strategis lainnya berupa alokasi anggaran yang responsif gender serat data terpilah gende yang akurat sebagai barometer dalam melakukan penilaian terhadap perkembangan yang berkaitan dengan komponen IKG.

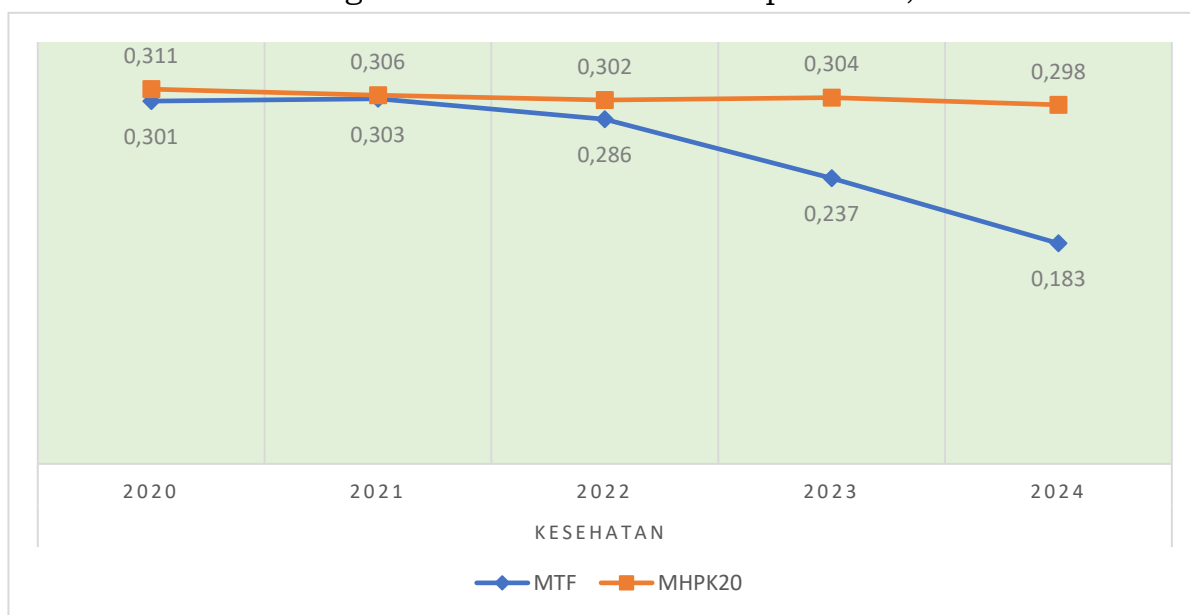
Grafik. Realisasi Indeks Ketimpangan Gender
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dan Target tahun 2026.



Sumber: BPS RI, 2026

Penurunan angka IKG dipengaruhi perbaikan di beberapa dimensi IKG. Dimensi kesehatan reproduksi dengan indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) selama periode 2020-2024 menunjukkan kinerja yang membaik atau cenderung mengalami penurunan yang signifikan terutama pada tahun 2021-2024, kenaikan sedikit terjadi pada tahun 2020-2021 sebesar 0,002. Kenaikan pada tahun 2020 sampai 2021 dan penurunan pada tahun setelahnya, diperkirakan karena pengaruh kebijakan pemerintah tentang pembatasan fisik dan isolasi mandiri yang diberlakukan di semua aspek kehidupan, termasuk layanan kesehatan.

Grafik. Perkembangan Dimensi Kesehatan Reproduksi, 2020-2024



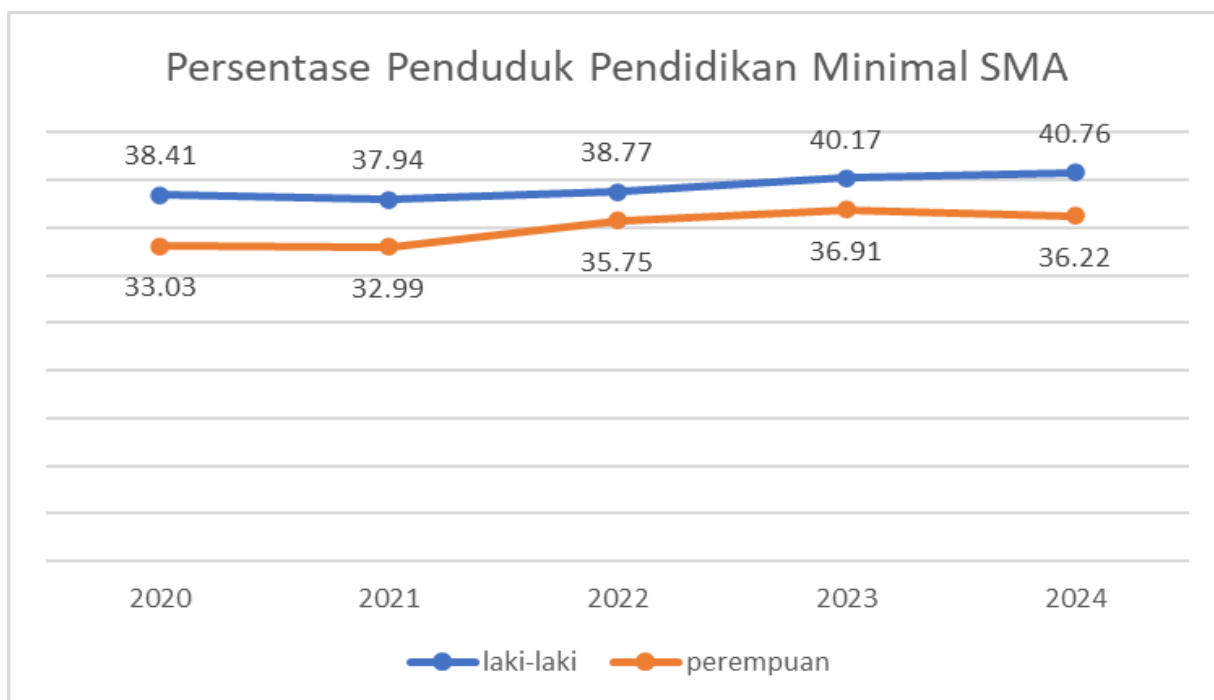
Sumber: BPS RI, 2026

Penurunan cukup signifikan juga terjadi pada indikator proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia <20 tahun (MHPK20) selama periode 2020-2024, dari 0,311 menjadi 0,298 atau mengalami penurunan yang cukup baik, meskipun Angka tersebut masih di atas capaian MHPK20 Nasional sebesar 0,248. Penurunan terjadi secara konsisten dalam skala nasional yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan tentang kesehatan reproduksi dan perbaikan partisipasi pendidikan perempuan. Penurunan pada dimensi kesehatan reproduksi ini dapat mempengaruhi penurunan angka IKG secara menyeluruh.

Pada Aspek pemberdayaan dengan indikator persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA baik laki-laki maupun perempuan selama periode 2020-2024 bergerak fluktuatif. Capaian pada laki-laki berkembang turun naik pada periode 2020-2022 dengan angka 38,41 pada tahun 2020 menurun sedikit di tahun 2021 sebesar 0,47, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 38,77. Peningkatan cukup pesat di tahun 2023 sebesar 40,17 dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 40,76. Capaian pada perempuan cenderung dinamis di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 mencapai 33,03 menurun menjadi 32,99 di tahun 2021, meningkat kembali di tahun 2022

menjadi 35,75. Peningkatan juga terjadi di tahun 2023 menjadi 36,91 namun mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 36,22. Secara umum capaian laki-laki lebih besar di banding capaian perempuan pada setiap tahunnya. Persentase Pendidikan Minimal SMA Di Provinsi Sumatera Selatan dalam gambar di bawah ini.

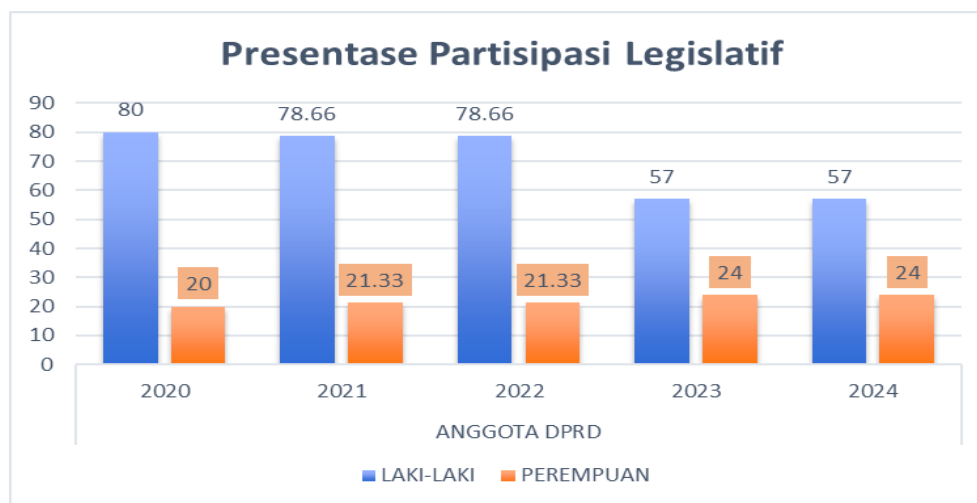
Grafik. Perkembangan Indikator Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA, Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2025



Sumber: BPS RI, 2026

Capaian indikator aspek pemberdayaan, persentase anggota legislatif selama periode 2020-2024 seperti yang disajikan pada gambar 2,75 menunjukkan bahwa keterwakilan legislatif perempuan pada tahun 2023-2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan perbandingan jenis kelamin, terdapat GAP yang tinggi antara legislatif perempuan dan laki-laki sekitar 52 % di tahun 2024. Ke depan perlu upaya untuk mendorong peningkatan keterwakilan legislatif perempuan agar dapat mengimbangi legislatif laki-laki.

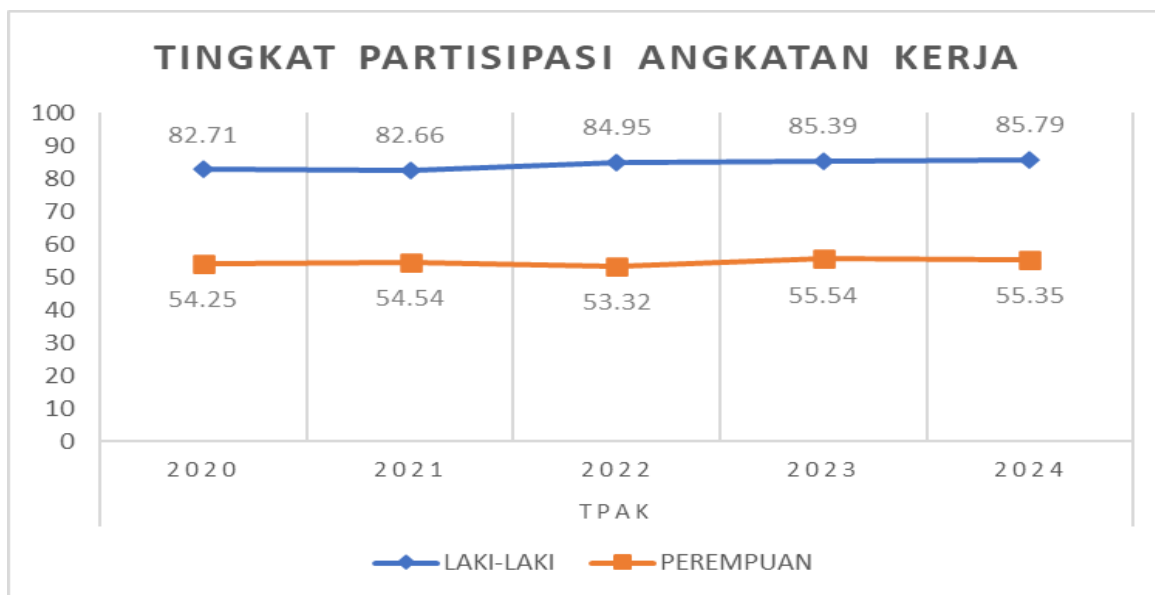
Grafik. Perkembangan Indikator Persentase Partisipasi anggota legislatif Laki-laki dan Perempuan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2026

Selama periode 2020-2024 dimensi pasar tenaga kerja yang diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terdapat kesenjangan yang cukup besar antara TPAK Perempuan dan TPAK Laki-laki. Tren TPAK pada laki-laki mengalami peningkatan yang cukup stabil pada tahun 2022 sampai 2024, penurunan sedikit di periode tahun 2020-2021 dari 82,71 menurun menjadi 82,66; kondisi ini diperkirakan karena dampak covid-19 yang berpengaruh terhadap sektor tenaga kerja di ranah publik. Tren pada TPAK perempuan cenderung lebih dinamis. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada periode tahun 2022 dari 54,54 menurun menjadi 53,32, sempat naik di tahun 2024 menjadi 55,45 dan sedikit menurun di tahun 2024 menjadi 55,35. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesenjangan adalah sosial budaya (Norma Gender) yang masih melekat pada perempuan, peran perempuan dalam ranah domestik masih diharapkan dibanding dalam ranah publik berdasarkan situasi keluarga.

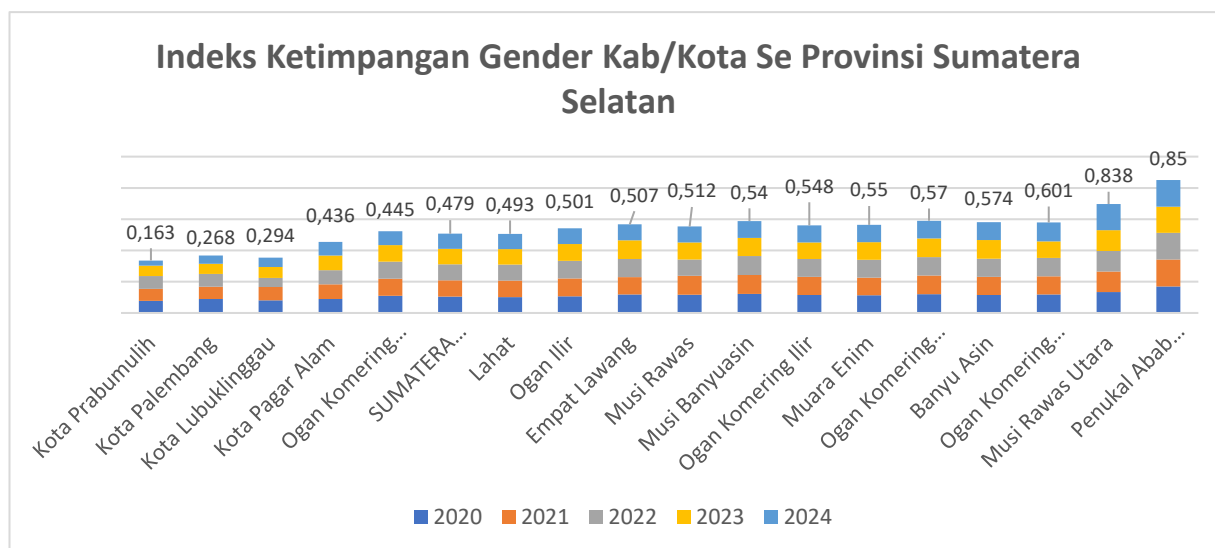
Grafik. Perkembangan Indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2025



Sumber: BPS RI, 2026

Capaian IKG kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan Periode 2020-2025 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin menurun. Perbaikan 3 dimensi mempengaruhi penurunan IKG secara keseluruhan. Pada tahun 2024, terdapat 5 Kabupaten/Kota yang capaian IKGnya lebih kecil dari Provinsi. Ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Prabumulih diikuti Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sementara 12 Kabupaten/Kota lainnya berada di atas capaian Provinsi, 11 Kabupaten/kota diantaranya memiliki angka IKG pada kategori tinggi ($>0,50$). Artinya secara keseluruhan capaian IKG di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih berada di kategori tinggi serta masih di atas angka IKG Nasional sebesar 0,428.

Grafik. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2025



Sumber: BPS RI, 2026

Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Penukal Ilir menunjukkan capaian IKG yang mendekati angka 1, yaitu 0,838 dan 0,85 yang mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi antara laki-laki dan perempuan dalam 3 dimensi IKG. Diketahui bahwa kedua Kabupaten tersebut merupakan wilayah pemekaran yang relatif baru dengan tantangan dalam pemerataan infrastruktur dasar, sosial-budaya, serta akses terhadap sumber daya yang belum seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pada aspek partisipasi legislatif selama tahun 2020-2024, belum tampak keterlibatan anggota legislatif perempuan di kabupaten PALI dan hanya 1 orang di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perbaikan, namun masih berada dibawah standar rata-rata nasional.

Analisis Perbandingan:

1. **Ketimpangan Lebih Tinggi:** Nilai IKG Sumsel (0,479) lebih tinggi daripada nasional (0,421). Dalam konteks IKG, semakin **rendah** angka (mendekati 0), semakin setara gender di wilayah tersebut. Artinya, ketimpangan



gender di Sumsel masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

2. **Tren Perbaikan:** Meskipun lebih tinggi, Sumsel menunjukkan perbaikan yang stabil. IKG Sumsel turun dari 0,496 pada tahun 2023 menjadi 0,479 pada tahun 2024 (rilis Mei 2025), yang berarti kesetaraan gender di Sumsel membaik.
3. **Faktor Penurunan:** Perbaikan di Sumsel didorong oleh peningkatan pada dimensi kesehatan reproduksi.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Sumatera Selatan terus menunjukkan tren perbaikan menuju efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang lebih setara. Berikut poin-poin utama terkait efisiensi dan ketimpangan gender di Sumatera Selatan untuk tahun 2025 :

1. Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
 - **Tren Positif:** Penurunan IKG dari 0,496 (2023) menjadi 0,479 (2024) menandakan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap pembangunan.
 - **Target 2025:** Pemerintah Provinsi menargetkan visi "**Sumsel Unggul dan Terdepan Tahun 2025**", di mana peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kapasitas manajemen pemerintahan menjadi pilar utama untuk menekan ketimpangan lebih jauh.
2. Efisiensi Sumber Daya dalam Pembangunan
 - **Tenaga Kerja:** Untuk periode 2025–2029, pemerintah telah membentuk Tim Penyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah guna memetakan persediaan dan kesempatan kerja yang lebih inklusif gender.
 - **Dimensi Pengukuran:** Efisiensi penggunaan sumber daya dalam IKG diukur melalui tiga dimensi utama:
 - **Kesehatan Reproduksi:** Akses terhadap layanan persalinan dan kesehatan ibu.
 - **Pemberdayaan:** Keterwakilan di parlemen dan tingkat pendidikan (pendidikan menengah ke atas).



- **Pasar Tenaga Kerja:** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

3. Kebijakan Strategis 2025-2029

- **RPJMD Sumsel 2025-2029:** Menekankan pada pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui pengarusutamaan gender.
- **Keseimbangan Ekonomi:** Meskipun komposisi tenaga kerja manajerial dan profesional mulai seimbang, tantangan utama di tahun 2025 tetap pada peningkatan sumbangan pendapatan perempuan yang secara nasional masih tertinggal dibanding laki-laki.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), khususnya dalam konteks daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan:

Dimensi Kesehatan Reproduksi

- Angka kematian ibu (AKI) masih fluktuatif
- Perkawinan usia anak yang masih terjadi di beberapa wilayah
- Akses layanan kesehatan reproduksi belum merata, terutama di daerah terpencil
- Rendahnya literasi kesehatan reproduksi pada remaja

Dimensi Pemberdayaan (Parlemen & Pendidikan)

- Keterwakilan perempuan di legislatif belum optimal
- Budaya patriarki yang masih kuat
- Perempuan belum banyak menduduki posisi pengambil keputusan strategis
- Ketimpangan akses pendidikan tinggi pada kelompok rentan tertentu

Dimensi Pasar Tenaga Kerja

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan lebih rendah dibanding laki-laki
- Perempuan banyak bekerja di sektor informal
- Kesenjangan upah (gender wage gap)



- Beban ganda (peran domestik dan publik)
- Terbatasnya akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dan modal usaha

Hambatan Struktural dan Kebijakan

- Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) belum optimal di seluruh OPD
- Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) belum maksimal
- Data terpilah gender belum lengkap dan mutakhir
- Koordinasi lintas sektor belum kuat

Faktor Sosial dan Budaya

- Norma sosial yang membatasi peran perempuan
- Stigma terhadap perempuan bekerja atau berpolitik
- Kekerasan terhadap perempuan yang berdampak pada partisipasi sosial dan ekonomi

Upaya yang Dilaksanakan untuk Meningkatkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Dalam rangka menurunkan tingkat ketimpangan gender sebagaimana tercermin dalam Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah terkait telah melaksanakan berbagai upaya strategis yang difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi perempuan.

1. Dimensi Kesehatan Reproduksi

Upaya yang dilakukan antara lain:

- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui optimalisasi pelayanan antenatal care (ANC), persalinan di fasilitas kesehatan, serta penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal.
- Pelaksanaan audit maternal perinatal sebagai langkah evaluasi pencegahan kematian ibu.



- Edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja serta kampanye pencegahan perkawinan anak.
- Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana dan intervensi gizi bagi ibu hamil serta remaja putri.

Langkah tersebut diarahkan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan meningkatkan kualitas kesehatan perempuan.

2. Dimensi Pemberdayaan Perempuan

a. Bidang Pendidikan

- Peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan.
- Fasilitasi beasiswa bagi anak perempuan dari keluarga kurang mampu.
- Upaya pencegahan putus sekolah akibat perkawinan anak.
- Pelatihan keterampilan dan vokasi bagi perempuan usia produktif.

b. Bidang Partisipasi dan Kepemimpinan

- Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui pelatihan dan pembinaan.
- Advokasi peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan jabatan pengambil keputusan.
- Penguatan peran organisasi perempuan dalam pembangunan daerah.

Upaya ini bertujuan meningkatkan proporsi perempuan berpendidikan menengah/tinggi serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

3. Dimensi Partisipasi Ekonomi

- Pengembangan kewirausahaan perempuan melalui pelatihan dan pendampingan UMKM.
- Fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk usaha perempuan.
- Peningkatan kompetensi kerja perempuan melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar.
- Penguatan kebijakan responsif gender dalam bidang ketenagakerjaan.

Intervensi tersebut diarahkan untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan mempersempit kesenjangan partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

4. Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Sebagai strategi pendukung, dilakukan:

- Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- Penyusunan dan pemanfaatan data terpisah menurut jenis kelamin.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program berbasis indikator gender.
- Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan PUG.

MENINGKATNYA DAYA SAING DAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Meningkatkan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah ada 3 indikator yaitu :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30 – 5,50	5,35	100,94
2	PDRB per Kapita	Rp (Juta)	79,90	81,50	102,00
3	Indeks Daya Saing	Indeks	3,48	3,53	104,31

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah adalah sebagai berikut :

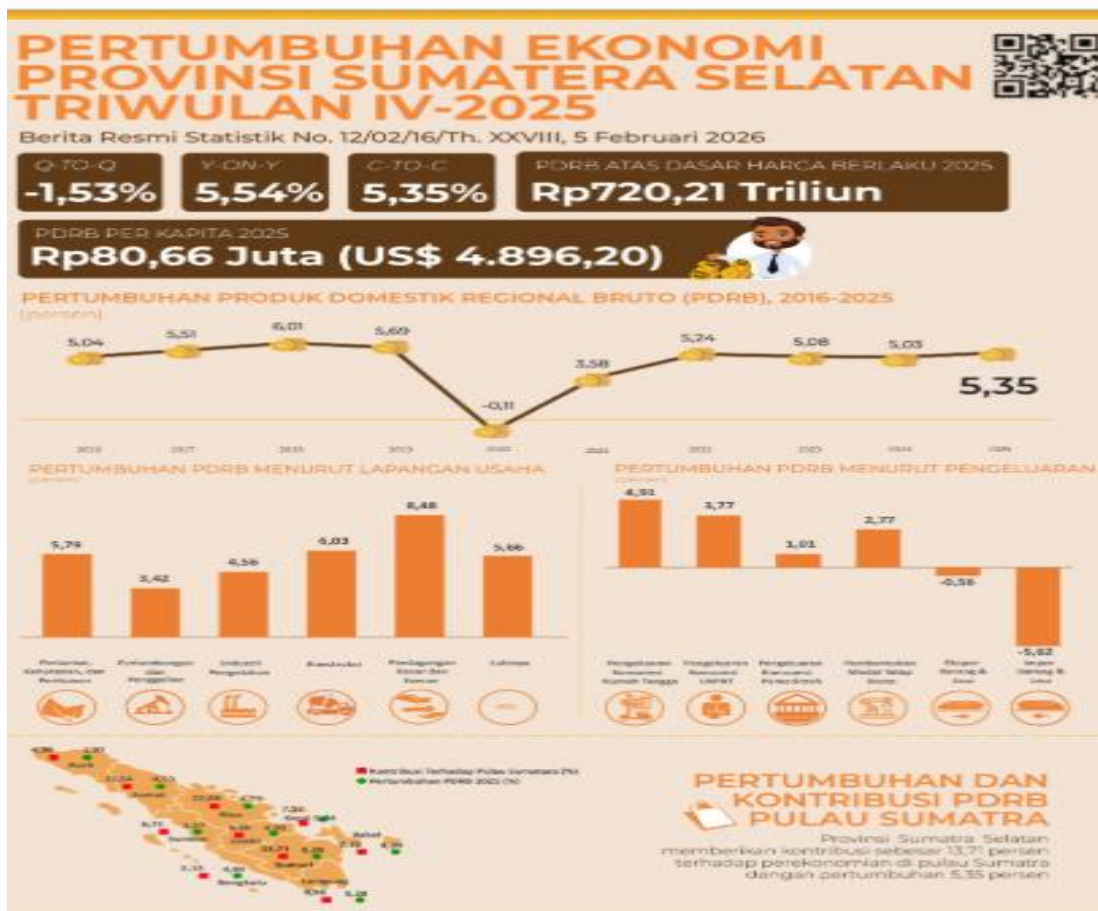


1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 tumbuh impresif sebesar 5,35% (y-on-y), melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada diangka 5,11%. PDRB Sumsel mencapai Rp720,21 triliun, didorong oleh kinerja inklusif di sektor pertanian, perdagangan, industri, serta peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

- **Sektor Penggerak (Produksi):** Pertumbuhan tertinggi didorong oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,66%), serta jasa keuangan dan pertanian.
- **Sisi Pengeluaran:** Didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh 4,91%.
- **Kinerja Ekonomi:** Sumsel menjadi kontributor ekonomi terbesar ketiga di Pulau Sumatera.

Perekonomian Sumatera Selatan menunjukkan struktur yang tangguh dan inklusif, tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan, sehingga membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Bisa liat Gambar dibawah melalui grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.



Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun 2023 s.d 2025 beberapa tahun sebelumnya Mengalami Peningkatan. Angka ini menunjukkan melampaui pertumbuhan nasional dan tren positif pertahunnya jika dibandingkan 2023 dan 2024 tahun 2025 lebih menunjukkan kinerja positif yang stabil. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 tumbuh sebesar 5,35%, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,66%, sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang tumbuh sebesar 4,91%. Sepanjang tahun 2025, kinerja ekonomi Sumatera Selatan didukung oleh permintaan domestik dan impor yang cenderung meningkat sehingga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi.



Laju Pertumbuhan Ekonomi terealisasi sebesar 5,35% bila dibandingkan dengan target jangka menengah masih belum mencapai target yang ditetapkan. Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk kedepan laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang meningkat dari sisi produksi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, ekspor barang dan jasa.

Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 terealisasi 5,35% belum mencapai standar nasional sebesar 5,39%. Upaya kedepan laju pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan bisa meningkat melalui sektor pertanian, pertambangan dan peningkatan konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan struktur ekonomi yang semakin tangguh dan inklusif, tidak hanya bergantung pada satu sektor, serta menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu kontributor ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ditopang oleh kinerja inklusif di berbagai sektor, terutama pertambangan, industri pengolahan dan pertanian serta didukung peningkatan konsumsi rumah tangga.

Berikut adalah poin-poin penting efisiensi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan 2025 :

- **Pertumbuhan Kuat Meski Efisiensi:** Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan mencatat ekonomi Sumsel 2025 tumbuh 5,35 persen. Efisiensi anggaran pemerintah tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
- **Penggerak Utama:** Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga, belanja masyarakat, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 20,76% (yoy) hingga triwulan III-2025.
- **Sektor Andalan:** Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan/penggalan menjadi motor penggerak utama.
- **Efisiensi Fiskal & Optimalisasi Aset:** Optimalisasi aset negara dan penyelesaian piutang meningkatkan PNBPN hingga 129,8% dari target.
- **Infrastruktur & Digitalisasi:** Pembangunan proyek strategis nasional (jalan tol) berlanjut, didukung digitalisasi di sektor pelabuhan (KSOP Palembang) untuk efisiensi logistik.



- **Kinerja Koperasi:** Terbentuknya 3.258 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Sumatera Selatan, meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat.

Kinerja APBD dan APBN di Sumatera Selatan pada 2025 dinilai stabil, tangguh dan efisien menjadikannya modal penting untuk pertumbuhan berkesinambungan ditahun-tahun berikutnya.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan mencapai keberhasilan menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar ketiga di Pulau Sumatera.

Berikut adalah rincian faktor keberhasilan dan program kegiatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2025:

Faktor Keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2025

1. **Stabilitas Konsumsi Rumah Tangga:** Konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan di angka 4,91%, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
2. **Kinerja Sektor Konstruksi dan Pertanian:** Pertumbuhan ditopang kuat oleh sektor konstruksi dan sektor pertanian.
3. **Lonjakan Investasi:** Realisasi investasi di Sumsel melampaui target, dengan total mencapai Rp49,82 triliun, yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi.
4. **Inklusivitas Sektor Usaha:** Pertumbuhan terjadi merata di berbagai sektor, termasuk sektor riil, barang, jasa, dan real estate, sehingga tidak bergantung pada satu sektor saja.
5. **Pengendalian Inflasi:** Pemerintah Daerah berhasil menjaga inflasi tetap terkendali, sehingga daya beli masyarakat terjaga.
6. **Sinergi Lintas Sektor:** Adanya kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Sumsel, Bank Indonesia, BPS, dan instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi.



Program Kegiatan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2025

- **Program Cetak Sawah (Swasembada Pangan):** Program ini menjadi salah satu pilar utama untuk mendorong sektor pertanian dan menjamin ketahanan pangan.
- **Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP):** Lanjutan program strategis untuk kemandirian pangan tingkat rumah tangga.
- **Program Makan Bergizi (MBG):** Implementasi program pemerintah pusat yang bersinergi dengan ekonomi lokal.
- **Sriwijaya Economic Forum 2025 (SERU Sriwijaya):** Forum untuk mendorong sinergi dan inovasi, terutama dalam penguatan UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- **Akselerasi Investasi & Infrastruktur:** Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan memfasilitasi kemudahan investasi untuk sektor energi, batubara, serta industri hilirisasi.
- **Program Magang dan Pemberdayaan SDM:** Paket Ekonomi 2025 yang mencakup delapan program akselerasi, termasuk kerja sama dengan sektor industri untuk penyerapan tenaga kerja fresh graduate.

Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan tetap tangguh dan mampu bertahan meskipun terdapat efisiensi anggaran, didukung oleh fondasi sektor komoditas dan pertanian yang kuat.

2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp 81,50 juta per tahun. Angka ini mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk dan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga dan jasa keuangan. Data ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, menandakan pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB Provinsi Sumatera Selatan tahun



2023 sebesar Rp. 80,66 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp. 75,13 Juta. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, hal ini terjadi karena masyarakat Sumatera Selatan mengalami peningkatan pada sisi pendapatan di tahun tersebut. Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai 720,21 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp. 81,50 Juta.

Pendapatan per Kapita PDRB ADHB pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mencapai target yang telah ditentukan dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu meningkatkan dari sisi produksi, perdagangan, penguatan lapangan usaha lainnya.

Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB realisasi tahun 2025 sebesar 81,50 bila dibandingkan dengan standar nasional 83,7 belum mencapai standar nasional, diharapkan upaya kedepan Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB.

Berikut adalah poin-poin efisiensi sumber daya dan indikator PDRB per kapita Sumsel tahun 2025:

- **Pertumbuhan PDRB & Efisiensi:** Ekonomi Sumsel tahun 2025 tumbuh 5,35 persen (y-on-y), didukung oleh kontribusi merata dari sektor barang dan jasa.
- **Pertumbuhan per Triwulan:** Pertumbuhan ekonomi menunjukkan ketahanan, dengan capaian 5,22% pada Triwulan I-2025 dan menguat ke 5,42% pada Triwulan II-2025.
- **PDRB Per Kapita (Kabupaten/Kota):** Meskipun angka total provinsi untuk akhir tahun 2025 belum dirilis secara final dalam satu dokumen, data triwulanan menunjukkan Kabupaten Muara Enim mencatatkan PDRB per kapita tertinggi mencapai 11.477,9 US\$ pada Triwulan II-2025.
- **Faktor Pendorong Efisiensi:** Pertumbuhan didukung oleh peningkatan nilai investasi (PMTB) dan percepatan proyek strategis nasional (PSN), termasuk hilirisasi sawit, pengembangan energi, dan food estate.



- **Optimalisasi Sumber Daya:** Terdapat upaya optimalisasi melalui rencana tenaga kerja 2025-2029 untuk memaksimalkan potensi daerah.

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Sumsel pada 2025 menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional (5,11% secara nasional) dan penurunan tingkat kemiskinan yang berlanjut.

Berikut adalah faktor keberhasilan dan program peningkatan pendapatan per kapita di Sumatera Selatan pada tahun 2025:

Faktor Keberhasilan (Driver Pertumbuhan Ekonomi 2025)

1. **Kinerja Sektor Ekstraktif (Tambang & Energi):** Sebagai lumbung energi, sektor pertambangan, batu bara, minyak, dan gas bumi tetap menjadi penopang utama ekonomi Sumsel, didukung oleh investasi yang melampaui target (mencapai Rp49,82 triliun pada 2025).
2. **Peningkatan Investasi Realisasi:** Realisasi investasi di Sumsel melampaui target, yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan PDRB.
3. **Pertumbuhan Inklusif:** Pertumbuhan ekonomi didukung oleh kontribusi merata dari berbagai sektor usaha, tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.
4. **Stabilitas Fiskal Daerah:** APBN di Sumsel tercatat stabil dan tangguh, dengan peningkatan transfer ke daerah (TKD) yang mendukung pembangunan lokal.
5. **Penurunan Angka Kemiskinan:** Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 10,51% (per September 2024), dengan tren menurun yang terus berlanjut ke 2025, meningkatkan pendapatan per kapita secara riil.



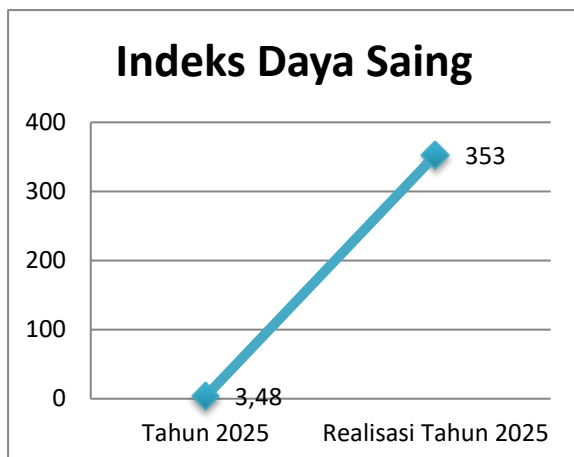
Program Peningkatan Pendapatan per Kapita 2025

Pemerintah Provinsi Sumsel menjalankan beberapa program strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat:

- **Pengembangan Industri Hilirisasi:** Fokus pada peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan (seperti sawit dan karet) agar tidak hanya menjual bahan mentah.
- **Penguatan Swasembada Pangan:** Program untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian (padi dan jagung) untuk menjaga stabilitas harga dan pendapatan petani.
- **Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif:** Mendorong UMKM untuk masuk ke ekosistem digital (go-digital) guna memperluas pasar.
- **Peningkatan SDM dan Ketenagakerjaan:** Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (2025-2029) untuk memotret dan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, serta menciptakan lapangan kerja baru yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi.
- **Optimalisasi Akses Keuangan (TPAKD):** Sumsel meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terbaik, yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan kemudahan modal bagi pelaku usaha lokal.

Secara keseluruhan, pendapatan per kapita Sumsel 2025 diperkirakan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, penurunan kemiskinan yang signifikan (khususnya kemiskinan ekstrem), dan realisasi investasi yang kuat.

3. Indeks Daya Saing



Grafik 1.14 Indeks Daya Saing Tahun 2025

Indeks Daya saing Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,48 dengan realisasi 3,53 (101,44) sebagai wujud komitmen dalam memperkuat daya saing inovasi daerah, piagam ini diberikan langsung oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atas apresiasi komitmen dari Provinsi Sumatera Selatan.

Indeks Daya Saing Daerah Sumatera Selatan 2025

- **Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu):** Berhasil menembus skor 3,80 pada IDSD 2025 dan menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera Selatan, bahkan dilaporkan masuk dalam 5 besar nasional untuk kategori kabupaten.
- **Tren Kinerja:** Secara keseluruhan, kinerja daya saing di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif, di mana instrumen IDSD 2025 digunakan sebagai acuan pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.
- **Fokus Pengukuran:** IDSD 2025 menggunakan 12 pilar (seperti kualitas SDM, inovasi, kelembagaan, dan teknologi) yang diadaptasi dari Global Competitiveness Index.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Sumatera Selatan tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, didorong oleh perbaikan kinerja pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekosistem riset/inovasi. Salah satu pencapaian menonjol adalah OKU (Ogan Komering Ulu) yang meraih skor tertinggi di Sumatera Selatan (3,80) dan masuk 5 besar nasional pada IDSD 2025.



Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, didorong oleh perbaikan kinerja pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekosistem riset/inovasi. Salah satu pencapaian menonjol adalah OKU (Ogan Komering Ulu) yang meraih skor tertinggi di Sumsel (3,80) dan masuk 5 besar nasional pada IDSD 2025.

Berdasarkan rilis terbaru Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diluncurkan pada awal 2026, Sumatera Selatan menunjukkan upaya peningkatan daya saing yang signifikan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berikut adalah poin-poin kunci terkait Efisiensi Sumber Daya dan Indeks Daya Saing Sumatera Selatan 2025:

Berdasarkan rilis terbaru Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diluncurkan pada awal 2026, Sumatera Selatan menunjukkan upaya peningkatan daya saing yang signifikan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berikut adalah poin-poin kunci terkait Efisiensi Sumber Daya dan Indeks Daya Saing Sumatera Selatan 2025:

- **Peningkatan Skor Daya Saing Daerah (IDSD) 2025:** Secara keseluruhan, tren daya saing daerah di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Selatan, menunjukkan peningkatan. IDSD 2025 mengadopsi 12 pilar (termasuk efisiensi sumber daya) yang diukur dari 63 indikator untuk tingkat provinsi.
- **Kinerja Spesifik Daerah (Contoh OKU):** Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumsel berhasil mencatatkan skor 3,80 pada IDSD 2025, yang menempatkannya sebagai salah satu yang tertinggi di Sumsel dan masuk 5 besar nasional.
- **Efisiensi Sumber Daya Alam dan Energi:** Sumsel tetap mengandalkan posisinya sebagai lumbung energi (batubara, minyak, gas bumi). Namun, fokus 2025 bergeser pada peningkatan efisiensi dan hilirisasi, termasuk pengembangan Biorefinery Pertamina di Musi Banyuasin dan konversi sampah menjadi energi.



- **Fokus Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya:** Kebijakan pada tahun 2025 menekankan pada efisiensi belanja melalui mekanisme blokir anggaran untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
- **Proyek Strategis Nasional (PSN):** Untuk mendorong efisiensi dan produktivitas sumber daya, Sumsel memprioritaskan hilirisasi komoditas (kelapa sawit, rumput laut) dan pengembangan food estate yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.
- **Kualitas Pembangunan:** Sumatera Selatan dinilai memiliki kualitas pembangunan yang baik, tercermin dari posisi yang cukup tinggi di tingkat nasional pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, Sumsel di 2025 berupaya meningkatkan efisiensi sumber daya dari sektor ekstraktif menuju hilirisasi yang lebih bernilai tambah dan ramah lingkungan untuk meningkatkan skor daya saing daerah.

Berikut adalah faktor-faktor utama keberhasilan daya saing Sumsel tahun 2025:

- **Peningkatan Kualitas SDM (IPM Tinggi):** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang, misalnya, mencapai kategori "Sangat Tinggi" di angka 83,27 pada tahun 2025, dengan angka harapan hidup yang membaik. Peningkatan kualitas SDM ini berkontribusi pada daya saing kapasitas daerah.
- **Penguatan Fondasi Riset dan Inovasi:** Peningkatan IDSD di Sumsel mencerminkan perbaikan kinerja pembangunan daerah dan penguatan ekosistem riset dan inovasi (termasuk peran BRIDA Sumsel).
- **Kinerja Ekonomi Inklusif & Hilirisasi:** Ekonomi Sumsel tahun 2025 diproyeksikan tumbuh 5,35%, melampaui rata-rata nasional (5,11%), didukung oleh konsumsi rumah tangga dan hilirisasi komoditas (kelapa sawit, batu bara).
- **Pengembangan Sektor Energi dan Proyek Strategis:** Sebagai lumbung energi nasional, Sumsel memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (batu bara, gas, panas bumi) dan pengembangan proyek strategis seperti Biorefinery Pertamina di Musi Banyuasin dan infrastruktur tol.



- **Optimalisasi Sektor Pertanian (Rawa):** Keberhasilan memaksimalkan lahan rawa dan meningkatkan indeks pertanaman (menjadi 2-3 kali setahun) menjadikan Sumsel andalan baru pangan nasional.
- **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup:** Tren positif pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (mencapai 77,20) juga mendukung daya saing berkelanjutan.
- **Stabilitas Penurunan Kemiskinan:** Tingkat kemiskinan di Sumsel berhasil diturunkan ke level satu digit (9,85% pada awal 2026, yang mencerminkan capaian 2025).

Program dan kegiatan peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 di Sumatera Selatan difokuskan pada penguatan ekosistem inovasi, optimalisasi potensi lumbung energi/perkebunan, serta peningkatan SDM. Hal ini mengacu pada hasil IDSD 2025 dari BRIN yang digunakan sebagai alat navigasi kebijakan, inovasi, dan perbaikan kinerja pembangunan daerah.

Program dan Kegiatan Utama 2025:

- **Penguatan Inovasi dan R&D:** Penyelenggaraan Kompetisi Pemilihan Inovator Provinsi Sumatera Selatan 2025, yang mendorong inovasi di berbagai sektor untuk meningkatkan daya saing daerah.
- **Optimalisasi Sektor Unggulan:** Penguatan daya saing melalui pengelolaan komoditas unggulan seperti karet (peringkat ke-6 nasional) dan sawit (CPO), serta pengembangan energi terbarukan (panas bumi, biomassa, dan gambut) sebagai upaya menjadikan Sumsel lumbung energi nasional.
- **Peningkatan SDM dan Kualitas Hidup:** Fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target mencapai kategori sangat tinggi, ditunjukkan dengan capaian IPM Kota Palembang 83,27 di tahun 2025.
- **Pelatihan Analisis Kebijakan:** Pelatihan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik dan Nonfisik bagi aparatur daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada daya saing.

- **Rujukan Perencanaan:** Penggunaan data IDSD 2025 sebagai dasar kebijakan dalam RKPD Sumsel 2025, yang disesuaikan dengan RPD 2024-2026 untuk konsistensi pembangunan.

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan skor IDSD Sumsel dan mencapai target pembangunan berkelanjutan.

TERWUJUDNYA STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah ada 1 indikator yaitu :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Inflasi	%	1,5-3,5	2,91	100

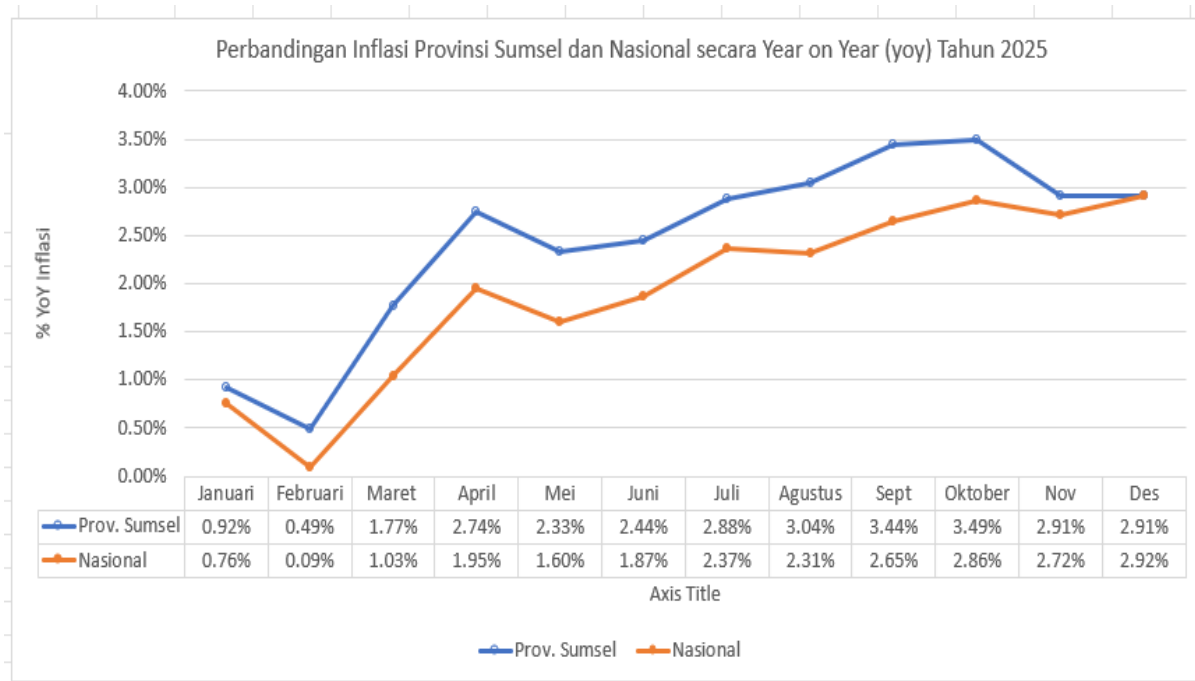
Capaian indikator kinerja dari sasaran Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Inflasi

Tabel. Perbandingan Angka Inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional
Secara year on year (yoy) Tahun 2025

No	Bulan	Perbandingan Inflasi secara Year on Year (yoy)	
		Prov. Sumsel	Nasional
1	Januari	0.92%	0.76%
2	Februari	0.49%	0.09%
3	Maret	1.77%	1.03%
4	April	2.74%	1.95%
5	Mei	2.33%	1.60%
6	Juni	2.44%	1.87%
7	Juli	2.88%	2.37%
8	Agustus	3.04%	2.31%
9	Sept	3.44%	2.65%
10	Oktober	3.49%	2.86%
11	Nov	2.91%	2.72%
12	Des	2.91%	2.92%

Grafik. Inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2019-2024



Perkembangan angka inflasi Sumatera Selatan secara Year on Year (yoy) dari Bulan Januari s.d Desember 2025 mengalami kenaikan. Tren yang sama juga terjadi di tingkat Nasional mengalami kenaikan. Pada Bulan November 2025 dan Desember 2025 angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan sama sebesar 2,91% secara yoy dan menurun terhadap angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan Bulan Oktober 2025 sebesar 3,49%. Namun demikian angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada Bulan Desember 2025 dibawah angka inflasi Nasional sebesar 2,91% secara yoy, sedangkan angka inflasi Nasional sebesar 2,92%. Selain itu kalau dilihat dari laju kenaikan angka inflasi Sumatera Selatan yang tajam mulai Bulan Maret 2025 sebesar 1,77% terhadap Bulan Februari 2025 sebesar 0,49% yang disebabkan pada Bulan Januari dan Februari 2025 adanya subsidi tarif listrik yang diberikan oleh pemerintah secara nasional dan mulai Bulan Maret 2025 subsidi tarif Listrik tersebut tidak diberikan lagi dan kenaikan laju inflasi tersebut juga terjadi secara Nasional.

Meskipun angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan menaik pada Bulan Januari 2025 sebesar 0,92% menjadi 2,91% pada Bulan Desember 2025 yoy sedangkan angka inflasi Nasional pada Bulan Januari 2025 sebesar 0,76%



menjadi 2,92% yoy, namun kenaikan angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan mulai Bulan Maret 2025 masih dalam rentang angka acuan nasional sebesar $2,5 \pm 1$ (1,5%-3,5%). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Selatan masih relatif terjaga dan stabil.

Perbandingan tingkat Inflasi *Year-on-Year* (y-on-y) Sumatera Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2023-2025, dengan tren yang cenderung melandai pada akhir tahun 2025 dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya.

Perbandingan Tingkat Inflasi Sumatera Selatan (y-on-y):

- **Tahun 2023 (Desember):** Inflasi gabungan 2 kota IHK di Sumatera Selatan tercatat sebesar **3,17%**.
- **Tahun 2024:** (Data spesifik akhir tahun 2024 belum ditampilkan secara rinci dalam pencarian, namun tren menunjukkan upaya stabilisasi).
- **Tahun 2025 (Tren hingga Akhir Tahun):**
 - **Januari 2025:** Inflasi berada pada level rendah, yaitu **0,92%**.
 - **Tengah Tahun (Juli 2025):** Inflasi meningkat menjadi **2,88%**.
 - **Puncak (Oktober 2025):** Inflasi menyentuh angka **3,49%**.
 - **Akhir Tahun (November 2025):** Inflasi melandai ke angka **2,91%**.

Ringkasan Perbandingan:

Tingkat inflasi pada November 2025 (2,91%) menunjukkan angka yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan posisi Desember 2023 (3,17%). Sepanjang tahun 2025, Sumatera Selatan sempat mencatatkan inflasi terendah nasional pada bulan Januari. Penyumbang inflasi utama pada akhir tahun 2025 umumnya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta perawatan pribadi.

Potensi sumber daya energi Sumatera Selatan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi terdapatnya tersebar dan berlimpah merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi khususnya melalui Pembangunan Ketenagalistrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri.

Provinsi Sumatera Selatan berharap apa yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Pusat baik Upaya Pengendalian Inflasi Daerah melalui TPID,

maupun program Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat didukung implementasinya. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tingkat inflasi daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai nilai stabil pada tahun 2025 dengan tetap menjaga harga barang relatif stabil, peningkatan aktivitas ekonomi baik Sektor industri maupun konsumsi masyarakat dengan solusi yang dilakukan yaitu :

- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
- Peningkatan Kualitas SDM: Investasi pada pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja.
- Diversifikasi Industri: Pengembangan sektor industri yang beragam dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja.
- Kebijakan yang Mendukung Pasar Kerja: Kebijakan yang mendukung fleksibilitas pasar kerja, seperti deregulasi dan insentif bagi pengusaha, dapat meningkatkan

TERWUJUDNYA KETERKAITAN KETAHANAN PANGAN, KETAHANAN ENERGI DAN KEDAULATAN AIR

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air ada 2 indikator yaitu :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,22	n/a	-
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	20,19	19,14	94,80



Capaian indikator kinerja dari sasaran Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan air adalah sebagai berikut :

1. Indeks Ekonomi Hijau Daerah

Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator imperatif dari pusat yang menggambarkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, capaian indikator seperti persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi komposit dalam penilaian Indeks Ekonomi Hijau. Oleh karena itu, nilai atau capaian emisi GRK dan IKLH diharapkan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, yang berarti ekonomi tetap tumbuh positif namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Indeks Ekonomi Hijau menunjukkan sejauh mana pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan, dimana ekonomi tumbuh, kualitas lingkungan tetap terjaga, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Sehubungan dengan target Indeks Ekonomi Hijau Daerah Tahun 2025 sebesar 62,22, sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah masih menunggu rilis realisasi capaian Tahun 2025, dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru dan salah satu Indikator Utama Pembangunan yang perhitungannya dilakukan dan dipublikasikan secara nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pemerintah Daerah dalam hal ini menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh Bappenas sebagai dasar penyampaian capaian indikator tersebut.

Dengan demikian, capaian Indeks Ekonomi Hijau Daerah bukan merupakan indikator kinerja yang dihitung secara langsung oleh Pemerintah Daerah, melainkan merupakan indikator yang bersumber dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung pencapaiannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.



2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru Indonesia pada tahun 2025 di targetkan sebesar 20,19 dengan realisasi 19,14 dengan capaian 94,80 tapi Indeks Ekonomi Biro Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan masih relative aman.

a. Defini dan Konsep IBEI

Indonesia Blue Economy Index (IBEI) adalah instrumen pengukuran komprehensif yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia (melalui Bappenas) untuk memantau transisi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan. Indeks ini tidak hanya mengukur pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan, tetapi mengintegrasikan tiga pilar utama:

- Pilar Ekonomi: Mencakup nilai tambah dari sektor perikanan, industri kelautan, dan perdagangan.
- Pilar Sosial: Fokus pada inklusivitas, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir atau perairan.
- Pilar Lingkungan: Menilai kualitas sumber daya laut, konservasi, dan penggunaan energi terbarukan.

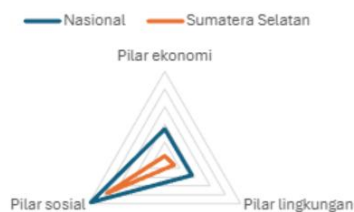
b. Sejarah dan Latar Belakang

Konsep IBEI mulai diintensifkan pada periode 2023-2024 sebagai bagian dari Transformasi Ekonomi Indonesia dalam Visi Indonesia Emas 2045. Bagi Sumatera Selatan, tantangan historis muncul karena struktur ekonominya yang selama ini didominasi oleh sektor migas dan perkebunan. Hal ini menyebabkan pembangunan di sektor perairan darat dan kelautan cenderung belum menjadi prioritas utama dibandingkan sektor ekstraktif darat.

Perbandingan IBEI tahun 2023 s.d 2025 menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang stagnan tetapi tetap dalam posisi stabil untuk Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum Indeks ekonomi Biru untuk mengukur transformasi ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan. Perbandingan capaian di Sumatera Selatan

c. Kondisi IBEI Sumatera Selatan (Analisis Data)

Figur 7. Indeks Ekonomi Biru (IBEI) berdasarkan Pilar: Nasional dan Sumatera Selatan



Figur 8. Indeks Ekonomi Biru (IBEI) berdasarkan Subpilar: Nasional dan Sumatera Selatan



Berdasarkan data pada Figur 7, capaian Indeks Ekonomi Biru (IBEI) Sumatera Selatan pada tingkat pilar masih berada di bawah rata-rata nasional pada ketiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pembangunan ekonomi biru di Sumatera Selatan belum sekuat capaian nasional secara keseluruhan. Pada level subpilar (Figur 8), kesenjangan terlihat lebih jelas, di mana Sumatera Selatan relatif tertinggal pada sebagian besar sub pilar, terutama pada subpilar pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta pariwisata berbasis kelautan. Dominasi sektor migas dan perkebunan selama ini tampaknya berkontribusi pada belum maksimalnya pembangunan di sektor kelautan dan perairan darat. Meskipun demikian, terdapat beberapa sub pilar yang relatif mendekati capaian nasional, seperti perikanan tangkap dan budidaya serta industri berbasis kelautan, sehingga berpotensi menjadi fokus penguatan daerah dalam transisi mendorong ekonomi biru berkelanjutan.

Berdasarkan data diatas, profil ekonomi biru Sumatera Selatan menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

- Posisi terhadap Nasional: Capaian IBEI Sumatera Selatan pada tingkat pilar (ekonomi, sosial, dan lingkungan) secara konsisten masih berada di bawah rata-rata nasional.



- Kesenjangan Subpilar: Terdapat ketimpangan yang signifikan pada aspek fundamental sosial, yaitu subpilar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
- Sektor Kelautan: Subpilar pariwisata berbasis kelautan juga tercatat masih tertinggal jauh dibandingkan capaian nasional.
- Titik Kekuatan: Sumatera Selatan menunjukkan performa yang kompetitif dan mendekati rata-rata nasional pada subpilar perikanan tangkap dan budidaya serta industri berbasis kelautan.

Tahun 2025, arah kebijakan ekonomi biru di Sumatera Selatan mulai bergeser dari ketergantungan pada komoditas darat menuju penguatan potensi perairan. Fokus utama pengembangan meliputi:

- Optimalisasi Perikanan: Memanfaatkan modalitas yang sudah ada di sektor perikanan tangkap dan budidaya untuk mendorong hilirisasi industri berbasis kelautan.
- Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi dominasi sektor migas dan perkebunan dengan mulai mengintegrasikan konservasi sumber daya laut ke dalam perencanaan daerah.
- Penguatan Sosial: Pemerintah daerah mulai memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perairan guna mengejar ketertinggalan di sub pilar kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan data awal tahun 2025-2026, pengembangan ekonomi biru di Sumatera Selatan (Sumsel) difokuskan pada penguatan ekosistem perairan darat (sungai/rawa) dan peningkatan nilai tambah produk perikanan (seperti ikan patin) sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi inklusif.

Berikut adalah poin-poin penting terkait perkembangan ekonomi dan ekonomi biru di Sumatera Selatan tahun 2025:

- Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tinggi: Ekonomi Sumsel sepanjang 2025 diproyeksikan tumbuh melampaui rata-rata nasional, yaitu sebesar 5,35% (rata-rata nasional 5,11%).



- Kinerja Ekonomi: Sumsel menjadi kontributor ekonomi terbesar ketiga di Pulau Sumatera, didukung oleh sektor produktif termasuk sektor perikanan dan kelautan yang mulai diarahkan ke konsep biru.
- Fokus Ekonomi Biru: BPPSDMKP melalui BRPPUPP Palembang berkomitmen mendukung lima Program Prioritas KKP untuk menciptakan Ekonomi Biru Berkelanjutan di 2025. Hal ini mencakup pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
- Ekspor dan Tantangan: Nilai ekspor Sumatera Selatan sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 5,78%, dipicu melemahnya permintaan global, terutama komoditas batubara, sehingga mendorong diversifikasi ke sektor perikanan/ekonomi biru.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): IPM Sumatera Selatan meningkat menjadi **74,76** pada tahun 2025.

Secara nasional, Bappenas dan Uni Eropa telah meluncurkan *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) 2025 untuk mendukung transformasi ekonomi biru yang berkelanjutan.

Potensi dan Perkembangan Ekonomi Biru Sumsel 2025:

- Fokus Perikanan Budidaya: BRPPUPP Palembang (Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan) berkomitmen mendukung lima program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menciptakan ekonomi biru berkelanjutan, terutama melalui perikanan budidaya.
- Komoditas Unggulan: Ikan patin merupakan salah satu produk unggulan Sumsel yang diminati, menjadikannya pilar penting dalam ekonomi biru regional.
- Pengembangan Sektor: Meskipun Sumsel kaya energi fosil (batubara/migas), arah pembangunan mulai beralih ke diversifikasi ekonomi termasuk potensi ekonomi biru, sejalan dengan inisiatif nasional.



- Program Strategis: Pemerintah Provinsi Sumsel menekankan penguatan sumber daya lokal dan infrastruktur, yang mencakup manajemen perairan dan budidaya perikanan berkelanjutan dalam Musrenbang 2025.

Konteks Nasional 2025:

- Bappenas dan Uni Eropa meluncurkan Indonesia *Blue Economy Index* 2025 (IBEI 2025) untuk mentransformasi ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
- Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan diproyeksikan tumbuh 5,35% pada 2025, melampaui rata-rata nasional 5,11%, yang didukung oleh inklusivitas berbagai sektor, termasuk perikanan.

Secara keseluruhan, "indeks ekonomi biru" di Sumatera Selatan 2025 lebih tercermin dalam peningkatan kualitas perikanan budidaya perairan darat dan konservasi sungai/rawa.

Berdasarkan proyeksi dan peta jalan yang disusun untuk tahun 2025, pengembangan ekonomi biru di Sumatera Selatan (Sumsel) difokuskan pada optimalisasi sumber daya lokal yang berkelanjutan, sejalan dengan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI). Pada tahun 2025, ekonomi Sumatera Selatan diproyeksikan tumbuh positif, didukung oleh inklusivitas sektor-sektor produktif, termasuk potensi sumber daya pesisir.

Berikut adalah poin kunci efisiensi sumber daya dan indeks ekonomi biru di Sumatera Selatan tahun 2025:

- Optimalisasi Sumber Daya Lokal: Sumatera Selatan menempatkan penguatan sumber daya lokal sebagai salah satu program prioritas untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
- Efisiensi dan Ekonomi Biru: Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 2024-2025 menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya, meminimalkan limbah, dan melipatgandakan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang lebih baik.



- Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025: Ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh melampaui rata-rata nasional, yakni sebesar 5,35%. Pertumbuhan ini didukung oleh kinerja inklusif, realisasi investasi, dan konsumsi rumah tangga yang meningkat.
- Transformasi Ekonomi Biru: Pemerintah, melalui Bappenas dan Uni Eropa, meluncurkan Blue Food Assessment & Indonesia Blue Economy Index 2025 untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.
- Pengelolaan Lingkungan: Pengembangan ekonomi biru juga mencakup pemulihan dan perlindungan ekosistem pesisir serta penggunaan teknologi bersih, yang menjadi komponen penting dalam efisiensi sumber daya.

Faktor-faktor yang memengaruhi indeks ekonomi biru di Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2025 berfokus pada optimalisasi perairan darat (sungai/rawa) dan pesisir berkelanjutan, yang sejalan dengan peta jalan ekonomi biru Indonesia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sebagai salah satu provinsi dengan ekosistem perairan yang luas, berikut adalah faktor-faktor utamanya:

- Pengembangan Budidaya Perikanan Darat (Budidaya Perairan): Ini merupakan salah satu pilar utama ekonomi biru di Sumatera Selatan. Strategi 2025 menekankan budidaya sebagai tulang punggung pemenuhan protein nasional dan penggerak ekonomi, khususnya perikanan air tawar di sungai dan rawa.
- Implementasi Kebijakan "Karbon Biru" dan Ekosistem Pesisir: Pemerintah fokus pada pengelolaan ekosistem mangrove dan lamun, terutama di wilayah pesisir timur Sumsel, yang berperan dalam penyimpanan karbon dan keberlanjutan ekosistem laut.
- Optimalisasi Tata Ruang Laut dan Pesisir: Adanya program SIBE (Strategi Ekonomi Biru) 2025 yang bertujuan mengatur tata ruang laut nasional secara berkelanjutan, termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir di Sumsel.



- Dukungan Infrastruktur dan Teknologi (BRPPUPP Palembang): Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang berperan penting dalam memberikan riset dan teknologi untuk pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.
- Ekonomi Pesisir dan Nelayan Kecil: Peningkatan kualitas hidup nelayan kecil melalui program perikanan berkelanjutan dan inklusif (seperti inisiatif seaBLUE).
- Pertumbuhan Ekonomi Regional: Ekonomi Sumatera Selatan yang tumbuh positif (mencapai 5,22% pada triwulan I-2025) memberikan ruang bagi diversifikasi ke sektor biru.
- Pada tahun 2025, faktor-faktor ini akan dinilai dalam "Rapor Biru" untuk mengukur seberapa efisien pengelolaan sumber daya air berkelanjutan di Sumatera Selatan.

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan ada 2 indikator yaitu :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,19	75,15	110,21
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	69,97	62,29	99,03

Capaian indikator kinerja dari sasaran Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Secara ringkas, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat melalui Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian



sasaran misi. Misi yang dimaksud adalah menjaga kualitas lingkungan hidup, yakni meliputi kualitas air, kualitas udara, Kualitas Air Laut dan tutupan lahan yang merupakan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Terjadinya perubahan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi pada Tahun 2025 dari sebelumnya sebesar 71,98 menjadi 68,19 disebabkan oleh adanya perubahan metode perhitungan IKLH secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tersebut meliputi penambahan parameter baru dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU), perubahan metode perhitungan pada Indeks Kualitas Air (IKA), serta perubahan metode pada Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana pada metode yang baru telah memperhitungkan 23 kelas tutupan lahan yang lebih rinci dibandingkan metode sebelumnya.

Dengan diberlakukannya metode perhitungan yang baru tersebut, maka seluruh capaian dan target IKLH, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus dilakukan penyesuaian kembali agar menggunakan basis perhitungan yang sama dan dapat diperbandingkan secara akurat.

Perubahan metode ini secara umum menghasilkan nilai IKLH yang lebih rendah dibandingkan metode sebelumnya, karena indikator yang digunakan menjadi lebih lengkap, detail, dan menggambarkan kondisi lingkungan hidup yang lebih komprehensif. Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun realisasi capaian IKLH pada tahun berjalan telah melebihi target sebelumnya sebesar 71,98, namun nilai tersebut masih menggunakan metode perhitungan lama. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian target menjadi 68,19 agar selaras dengan metode perhitungan baru yang telah disepakati dan ditetapkan secara nasional.

Penyesuaian target ini bukan menunjukkan adanya penurunan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan metodologi perhitungan agar perencanaan, pengukuran kinerja, serta evaluasi capaian IKLH antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tetap sinkron dan menggunakan standar yang sama.

Target yang telah disesuaikan tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, serta digunakan sebagai dasar

dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pada Tahun 2025 realisasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 75,15 dari target yang ditetapkan yaitu 68,19 sehingga untuk Tahun 2025 nilai IKLH mencapai target. Jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada Tahun 2024 yaitu 71.93 dengan capaian IKLH di Tahun 2024 yaitu 72.69, maka terjadi peningkatan capaian.

Hasil perhitungan, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2025 yaitu 78,26 Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 72,87, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yaitu 78,24 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu 68,65. Sehingga didapat nilai IKLH sebesar 75,15.

Rumus Perhitungan Nilai IKLH adalah:

$$\begin{aligned} &= (0,428 \times \text{IKU}) + (0,340 \times \text{IKA}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL}) \\ &= (0,428 \times 78,26) + (0,340 \times 72,87) + (0,133 \times 68,65) + (0,099 \times 78,24) \\ &= 75,15 \end{aligned}$$



Jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada Tahun 2024 yaitu 72.69, capaian IKLH di Tahun 2025 yaitu 75.15, terjadi peningkatan capaian. Esensi dari nilai IKLH di atas adalah sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan memiliki angka 78.26. Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 90.25 maka terjadi penurunan sebesar 11.97.
- Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka 72.87 Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2025 bila dibandingkan tahun 2024 sebesar 59.54 maka terjadi peningkatan sebesar 13.33.
- Indeks Kualitas Lahan secara perhitungan berdasarkan website Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menunjukkan angka 68.65. bila dibandingkan tahun 2024 sebesar 44.52 maka terjadi peningkatan sebesar 24,13.
- Indeks Kualitas Air Laut berdasarkan perhitungan memiliki angka 78,24,



apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Air Laut pada Tahun 2024 adalah sebesar 79,71 maka terjadi penurunan sebesar 1.47.

Tabel. Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,93	72,69	101,05	68,19	75,15	110,20

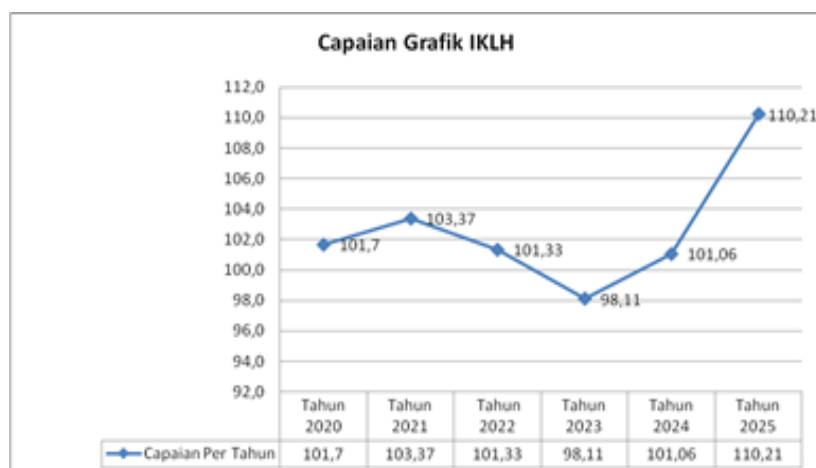
Berdasarkan data dan laporan lingkungan hidup, berikut adalah gambaran perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk periode 2023 hingga 2025:

- Tahun 2023: Kinerja lingkungan hidup di Sumsel fokus pada pemulihan pasca-pandemi, dengan tantangan utama pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kualitas udara. WALHI mencatat adanya konflik agraria yang mempengaruhi ekosistem, namun Pemprov Sumsel terus berupaya mencapai target IKLH dalam LKjIP 2023.
- Tahun 2024: Upaya peningkatan IKLH berlanjut dengan fokus pada pengelolaan sampah dan limbah, serta pemantauan kualitas air dan udara untuk mengantisipasi penurunan kualitas lingkungan akibat pesatnya pembangunan dan potensi alih fungsi lahan.
- Tahun 2025 (Proyeksi/Kesiapsiagaan): Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menekankan kesiapsiagaan karhutla di Sumsel sebagai fokus utama di awal tahun 2025 untuk menjaga kualitas udara (langit biru). Peningkatan IKLH di 2025 diupayakan melalui implementasi ekonomi hijau dan target penurunan emisi.

Faktor Penentu IKLH Sumsel 2023-2025:

- Pengendalian Karhutla & Kualitas Udara: Penanganan intensif karhutla menjadi indikator utama, terutama pada musim kemarau.
- Kualitas Air & Lahan: Pemantauan dan pengelolaan sungai serta tutupan lahan/vegetasi untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas perkebunan dan tambang.
- Kepatuhan Lingkungan: Kinerja pemerintah dan perusahaan dalam menaati aturan perlindungan lingkungan hidup.

Secara umum, tren upaya yang dilakukan Pemprov Sumsel adalah



meningkatkan skor IKLH melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih ketat, meskipun tantangan geografis dan sosial (konflik lahan) masih ada.

Capaian IKLH dari tahun 2020 s.d 2025 dilihat dari grafik diatas pada tahun 2020 s.d 2021 mengalami fluktuasi peningkatan dan pada tahun 2022 s.d 2023 terjadinya dampak penurunan yang signifikan serta meningkat kembali capaiannya pada tahun 2024 dan 2025. Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 nilai IKLH mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, yaitu sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 nilai IKLH melebihi target 67.40 Hal ini disebabkan capaian IKA, IKU dan IKL yang meningkat dikarenakan adanya pandemic Covid 19 dimana aktivitas masyarakat berkurang, curah hujan yang cukup tinggi di tahun 2020 serta tidak terjadi kebakaran hutan.



- Pada tahun 2021 nilai IKLH tidak mencapai target, hal ini disebabkan penurunan Indeks Kualitas Air. Hal ini dapat dilihat dari 68 titik lokasi pantau di Tahun 2021 yang berstatus tercemar berat. Hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO3-N, Sulfida dan Cyanida. Walaupun IKLH tidak mencapai target namun pencapaian IKLH meningkat dari tahun 2020 sebesar 68,53. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 ada perubahan metode perhitungan dengan adanya tambahan indikator IKAL.
- Tahun 2022 nilai IKLH melebihi target, hal ini disebabkan perbaikan kualitas udara dan lahan, akibat meningkatnya upaya perbaikan fungsi lahan/hutan, seperti kegiatan restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan di Sumatera Selatan.
- Tahun 2023 nilai IKLH mengalami penurunan sebesar 70,20 dari tahun 2022 sebesar 72,12 atau 1,92 hal ini disebabkan indeks kualitas air menurun akibat meningkatnya pemanfaatan wilayah sungai untuk pembangkit listrik di wilayah Kabupaten OKU, Muara Enim dan Musi Banyuasin serta bertambahnya jumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan. Selain itu juga menurunnya nilai indeks kualitas udara dikarenakan kondisi global el-nino yang memicu kebakaran hutan dan lahan, serta volume kendaraan untuk transportasi dalam kota meningkat akibat banyaknya kunjungan masyarakat setelah adanya jalan tol.
- Tahun 2024 nilai IKLH mengalami peningkatan sebesar 72,69 dari tahun 2023. Hal ini disebabkan Implementasi kegiatan seperti pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil. Untuk IKL meningkat karena adanya penambahan luas RTH. Peningkatan IKAL dikarenakan adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir laut.



- Tahun 2025 Nilai IKLH mengalami peningkatan sebesar 75,15 dari tahun 2024. Hal ini disebabkan Implementasi kegiatan seperti pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil. Untuk IKL meningkat karena adanya penambahan luas RTH.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pengelola Lingkungan	IKLH	75,15	75	100,2

Perbandingan nilai IKLH Tahun 2025 dengan target jangka menengah sampai dengan Tahun 2025 dan Target Nasional Tahun 2025 :

Tahun 2025 nilai IKLH Provinsi Sumatera Selatan belum melampaui target Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan menurunnya kualitas udara akibat dampak global el-nino serta kebakaran hutan volume kendaraan yang menyebabkan polusi udara tercemar dan lahan. Capaian IKLH Provinsi Sumatera Selatan hampir mencapai realisasi IKLH nasional. Hal ini didukung dengan Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Implementasi kegiatan seperti pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil. Untuk IKL meningkat karena adanya penambahan luas RTH. Peningkatan IKAL dikarenakan adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir laut.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.



Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah melalui pelaksanaan program dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan, serta pengendalian emisi GRK sesuai dengan kewenangan daerah, termasuk inventarisasi GRK, pembinaan kepada kabupaten/kota, serta penginputan dan pelaporan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan indikator dapat selaras dengan target nasional. Apabila sampai dengan Tahun 2029 target belum tercapai, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah melalui evaluasi terhadap capaian kinerja, peningkatan efektivitas program dan kegiatan yang mendukung indikator, serta penyesuaian strategi dan perencanaan sesuai arahan Pemerintah Pusat dan hasil evaluasi, guna mendukung pencapaian target pada periode selanjutnya. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,19	75,15	110,20	Faktor Pendorong : Tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan (area gambut dan minertal) yang mengakibatkan udara ambien dalam kondisi baik serta curah hujan yang cukup tinggi sehingga meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Faktor Penghambat : Masih tingginya pencemaran air Sungai dari sektor pertambangan di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin sehingga terjadi penurunan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Masih tingginya kadar DO di muara Sungai Musi I dan muara Sungai Musi II di Daerah Sungsang sehingga nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menurun.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur izin lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Prov. Sumsel selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Efisiensi sumber daya dalam konteks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sumatera Selatan tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pemanfaatan potensi SDA secara optimal.



Beberapa poin terkait efisiensi sumber daya dan IKLH Sumatera Selatan 2025 yaitu : Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Optimalisasi Energi, Sinergi Lingkungan Hidup.

Tabel. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan	- IKLH	68,19	75,15	110,20	1.777.305.554	1.517.647.343	85,39 %	77,48%
		- Penurunan Intensitas Emisi GRK	69,97	*69,29					

Pada Tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan efisiensi tersebut berdampak pada adanya pengurangan pagu anggaran pada beberapa program dan kegiatan, sehingga tidak seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan secara optimal.

Efisiensi anggaran ini mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami penundaan, pengurangan volume kegiatan, maupun tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Selain itu, keterbatasan anggaran yang tersedia menyebabkan prioritas pelaksanaan kegiatan difokuskan pada program dan kegiatan yang bersifat utama dan mendukung pencapaian target prioritas daerah, sehingga kegiatan lainnya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya kinerja pelaksanaan kegiatan, melainkan lebih kepada adanya penyesuaian kebijakan anggaran yang harus diikuti oleh perangkat daerah. Dengan demikian, tidak tercapainya sebagian target kinerja pada Tahun 2025 merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai. Capaian Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui Sumber APBD.

Pada tahun 2025 telah dilakukan pemantauan kualitas air dan udara yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	IKLH	75,15	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,15	Menunjang
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Penurunan Intensitas Emisi GRK	75,15 *69,29	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	56,92	Menunjang
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11,92	Menunjang



2. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Terjadinya perubahan target persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi pada Tahun 2025 dari sebelumnya sebesar 8,66 menjadi 69,97 disebabkan oleh adanya perubahan metodologi perhitungan dan penyesuaian indikator yang mengacu pada kebijakan dan pedoman terbaru dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dimana Pemerintah Daerah (Provinsi) dalam hal ini menyesuaikan sesuai dengan arahan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Saat ini, realisasi capaian persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Tahun 2025 masih menggunakan realisasi tahun 2024 karena data capaian tersebut baru dilakukan proses pengolahan, perhitungan, dan verifikasi pada Tahun 2026 melalui Aplikasi AKSARA Bappenas. Berdasarkan mekanisme yang berlaku, hasil realisasi tersebut diperkirakan akan tersedia pada periode Februari sampai dengan Agustus 2026, setelah seluruh tahapan input data, verifikasi, dan validasi selesai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahun 2026 ditargetkan sebesar 69,97% terealisasi 69,29% dengan capaian 99,03%. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terdapat di lapisan troposfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah. Gas rumah kaca secara alami terdapat di atmosfer yang menjaga suhu bumi tetap hangat, jika tanpa gas rumah kaca maka suhu di bumi akan sangat dingin dan sulit untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.

Sumatera Selatan (Sumsel) berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sejalan dengan target nasional 31,89% (upaya mandiri) hingga 43,20% (dukungan internasional) pada 2030. Fokus utamanya mencakup sektor kehutanan (FOLU) melalui restorasi gambut dan pencegahan deforestasi, serta sektor energi/pertambangan dengan optimalisasi energi bersih dan efisiensi bahan bakar.



Berikut adalah poin-poin penting penurunan intensitas emisi GRK di Sumatera Selatan:

- Strategi Sektor Kehutanan (FOLU): Fokus pada empat area kerja (Suaka Margasatwa Dangku, Gumai Tebing Tinggi, Gunung Raya, dan Padang Sugihan) dengan strategi menghindari deforestasi, restorasi lahan gambut, serta perbaikan tata air gambut.
- Sektor Energi dan Tambang:
 - Penggunaan teknologi bersih dan bahan bakar rendah karbon (gas alam).
 - Penerapan E-Reporting System untuk pemantauan emisi kendaraan operasional di sektor pertambangan (seperti di PT Bukit Asam Tbk).
- Kebijakan dan Perencanaan: Revisi Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK untuk menyesuaikan dengan target nasional yang lebih ketat, serta mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Ekonomi Hijau: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan di 17 kabupaten/kota.

Penurunan ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengurangi dampak perubahan iklim di wilayah Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan salah satu provinsi strategis dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional, mengingat perannya sebagai lumbung energi (batubara, minyak, gas) dan memiliki risiko kebakaran hutan/lahan tinggi. Berikut adalah perbandingan intensitas penurunan emisi GRK Sumatera Selatan dengan standar nasional:

a. Target Penurunan Emisi: Sumsel vs Nasional (2030)

- Standar Nasional (ENDC 2025/2030): Indonesia menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 31,89% dengan upaya domestik (sendiri) dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.



- Sumatera Selatan: Provinsi Sumsel berkomitmen mendukung target NDC pusat dengan fokus pada aksi mitigasi di sektor energi, transportasi, serta kehutanan dan lahan (FOLU). Sumsel gencar mendorong pembangunan rendah karbon, khususnya melalui target *net zero emission* 2030 pada sektor-sektor tertentu.

b. Pencapaian dan Strategi Utama

- Sektor Energi (Kekuatan & Tantangan): Sebagai lumbung energi, Sumsel menyumbang emisi cukup besar dari sektor energi. Namun, Sumsel tercatat telah melampaui target bauran energi bersih dengan mencapai 24,14% (data 2025), lebih cepat dari target-target yang ditetapkan di sektor tersebut.
- Sektor FOLU (Land4Lives): Sumatera Selatan aktif mendorong pembangunan rendah karbon, termasuk manajemen lahan untuk menekan emisi GRK, sejalan dengan sub-nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
- Target Net Zero 2030: Wakil Gubernur Sumsel menyatakan komitmen mengejar target zero emisi karbon pada 2030, yang sejalan dengan intensitas ambisius pusat.

c. Perbandingan Intensitas

- Sektor Energi: Sumsel berkontribusi tinggi pada emisi energi nasional (produsen batubara dan gas). Upaya transisi energi di Sumsel (seperti penggunaan EBT) adalah krusial untuk menurunkan intensitas emisi energi nasional.
- Aksi Mitigasi: Sumsel melakukan aksi mitigasi yang berfokus pada efisiensi energi, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, dan pencegahan kebakaran hutan, sejalan dengan standar nasional.

Kesimpulan

Sumatera Selatan berada dalam posisi strategis pendukung utama target nasional. Dengan mencapai 24,14% energi bersih (2025) dan mengejar *net zero* 2030, Sumsel berusaha bergerak selaras atau bahkan melampaui standar kecepatan penurunan emisi yang ditetapkan dalam dokumen NDC Nasional.



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah melalui pelaksanaan program dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan, serta pengendalian emisi GRK sesuai dengan kewenangan daerah, termasuk inventarisasi GRK, pembinaan kepada kabupaten/kota, serta penginputan dan pelaporan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan indikator dapat selaras dengan target nasional. Apabila sampai dengan Tahun 2029 target belum tercapai, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah melalui evaluasi terhadap capaian kinerja, peningkatan efektivitas program dan kegiatan yang mendukung indikator, serta penyesuaian strategi dan perencanaan sesuai arahan Pemerintah Pusat dan hasil evaluasi, guna mendukung pencapaian target pada periode selanjutnya. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel dibawah ini :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.		Penurunan Intensitas Emisi GRK	69,97	*69,29	-	Faktor Pendorong : adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, peningkatan efisiensi energi pada sektor industri, transportasi, dan	Dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi,



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						perkantoran turut berkontribusi dalam menurunkan jumlah emisi yang dihasilkan per unit kegiatan ekonomi. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya serap karbon. Di samping itu, mulai berkembangnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan meningkatnya kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup menjadi faktor pendukung dalam upaya penurunan intensitas emisi GRK. Faktor Penghambat : masih tingginya ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil yang merupakan sumber utama emisi GRK. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi pada periode tertentu turut memberikan kontribusi	serta peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan pendanaan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan juga perlu ditingkatkan. Di samping itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian target penurunan intensitas emisi GRK secara optimal dan berkelanjutan.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						terhadap peningkatan emisi. Keterbatasan anggaran dan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program mitigasi perubahan iklim, serta keterbatasan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, juga menjadi kendala. Selain itu, aktivitas ekonomi yang masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam berpotensi menghasilkan emisi yang cukup besar apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang optimal.	

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.



Tabel. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan	- IKLH - Penurunan Intensitas Emisi GRK	68,19 69,97	75,15 *69,29	110,20	1.777.305.554	1.517.647.343	85,39 %	77,48%

Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sumatera Selatan, pemerintah daerah tersebut telah menetapkan target penurunan intensitas emisi yang diselaraskan dengan target nasional (Enhanced NDC) hingga tahun 2030. Berikut adalah perbandingan dan detail penurunan Intensitas Emisi GRK di Sumatera Selatan:

- Jangka Waktu: Target penurunan emisi umumnya diukur dari tahun dasar (baseline) tertentu menuju target tahun 2030, dengan rencana aksi yang telah didorong sejak tahun 2012.
- Target Penurunan: Sumatera Selatan menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 11,79% dari Business As Usual (BAU) hingga tahun 2030.
- Sektor Utama: Penurunan intensitas emisi ini berfokus pada sektor energi, kehutanan, lahan gambut, serta pertanian.
- Komitmen Energi Bersih: Dalam rencana umum energi daerah, target penurunan emisi dari sektor bauran energi adalah 23% pada tahun 2025.
- Target Panjang: Sejalan dengan target nasional, Sumatera Selatan berkomitmen menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun **2060** atau lebih cepat.

Sebagai catatan, sebagai provinsi dengan potensi energi yang melimpah (batubara, gas, gambut), Sumatera Selatan fokus pada mitigasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau.

MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN, ENERGI DAN AIR

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi dan Air ada 1 indikator yaitu :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,52	79,31	102,31

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi dan Air adalah sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan yang mencapai 79,31, melampaui target sebesar 77,52 atau 102,31%. Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2025 memproyeksikan penguatan ketahanan pangan yang signifikan, didukung posisi sebagai peringkat ketiga nasional penghasil padi terbesar dengan produksi mencapai 3,5 juta ton, naik 23% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini beriringan dengan penurunan kemiskinan menjadi satu digit (9,85%) dan pertumbuhan ekonomi daerah di angka 5,35% pada 2025.

Poin Kunci Ketahanan Pangan Sumatera Selatan 2025:

- Produksi Beras: Produksi padi meningkat hampir 690.000 ton menjadi 3,5 juta ton, memperkuat posisi Sumsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
- Indeks Ketahanan Pangan (IKP): Badan Pangan Nasional (Bapanas) merilis FSVA dan IKP 2025 sebagai baseline evaluasi, menekankan pada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.



- Konsumsi Pangan: Konsumsi sayur dan buah di Sumsel (dan nasional) melampaui target (251,34 gr/kapita/hari), sementara konsumsi energi mendekati target ideal (2073 kkal/kapita/hari).
- Program Strategis: Optimalisasi penggunaan minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan guna mendukung kemandirian warga.

Meningkatnya ketahanan pangan merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan daerah. Berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Ketahanan . Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, sekaligus mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Tabel. Realiasi Indeks Ketahanan Pangan

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Indeks Ketahanan Pangan	74,07	79,31

Berdasarkan Tabel diatas terlihat adanya peningkatan kinerja ketahanan pangan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Indeks Ketahanan Pangan meningkat signifikan dari 74,07 pada tahun 2024 menjadi 79,31 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di masyarakat.

Provinsi Sumatera Selatan berhasil menempati peringkat ke-4 secara nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan. Capaian ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan bergizi, serta mendorong pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berkelanjutan. Pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan. Posisi Sumatera Selatan pada peringkat



empat nasional menunjukkan bahwa kebijakan dan program strategis di bidang pangan telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan signifikan Pada tahun 2025 dan menempatkan provinsi pada peringkat ke-4 nasional, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU) yang signifikan, di mana penurunan yang terjadi masih relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan, terutama pada wilayah dengan keterbatasan akses ekonomi dan geografis.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi meliputi ketergantungan pada komoditas pangan tertentu, fluktuasi harga pangan, keterbatasan cadangan pangan pemerintah, serta belum meratanya pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman di seluruh lapisan masyarakat. Faktor-faktor tersebut berpotensi menghambat percepatan penurunan POU dan keberlanjutan peningkatan ketahanan pangan daerah.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut dan menjaga keberlanjutan capaian kinerja ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dan terus melakukan berbagai upaya strategis. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan ketersediaan pangan dengan mendorong peningkatan produksi pangan lokal, penguatan cadangan pangan pemerintah, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Selain itu, peningkatan akses pangan dilakukan melalui penguatan distribusi pangan hingga ke wilayah rawan pangan, pelaksanaan program bantuan pangan bagi kelompok rentan, serta peningkatan daya beli masyarakat. Pada aspek pemanfaatan pangan, pemerintah daerah mendorong percepatan diversifikasi dan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), termasuk melalui edukasi gizi kepada masyarakat.



Sinergi dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan, dan masyarakat terus diperkuat guna memastikan kebijakan dan program ketahanan pangan berjalan efektif. Upaya-upaya tersebut terbukti berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Ketahanan Pangan dan penurunan POU, serta diharapkan mampu mendorong perbaikan yang lebih cepat dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Tabel. Realiasi Indeks Ketahanan Pangan dari tahun 2021 s/d 2025.

No	Keterangan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Ketahanan Pangan	69,55	69,64	73,82	74,07	79,31

Sumber : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan DKPP Prov. Sumsel

Berdasarkan data pada tabel, Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 nilai indeks tercatat sebesar 69,55 dan relatif stagnan pada tahun 2022 menjadi 69,64. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 73,82 dan terus meningkat pada tahun 2024 sebesar 74,07, hingga mencapai 79,31 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin membaiknya kondisi ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan, baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatan pangan.

Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Ketahanan Pangan yang meningkat sejalan dengan menurunnya angka POU menunjukkan keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan serta mengurangi tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Faktor pendukung utama Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 didorong oleh lonjakan produksi padi, optimalisasi lahan, serta program kemandirian pangan yang intensif. Sumsel diproyeksikan memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan nasional dengan peningkatan produksi padi signifikan pada 2025.

Berikut adalah faktor-faktor pendukung ketahanan pangan di Sumatera Selatan tahun 2025:

- **Peningkatan Signifikan Produksi Padi (Sumsel Lumbung Pangan):**
 - **Lonjakan Produksi:** Produksi padi (GKG) Sumsel pada 2025 diproyeksikan tembus 3,5 - 3,63 juta ton, meningkat sekitar 23% - 24,6% dibanding tahun 2024.
 - **Daerah Sentra:** Kabupaten Banyuasin dan OKU Timur menjadi kontributor utama, didukung dengan perluasan lahan dan teknik pertanian intensif.
- **Optimalisasi Lahan dan Program Strategis:**
 - **Cetak Sawah Baru:** Program cetak sawah baru (150 ribu hektar) untuk meningkatkan luas panen dan produksi padi, yang diintegrasikan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
 - **Pengembangan Food Estate:** Adanya pengembangan food estate di beberapa wilayah Sumsel.
- **Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP):**
 - Program ini dimassifkan untuk mengubah perilaku masyarakat dari pembeli menjadi penghasil pangan mandiri, sehingga menekan angka ketergantungan pangan.
 - Mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan produksi komoditas pangan lainnya (jagung, ubi kayu, perikanan, peternakan).
- **Penguatan Infrastruktur dan Kebijakan:**
 - **Penggunaan Dana Desa (Minimal 20%):** Penggunaan Dana Desa 2025 difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat desa, intervensi stunting, dan kemandirian warga.
 - **Validasi Data (FSVA):** Dinas Ketahanan Pangan Sumsel melakukan pemetaan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) 2025 untuk intervensi yang tepat sasaran.
- **Dukungan Produksi Lainnya:**
 - Polda Sumsel turut berkontribusi dengan produksi jagung (186.273 ton pada 2025) untuk menjaga kestabilan pasokan.



- **Investasi Strategis:** Penguatan proyek strategis nasional (seperti hilirisasi sawit dan infrastruktur) yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan produktivitas padi (kenaikan 1 Ku/Ha berpengaruh positif pada IKP) dan efektivitas program mandiri pangan menjadi kunci penguat ketahanan pangan Sumsel di 2025.

Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2025 dengan Standar Nasional yaitu: secara umum IKP melampaui target standar nasional pada komponen konsumsi protein, buah-sayur dan produksi beras (swasembada). Namun pemerintah masih melakukan intervensi pada pemerataan IKP antarwilayah dan stabilitas harga komoditas pangan pokok tertentu.

No	Keterangan	Target	Realisasi
1	Indeks Ketahanan Pangan Nasional	73,2	73,00
2	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumsel	77,52	79,31

Badan Pangan Nasional menetapkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional 2025 mencapai 73,00 terdiri dari aspek ketersediaan pangan (61,47), keterjangkauan pangan (82,70) dan pemanfaatan pangan (74,99). Dengan 12 indikator Ketahanan Pangan yang lebih komprehensif, capaian IKP Nasional 2025 hampir mencapai target RPJMN 2025 sebesar 73,2, capaian ini merupakan edisi terbaru yang menjadi dasar peningkatan nilai IKP kedepan. Untuk Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mencapai skor 79,31 melampaui target sebesar 77,52 serta telah melampaui target standar nasional. Capaian ini mengidentifikasi adanya perbaikan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Program dan kegiatan ketahanan pangan di Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2025 difokuskan pada penguatan kemandirian pangan tingkat rumah tangga, peningkatan produksi komoditas strategis, serta penurunan angka kerawanan pangan (FSVA).

Berikut adalah poin-poin utama program dan kegiatan ketahanan pangan Sumsel 2025 berdasarkan hasil pencarian:



- **Program Utama: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025**
 - Fokus: Menggerakkan masyarakat untuk menjadi produsen pangan mandiri, bukan hanya konsumen, sekaligus mengendalikan inflasi dari sisi pasokan.
 - Target: Meliputi lingkungan desa, panti, hingga perkantoran untuk memastikan akses pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan.
 - Implementasi: Inovasi "GSMP Goes to School/Campus" dan intensifikasi pemanfaatan pekarangan.
- **Peningkatan Produksi Pangan dan Sawah Baru (Sumsel Lumbung Pangan)**
 - Cetak Sawah Baru: Sumsel siap mencetak 150 ribu hektare sawah baru pada 2025 untuk menyokong swasembada pangan nasional.
 - Tanam Perdana: Dilakukan inisiasi cetak sawah rakyat sebagai bagian dari Program Strategis Nasional.
 - Produksi Komoditas: Fokus pada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Contoh: Polda Sumsel mendukung produksi 186.273 ton jagung pada 2025.
- **Pemetaan dan Evaluasi Ketahanan Pangan (IKP/FSVA)**
 - Penyusunan FSVA & IKP 2025: Pemprov Sumsel melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) tahun 2025.
 - Baseline Data: FSVA dan IKP 2025 menjadi edisi pertama sebagai baseline evaluasi untuk intervensi program, termasuk penurunan stunting.
- **Diversifikasi Pangan dan Penguatan Cadangan**
 - Diversifikasi Pangan Lokal: Mendorong konsumsi pangan non-beras dan non-terigu untuk mengurangi ketergantungan pada beras.
 - Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Diterapkan sebagai instrumen untuk menguatkan ketahanan pangan dan menyerap hasil produksi petani lokal.
 - Cadangan Pangan: Penguatan cadangan dan distribusi pangan desa/kalurahan untuk menjaga stabilitas stok.



- **Kegiatan Pendukung**

- Gebyar Perbenihan: Mempertahankan swasembada beras melalui penyediaan benih unggul.
- Rapat Evaluasi: Rapat berkala untuk memantau hasil produksi dan kerentanan pangan daerah.

Program-program ini bertujuan menjaga Sumsel sebagai pilar swasembada pangan nasional pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil pemaparan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2025, Sumatera Selatan memosisikan diri sebagai pilar swasembada pangan nasional dengan fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya, percepatan cetak sawah, dan penguatan Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Berikut adalah poin-poin efisiensi sumber daya dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sumsel tahun 2025:

- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2025: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun FSVA dan IKP 2025 sebagai instrumen strategis/baseline untuk memetakan kerentanan pangan dan menentukan prioritas intervensi.
- Target Ketahanan Pangan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan 100% desa dan kelurahan menerapkan GSMP pada tahun 2025, meningkat dari capaian 2024, guna mengurangi ketergantungan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
- Efisiensi Sumber Daya & Infrastruktur:
- Perluasan Lahan: Pemerintah fokus pada proyek cetak sawah baru seluas 48.000 hektar pada tahun 2025 untuk memaksimalkan potensi lahan di Sumsel.
- Teknologi & SDM: Penguatan ketahanan pangan dilakukan dengan optimalisasi kualitas SDM dan penerapan teknologi pertanian, didukung oleh alokasi 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan.
- Andalan Pangan Nasional: Sumsel diproyeksikan menjadi andalan baru pangan nasional dengan tingkat produksi tinggi yang didukung oleh intervensi kebijakan yang tepat sasaran.



- Target Kinerja (Contoh Kota Palembang): Sebagai bagian dari Sumsel, target Indeks Ketahanan Pangan (IKP) kota di Sumsel cukup tinggi (contoh: 73,90) dengan target skor Pola Pangan Harapan (PPH) 93 pada tahun 2025.

Langkah-langkah ini bertujuan memastikan efisiensi anggaran dan efektivitas program dalam meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.

Berdasarkan data terkini tahun 2025-2026, Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan performa ketahanan pangan yang sangat kuat, bahkan menargetkan posisi sebagai lumbung pangan utama nasional. Berikut adalah perbandingan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sumsel dengan standar/posisi nasional pada tahun 2025:

Peringkat dan Posisi Produksi (Tahun 2025)

- Target Sumsel: Pemprov Sumsel membidik posisi 3 besar lumbung pangan nasional pada tahun 2025 melalui intensifikasi "Gerakan Sumsel Mandiri Pangan" (GSMP) dan cetak sawah rakyat.
- Capaian Aktual: Pada awal 2025, Sumsel tercatat sebagai peringkat ketiga nasional penghasil beras terbesar, dengan proyeksi produksi padi mencapai 3,5 juta ton atau meningkat 23% dari tahun sebelumnya.
- Perbandingan: Sumsel melampaui rata-rata provinsi lain di Sumatera dalam kontribusi produksi, menjadikan indeks ketersediaan pangan di Sumsel di atas standar rata-rata nasional.

MENINGKATNYA PENGELOLAAN BENCANA

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan Bencana ada 1 indikator yaitu :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	130,41	136.67	107,10

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Pengelolaan Bencana adalah sebagai berikut :

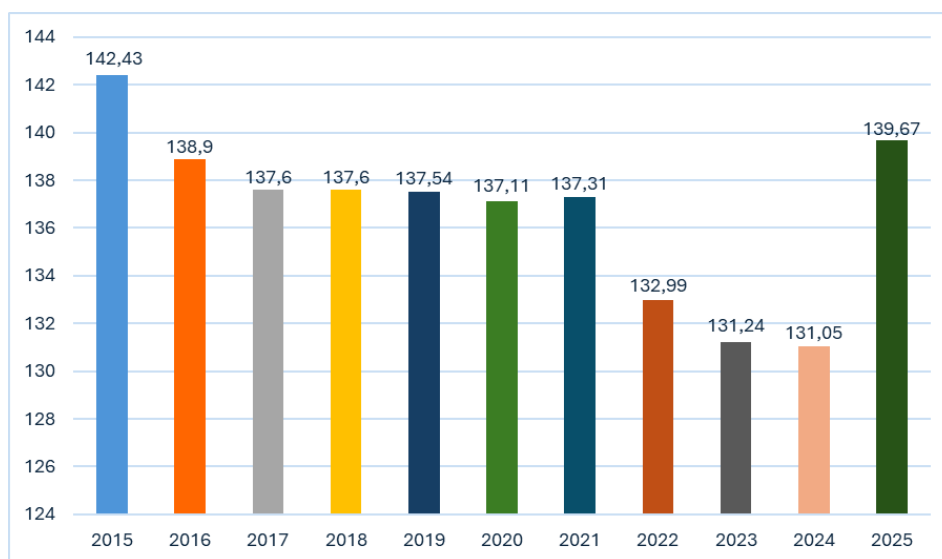
1. Indeks Resiko Bencana (IRBI)

Sebelum menjelaskan indikator penurunan nilai indeks risiko bencana ada beberapa potensi bencana yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi prioritas dalam pengurangan risiko bencana di 17 Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut:

- Gelombang Ekstrim dan Abrasi.
- Banjir Cuaca Ekstrim.
- Banjir Bandang.
- Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Cuaca Ekstrim.
- Tanah Longsor.
- Kekeringan.
- Letusan Gunung Api.
- Gempa Bumi.
- Epidemi dan Wabah Penyakit.
- Likuefaksi.
- Kegagalan Teknologi.
- Pandemi COVID-19.

Bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumsel diantaranya karhutla, bansor, angin puting beliung, dan covid-19 tahun 2020 kemarin. Potensi bencana tersebut diatas perlu dilakukan pengurangan risiko agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Berikut ini dapat ditampilkan grafik penurunan IRBI di Sumsel tahun 2015-2025 :

Grafik. Nilai IRBI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2025



Sumber: InaRISK

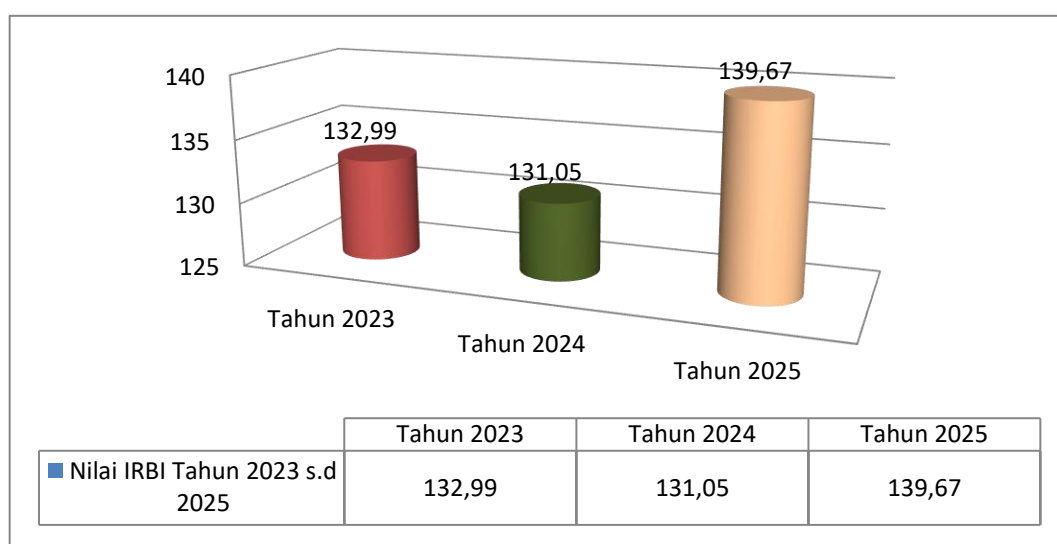
Dari grafik diatas Provinsi Sumsel telah berhasil melakukan penurunan risiko bencana. Berdasarkan grafik diatas nilai Indeks Risiko Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2015-2024 adanya penurunan nilai IRBI namun di tahun 2025 mengalami peningkatan dari 131,05 menjadi 139,67. Kenaikan ini mencerminkan adanya perubahan dinamika risiko bencana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya bahaya, kerentanan, menurunnya kapasitas daerah, dan frekuensi kejadian bencana alam, tekanan pembangunan di wilayah rawan bencana, serta bertambahnya tingkat keterpaparan masyarakat dan aset terhadap ancaman bencana.

Peningkatan nilai IRBI juga menggambarkan bahwa risiko bencana perlu mendapat perhatian yang lebih serius, khususnya dalam aspek pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas daerah. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya integrasi kebijakan penanggulangan bencana ke dalam

perencanaan pembangunan, tata ruang, serta penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan.

Di sisi lain, meningkatnya nilai IRBI tahun 2025 dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan strategi penanggulangan bencana. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan data dan teknologi kebencanaan, serta partisipasi aktif masyarakat, risiko bencana diharapkan dapat ditekan secara bertahap. Dengan langkah-langkah tersebut, peningkatan nilai IRBI tidak hanya menjadi indikator risiko, tetapi juga menjadi pemicu untuk memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

Grafik. Perbandingan Nilai Indeks Risiko
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 s.d 2025



Dari grafik diatas bisa dilihat perbandingan IRBI tahun 2023 s.d 2025. Nilai IRBI mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 jika disbanding 2 tahun terakhir. Nilai IRBI tahun 2023 menunjukkan oenurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan indikator positif dalam upaya pengurangan risiko bencana, tahun 2024 mengindikasi adanya upaya berkelanjutan untuk menurunkan indes risiko di berbagai Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Penurunan Nilai IRBI di Sumatera Selatan umumnya didorong oleh peningkatan kapasitas daerah, seperti penguatan regulasi penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat



dalam menghadapi ancaman rutun seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.

Tabel. Perbandingan Nilai Indeks Risiko Bencana

NO	INDEKS RISIKO	NILAI INDEKS RISIKO		MENURUN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	SUMSEL	131,05	139,67	8,62

Pada tahun 2025 Nilai Indeks Risiko Bencana Sumatera Selatan masuk dalam kategori tinggi dengan skor 139,67 terdapat kenaikan sebesar 8,62 sebelumnya nilai IRBI Tahun 2024 dengan nilai 130,05.

Berdasarkan hasil pemutakhiran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2025, Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan adanya peningkatan nilai risiko bencana dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa potensi ancaman bencana di wilayah Sumatera Selatan semakin meningkat dan memerlukan perhatian serta penanganan yang lebih serius dan terencana.

Peningkatan indeks risiko ini juga mencerminkan adanya tantangan dalam aspek kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kapasitas penanggulangan bencana yang perlu terus diperkuat. Oleh karena itu, hasil IRBI 2025 menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berwawasan kebencanaan dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana

Berdasarkan dokumen perencanaan BNPB dan inaRISK tahun 2025-2026, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Sumatera Selatan menunjukkan dinamika yang dinamis, mencerminkan pergeseran antara ancaman bencana alam yang tinggi (seperti kebakaran hutan/lahan dan banjir) dengan upaya peningkatan kapasitas daerah.

Nilai IRBI tahun 2025 dengan realisasi 139,67 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 127,88 masih belum terjadi penurunan signifikan. Target 2029 menitikberatkan pada pergeseran paradigma dari responsive (tanggap darurat) menjadi preventif (pengurangan risiko) yang lebih



sistematis untuk menurunkan nilai indeks secara keseluruhan.

Berikut adalah perbandingan standar nasional IRBI untuk Sumatera Selatan pada konteks 2025:

- Profil Risiko Bencana Sumsel (Standar Nasional)
 - Posisi Kelas Risiko: Berdasarkan data IRBI, Sumatera Selatan secara konsisten dikategorikan dalam tingkat risiko sedang hingga tinggi.
 - Jenis Ancaman Utama: Sumsel memiliki risiko tinggi pada 7 jenis bencana, terutama Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla), banjir, dan tanah longsor.
 - Faktor Penentu: Tingginya risiko dipengaruhi oleh tingginya paparan bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) sosial budaya/ekonomi, dan kapasitas (capacity) penanggulangan.
- Perbandingan Standar 2024-2025 (Tren)
 - Peningkatan Kapasitas (IKD): Sebagai bagian dari standar 2025, Sumsel berfokus pada peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang diukur dari kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan.
 - Penurunan Indeks: Hampir seluruh provinsi, termasuk Sumsel, diarahkan untuk menurunkan nilai indeks risiko, namun lajunya fluktuatif tergantung pada penanggulangan karhutla dan banjir.
 - Perubahan Data: IRBI 2025 menggunakan pembaruan data bahaya dan kapasitas (berdasarkan pemutakhiran berkelanjutan) yang memengaruhi nilai risiko dibanding tahun sebelumnya.
- Fokus Rencana Penanggulangan Bencana (Sumsel)

Dalam rangka memenuhi standar nasional 2025, Sumsel berfokus pada:

 - Renais PB 2025-2029: Pemerintah menggunakan dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029 sebagai acuan strategis.
 - Pengurangan Risiko: Mitigasi difokuskan pada kawasan rawan bencana (tematik) untuk menurunkan angka kerugian harta benda dan dampak sosial ekonomi.
 - Sinergi Kelembagaan: Peningkatan kapasitas BPBD Sumatera Selatan dalam manajemen kedaruratan.



Berdasarkan hasil pencarian, berikut adalah informasi terkait program, kegiatan, dan kondisi kebencanaan di Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2025 yang melibatkan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan mitra relawan:

- Fokus Kegiatan Kebencanaan Sumsel 2025
 - Dominasi Bencana Banjir: Sepanjang 2025, BPBD mencatat ratusan kejadian bencana di Sumsel, dengan banjir menjadi jenis bencana terbanyak.
 - Kolaborasi Kesiapsiagaan: PLN UID S2JB melakukan kolaborasi dengan BPBD Sumsel di awal 2025 untuk memperkuat kesiapsiagaan darurat bencana.
 - Pengurangan Risiko Bencana (PRB): Fokus pada pemetaan dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) yang kolaboratif.
 - Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025: Kegiatan nasional yang didukung di tingkat daerah, termasuk sosialisasi kesiapsiagaan dan sekolah aman bencana.
- Program Utama (Konteks Rencana Aksi 2025)
 - Penyusunan dan Pemutakhiran IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia): IRBI digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Pada 2025, dilakukan rapat koordinasi (contoh: di BPBD Kota Palembang) untuk membahas hasil IRBI.
 - Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025: Diperingati pada 26 April, difokuskan pada latihan evakuasi mandiri.
 - Penguatan Relawan: Melibatkan ikatan relawan/mahasiswa dalam penanganan bencana (respons solidaritas).
- Mitigasi dan Antisipasi
 - Penanganan Darurat: Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas (Satgas) untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor, yang operasionalnya didukung anggaran APBD.



- Modifikasi Cuaca: Upaya ini dilakukan untuk mengatasi cuaca ekstrem yang memicu bencana.

Secara umum, kegiatan IRBI di Sumsel pada 2025 mengarah pada pembaruan data kajian risiko untuk menentukan tingkat ancaman bencana, serta memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan data terkini tahun 2025, upaya pengurangan risiko bencana di Sumatera Selatan (Sumsel) difokuskan pada penguatan mitigasi hidrometeorologi (banjir dan karhutla) serta peningkatan kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana.

Beberapa upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di tahun 2025 meliputi:

Penguatan Mitigasi Bencana Banjir dan Karhutla 2025

Pemprov Sumsel menekankan kesiapsiagaan dini, terutama mengingat 11 wilayah di Sumsel ditetapkan sebagai daerah rawan bencana pada musim hujan 2025. BPBD Sumsel mencatat setidaknya 284 kejadian bencana terjadi sepanjang 2025, dengan dominasi banjir, sehingga fokus tindakan ada pada kesiapsiagaan operasional.

- Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Sumsel 2025
BPBD meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi ancaman bencana di wilayah Sumsel. Rapat ini dilakukan untuk memperkuat langkah-langkah kesiapsiagaan, termasuk koordinasi data dengan BMKG.
- Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
Sumsel membentuk Forum PRB (disahkan/diperkuat sekitar Juli 2025) untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat. Upaya ini mencakup sosialisasi, pelatihan, dan penyusunan dokumen rencana pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.

- Penanggulangan Karhutla

Sepanjang tahun 2025, BPBD Sumsel mencatat 220 kasus karhutla dan terus mengupayakan penanganan cepat untuk mengurangi risiko bencana akibat kebakaran lahan.

- Sinergi dalam Rencana Nasional (RENAS) PB 2025-2029

Pemda Sumsel menjadikan rencana penanggulangan bencana daerah sebagai acuan dalam upaya menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Upaya-upaya ini krusial mengingat tingginya frekuensi bencana banjir dan karhutla yang terjadi sepanjang 2025 di Sumatera Selatan.

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

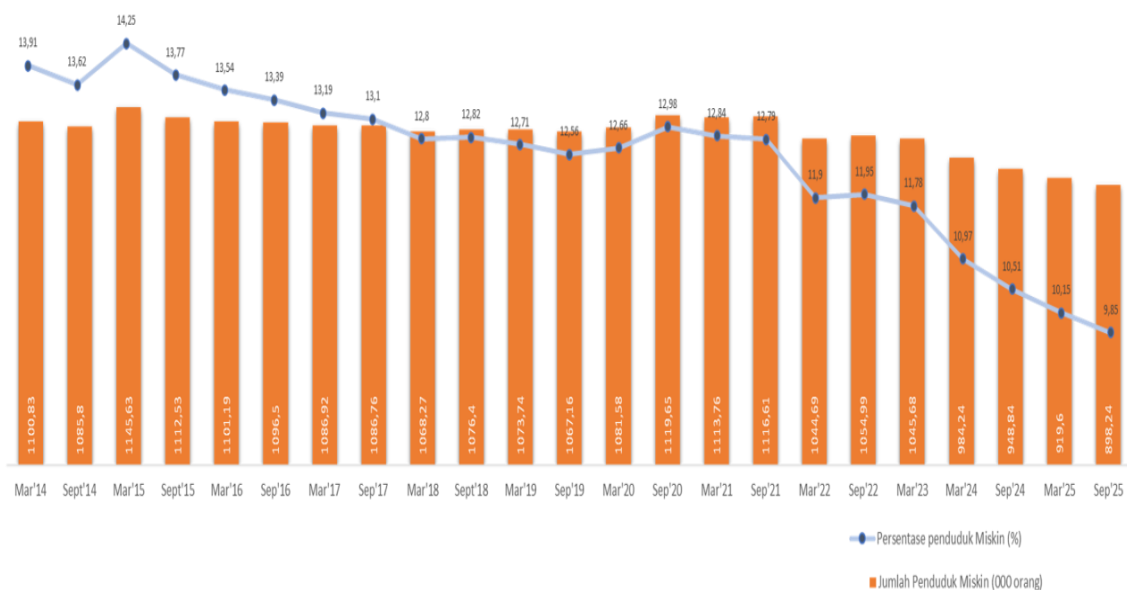
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat ada 2 indikator yaitu :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Kemiskinan	%	9,37-10,37	9,85	105,01
2	Rasio Gini	Indeks	0,316-0,320	0,298	93,13

Capaian indikator kinerja dari sasaran Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan

Secara umum kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan, dalam periode Maret 2014-September 2025, menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan menurun dari 1.100,83 ribu orang di Maret 2014 menjadi 898,24 ribu orang pada September 2025. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 13,91% menjadi 9,85%. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2014 sampai dengan September 2025 disajikan pada grafik dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan

Penduduk miskin September 2025 turun jika dibandingkan dengan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Selatan September 2025 mencapai 898,24 ribu orang atau turun 21,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2025 yang berjumlah 919,60 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 9,85%, mengalami penurunan 0,30% poin terhadap persentase Maret 2025. Sedangkan untuk Persentase penduduk miskin secara Nasional pada September 2025 sebesar 8,25%, menurun 0,22% poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,32% poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta orang, menurun 0,49 juta orang terhadap Maret 2025 dan menurun 0,70 juta orang terhadap September 2024.



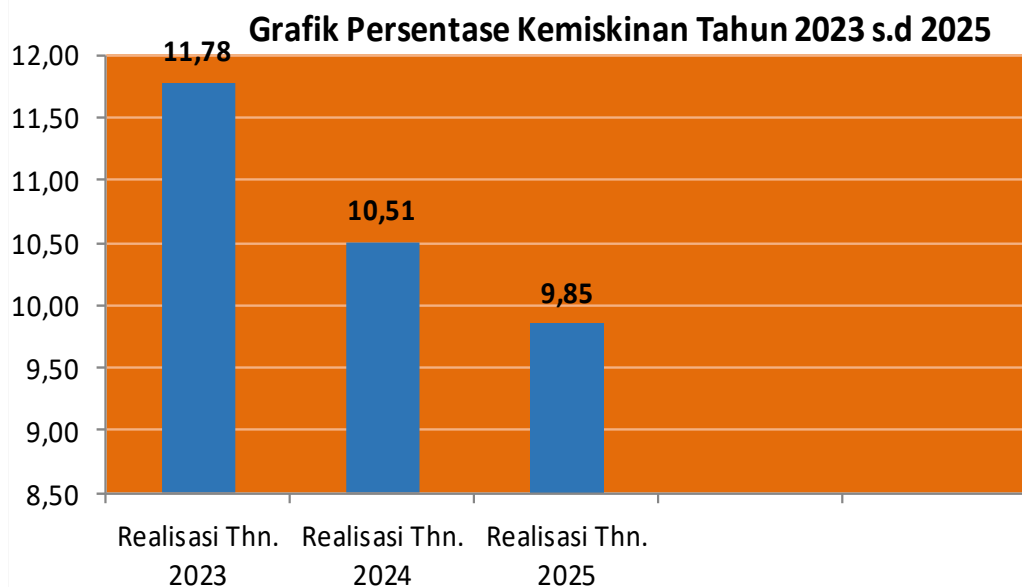
Tabel. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2025– September 2025

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2025	314,49	9,10
September 2025	310,56	8,91
Perdesaan		
Maret 2025	605,12	10,79
September 2025	587,68	10,43
Total		
Maret 2025	919,60	10,15
September 2025	898,24	9,85

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2025–September 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 3,9 ribu orang dari 314,49 ribu orang Maret 2025 menjadi 310,56 ribu orang September 2025. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2025 menurun sebesar 0,19% dari semula 9,10% pada Maret 2025 menjadi 8,91% pada September 2025. Penduduk miskin di perdesaan September 2025 menurun sebanyak 17,4 ribu orang dibandingkan Maret 2025 dari 605,12 ribu orang menjadi 587,68 ribu orang. Persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2025 menurun sebesar 0,36% poin dari semula 10,79% menjadi 10,43% pada September 2025.

Sedangkan untuk tingkat nasional Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2025–September 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat sebesar 0,09 juta orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,40 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,73% menjadi 6,60% Sementara itu, di perdesaan turun dari 11,03% menjadi 10,72%.



Grafik 1.18 Perbandingan Persentase Kemiskinan Tahun 2023 s.d 2025

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebagaimana yang tergambar pada grafik diatas, maka dapat dilihat angka kemiskinan terus mengalami penurunan, di tahun 2023 sebesar 11,78% sedangkan di tahun 2024 sebesar 10.51% mengalami penurunan capaian sebesar 1,27%. Sama halnya pada tahun 2025 persentase kemiskinan sebesar 9,85% kembali mengalami penurunan sebesar 0.66% bila dibandingkan persentase kemiskinan pada tahun 2024. Jika dilihat dari grafik capaian persentase angka kemiskinan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2025 - September 2025 antara lain adalah:

- a. Ekonomi Sumatera Selatan triwulan 3-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 % (y-on-y), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,04%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan Agustus 2025 sebesar 3,69%, turun dibanding TPT Februari 2025 (3,89%).
- c. Pengeluaran konsumsi rumah tangga Sumatera Selatan pada Triwulan 3 2025 meningkat 4,98% (y-on-y).
- d. Inflasi Sumatera Selatan September 2025 relatif terkendali sebesar 3,44% (y on y).



- e. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel September 2025 sebesar 127,77 sedangkan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) September 2025 sebesar 131,72.
- f. Beberapa komoditas yang mempengaruhi kemiskinan tercatat mengalami kenaikan harga, antara lain beras (naik 4,21%), daging ayam ras (naik 4,45%), mie instan (naik 5,66%) dan rokok kretek filter (naik 10,05%) sedangkan yang mengalami penurunan harga adalah telur ayam ras (turun 1,6%).
- g. Berbagai program bansos dikucurkan, antara lain PKH, BPNT/Sembako dan PBI di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan (sumber: Dinas Sosial Prov. Sumsel). Selain itu peningkatan MBG yang disalurkan tercermin dari jumlah SPPG yang meningkat dari sebanyak 3 SPPD di bulan Maret 2025 menjadi 134 SPPG di bulan September 2025 (sumber: BGN).
- h. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang di Sumsel pada September 2025 (48,12%) meningkat dari TPK Hotel Bintang pada Maret 2025 (31,46%).

Keberhasilan penurunan persentase angka kemiskinan merupakan kerja sama bersama antara seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Sosial tapi dari seluruh aspek stakeholder yang ada. Penurunan persentase angka kemiskinan ini salah satunya didukung melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup. Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah yang ikut berperan dalam penurunan angka kemiskinan disamping instansi terkait lainnya. Adapun program kegiatan yang mendukung terjadinya penurunan persentase angka kemiskinan ini antara lain:

- a. Program Nasional dari Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 293.940 Keluarga Miskin Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Tujuan dari program ini untuk :
 - Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sangat miskin;

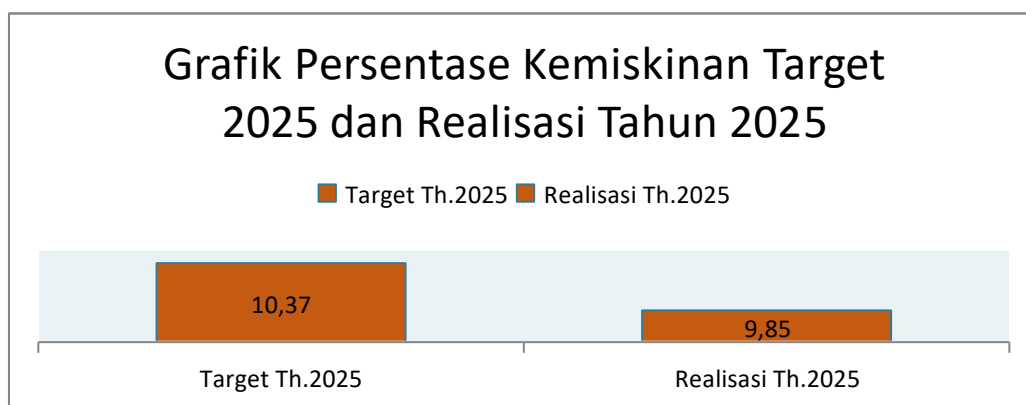


- Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan);
- Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib pendidikan dasar 12 Tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Kriteria dari PKH ini adalah Rumah Tangga yang memiliki anak balita, anak usia sekolah Ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia berusia 60 tahun keatas. Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan pada 17 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Muba, OKI, OI, Lahat, Musi Rawas, Empat Lawang, Muara Enim, OKU, OKUS, OKUT, PALI dan Muratara.

- b. Bantuan Program Sembako kepada warga miskin di Provinsi Sumatera Selatan di 17 Kabupaten/Kota. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebesar Rp. 200.000/bulan sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat akan kebutuhan pangan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan Sosial Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya berupa beras dan telur.
- c. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Miskin di wilayah 17 Kabupaten/Kota sebanyak 1.500 KK. Bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan/bahan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki embrio usaha namun terhambat perkembangannya sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

- d. Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, Melalui pelayanan sosial didalam panti, diluar panti dan bantuan sosial (Asistensi Lanjut Usia/Bantuan Langsung Tunai) bagi lansia non potensial serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia potensial.
- e. Program Perlindungan Sosial Anak Pelayanan di dalam panti, diluar panti dan bantuan sosial bagi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- f. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), pemberian bantuan cash transfer bagi penyandang disabilitas berat dan bantuan alat bantu, penjangkauan kedaruratan/bebas pasung bagi penyandang disabilitas mental (orang dengan gangguan jiwa)
- g. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial
Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.



Grafik 1.19 Persentase Kemiskinan Target 2025 dan Realisasi Tahun 2025

Berdasarkan grafik Capaian Persentase Kemiskinan Tahun 2025 dapat dijelaskan, pada akhir tahun 2025 realisasi persentase angka kemiskinan sebesar 9.85% dari yang ditargetkan sebesar 10,37% hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,52% atau target penurunan angka kemiskinan menjadi 1 (satu) digit di Provinsi Sumatera Selatan telah tercapai dibandingkan periode sebelumnya.

Efisiensi Sumber Daya dan Faktor Pendukung:

Penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor efisiensi dan kebijakan strategis:

- a. Optimalisasi Anggaran: APBN dan APBD di Sumatera Selatan tercatat tangguh hingga akhir 2025, dengan pendapatan yang tumbuh kuat dan optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD).
- b. Strategi Pengentasan Kemiskinan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan langkah strategis khusus di tahun 2025, termasuk peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan penanganan kemiskinan ekstrem.
- c. Hilirisasi dan Investasi: Pemanfaatan potensi sumber daya alam (food estate, hilirisasi sawit, dan biorefinery) yang diproyeksikan dalam PSN (Proyek Strategis Nasional) di Sumatera Selatan berpotensi memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi daerah.
- d. Penurunan Kemiskinan Ekstrem: Rata-rata penurunan kemiskinan ekstrem di Sumsel cukup signifikan, mencerminkan efisiensi intervensi pada kelompok masyarakat paling rentan.

Berikut ini beberapa program kegiatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama terkait Penurunan Persentase Angka Kemiskinan :

- a. Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Provinsi.
- b. Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia terlantar di dalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.
- c. Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut:

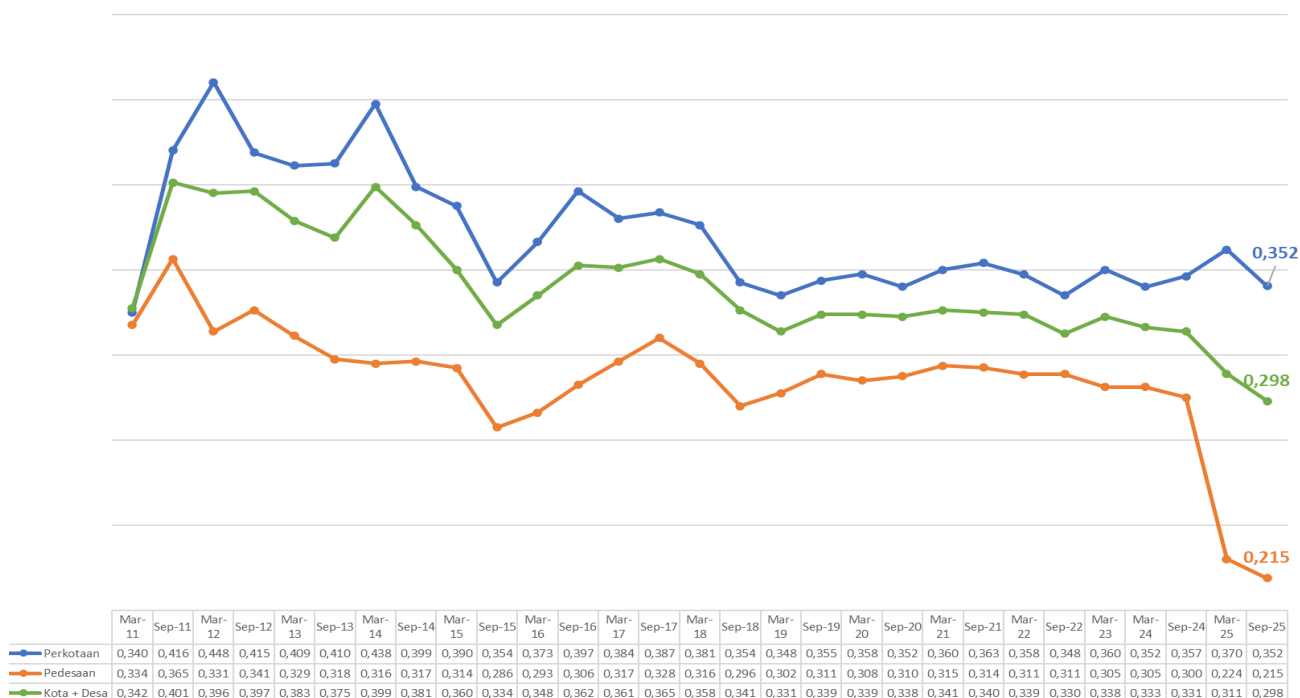


- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- d. Program Penanganan Bencana dengan Kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Permakanan dan Sandang.
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi.
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan.
 - Pelayanan Dukungan Psikososial.
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Kegiatan sebagai berikut :
- Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

2. Rasio Gini

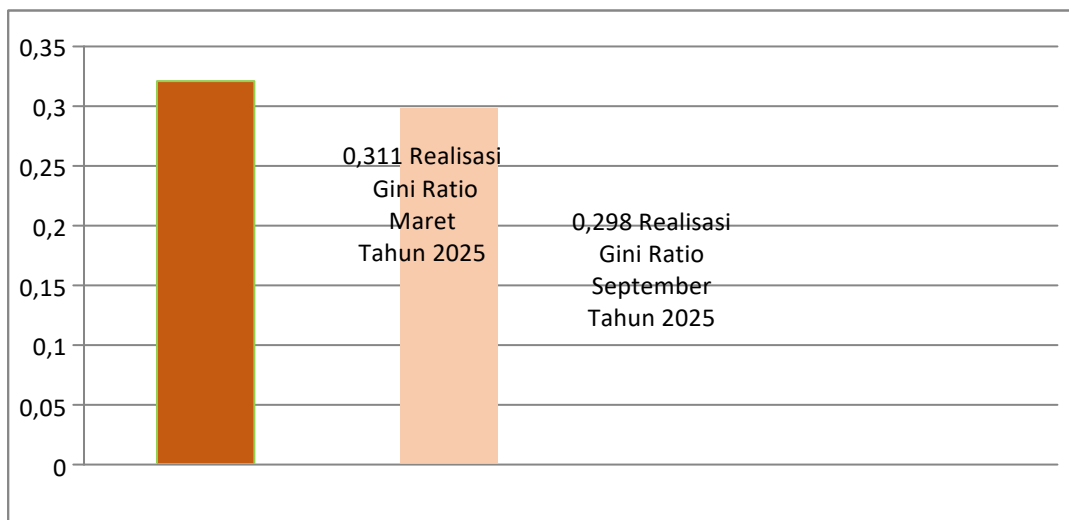
Gini Ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan dimana nilainya berkisar antara 0 dan 1. Ratio Gini = 0 mengindikasikan ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Sementara Rasio Gini = 1 menunjukkan terjadinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna, artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Semakin mendekati 0 ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pendapatan, BPS menggunakan indikator Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan sejak Maret 2011 tampak fluktuatif dan cenderung menurun selama periode 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Maret 2011 Gini Ratio sebesar 0,342, pada September 2025 angka Gini Ratio hanya sebesar 0,298. Ini menunjukkan selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sumatera Selatan.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar. Perkembangan Gini Ratio, Maret 2011–September 2025

Dalam enam bulan terakhir atau pada periode Maret 2025-September 2025 Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,311 keadaan Maret 2025 menjadi 0,298 pada September 2025. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2025 sebesar 0,352, turun 0,018 poin dibanding Maret 2025 yang sebesar 0,370. Sebaliknya untuk daerah pedesaan, Gini Ratio pada September 2025 tercatat sebesar 0,215, turun 0,009 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2025 sebesar 0,224.



Grafik 1.20 Gini Ratio Tahun 2025

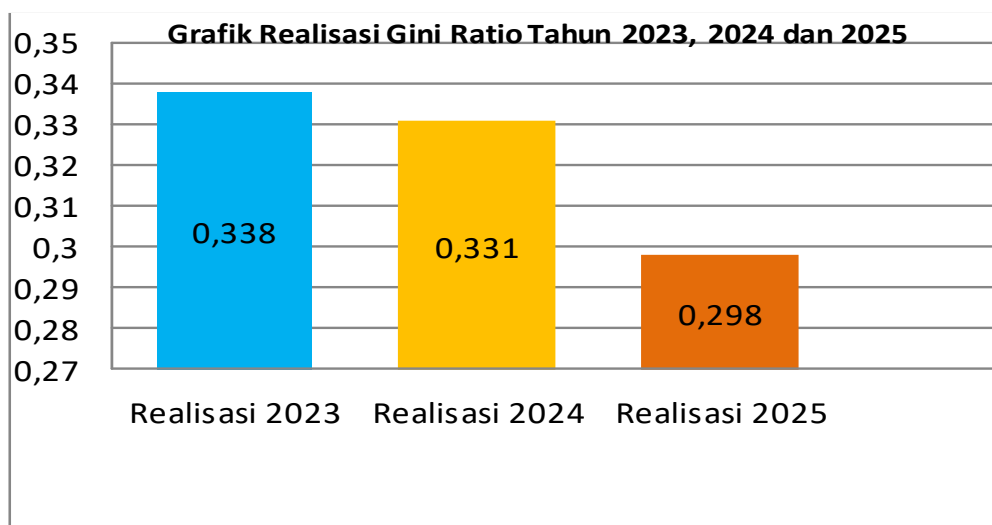
Penurunan Gini ratio di Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada grafik diatas. Tercapainya target penurunan Ratio Gini di Provinsi Sumatera Selatan menandakan terjadinya perbaikan pemerataan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penyebab dari menurunnya Gini ratio antara lain :

- Perluasan jangkauan dan penambahan jumlah penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin/rentan. Pada tahun 2025 jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial sebanyak 2.444.966 jiwa yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota (dipedesaan maupun perkotaan), mengalami kenaikan sebesar 77,99% atau 537.942 jiwa jika dibandingkan capaian pada tahun 2024 sebanyak 1.907.024 jiwa. Dengan adanya perluasan jangkauan dan penambahan jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin/rentan tersebut. dan menguatkan perekonomian mereka.
- Penambahan indeks bantuan sosial bagi penerima PKH dan Program Sembako, Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH, Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) khusus bagi Ibu Hamil dan Anak Balita pada tahun 2025 mengalami penambahan indeks sebagai berikut:



Ibu Hamil	Rp. 750.000.- / Triwulan
Anak usia dini (0-6 tahun)	Rp. 750.000.- / Triwulan
SD	Rp. 225.000.- / Triwulan
SMP	Rp. 375.000.- / Triwulan
SMA	Rp. 500.000.- / Triwulan
Disabilitas Berat	Rp. 600.000.- / Triwulan
Lanjut Usia (60 thn atas)	Rp. 600.000.- / Triwulan
- Penambahan indeks bantuan untuk program sembako yang semula sebesar Rp.110.000/KPM/bulan, maka pada Program Sembako indeks meningkat menjadi Rp.200.000/KPM/bulan, Total Per Tahun: Setiap keluarga menerima bantuan total Rp2.400.000 per tahun. Melalui 2 mekanisme yaitu, Melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Biasanya dicairkan setiap dua bulan sekali dengan nominal Rp400.000 per tahap. Melalui PT Pos Indonesia: Biasanya dicairkan setiap tiga bulan sekali (per triwulan) dengan nominal Rp600.000 per tahap. Bantuan sosial program sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan bahan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya. Bantuan sosial pangan ini diberikan dalam bentuk non tunai (cashless) melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan sehingga KPM dapat menggunakan untuk memperoleh bahan makanan pangan di e-Warong yang tersedia/yang ditunjuk.

Penurunan Gini ratio di Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil dari berbagai intervensi kebijakan yang sudah digulirkan pemerintah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perluasan penerima manfaat PKH dan bantuan sembako, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah juga sudah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dari dampak pandemi. (Perbandingan target nasional).



Grafik 1.21 Perbandingan Realisasi Gini Ratio Tahun 2023 s.d 2025

Berdasarkan grafik diatas Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan pada kurun waktu dari tahun 2023-2025 mengalami penurunan fluktuasi,dalam satu tahun terakhir atau pada periode Maret 2023-September 2023 Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,338 keadaan Maret 2023 menjadi 0,331 keadaan September 2024 atau turun 0,007 poin, sedangkan penurunan yang cukup besar juga terjadi untuk periode September 2025 yaitu sebesar 0,033 poin terhadap periode sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Provinsi Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat direalisasikan semakin baik di masyarakat.

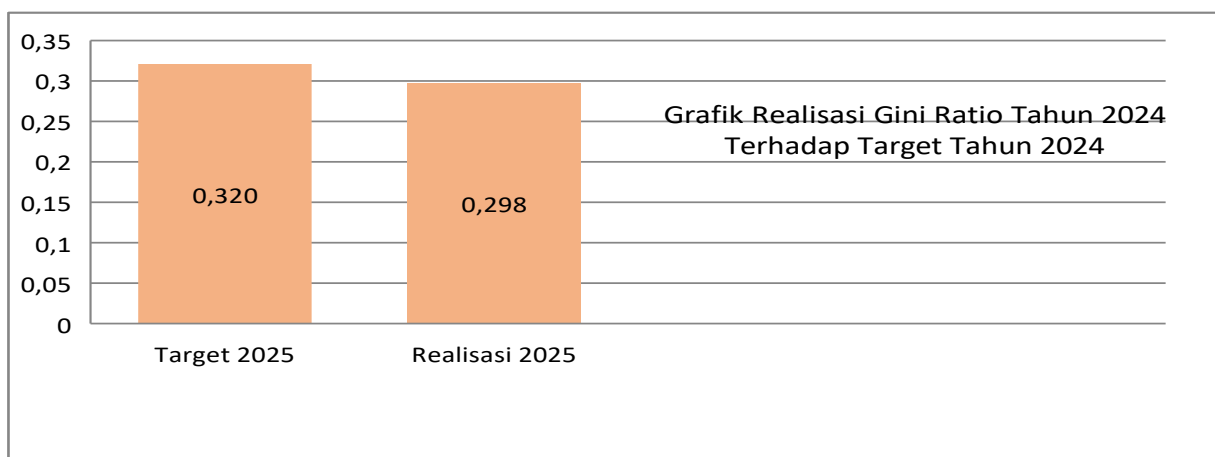
Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2025	18,40	36,68	44,92	100
September 2025	19,32	36,98	43,70	100
Perdesaan				
Maret 2025	24,43	44,34	31,22	100
September 2025	24,99	44,33	30,68	100



Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2025	21,27	39,33	39,41	100
September 2025	21,90	39,72	38,38	100

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS Prov.Sumsel

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah sebesar 21,90%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 19,32% dan untuk daerah perdesaan 24,99%, yang juga berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.



Grafik 1.23 Realisasi Gini Ratio Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas realisasi tahun 2025 Gini Ratio sebesar 0,298 melampaui capaian target tahun 2025 sebesar 0,320. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini Ratio Nasional (Pusat) pada bulan September 2025 sebesar 0,363. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,298 maka angka ini masih berada dibawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangkan menurunkan angka ketimpangan pendapatan yang ada di daerah melalui program dan kegiatan yang bertujuan



mengurangi/menurunkan angka kemiskinan yang terjadi. Harapan kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan melalui Dinas Sosial dapat semakin menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Efisiensi Sumber Daya dan Ekonomi (2025)

- Perekonomian: Ekonomi Sumatera Selatan menunjukkan performa positif dengan pertumbuhan 5,20% (yoy) hingga Oktober 2025.
- Investasi: Pada triwulan II 2025, total realisasi investasi (PMA dan PMDN) tercatat sebesar Rp12,59 triliun, yang menunjukkan penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya.
- Fokus Sumber Daya: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berfokus pada peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk energi dan pangan yang berkelanjutan, serta pengembangan hilirisasi komoditas sawit dan pengembangan sampah menjadi energi listrik.
- Efisiensi SDA: Dokumen perencanaan menunjukkan adanya upaya efisiensi dalam eksploitasi sumber daya alam (SDA) untuk mendukung pertumbuhan yang seimbang.

MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha ada 1 indikator yaitu :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93	3,69	103,40

Capaian indikator kinerja dari sasaran Terwujudnya Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha adalah sebagai berikut :



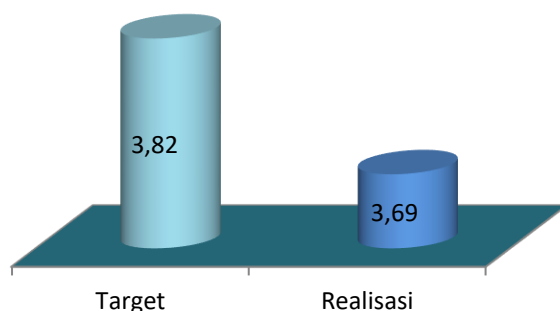
1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase Jumlah Pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT mempunyai kegunaan untuk mengidentifikasi besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diinterpretasikan bahwa TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja, Dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha dipasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2025 adalah sebesar 3,69%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3-4 orang penganggur. Pada Agustus 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,17% poin dibandingkan dengan Agustus 2024.

Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pengangguran dari 179.71 orang pada tahun 2024 menjadi 172.36 orang pada tahun 2025 atau terjadi penurunan Tingkat pengangguran terbuka sebesar 7.350 orang.

Proyeksi dan realisasi tahun 2025
Indikator kinerja Tingkat pengangguran Terbuka





Pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,82%, berdasarkan BRS Agustus 2025 realisasi TPT Tahun 2025 sebesar 3,69%, artinya capaian melebihi persentase yang telah ditargetkan sebesar 0,13%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian untuk TPT menunjukkan hasil yang baik, karena idealnya TPT sama atau lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2025 terdiri atas 4,492,57 ribu orang penduduk yang bekerja dan 172,36 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing-masing bertambah sebanyak 5.130 orang dan 12.470 orang, sedangkan pengangguran turun 7.350 orang.

Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Februari 2025, jumlah angkatan kerja menurun sebesar 9.120 ribu orang. Penduduk bekerja meningkat sebesar 240 orang dan pengangguran berkurang sebesar 9.370 orang. Pada bulan Agustus 2025 TPT dari Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibanding tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 8,08%.

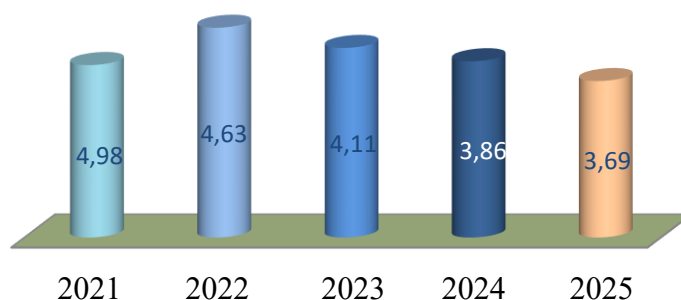
Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) kebawah yaitu sebesar 1,27 persen. Dibandingkan Agustus 2024, Penurunan TPT terjadi pada tingkat pendidikan SMP, SMK dan Diploma I, II, dan III. Penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma I, II, dan III yaitu 7,09 persen poin.

Tabel. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan Tahun 2025

Tahun	Pengangguran (Orang)	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	Tingkat Pengangguran (%)
2021	219.200	4.398.910	4,98
2022	208.260	4.497.960	4,63
2023	188.510	4.588.170	4,11
2024	179.710	4.659.810	3,86
2025	172.360	4.664.940	3,69

Sumber : BPS, 2024

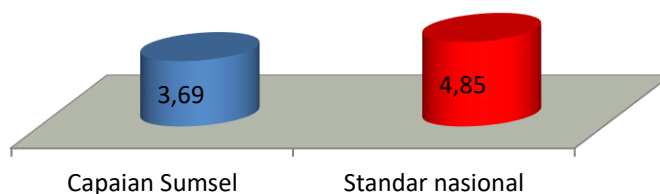
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka



Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021 sebesar 4,98% terjadi penurunan ditahun 2022 menjadi sebesar 4,63% yang disebabkan oleh penurunan jumlah pengangguran dari 219.200 orang menjadi sebanyak 208.260 orang, jadi terdapat penurunan TPT yang sebesar 0,35% atau 10.940 orang.

Pada Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,11% dengan jumlah pengangguran turun menjadi 188.510 orang dan terus menurun pada tahun 2024 TPT 3,86% dengan jumlah pengangguran turun menjadi 179.710 orang atau turun sebanyak 8.800 orang. Pada tahun 2025, TPT Sumatera Selatan sebesar 3,69% atau 172.360 orang, angka ini turun sebanyak 7.350 orang jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Perbandingan capaian indikator tahun 2025 terhadap standar Nasional dapat dilihat pada grafik ini:



Capaian Kinerja untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan terus membaik, apabila dibandingkan dengan capaian Nasional masih berada diatas capaian nasional, capaian Sumsel pada



tahun 2025 sebesar 3,69%, lebih baik dari Nasional yang sebesar 4,85%.

Penyebab Keberhasilan menurunkan pengangguran di Sumatera Selatan ini merupakan akumulasi beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pasca Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan upaya untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan dengan mendidik tenaga terampil dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perluasan kesempatan kerja, sehingga pengurangan pengangguran dari tahun ke tahun dapat direalisasikan.

Program Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengurangan pengangguran antara lain sebagai berikut :

- Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk memperluas Kesempatan Kerja.
- Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang bertujuan untuk menjadikan para peserta magang menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Tenaga kerja magang yang bekerja dengan sangat baik maka pihak perusahaan disarankan untuk merekrutnya sebagai karyawan tetap.
- Penempatan Tenaga Kerja AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
- Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
- Pengelolaan informasi pasar kerja melalui kegiatan Job/ Bursa kerja.

Upaya yang akan dilaksanakan kedepannya dalam rangka pengurangan pengangguran antara lain sebagai berikut :

- Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
- Bersama Balai Pelayanan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) melaksanakan Sosialisasi kepada pencari kerja di Kabupaten/Kota untuk bekerja ke Luar negeri secara prosedural.
- Mendorong Kabupaten/ Kota dan Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk melaksanakan Kegiatan Job Fair.
- Membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 273/KPTD/BAPPEDA/2024 tanggal 16 April 2024.



- Berkolaborasi dengan politeknik Negeri Sriwijaya untuk membangun kolaborasi yang solid antara pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan Vokasi dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
- Melaksanakan Job Fair Sumatera Selatan.
- Mengoptimalkan layanan pada aplikasi siapkerja.kemnaker.go.id.
- Melaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan untuk mempersiapkan pencari kerja memasuki dunia kerja.
- Melaksanakan Pemagangan Dalam negeri (Magang Hub).

Efisiensi penggunaan sumber daya mempunyai peran krusial dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan cara meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru melalui inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya yang efisien, baik alam maupun manusia, memungkinkan sektor industri dan UMKM untuk tumbuh lebih kompetitif tanpa harus meningkatkan biaya input secara drastis.

Salah satu upaya yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu:

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Akses Pendidikan dan Kesehatan yang lebih baik meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang secara signifikan menurunkan tingkat pengangguran.
 - Program Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi (PBK).
- Efisiensi dalam Sektor Industri
- Optimalisasi Investasi dan Pengeluaran Pemerintah
 - Investasi yang diarahkan pada peningkatan efisiensi dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja.
 - Pengalihan anggaran yang kurang efisien (misalnya biaya perjalanan dinas) ke program prioritas seperti UMKM dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.



- Efisiensi Sumber Daya Alam (SDA)
 - Eksploitasi sumber daya alam yang efisiensi dan berkelanjutan (seperti pada sektor pertanian/perkebunan) membantu mengurangi pengangguran di daerah.

INDIKATOR KINERJA	Indikator Kinerja Tahun 2025				Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat
	Satuan	Target	Realisasi	%	(Rp.)	(Rp.)	%	Efisiensi
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93	3,69	103,4	30.266.982.124	28.081.972.871	92,78	Efisien

Efisiensi penyesuaian anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.983.610.876 semula APBD Induk 2025 anggaran Disnakertrans sebesar Rp. 33.250.593.000 menjadi Rp. 30.266.982.124 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Efisiensi ini berasal dari anggaran Perjalanan Dinas, Alat Tulis Kantor, Baju Dinas, Cetak Penggandaan

Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang salah satu tujuan dan sasaran pembangunan makro daerah adalah mengurangi pengangguran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan akan terus mendorong program-program kegiatan yang mengarah kepada penurunan angka pengangguran.

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan ada 1 indikator yaitu :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (75-76)	74,58	99,44



Capaian indikator kinerja dari sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan adalah sebagai berikut :

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar “74,58” dengan kategori “B” (baik) dimana nilai ini masih angka sementara tahun 2024 apabila dibandingkan dengan nilai Indeks RB tahun 2024 adalah 74,58 (Baik) terdapat peningkatan sebesar 4,1%. Perbandingan Nilai RB selama dari tahun 2023 s.d 2025 mengalami peningkatan beberapa poin. Faktor pendorong adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan aktif melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan RB baik peningkatan kualitas administrasi maupun implementasi pelaksanaan RB di berbagai bidang.

Hambatan yang masih dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya pemahaman ASN dalam mengimplementasi pelaksanaan RB.
- Belum optimalnya sinergi perencanaan penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah dengan target capaian pelaksanaan RB.
- Belum optimalnya komitmen ASN dan pimpinan dalam mensinergikan pelaksanaan RB.

Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pembinaan dan monitoring yang dinamis dengan Rakor, Bimbingan, Sosialisasi dll.
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan RB dengan mengadakan konsultasi dan asistensi langsung dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB.

Membentuk Tim Pelaksana RB Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik.



ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari enam belas sasaran, terdapat sepuluh sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA % CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	98,39	99,98	(1,59)
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	92,57	93,84	(1,27)
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	103,01	87,03	15,98
4.	Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah	101,46	97,83	3,63
5.	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	100	92,48	7,52
6.	Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air	47,40	96,36	(48,96)
7.	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan	69,54	88,41	(18,87)
8.	Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi dan Air	102,31	96,36	5,95
9.	Meningkatnya Pengelolaan Bencana	107,10	99,76	7,34
10.	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	99,07	83,37	15,70
11.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	101,44	96,10	5,34
12.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	99,44	99,14	0,30

Efisiensi anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah provinsi

Urusan Pemerintahan Tugas Pembantuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas Pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai dari APBN. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota di Sumatera Selatan.

Tugas Pembantuan merupakan penyerahan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Provinsi yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dimana pelaksanaannya dapat mencerminkan adanya kontribusi Pemerintah Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan. Oleh karenanya, besarnya kontribusi tersebut dapat digunakan untuk



mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik.

a) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pada tahun anggaran 2025 Kementerian/ Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI
2. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI
3. Ditjen Perkebunan Kementerian Perkebunan RI
4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
6. Kementerian Pertanian RI

b) Instansi Pelaksana Tugas Pembantuan

Instansi atau Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan fungsi tugas pembantuan tahun anggaran 2025 dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
3. Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK APBN
TUGAS PEMBANTUAN (TP) PROVINSI SUMATERA SELATAN Per 31
Desember 2025**

No	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	KET
1	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan	12.481.779.000	11.997.797.259	96,12	100,00	
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	79.033.000	71.085.500	89,94	100,00	
3	Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera	4.080.860.000	4.079.497.250	99,97	100,00	



	Selatan					
4	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	37.345.278.000	36.277.074.937	97,14	100,00	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	2.700.000	2.700.000	100,00	100,00	
6	Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan	384.919.000	-	-	-	
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	3.169.072.000	3.028.087.030	95,55	100,00	
8	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	148.125.000	-	-	-	
	Jumlah (Rp.)	57.691.766.000	55.456.241.976	96,13	100,00	

Sumber Data : Diolah dari Kanwil KPPN Sumsel

Total Pagu dan Tugas Pembantuan yang di alokasikan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 57.691.766.000 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp. 55.456.241.976 atau persentase keuangan sebesar 96.13%.

1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Selatan

Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat TP adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.



Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah TP-OP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan memiliki 7 (tujuh) Lokasi kerja daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Adapun kegiatan irigasi dan rawa yang meliputi :

- Kegiatan Jaringan Irigasi D.I.MUARARIBEN Kota PagarAlam
- Kegiatan Jaringan Irigasi D.I. AIR KERUH dan D.I. LINTANG KANAN Kabupaten Empat Lawang
- Kegiatan Jaringan Rawa D.I.RUPANG,D.I.RPULAU RIMAU Kabupaten Banyuasin

- c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah TP-OP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan

No	Sasaran Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Alokasi (dlmRp.M)
			Output	Outcom e	
1	2	3	4	5	6
1	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA Serta Penanggulangan Akibat Bencana	1 Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat Yang Dioperasikan dan dipelihara	123,80 Km	9.256 Ha	Rp.3.871.283.000
		2 Irigasi Rawa Kewenangan Pusat Yang Di operasikandan	509,24 Km	34.080 Ha	Rp.8.916.940.000
		3 Layanan Perkantoran	12	Bulan	



Target Kinerja

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu	Target Output		Target Outcome	
				Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terjaganya Layanan Infrastruktur SDA dalam rangka meningkatkan dan menjaga kapasitas tampungan air, pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta Untuk ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	1. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA Serta Penanggulangan Akibat Bencana dan Program Dukungan Manajemen	12.988.599.000	633,04	Km	43.336	Ha
Total			12.988.599.000				

Realisasi

BULAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
TARGET FISIK	7,78	16,45	24,93	33,31	41,64	49,97	58,31	66,64	74,97	83,32	91,66	100,00
REALISASI FISIK	0,00	0,00	0	0,00	21,4	29,48	43,46	46,05	57,5	67,96	82,53	92,37



No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Output	Target Outcome
1	2	3	4	5
1.	Terjaganya Layanan Infrastruktur SDA dalam Rangka meningkatkan dan menjaga kapasitas Tampungan air, pasokan Air berkelanjutan dan produktivitas airserta untuk ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA Serta Penanggulangan Akibat Bencana dan Program Dukungan Manajemen	633,04 Km	43.336 Ha
Total Kinerja				

No.	Sasaran Strategis / Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Output	Target Outcome	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
					RN	RL	Kinerja	RN	RL	Kinerja	RN	RL	Kinerja	RN	RL	Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6) *100	9	10	11 =(10/9) *100	12	13	14 =(13/12) *100	15	16	17 =(16/15) *100
1.	Meningkatnya Ketahanan Air Untuk Mendukung Pencapaian Swasembada Pangan, Energi dan Air	1. Persentase Capaian Ketahanan Air Nasional	633,04 Km	43.336 Ha	24,93	00,00	00,00	49,97	28,15	56,33	74,97	57,75	77,03	100,00	100,00	100,00
Total Kinerja							00,00			56,33			77,03			100,00



kinerja<60	Sangat Kurang
61<kinerja<69	Kurang
70<kinerja<89	Butuh Perbaikan
90<kinerja<100	Baik
kinerja>100	Istimewa
Belumbisa dinilai	

- d. Urusan Pemerintah yang Ditugas - Pembantuan Identifikasi Tugas Urusan Pembantuan Urusan Pemerintah yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya. Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Alokasi anggaran dana Tugas Pembantuan adalah sebesar Rp.12.988.599.000,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). dengan Realisasi Keuangan sebesar 92,37% dan Realisasi Fisik sebesar 100%.

Adapun Program dan Kegiatannya terdiri dari:

- Program Ketahanan Sumber Daya Air Rp.12.788.223.000,-
- Program Dukungan Manajemen Rp.200.736.000,-

- e. Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang ditemui pada adalah Kebutuhan akan dana yang lebih besar untuk pemeliharaan agar daerah irigasi permukaan maupun irigasi rawa kembali optimal dan dalam kondisi baik

2) Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sumsel

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

- a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

(Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor: 42/Kpts/Dkpp/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 10 Januari 2025.

- b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi
(Pelaksanaan tugas pembantuan bidang peternakan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan yang didanai oleh APBN. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan bertindak sebagai pelaksana teknis utama.
- c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Target dan realisasi Anggaran Kegiatan Dana TP Satker Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan Prov. Sumsel
 - Layanan Dukungan Manajemen Internal : Target yaitu 5.0 Layanan
 - Layanan Manajemen Kinerja Internal : Target yaitu 13.0 Dokumen
- d. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi
Target Kinerja
 - Layanan Dukungan Manajemen Internal
Target : 5.0 Layanan
Anggaran :Rp. 47,918,000,-
Anggaran Blokir : Rp. 31.277.000,-
Total Anggaran yang bisa di Realisasikan : Rp. 16,641,000,-
 - Layanan Manajemen Kinerja Internal
Target : 13.0 Dokumen
Anggaran :Rp 89,763,000,-
Anggaran Blokir : Rp. 27.371.000,-



Total Anggaran yang bisa di Realisasikan : Rp. 62,392,000,-
Realisasi

- Layanan Dukungan Manajemen Internal

Target : 5.0 Layanan

Realisasi : 5.0 Layanan (100%)

Anggaran :Rp. 47,918,000,-

Anggaran Blokir : Rp. 31.277.000,-

Total Anggaran yang bisa di Realisasikan : Rp. 16,641,000,-

Realisasi : Rp. 15,906,00,- (95.58 %)

- Layanan Manajemen Kinerja Internal

Target : 13.0 Dokumen

Realisasi : 13.0 Dokumen (100%)

Anggaran :Rp 89,763,000,-

Anggaran Blokir : Rp. 27.371.000,-

Total Anggaran yang bisa di Realisasikan : Rp. 62,392,000,-

Realisasi : Rp. 55,179,500,- (88.44%)

No	K/L PNK	DASAR PELAKS ANAAN PENUGA SAN (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keua ngan	Realisasi Capaian Kegiatan		(%) Fisi k	Ke t
									Narasi Hasil Kegiatan	Satuan (Unit)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kem ente rian Pert ania n	-	Program Program Dukungan Manajemen Kegiatan ; Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen Pernakanan Keluaran (OUTPUT) : Jumlah dokumen Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Ditjen Pernakanan Rincian egiatan : Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal	Provin si Sumat era Selata n	Dinas Ketahanan Pangan dan Pernaka n Provinsi Sumatera Selatan	Anggaran : Rp. 137,681,00 0 Blokir Anggaran : Rp. 58.648.000 , Total Anggaran yang bisa digunakan : Rp. 79.033.000 , -	Rp. 71.085.5 00,-	89,94	Dokume n Dukung an Manajem en Ditjen PKH	1	100	



Permasalahan

Anggaran hanya berupa Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan. Tidak dialokasikan dana yang mendukung kegiatan peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Provinsi Sumatera Selatan

3) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov.Sumsel

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembara Negara RI Tahun 2021 Nomor 246);
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembara Negara RI Tahun 2018 Nomor 229);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembara Negara RI Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 40);



- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 725);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 473);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1144);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 855);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1703);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1333);

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut TP adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui TP kepada pemerintah provinsi meliputi kegiatan Sumber Daya Air, Bina Marga, Perkotaan dan Perdesaan, Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Jasa Konstruksi, dan Kegiatan Penataan Ruang. Dalam hal ini SKPD-TP Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Tugas Pembantuan/TP dalam kegiatan Bina Marga. Pada pelaksanaannya kegiatan TP dilakukan setelah adanya penugasan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Kementerian dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur Sumatera Selatan. Berikut kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan SKPD-TP Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2025 :

- Program Infrastruktur Konektivitas :
 - Dukungan Teknis yaitu layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan
 - OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) yaitu Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)
 - OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) yaitu Preservasi Rutin Jembatan, Preservasi Jembatan dan Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)
- Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga yaitu Layanan Umum dan Layanan Perkantoran



Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam pelaksanaan kegiatan TP diselenggarakan secara terpisah dari APBD dan APBD Dekon. Adapun proses penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tugas Pembantuan dilaksanakan di Pusat dan menghasilkan Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebagai dasar penelaahan dan penerbitan DIPA. Proses pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan sebagian di pusat dan sebagian di daerah. Lampiran konsep DIPA yang diterbitkan di Pusat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan DIPA dan revisi DIPA yang diterbitkan di daerah dalam waktu 7 hari kerja setelah DIPA ditandatangani kepada Kepala Unit Eselon I Ditjen Bina Marga dan Sekretaris Jenderal Bina Marga. Setiap perubahan rencana, program, dan anggaran yang diusulkan oleh daerah dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Eselon I Ditjen Bina Marga. Persetujuan tertulis dapat dipertimbangkan berdasarkan usulan tertulis dari Gubernur dan/atau Kepala SKPD-TP Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang disertai penjelasan mengenai alasan-alasannya.

SKPD-TP Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2025 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 4.080.860.000,- (*Empat Milyar Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri dari 2 program kegiatan yaitu, Program Konektivitas Infrastruktur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.015.988.000,- (*Empat Milyar Lima Belas Juta Sembilan Ratus*



DelapanPuluh Delapan Ribu Rupiah) dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga sebesar Rp. 64.862.000,- (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama satu tahun 2023. Adapun capaian kinerja pelaksanaan SKPD-TP Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		Kinerja
							RN	RL	RN	RL	
1	GA	Program Infrastruktur Konektivitas			4.015.998	4.015.997	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	7696	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			4.015.998	4.015.997	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	7696.CBR	Dukungan Teknis (Dokumen)	1	(Dokumen)	228.003	228.002	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	7696.CBR.001	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1	(Dokumen)	228.003	228.002	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	7696.CDC	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), (km)	74,8	(km)	2.926.807	2.926.807	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	7696.CDC.001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	38,22	(km)	2.429.872	2.429.872	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	7696.CDC.012	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	36,58	(km)	496.935	496.935	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	7696.CDF	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), (m)	336	(m)	861.188	861.188	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	7696.CDF.001	Preservasi Rutin Jembatan	213,08	(m)	239.715	239.715	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	7696.CDF.002	Preservasi Jembatan	31,6	(m)	518.738	518.738	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	7696.CDF.010	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	91,32	(m)	102.735	102.735	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	WA	Program Dukungan Manajemen			64.862	63.500	100,00	97,90	100,00	100,00	100,00
13	7756	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga			64.862	63.500	100,00	97,90	100,00	100,00	100,00
14	7756.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	2	Layanan/Laporan/Dokumen/Rekomendasi/Unit	64.862	63.500	100,00	97,90	100,00	100,00	100,00
15	7756.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen/Rekomendasi/Unit	726	726	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	7756.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen/Rekomendasi/Unit	64.136	62.774	100,00	97,88	100,00	100,00	100,00
TOTAL					4.080.860	4.079.497	100,00	99,97	100,00	100,00	

d. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan. Adapun Target Kinerja SKPD-TP Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	1. Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	KM	38,22
		2. Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	KM	36,58
		3. Panjang Preservasi Rutin Jembatan	M	213,08
		4. Panjang Preservasi Jembatan	M	31,6
		5. Panjang Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	M	91,32
		6. Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	1,00
		7. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Dokumen	2,00

*)Target 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kasatker dengan Kabalai

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran pada umumnya dan tidak ada kendala dalam proses realisasi administrasi keuangan dan realisasi fisik pada tahun 2025, pencapaian ini sekaligus menandakan adanya peningkatan kinerja SATKER SKPD – TP Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun kedepannya SATKER SKPD – TP Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Masih Perlu Meningkatkan kinerja pada bidang jalan yang masih harus menjadi perhatian yakni, meliputi bagaimana peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan jalan yang semakin perlu ditingkatkan.

Untuk itu terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian didalam upaya meningkatkan kinerja, antara lain melalui percepatan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun mendatang yang berbasis kinerja. Upaya-upaya yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut :

1. Manajemen

- Penyiapan Organisasi Satker
- Pemilihan dan penentuan kriteria SDM Satker/PPK
- Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk :
 - ✓ Pelaksanaan Kegiatan

- ✓ Pengelolaan keuangan secara umum khususnya pinjaman luar negeri.

- Monitoring, evaluasi dan pengendalian.

2. Perencanaan

- Komitmen terhadap pencapaian kinerja
- Komitmen terhadap penggunaan anggaran sesuai prioritas (Sense of Urgency perlu ditingkatkan)
- Keseragaman dalam pembuatan dokumen perencanaan
- Kurangnya pemahaman terhadap spesifikasi teknis
- Kurangnya pemahaman tentang Lingkungan dan Jalan yang Berkeselamatan

3. Pengadaan

- Masih banyak yang belum memahami atau interpretasi yang berbeda terhadap Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah.
- Keseragaman dalam pembuatan dokumen lelang dan seleksi yang mengacu pada Permen PU No. 07/PRT/M/2011.
- Banyak "klaim" ketidakpuasan atas prosedur tender.
- Proses evaluasi prakualifikasi dan pelelangan yang berbelarut-larut
- Pemahaman gugur/tidaknya penawaran

4. Pelaksanaan

- Waktu pelaksanaan yang relatif pendek, terkait dengan persiapan dan proses pengadaan.
- Monitoring lapangan berkurang.
- Pengendalian mutu belum konsisten dengan spesifikasi
- Kurangnya antisipasi kebutuhan peralatan
- Penguasaan manajerial dan substansi teknis belum merata
- Keterlambatan pembayaran ke kontraktor
- Kemampuan kontraktor dan konsultan perlu ditingkatkan
- Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan instansi penyedia utilitas dan masyarakat sekitarnya.



5. Pengawasan

- Keberadaan Kasatker/PPK dilapangan perlu ditingkatkan
- Peran konsultan supervisi belum optimal
- Kemampuan teknis pengawasan staf Satker/PPK perlu ditingkatkan
- Kemampuan tenaga direksi atau pengawas belum optimal

6. Evaluasi

- Belum adanya sistem evaluasi kerja
- Belum adanya upaya perbaikan kinerja
- Belum adanya pemahaman yang komprehensif terhadap indikator kinerja
- Efisiensi penggunaan anggaran
- Masih minimnya referensi/SOP untuk melakukan evaluasi kinerja

Tabel Realisasi Keuangan dan Fisik

No	Kode	Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket	Target		Lokasi	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Rencana Tanggal Mulai	Rencana Tanggal Selesai	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi Keuangan		Progres Fisik (%)
			Vol	Satuan								(Rp Ribu)	(%)	
1	7696	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional									4.015.998	4.015.997	100,00	100,00
2	7696.CBR	Dukungan Teknis (Dokumen)	1	(Dokumen)							228.003	228.002	100,00	100,00
3	7696.CBR.001.401.AA	MONITORING DAN EVALUASI	1	Dokumen	AU	AU	2025-01-02	2025-12-10	RPM		228.003	228.002	100,00	100,00
4	7696.CDC	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), (km)	74,8	(km)							2.926.807	2.926.807	100,00	100,00
5	7696.CDC.001.319.A	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS BTS.PROV.JAMBI - MAUR - TERAWAS	13,84	Kilometer		Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	2025-01-02	2025-12-31	RPM	250.983	250.983	100,00	100,00
6	7696.CDC.001.320.A	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS BTS.PROV.JAMBI - MAUR - TERAWAS	17,18	Kilometer		Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	2025-01-02	2025-12-31	RPM	896.817	896.817	100,00	100,00
7	7696.CDC.001.329.A	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS BTS.PROV.JAMBI - MAUR - TERAWAS	7,2	Kilometer		Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	2025-01-02	2025-12-31	RPM	1.282.072	1.282.072	100,00	100,00
8	7696.CDC.012.330.B	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS BTS.PROV.JAMBI - MAUR - TERAWAS (PADAT KARYA)	32,28	Kilometer		Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	2025-01-02	2025-12-31	RPM	272.731	272.731	100,00	100,00
9	7696.CDC.012.332.B	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS BTS.PROV.JAMBI - MAUR - TERAWAS (PADAT KARYA)	4,3	Kilometer		Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	2025-01-02	2025-12-31	RPM	224.204	224.204	100,00	100,00
10	7696.CDF	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), (m)	336	(m)							861.188	861.188	100,00	100,00
11	7696.CDF.001.325.A	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS BTS.PROV.JAMBI - MAUR - TERAWAS	213,08	Meter		Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	2025-01-02	2025-12-31	RPM	239.715	239.715	100,00	100,00
12	7696.CDF.002.333.D	PRESERVASI JEMBATAN RUAS BTS.PROV.JAMBI - MAUR - TERAWAS	31,6	Meter		Pekerjaan Konstruksi	E-purchasing	2025-07-28	2025-11-24	RPM	518.738	518.738	100,00	100,00
13	7696.CDF.010.569.B	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS BTS.PROV.JAMBI - MAUR - TERAWAS (PADAT KARYA)	91,32	Meter		Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	2025-01-02	2025-12-31	RPM	102.735	102.735	100,00	100,00
14	7756	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga									64.862	63.500	97,90	100,00
15	7756.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	2	Layanan/Laporan/Dokumen/Rekomendasi/Unit							64.862	63.500	97,90	100,00
16	7756.EBA.962.054.AA	BELANJA NON OPERASIONAL KANTOR	1	Dokumen	AU	AU	2025-01-02	2025-12-31	RPM		726	726	100,00	100,00
17	7756.EBA.994.002.AD	BELANJA OPERASIONAL KANTOR	1	Dokumen	AU	AU	2025-01-02	2025-12-31	RPM		64.136	62.774	97,88	100,00
		TOTAL									4.080.860	4.079.497	99,97	100,00



Tabel

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang
Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi**

No	KLPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp Ribu)	Realisasi Anggaran (Rp Ribu)	(%) Keuangan	Realisasi Capaian Kegiatan		(%) Fisik	KET
									Narasi Hasil Kegiatan	Satuan Unit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga	Peraturan Menteri LPNK	Program Infrastruktur Konektivitas	Kab. Murata	OPD Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan	4,015,998	4,015,997	100.00%				
		Nomor : 15/PRT/M/2011	7696 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			4,015,998	4,015,997	100.00%				
		Tahun : 2011	7696 CBR, Dukungan Teknis			228,003	228,002	100.00%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Penganggaran	1 Dokumen	100.00%	
		Tentang : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Keputusan Pemerintah dan di Laksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	7696 CBR.001 Layanan Penyisipan dan Pengendalian Pelaksanaan			228,003	228,002	100.00%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Penganggaran	1 Dokumen	100.00%	
			7696 CDC OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			2,926,807	2,926,807	100.00%	Panjang Penanganan Jalan	75,3 km	100.00%	
			7696 CDC.001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan			2,429,872	2,429,872	100.00%	Panjang Penanganan Jalan	38,22 km	100.00%	
			7696 CDC.012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)			496,935	496,935	100.00%	Panjang Penanganan Jalan	36,58 km	100.00%	
			7696 CDF OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			861,188	861,188	100.00%	Panjang Penanganan Jembatan	367 m	100.00%	
			7696 CDF.001 Preservasi Rutin Jembatan			239,715	239,715	100.00%	Panjang Penanganan Jembatan	213,08 m	100.00%	
			7696 CDF.002 Preservasi Jembatan			518,738	518,738	100.00%	Panjang Penanganan Jembatan	31,6 m	100.00%	
			7696 CDF.010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)			102,735	102,735	100.00%	Panjang Penanganan Jembatan	91,32 m	100.00%	
			Program Dukungan Manajemen			64,862	63,500	97.90%				
			7756 Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga			64,862	63,500	97.90%				
			7756 EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal			64,862	63,500	97.90%	Jumlah Layanan, Laporan, Dokumen Satuan Kerja	2 Layanan/Laporan/Dokumen	100.00%	
			7756 EBA.963 Layanan Umum			726	726	100.00%	Jumlah Layanan, Laporan, Dokumen Satuan Kerja	1 Layanan/Laporan/Dokumen	100.00%	
			7756 EBA.994 Layanan Perkantoran			64,136	62,774	97.88%	Jumlah Layanan, Laporan, Dokumen Satuan Kerja	1 Layanan/Laporan/Dokumen	100.00%	
						4,080,860	4,079,497	99.97%			100.00%	

e. Permasalahan dan Kendala

Secara umum dalam melaksanakan pekerjaan pada tahun anggaran 2025 ini SKPD-TP Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tidak mengalami masalah secara signifikan, akan tetapi ada beberapa Permasalahan dan Kendala yaitu :

- Realisasi Keuangan yang baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2025 dikarenakan terdapat pagu blokir pada DIPA
- Pelaporan kinerja tidak disajikan secara detail terkait capaian kinerja *outcome*.
- Pelaporan kinerja tidak menyajikan data perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah
- Kegiatan pelaporan tidak tersip dengan baik.
- Terbatasnya Pagu Dukungan Manajemen Kegiatan di Tahun Anggaran 2025 yang tidak selaras dengan jauhnya lokasi Kegiatan yang terletak di Kab. Musi Rawas Utara



f. Saran dan Tindak Lanjut

- Pelaksanaan realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai rencana yaitu terakhir penarikan pada bulan Desember
- Pelaporan kinerja yang menyajikan detail terkait capaian kinerja outcome akan dilengkapi dan diperbaiki pada laporan tahun berikutnya.
- Pelaporan Kinerja yang menyajikan data perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah akan dilengkapi pada laporan tahun berikutnya.
- Telah ditindaklanjuti dan diperbaiki di tahun berikutnya.
- Harapan kami muda - mudahan ditahun berikutnya anggaran yang di berikan kepada SKPD-TP- Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat ditingkatkan.

4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
- Keputusan Gubenrur Sumatera Selatan Nomor : 986/KPTS/BPKAD/2024 Tanggal 31 Desember 2024 tetang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penngeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di



Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 41 Tahun 2016, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan tugas pembantuan di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. Dalam hal ini tugas pembantuan provinsi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Total Pagu Anggaran Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.744.196.273.000,- dengan alokasi program kegiatan tugas pembantuan provinsi terdiri dari 3 (tiga) satker, 6 (enam) program, dan 8 (delapan) kegiatan.

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, yaitu

- Realisasi keuangan sebesar 79,21% (Total Pagu Anggaran Rp. 1.744.196.273.000,- dan terealisasi Rp. 1.381.633.162.967,- yang terdiri dari 3 (tiga) satker yaitu Tugas Pembantuan Tanaman Pangan (119129), Tugas Pembantuan PSP (119137), dan Tugas Pembantuan Lahan Irigasi Pertanian/ LIP (691335).
- Realisa sifisik sebesar 90,07%

Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi
Target Kinerja

Satker Tanaman Pangan (119129)

- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal
Target Kinerja: 1 kegiatan
- Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya



Target Kinerja : 3 dokumen

Satker Prasarana dan Sarana Pertanian(119137)

- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan :

- Optimasi Lahan,dengan target45,26km²
- Cetak Sawah,dengan target1ha
- SID Cetak Sawah,dengan target 1dokumen
- SID OptimasiLahan,dengan target 1dokumen

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat
Mesin Pertanian, dengan target 1 unit.

Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, dengan target penerima
pupuk subsidi yang divalidasi/ diverifikasi sebanyak 271.429
orang,serta target laporan pengawasan pupuk pestisida sebanyak
1 laporan.

- Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Manajemen
Teknis Lainnya, dengan target 1 dokumen

Satker Lahan dan Irigasi Pertanian (691335)

- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan :

- Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan,dengan
target67.676 kelompok masyarakat
- Data dan Informasi Publik,dengan target 1dokumen
- OptimasiLahan,dengantarget503,56km²
- CetakSawah,dengantarget37.890ha
- SIDCetakSawah,dengantarget1dokumen
- SIDO ptimasi Lahan, dengan target2 dokumen

- Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya,
dengan target 1 dokumen

Realisasi

Satker Tanaman Pangan (119129)



1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Realisasi Kinerja: 1 kegiatan

2. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Realisasi Kinerja : 3 dokumen

Satker Prasarana dan Sarana Pertanian (119137)

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan :

- Optimasi Lahan, terealisasi 45,26 km²
- Cetak Sawah, terealisasi 1 ha
- SID Cetak Sawah, terealisasi 1 dokumen
- SID Optimasi Lahan, terealisasi 1 dokumen

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, terealisasi 1 unit.

Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian, dengan realisasi penerima pupuk subsidi yang divalidasi/diverifikasi sebanyak 271.429 orang, serta realisasi laporan pengawasan pupuk pestisida sebanyak 1 laporan.

2. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya, terealisasi 1 dokumen

Satker Lahan Dan Rigasi Pertanian (691335)

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan :

- Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan, terealisasi 47.583 kelompok masyarakat
- Data dan Informasi Publik, tidak terealisasi
- Optimasi Lahan, terealisasi 481,11 km²

- Cetak Sawah, terealisasi 33.250 ha
- SID Cetak Sawah, terealisasi 1 dokumen
- SIDO optimasi Lahan, terealisasi dokumen

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya,
terealisasi 1 dokumen

d. Permasalahan dan Kendala

Untuk Kegiatan Optimasi Lahan:

- Adanya revisi berkali-kali dengan luasan berbeda-beda sesuai dengan buka blokir
- Adanya pergantian Kepala Dinas Kabupaten dan Kodim
- Data usulan ada yang masih berdasarkan potens belum berbasis spasial
- Kodim yang sudah berkontrak belum menyampaikan buku rekening koran dan NPWP sehingga ada kontrak kadaluarsa
- Anggaran operasional kabupaten belum ada seperti perjalanan dinas
- Beberapa wilayah masih tergenang sehingga konstruksi terlambat dilaksanakan
- Untuk pelaksanaan konstruksi yang menggunakan SID tersedia perlu direviu kembali karena adanya perubahan harga dan komponen.

Untuk Kegiatan Cetak Sawah:

- Adanya ketidakpastian juknis diawal sehingga menghambat pelaksanaan
- Adanya revisi POK yang berkali-kali dan luasan berubah-ubah
- CPCL dianggap clean and clear berbasis spasial belum ditapis dengan spasial tata ruang

Untuk kegiatan Tanaman Pangan :pelaksanaan kegiatan di kabupaten berupa perjalanan dinas petugas data dan mantri tani Sebagian besar baru dilaksanakan di akhir tahun sehingga tidak terserap maksimal.

Saran dan Tindak Lanjut

- Koordinasi antar instansi terkait sangat diperlukan begitu juga dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan terkait revisi POK
- Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan kegiatan seharusnya sudah tersedia di awal tahun sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.

5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk mekanisme Tugas Pembantuan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.



Dasar hukum tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, serta pertanggungjawaban kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dalam bentuk Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas Pembantuan tersebut direncanakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis dibidang kelautan dan perikanan, meliputi pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta dukungan manajemen. Namun demikian, berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat, seluruh pagu anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mengalami pemblokiran (dibintangi). Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan Tugas Pembantuan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan dalam DIPA.

c. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Sehubungan dengan adanya pemblokiran anggaran Tugas Pembantuan, maka sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat realisasi keuangan maupun realisasi fisik atas kegiatan Tugas Pembantuan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, capaian pelaksanaan Tugas Pembantuan belum dapat diwujudkan karena ketiadaan pencairan anggaran.

d. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah



Tugas Pembantuan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian target kinerja dan realisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Target Kinerja

Target kinerja Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 meliputi terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pembinaan sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA APBN, dengan sasaran peningkatan produktivitas, penguatan pengawasan, peningkatan mutu dan daya saing produk perikanan, serta penguatan dukungan manajemen.

Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Tugas Pembantuan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah nihil (0%), baik dari sisi keuangan maupun fisik. Hal ini disebabkan seluruh anggaran Tugas Pembantuan diblokir (dibintangi) dan tidak dilakukan pencairan sampai dengan akhir tahun anggaran, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.



Laporan realisasi keuangan dan fisik APBN Tugas Pembantuan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025

No.	Unit Organisasi / Unit Kerja	Nomor Kode dan Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Outputs)				Instansi Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan / Kendala dan Permasalahan
			No. Lo an	PH LN	Rupiah	Total	S (%)	R (%)	Narasi	Sat uan (Unit)	S (%)	R (%)			
2	Sekretariat Jenderal 690935	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 032.01. WA Program Dukungan Manajemen 032.01. WA. 2325 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	-	-	0	0	0.00	0.00			0.00	0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Selatan	Palembang Sumatera Selatan	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Setjen tidak ada anggaran program dukungan manajemen dari APBN. Dukungan manajemen ini termasuk honor validator dan enumerator statistik kabupaten/kota, sehingga tidak ada pembayaran honor selama tahun 2025.
3	Ditjen Perikanan Budidaya 119142	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 032.04. HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 032.04. HB. 7022 Pengelolaan Budidaya Ikan Air Payau	-	-	0	0	0.00	0.00			0.00	0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Selatan	Palembang Sumatera Selatan	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Perikanan Budidaya tidak ada anggaran pada tahun 2025.
3	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 119038	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 032.05. HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 032.05. HB. 2352 Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	0	0	0.00	0.00			0.00	0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Selatan	Palembang Sumatera Selatan	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak ada anggaran pada tahun 2025.
4	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 690980	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 032.05. WA Program Dukungan Manajemen 032.05. WA. 2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	0	0	0.00	0.00			0.00	0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Selatan	Palembang Sumatera Selatan	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak ada anggaran program dukungan manajemen pada tahun 2025.
3	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 691018	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 032.06. EC Program Nilai Tambah Daya Saing Industri 032.06. EC. 2357 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 032.06. WA Program Dukungan Manajemen 032.06. WA. 2361 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	-	-	139,068,000	139,068,000	0.00	0.00			0.00	0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Selatan	Palembang Sumatera Selatan	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2025 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 139.068.000,-. Namun terdapat blokir/automatic adjustments senilai Rp. 139.068.000,-, sehingga tidak ada anggaran yang dapat digunakan sampai akhir tahun 2025.
4	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 691056	04 Ekonomi 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 032.07. WA Program Dukungan Manajemen 032.07. WA. 2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	-	-	0	0	0.00	0.00			0.00	0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Selatan	Palembang Sumatera Selatan	Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2025 Satker Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tidak ada anggaran program dukungan manajemen pada tahun 2025.
JUMLAH					139,068,000	139,068,000	0.00	0.00			0.00	0.00			



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; Sub Output; Komponen; Sub Komponen;
Akun; Periode Desember 2025

Kementerian: Unit Organisasi Satuan Kerja

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2025		%	Sisa Anggaran
				Periode ini	s.d periode		
WA Program Dukungan Manajemen	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	100	0
WA.2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	100	0
EBDLayanan Manajemen Kinerja Internal	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	100	0
EBD.955Layanan Manajemen Keuangan	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	100	0
054Pelaporankeuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	100	0
TANPA SUB KOMPONEN	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	100	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	100	0
JUMLAH SELURUHNYA	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	100	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan meliputi :

- DIPANo.DIPA:152.03.4.694560/2025 tanggal 02 Desember 2024
- Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Bantuan Dana APBN dari Kementerian Transmigrasi RI untuk dilaksanakan selama tahun anggaran 2025.
- Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pemberian Catu Pangan Beras dilokasi Desa Tempirai Selatan SP. 1 Kabupaten PALI sebanyak 1.290 Kg untuk 3 bulan dan angkutan Catu Pangan Beras dilokasi Desa Tempirai Selatan SP. 1 Kabupaten PALI sebanyak 10 KK untuk 3 Bulan



Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi
Target Kinerja

Bahwa Kementerian Transmigrasi memberikan Dana APBN untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dilaksanakan selama tahun anggaran 2025. Target Kinerja yang dilaksanakan Adalah Pemberian Catu Pangan dan Angkutan Beras untuk Lokasi Desa Tempirai Selatan SP.1 Kab. PALI. Pelaksanaan Kegiatan Fisik Berupa Rehab Sekolah dan Pembangunan Toilet dan SAB Sekolah di Kabupaten MUBA dan MURA.

Realisasi

Realisasi anggaran yang di dapat Adalah sebesar *Rp. 3.169.072.000,- (Tiga milyar seratus enam puluh Sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah)* sedangkan Realisasi yang di capai Adalah sebesar *Rp. 3.044.547.100,- (Tiga milyar empat puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah)*.

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Keg, Output, dan Rincian Keg	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Realisasi Capaian Kegiatan		Fisik (%)	Ket
									Narasi hasil Kegiatan	Satuan (Unit)		
1	Kementerian Transmigrasi RI	DIPA-152.03.4.694560/2025 Tanggal 02 Desember 2024	Program Transmigrasi	Provinsi Sumsel	Dinas Nakertrans Prov. Sumsel	3.169.072.000	3.044.547.100	(96.07%)	Rehab Sekolah di Kawasan Air Balui Jug Nganti Kab. MUBA	3 Unit	100%	
									Rehab Sekolah di Kawasan Simpang Rimau/Muara Kelingi Kab. MURA	4 Unit	100%	
									Pembangunan Toilet Sekolah dan SAB Sekolah di Kawasan Simpang Rimau/Muara Kelingi Kab. MURA	6 Unit	100%	
									Angkutan Beras Lokasi Tempirai I	10 KK	100%	



									Selatan Kab.PALI			
									Pengadaan Catu Pangan Beras Lokasi Tempirai Selatan Kab. PALI	1.290 Kg	100%	
									Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi	2 Perkar a	100%	

Permasalahan dan Kendala

- Pergantian Kode Satker dan Kementerian yang awal nya Kode Satker 350172 menjadi 694560 dan Kementerian dari Kementerian PDT,dan Transmigrasi menjadi Kementerian Transmigrasi.
- Perubahan Nomor Rekening yang memakan waktu kurang lebih 1bulan untuk proses pembuatan rekening baru.
- Pergantian KPA yang terjadi di Akhir Bulan November 2025, sehingga pembuatan Untuk Akun SAKTIK PAYang Lama KeKPA baru memakan waktu kurang lebih 2 Minggu
- Kegiatan Persertifikatan dilokasi UPT Keban Agung Kab. Lahat tidak dapat terlaksana karena menggunakan anggaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat

Saran dan Tindak Lanjut

- Saran : untuk Penggantian KPA kalau Bisa di awal Tahun Anggaran Baru saja, biar tidak menghambat proses Realisasi Kegiatan Pencairan Dana APBN
- Tindak Lanjut :dengan segera mungkin untuk proses pembuatan surat Perubahan Kode Satker, Proses Pembuatan Rekening baru dan Proses Pembuatan Akun KPA yang baru.



MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG
DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN/ KOTA

N O	K/L PNK	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan		Loka si	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisas i Anggara n	(%) Keua ngan	Realisasi Capaian Kegiatan		(%) Fisik	Ke t
									Narasi Hasil Kegiatan	Satua n (unit)		
(1)	(2)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kementeri an Transmigrasi		Koordinasi	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	15.882.000	5.374.480	33,84	33,84		33,84	
2	Kementeri an Transmigrasi		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	14.690.000	3.600.000	24,51	24,51		24,51	
3	Kementeri an Transmigrasi		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A]	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	17.940.000	16.300.000	90,86	90,86		90,86	
4	Kementeri an Transmigrasi		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	40.270.000	2.642.000	6,56	6,56		6,56	
5	Kementeri an Transmigrasi		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A]	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	25.253.000	13.928.000	55,15	55,15		55,15	
6	Kementeri an Transmigrasi		Bantuan Keluarga	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	44.680.000	39.152.996	87,63	87,63		100,00	
7	Kementeri an Transmigrasi		Bantuan Keluarga [Penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A]	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.840.000	-	-	-		-	
8	Kementeri an Transmigrasi		Bantuan Peralatan / Sarana	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	38.500.000	37.999.984	98,70	98,70		100,00	
9	Kementeri an Transmigrasi		Bantuan Peralatan / Sarana [Penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A]	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	38.500.000	-	-	-		-	
10	Kementeri an Transmigrasi		Sarana Pengembangan Kawasan [Penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A]	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.785.341.000	2.164.946.940	77,73	86,65		86,65	
11	Kementeri an Transmigrasi	A.	SAB Pompa Tangan (Penempatan 2022, 2023 dan 2 fasum)	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	380.744.000	379.935.250	99,79	100,00		100,00	
12	Kementeri an Transmigrasi	B.	Fasilitas Umum (Rumah Ibadah)	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	459.577.000	287.316.690	62,52	75,39		100,00	

BAB III
Capaian Kinerja Pelaksanaan
Tugas Pembantuan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

13	Kementerian Transmigrasi	C	Fasilitas Umum yang Direhabilitasi / Ditingkatkan (Pembangunan Toilet Sekolah dan Rehab Sekolah)	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.945.020.000	1.497.695	77,00	86,69		86,69	
14	Kementerian Transmigrasi		> Belanja Perjalanan Dinas Rehab/Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Transmigrasi	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.020.000	-	-	-		-	
15	Kementerian Transmigrasi		> Pembangunan Toilet Sekolah dan SAB Sekolah di Kawasan Petata	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	600.000.000	399.529.000	66,59	91,92		91,92	
16	Kementerian Transmigrasi		1. SD N 6 Penukal Utara Desa Kota Baru	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	200.000.000	99.867.500	49,93	88,31		100,00	
17	Kementerian Transmigrasi		2. SD N 15 Penukal Utara Desa Kota Baru	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	200.000.000	99.854.500	49,93	87,46		100,00	
18	Kementerian Transmigrasi		3. SD N 1 Penukal Utara Desa Tanding Marga	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	200.000.000	199.807.000	99,90	100,00		100,00	
19	Kementerian Transmigrasi		> Supervisi Toilet Sekolah Sekolah di Kawasan Petata	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	48.000.000	-	-	87,88		100,00	
20	Kementerian Transmigrasi		> Rehab Sekolah di Kawasan Petata	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.200.000.000	1.098.166.000	91,51	83,33		83,33	
21	Kementerian Transmigrasi		1. SD N 2 Penukal Utara Desa Tanding Marga	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	200.000.000	199.685.000	99,84	100,00		100,00	
22	Kementerian Transmigrasi		2. SD N 5 Penukal Utara Desa Karang Tanding	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	200.000.000	199.632.000	99,82	100,00		100,00	
23	Kementerian Transmigrasi		3. SD N 11 Penukal Utara Desa Muara Ikan	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	200.000.000	199.688.000	99,84	100,00		100,00	
24	Kementerian Transmigrasi		4. SMP N 2 Penukal Utara Desa Sukarami	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	200.000.000	199.628.000	99,81	100,00		100,00	
25	Kementerian Transmigrasi		5. SMP N 3 Penukal Utara Desa Muara Ikan	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	200.000.000	199.661.000	99,83	100,00		100,00	
26	Kementerian Transmigrasi		6. SMP N 5 Penukal Utara Desa Tanding Marga	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	200.000.000	99.872.000	49,94	96,25		100,00	
27	Kementerian Transmigrasi		> Supervisi rehab Sekolah di Kawasan Petata	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	96.000.000	-	-	96,25		96,25	
28	Kementerian Transmigrasi	11	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.663.029.000	471.253.800	28,34	53,03		53,03	
29	Kementerian Transmigrasi	A	Pembangunan Jalan Lingkungan Primer di Lok. Tempirai Selatan SP.1	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	663.029.000	188.522.700	28,43	17,72		17,72	
30	Kementerian Transmigrasi	B	Rehabilitasi / Peningkatan	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.000.000.	282.731	28,27	76,44		76,44	



	Transmigrasi	.	Jalan Non Status di Tempirai Selatan SP.1		an dan Transmigrasi	000	.100					
31	Kementerian Transmigrasi	12	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	561.809.000	552.712.000	98,38	100,00		100,00	
32	Kementerian Transmigrasi	13	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.285.300.000	845.553.600	65,79	75,11		75,11	
34	Kementerian Transmigrasi	A	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	161.162.000	108.829.600	67,53	67,53		67,53	
35	Kementerian Transmigrasi	1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	55.818.000	13.360.000	23,93	23,93		23,93	
6	Kementerian Transmigrasi	2	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A]	PALI	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	105.344.000	95.469.600	90,63	90,63		90,63	

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK APBN
TUGAS PEMBANTUAN (TP)
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Per 13 Januari 2026

No	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Ket
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	6.695.196.000	6.470.900.760	96.65	100,00	
	Jumlah (Rp)	6.695.196.000	6.470.900.760	96,65	100,00	

Sumber data : Diolah dari Kanwil KPPN Sumsel

1. Pada Kegiatan Koordinasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi realisasi keuangan 33.84% dan realisasi Fisik 33.84% dikarenakan Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi ke Pusat yang tidak terealisasi dan juga terdapat kelebihan pada sisa uang tiket pesawat dan transport.



2. Pada Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan lembaga di satuan permukiman dan Pusat SKP Realisasi Keuangan 24.51% dan realisasi fisik 24.51 terdapat 1 efisiensi
3. Pada Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat realisasi keuangan 6.65% dan Realisasi Fisik 6.56% terdapat efisiensi Kegiatan Operasional Layanan Pendidikan, kegiatan Rujukan Pasien dan Dukungan Operasional Rujukan Pasien tidak terealisasi karena tidak ada TPA/TPS yang perlu dirujuk, dan kegiatan pembinaan mental spritual karena tidak ada kegiatan dilapangan.
4. Pada Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat realisasi keuangan 55.15% realisasi fisik kegiatan Rujukan Pasien dan Dukungan Operasional Rujukan Pasien tidak terealisasi karena tidak ada TPA/TPS yang perlu dirujuk, untuk kegiatan pembinaan mental spritual tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya kegiatan dilapangan.
5. Pada Kegiatan Fasilitas Umum (Rumah Ibadah) realisasi keuangan 62,52% realisasi fisik sampai saat ini 75.39% dikarenakan pekerjaan dilapangan terkendala cuaca dan banjir. Untuk pembayaran 100% sudah di tampungkan ke RPATA Penampungan dan pekerjaan fisik masih dikerjakan sampai dengan selesai di tahun selanjutnya
6. Pada Kegiatan Pembangunan Toilet SDN 6 Realisasi Keuangan 49,93%, realisasi fisik 88.311%. Untuk pembayaran 100% sudah di tampungkan ke RPATA Penampungan dan pekerjaan fisik masih dikerjakan sampai dengan selesai di tahun selanjutnya
7. Pada Kegiatan Pembangunan Toilet SDN 15 Realisasi Keuangan 49.93% realisasi fisik 87.46%. Untuk pembayaran 100% sudah di tampungkan ke RPATA Penampungan dan pekerjaan fisik masih dikerjakan sampai dengan selesai di tahun selanjutnya
8. Pada Kegiatan Rehab Sekolah SMP N 5 Realisasi Keuangan 49.94% realisasi fisik 96.250%. Untuk pembayaran 100% sudah di tampungkan ke RPATA Penampungan dan pekerjaan fisik masih dikerjakan sampai dengan selesai di tahun selanjutnya



9. Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Primer 0.75 Realisasi Keuangan 28.43% realisasi fisik 17.72% . Pekerjaan ini putus kontrak dikarenakan kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kontrak yang disepakati.
10. Pada Kegiatan Rehabilitasi Peningkatan Jalan Non status Primer 0.78 Realisasi Keuangan 28.27% realisasi fisik 76.44%. Untuk pembayaran 100% sudah di tumpangkan ke RPATA Penampungan dan pekerjaan fisik masih dikerjakan sampai dengan selesai di tahun selanjutnya
11. Pada Kegiatan Prasarana Jaringan Sumber Air Realisasi Keuangan 65.79% realisasi fisik 75.11% Untuk pembayaran 100% sudah di tumpangkan ke RPATA Penampungan dan pekerjaan fisik masih dikerjakan sampai dengan selesai di tahun selanjutnya
12. Pada Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Realisasi Keuangan 23.93% realisasi fisik 23.93% dikarenakan ada 1 belanja bahan yang di efisiensi

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Bidang Urusan Pendidikan

a. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan menjamin kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan di daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

1. Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bagi Pemerintah Provinsi adalah :
 - a. Pendidikan Menengah, terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - b. Pendidikan Khusus
2. Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan Provinsi :
 - a. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Menengah merupakan Peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Khusus merupakan Peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.
3. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM mencakup :

- a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa ;
- b. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
dan
- c. Tata Cara Pemenuhan Standar.

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa meliputi :

1. Standar Satuan Pendidikan ;
2. Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik ;
3. Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik ;
4. Kualitas dan Pemerataan Layanan.

1. Standar Satuan Pendidikan, terdiri dari : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan

2. Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik ;

- Kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus mencakup : Kompetensi literasi dan Kompetensi numerasi
- Kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Kejuruan mencakup : Kompetensi literasi, Kompetensi numerasi, Budaya kerja; dan Keterserapan lulusan di dunia kerja, berwirausaha, dan atau melanjutkan ke pendidikan tinggi.

3. Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Sekolah menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus mencakup ;

- Angka Partisipasi Kasar
- Angka Partisipasi Sekolah

4. Kualitas Layanan dan Pemerataan Layanan

Kualitas layanan dan pemerataan layanan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus mencakup ;

- Iklim keamanan ; dan
- Iklim kebhinekaan dan inklusivitas

Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, guru/pamong belajar/tutor aktif.

Selain kegiatan diatas, pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, guru/pamong belajar /tutor berupa ;

- a. Pelatihan ;
- b. Seminar ; dan /atau
- c. Lokakarya (workshop)

Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. Pembentukan komunitas belajar, dan memastikan kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru terlibat aktif ;
- b. Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan ;
- c. Fasilitasi kemitraan dengan dunia kerja ; dan
- d. Pemetaan terhadap lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik.

Selain pemenuhan kegiatan diatas, pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, guru/pamong belajar /tutor berupa ;



- a. Pelatihan ;
- b. Seminar ; dan /atau
- c. Lokakarya (workshop).

Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik

Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dilaksanakan dengan kegiatan pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah. Selain kegiatan pendataan tersebut diatas, pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu hingga lulus ;
- b. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung ; dan/atau
- c. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Kualitas dan Pemerataan Layanan

Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebhinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku dan budaya paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
- b. Fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling tidak 1 (satu) kali dalam waktu 6 (enam) bulan.



Selain kegiatan diatas, pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dapat dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan ;
- b. Pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ;
- c. Pemeliharaan dan/ atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat.

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas terdiri atas :

- a. Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- b. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; dan
- c. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Jenis Pendidik pada Sekolah Menengah Atas yaitu :

- a. Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum ;
- b. Guru bimbingan dan konseling ; dan
- c. Guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.

Jenis Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas terdiri atas: Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Tenaga Laboratorium ; dan Tenaga Penunjang lain.

Kualitas Pendidik pada Sekolah Menengah Atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) ; dan
- b. Memiliki sertifikat pendidik

Kualitas Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- a. Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-4) atau Sarjana (S-1) ;
 - Berasal dari guru ;
 - Memiliki sertifikat pendidik ;
 - Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun ; dan
 - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- b. Pengawas Sekolah pada Sekolah Menengah Atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Memiliki kualifikasi akademik Magister (S-2) kependidikan dengan basis (S-1) dalam rumpun mata pelajaran yang relavan pada perguruan tinggi terakreditasi ;
 - Berasal dari guru ;
 - Memiliki sertifikat pendidik ; dan
 - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- c. Tenaga Laboratorium pada Sekolah Menengah Atas memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas / sederajat.
- d. Tenaga Penunjang lain pada Sekolah Menengah Atas memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas / sederajat.

Jumlah Pendidik pada Sekolah Menengah Atas diukur dengan

- a. Kecukupan formasi Guru ASN untuk Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ; dan
- b. Indeks Distribusi Guru

Jumlah Pengawas Sekolah Menengah Atas diukur dengan rasio Pengawas Sekolah terhadap jumlah Sekolah Menengah Atas.

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas :

- a. Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- b. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; dan

c. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Jenis Pendidik pada Sekolah Menengah Kejuruan yaitu :

- a. Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum ;
- b. Guru bimbingan dan konseling ; dan
- c. Guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.

Jenis Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Pengawas Sekolah ;
- c. Tenaga Laboratorium/ Bengkel ; dan
- d. Tenaga Penunjang lain.

Kualitas Pendidik pada Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) ; dan
- b. Memiliki sertifikat pendidik

Kualitas Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-4) atau Sarjana (S-1) ;
 - Berasal dari Guru ;
 - Memiliki sertifikat Pendidik ;
 - Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun ; dan
 - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak.
- b. Pengawas Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Memiliki kualifikasi akademik Magister (S-2) kependidikan dengan basis (S-1) dalam rumpun mata pelajaran yang relavan pada perguruan tinggi terakreditasi ;



- Berasal dari Guru ;
 - Memiliki sertifikat Pendidik ; dan
 - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Pengawas Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
- c. Tenaga Laboratorium/Bengkel pada Sekolah Menengah Kejuruan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan / sederajat.
- d. Tenaga Penunjang lain pada Sekolah Menengah Kejuruan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan / sederajat.

Jumlah Pendidik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diukur dengan :

- a. Kecukupan formasi guru ASN untuk Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ; dan
- b. Indeks Distribusi Guru

Jumlah Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan diukur dengan rasio Pengawas Sekolah terhadap jumlah Sekolah Menengah Kejuruan.

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Pendidikan Khusus terdiri atas :

- a. Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- b. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; dan
- c. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Jenis Pendidik pada Sekolah Pendidikan Khusus yaitu :

- a. Guru Kelas ;
- b. Guru Mata Pelajaran ; dan
- c. Guru Pendidikan Khusus

Jenis Tenaga Kependidikan pada Sekolah Pendidikan Khusus terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Pengawas Sekolah ;
- c. Tenaga Penunjang lain.

Kualitas Pendidik pada Sekolah Pendidikan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) ; dan
 - b. Memiliki Sertifikat Pendidik
- Kualitas Tenaga Kependidikan pada Sekolah Pendidikan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah pada Sekolah Pendidikan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-4) atau Sarjana (S-1) ;
 - Berasal dari Guru ;
 - Memiliki sertifikat Pendidik ;
 - Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun ; dan
 - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak.
 - b. Pengawas Sekolah pada Sekolah Pendidikan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi ;
 - Berasal dari Guru ;
 - Memiliki sertifikat Pendidik ; dan
 - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Pengawas Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak.
 - c. Tenaga Laboratorium/Bengkel pada Sekolah Menengah Kejuruan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan / sederajat.
 - d. Tenaga Penunjang lain pada Sekolah Pendidikan Khusus memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas / sederajat.

Jumlah Pendidik pada Sekolah Pendidikan Khusus diukur dengan :

- a. Kecukupan formasi Guru ASN untuk Sekolah Pendidikan Khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ; dan
- b. Indeks Distribusi Guru

Jumlah Pengawas Sekolah Pendidikan Khusus diukur dengan rasio Pengawas Sekolah terhadap jumlah Sekolah Pendidikan Khusus.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

1. Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan ;
 - Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; dan/atau
 - Fasilitasi Kepala Sekolah atau Guru yang belum memiliki sertifikat Guru Penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Guru Penggerak.
2. Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan satuan Pendidikan Khusus dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
 - Redistribusi Guru ASN berdasarkan perhitungan dari kementerian;
 - Pengajuan formasi Guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan Guru oleh kementerian ;
 - Penyediaan Guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas ;
 - Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah/lulusan pendidikan Guru Penggerak sebagai Kepala Sekolah ;



- Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon Pengawas Sekolah/ lulusan pendidikan Guru Penggerak sebagai Pengawas Sekolah pengangkatan Guru ASN yang lulus seleksi ASN ; dan
 - Pemetaan kecukupan jumlah Pengawas Sekolah.
3. Perencanaan Pemenuhan Capaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan :
 - Kemampuan literasi Peserta Didik ; dan
 - Kemampuan numerasi Peserta Didik.
 - Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan :
 - Kemampuan literasi Peserta Didik ;
 - Kemampuan numerasi Peserta Didik ;
 - Tingkat penyerapan lulusan ; dan
 - Budaya kerja lulusan.
 - Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan untuk Pemerataan hasil Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain sederajat diukur melalui perhitungan :
 - Perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan ;
 - Perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi ;
 - Perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan ;
 - Perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi.



- Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan :
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat ;
 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.
- Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan :
 - Indeks iklim keamanan ;
 - Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas.
- Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Khusus diukur melalui perhitungan:
 - Kemampuan literasi Peserta Didik ;
 - Kemampuan numerasi Peserta Didik.
- Capaian Pemenuhan SPM untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Khusus diukur melalui perhitungan :
 - Perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan ;
 - Perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi ;
 - Perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan ;
 - Perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi.



- Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan pendidikan untuk Pendidikan Khusus diukur melalui perhitungan warga negara usia 4 (empat) sampai 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang mengikuti Pendidikan Khusus.
- Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Sekolah Pendidikan Khusus diukur melalui perhitungan :
 - Indeks iklim keamanan ;
 - Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas.
- Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan mengenai standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus di ukur melalui perhitungan :
 - Kecukupan formasi Guru ASN ;
 - Proporsi lulusan program Guru Penggerak yang diangkat menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah ; dan
 - Indeks distribusi Guru.
- Indeks Capaian SPM Pendidikan provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1) Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Sekolah Menengah serta meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari TK-PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (SMA-SMK dan MA).



**Tabel. Angka Partisipasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Dikdas dan Dikmen
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2025.**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
TK PAUD	--	--	50,83	53,36
SD/MI Sederajat	93,52	93,59	105,97	106,04
SMP/MTs Sederajat	74,14	74,51	105,54	104,37
SMA/SMK/MA Sederajat	61,90	65,06	94,65	97,86

*Sumber Data : Rapor Pendidikan 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMA-SMK dan MA Sederajat pada tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan adalah 65,06, meningkat 3,16 dari tahun 2024 yaitu 61,90. sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tahun 2025 sebesar 97,86, artinya naik 3,21 dari tahun sebelumnya dimana tahun 2024 adalah 94,65.

Pada tahun 2025, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Sekolah TK-PAUD adalah 53,36, meningkat dari tahun 2024 yaitu 50,83. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD-MI sederajat adalah 93,59, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD-MI sederajat adalah sebesar 106,04 sedangkan APK di tingkat SMP - MTs sederajat adalah 104,37.

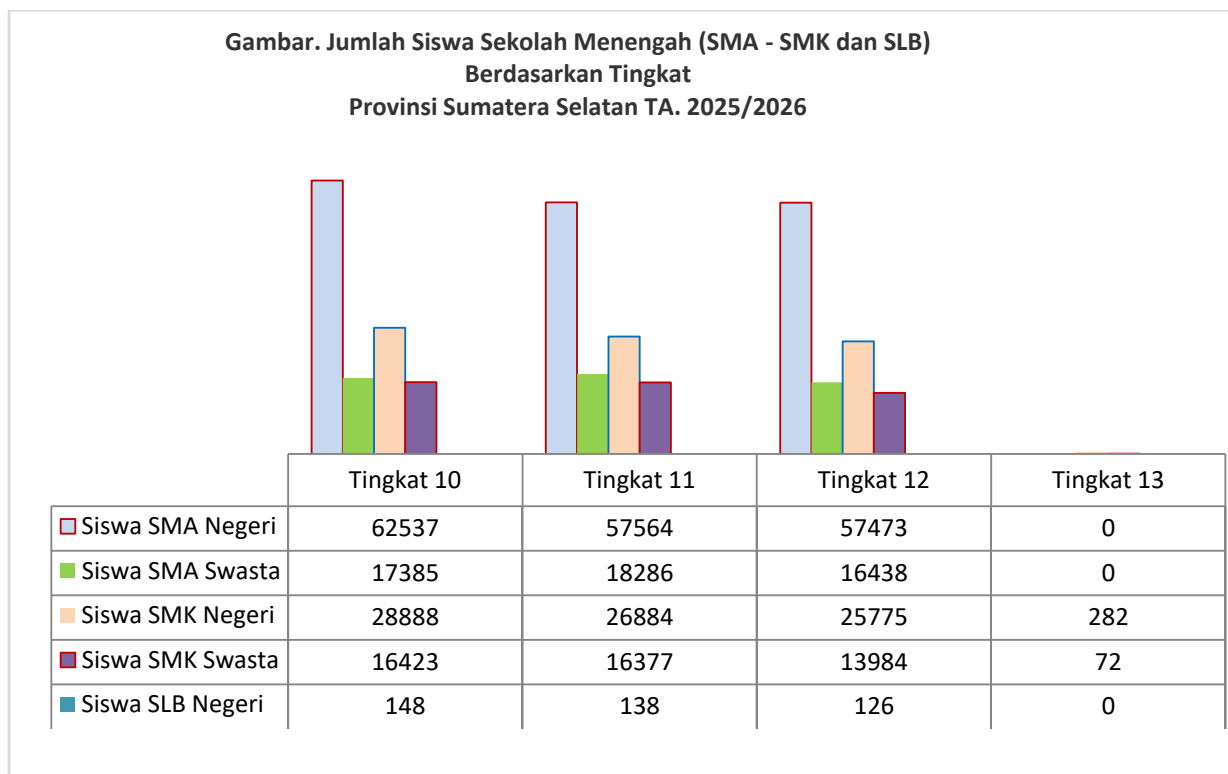


Jumlah Siswa Sekolah Menengah (SMA - SMK) dan SLB Berdasarkan Tingkat dan Jenis Kelamin

Pada TA. 2025/2026, Total Jumlah Siswa SMA adalah 229.683 yang terdiri dari Siswa Laki-laki 104.776 orang dan siswa perempuan berjumlah 124.907 orang.

Jumlah Siswa di SMA Negeri sebanyak 177.574 siswa, terdiri dari 78.723 siswa laki-laki dan 98.851 siswa perempuan. Sedangkan Total Jumlah Siswa SMA Swasta adalah 52.109 siswa yang terdiri dari 26.053 siswa laki-laki dan 26.056 siswa perempuan.

- ✓ Jumlah Siswa Tingkat 10 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 62.537 orang, Siswa Tingkat 11 berjumlah 57.564 orang siswa terdiri dan Tingkat 12 di SMA Negeri sebanyak 57.473 orang.



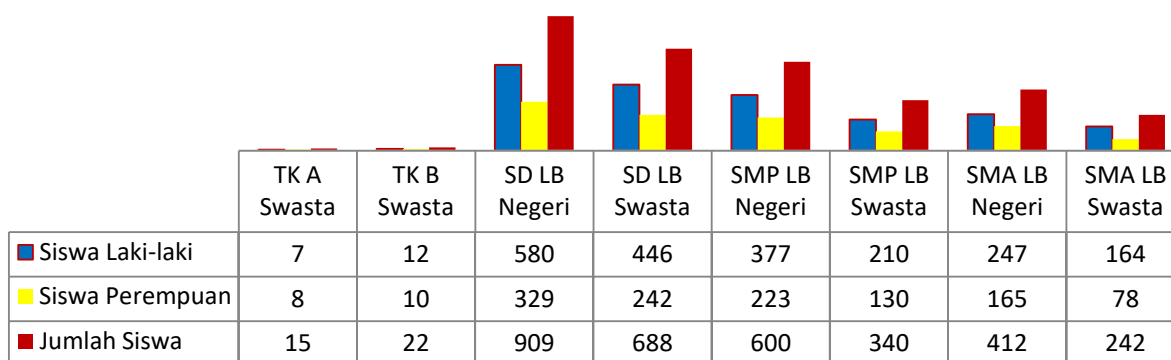
*Sumber : dapodik - November 2025

- ✓ Jumlah Siswa Tingkat 10 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yaitu 17.385 orang. Tingkat 11 berjumlah 18.286 orang dan Siswa Tingkat 12 adalah 16.438 orang.



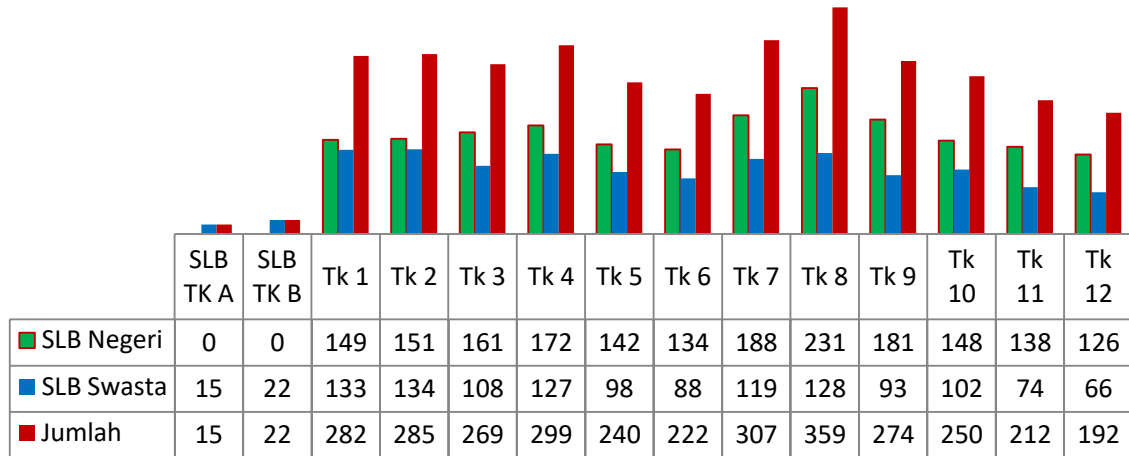
- ✓ Pada TA.2025/2026, Total Jumlah Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah 128.685 orang (75.374 laki-laki dan 53.311 perempuan).
- ✓ Jumlah Siswa SMK Negeri adalah 81.829 orang, dimana untuk Jumlah Siswa Tingkat 10 di SMK Negeri berjumlah 28.888 orang siswa, Tingkat 11 berjumlah 26.884 orang, Tingkat 12 sebanyak 25.775 orang, Siswa Tingkat 13 di SMK Negeri berjumlah 282 orang siswa. Total Jumlah Siswa SMK Swasta di Provinsi Sumatera Selatan TA.2025/2026 adalah 46.856 orang terdiri dari 28.317 orang siswa laki-laki dan 18.539 siswa perempuan.
- ✓ Siswa Tingkat 10 di SMK Swasta berjumlah 16.423 orang siswa, Tingkat 11 berjumlah 16.377 orang siswa, Tingkat 12 berjumlah 13.984 orang. Jumlah Siswa Tingkat 13 di SMK Swasta terdata 72 orang.
- ✓ Total Jumlah Siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Sumatera Selatan TA. 2025/2026 adalah 3.228 orang siswa terdiri dari 1.921 di SLB Negeri dan 1.307 orang siswa di SLB Swasta. Jumlah Siswa di SMA-LB Negeri adalah 412 orang, Sedangkan Total Jumlah Siswa di SMA-LB Swasta adalah 242 orang

Gambar. Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta Berdasarkan Tingkat Sekolah dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan TA. 2025/2026



Sumber : Dapodik - November 2025.

**Gambar. Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB)
Negeri dan Swasta Berdasarkan Tingkat
di Provinsi Sumatera Selatan TA. 2025/2026**



Sumber : dapodik - November 2025

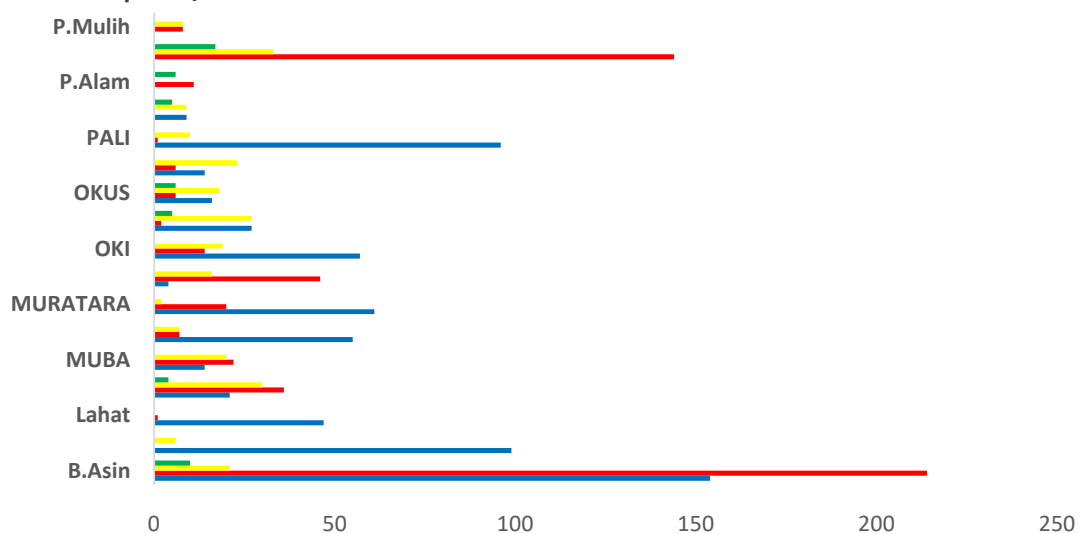
- ✓ Pada TA. 2025/2026, Jumlah Siswa SLB TK-A adalah 15 orang siswa sedangkan di SLB-TK B berjumlah 22 orang siswa.
- ✓ Jumlah Siswa SD-LB di tingkat 1 adalah 282 orang, terdiri dari 149 siswa SD-LB Negeri dan 133 siswa SD-LB Swasta.
- ✓ Jumlah Total Siswa SD-LB di tingkat 2 adalah 285 orang, terdiri dari 151 siswa SD-LB Negeri dan 134 orang siswa SD-LB Swasta.
- ✓ Jumlah Total Siswa SD-LB di tingkat 3 adalah 269 orang, terdiri dari 161 siswa SD-LB Negeri dan 108 orang siswa SD-LB Swasta.
- ✓ Jumlah Total Siswa SD-LB di tingkat 4 adalah 299 orang, terdiri dari 172 siswa SD-LB Negeri dan 127 siswa SD-LB Swasta.
- ✓ Jumlah Total Siswa SD-LB di tingkat 5 adalah 240 orang, terdiri dari 142 siswa SD-LB Negeri dan 98 siswa SD-LB Swasta.
- ✓ Jumlah Total Siswa SD-LB di tingkat 6 adalah 222 orang, terdiri dari 134 siswa SLB Negeri dan 88 siswa SD-LB Swasta.
- ✓ Jumlah Total Siswa SMP-LB di tingkat 7 adalah 307 orang, terdiri dari 188 siswa SLB Negeri dan 119 siswa SMP LB Swasta.

2) Data Jumlah Siswa Putus (Droop Out/DO), Siswa Dikeluarkan, Siswa Mundur dan Siswa Wafat di Tingkat Sekolah Menengah (SMA - SMK dan SLB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

a) Jumlah Siswa Putus (DO) dan Siswa Wafat di SMA pada Tahun 2025

- Pada Tahun 2025, Total Jumlah Siswa SMA (Negeri dan Swasta) yang Putus Sekolah (Droop Out/DO) di Prov. Sumatera Selatan sebanyak 1.212 orang yang terdiri dari 574 di SMA Negeri dan 538 orang di SMA Swasta.
- Total Jumlah Siswa SMA (Negeri dan Swasta) yang Wafat di seluruh Kabupaten/Kota Prov. Sumatera Selatan sebanyak 302 orang yang terdiri dari 249 di SMA Negeri dan 53 orang di SMA Swasta.

Gambar. Jumlah Siswa Putus (DO) dan Siswa Wafat di Tingkat SMA Negeri dan Swasta Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

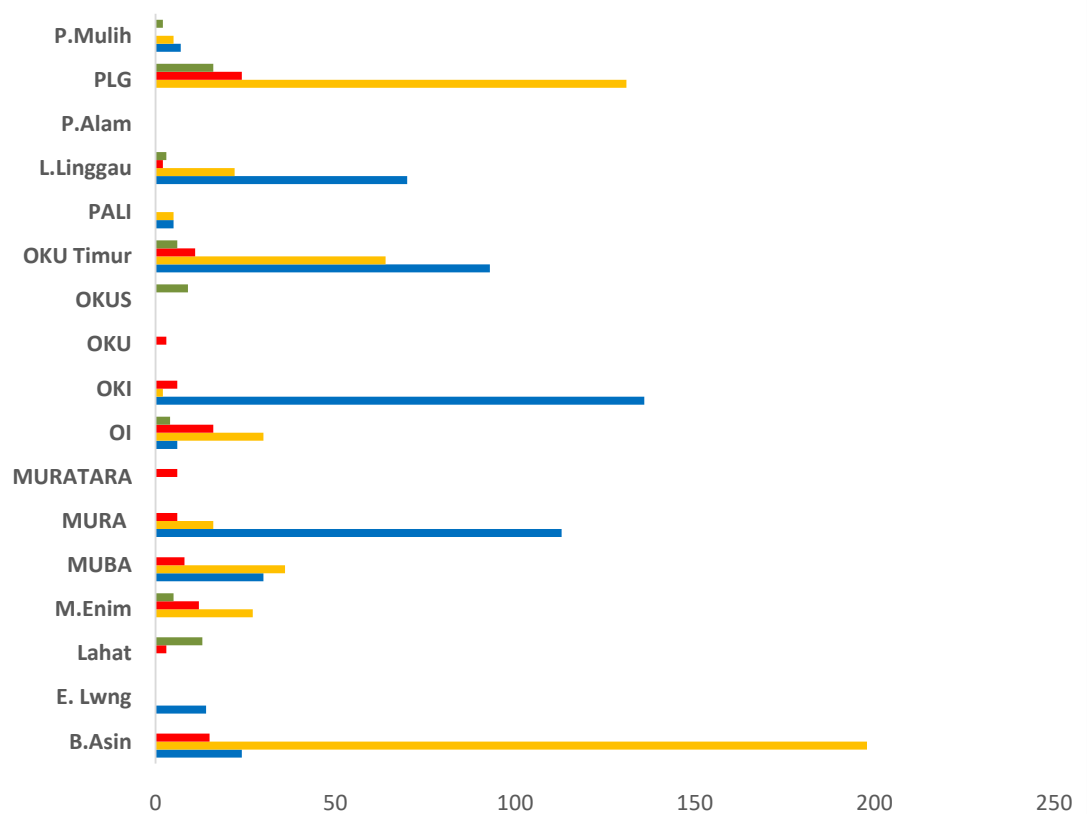


	B.Asi n	E. Lwng	Lahat	M.En im	MUB A	MUR A	MUR ATAR A	OI	OKI	OKU	OKU S	OKU Timu r	PALi	L.Lin ggau	P.Ala m	PLG	P.Mu lih
■ Siswa Wafat SMA Swasta	10	0	0	4	0	0	0	0	0	5	6	0	0	5	6	17	0
■ Siswa Wafat SMA Negeri	21	6	0	30	20	7	2	16	19	27	18	23	10	9	0	33	8
■ Siswa Putus SMA Swasta	214	0	1	36	22	7	20	46	14	2	6	6	1	0	11	144	8
■ Siswa Putus SMA Negeri	154	99	47	21	14	55	61	4	57	27	16	14	96	9	0	0	0

b) Jumlah Siswa Putus dan Siswa Wafat di SMK pada Tahun 2025

- Total Jumlah Siswa SMK (Negeri dan Swasta) yang Putus Sekolah/DO di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.034 orang terdiri dari 498 di SMK Negeri dan 536 orang di SMK Swasta.
- Jumlah **Siswa SMK (Negeri dan Swasta) yang Wafat di Prov. Sumsel yaitu 170 orang**, terdiri dari 112 di SMK Negeri dan 58 orang di SMK Swasta.

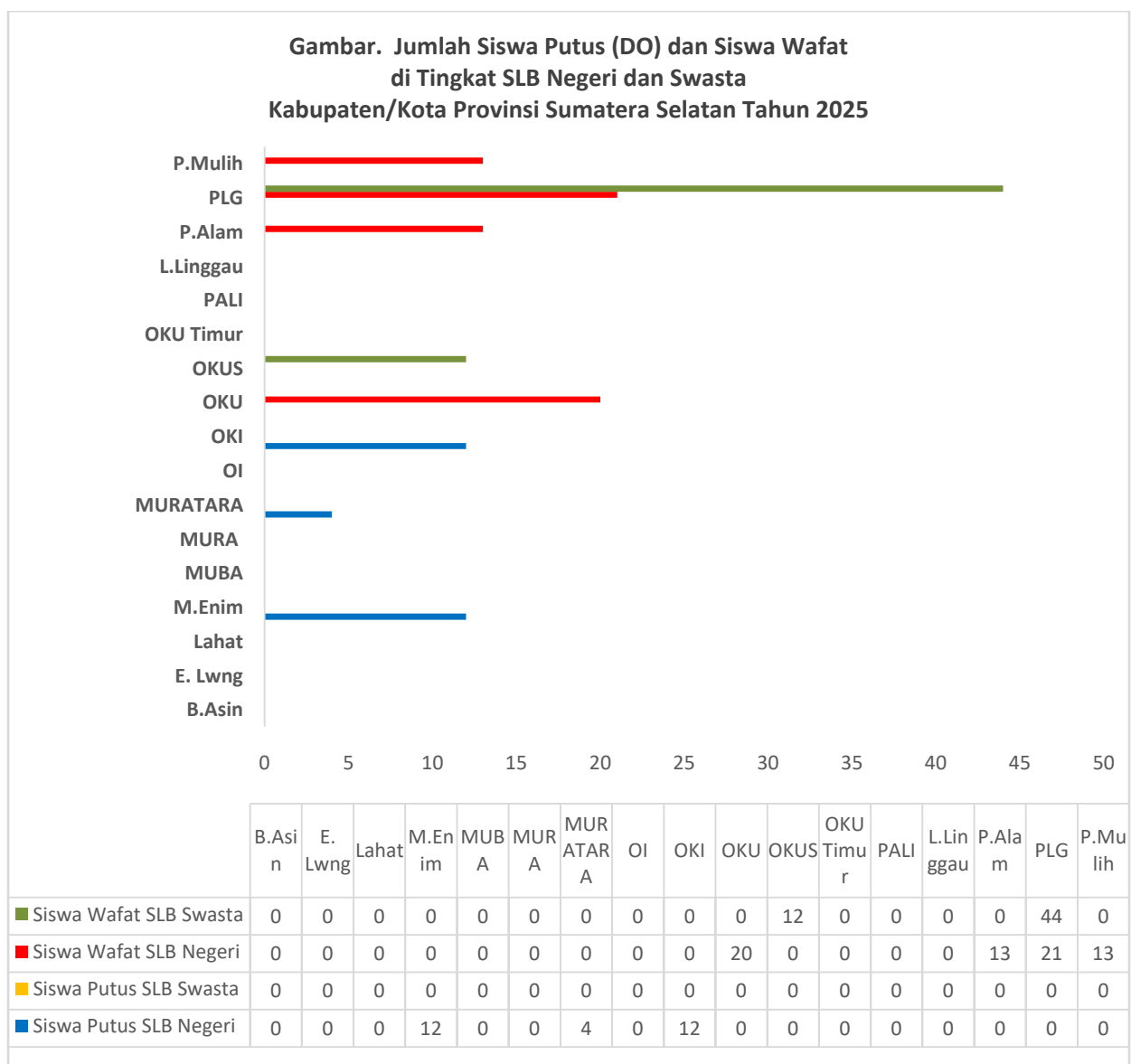
**Gambar . Jumlah Siswa Putus (DO) dan Siswa Wafat
di Tingkat SMK Negeri dan Swasta
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**





c) **Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Siswa Wafat di SLB pada Tahun 2025**

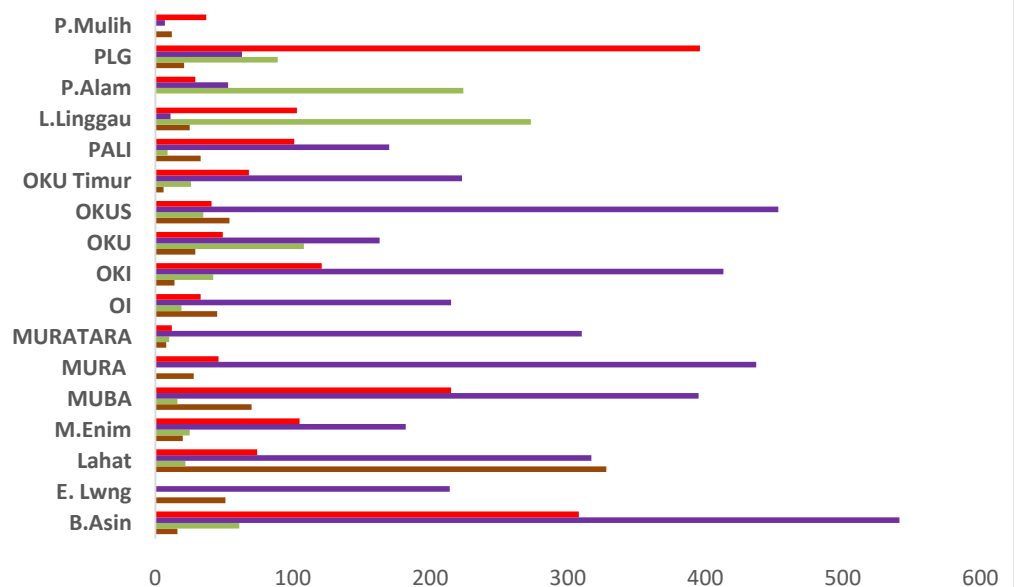
- Pada tahun 2025, Total Jumlah Siswa SLB (Negeri dan Swasta) yang Putus Sekolah/Droop Out(DO) di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 28 siswa (12 siswa laki laki dan 16 siswa perempuan) berasal dari SLB Negeri.
- Jumlah Siswa SLB (Negeri dan Swasta) yang Wafat di Prov. Sumsel yaitu 123 siswa (21 Laki laki dan 102 siswa perempuan), terdiri dari 67 orang siswa di SLB Negeri dan 56 orang di SLB Swasta.



d) **Jumlah Siswa Dikeluarkan dan Siswa Mundur di SMA pada Tahun 2025**

- Total Jumlah Siswa SMA (Negeri dan Swasta) yang Dikeluarkan dari Sekolah di Prov. Sumatera Selatan terdata 1.719 siswa (1.046 laki laki dan 673 perempuan) dari SMA Negeri 760 siswa dan SMA Swasta 959 siswa.
- Jumlah Siswa SMA (Negeri dan Swasta) yang Mundur di Prov. Sumsel yaitu 5.905 siswa terdiri dari 4.167 orang siswa di SMA Negeri dan 1.738 orang di SMA Swasta.

**Gambar . Jumlah Siswa Dikeluarkan dan Siswa Mundur
di SMA Negeri dan Swasta
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

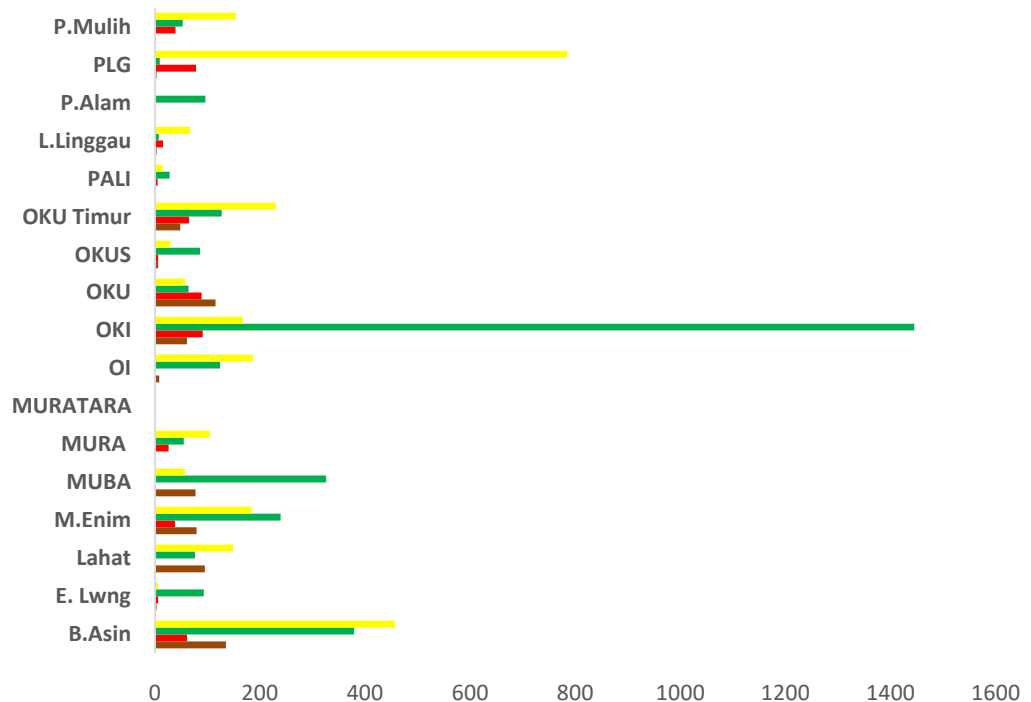


	B.Asi n	E. Lwn g	Laha t	M.E nim	MUB A	MUR A	MUR ATA RA	OI	OKI	OKU	OKU S	OKU Timu r	PALI	L.Lin ggau	P.Ala m	PLG	P.M ulih
■ Siswa Mundur di SMA Swasta	308	0	74	105	215	46	12	33	121	49	41	68	101	103	29	396	37
■ Siswa Mundur di SMA Negeri	541	214	317	182	395	437	310	215	413	163	453	223	170	11	53	63	7
■ Siswa Dikeluarkan di SMA Swasta	61	0	22	25	16	0	10	19	42	108	35	26	9	273	224	89	0
■ Siswa Di Keluarkan di SMA Negeri	16	51	328	20	70	28	8	45	14	29	54	6	33	25	0	21	12

e) **Jumlah Siswa Dikeluarkan dan Siswa Mundur di SMK pada Tahun 2025**

- Total Jumlah Siswa SMK (Negeri dan Swasta) yang Dikeluarkan dari Sekolah di Prov. Sumatera Selatan terdata 1.155 siswa dari SMK Negeri 635 siswa dan SMK Swasta 520 siswa.
- Pada Tahun 2025, Jumlah Siswa SMK (Negeri dan Swasta) yang Mundur di Prov. Sumsel yaitu 5.855 siswa , terdiri dari 3.207 siswa di SMK Negeri dan 2.648 siswa di SMK Swasta.

Gambar . Jumlah Siswa Dikeluarkan dan Siswa Mundur di SMK Negeri dan Swasta Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

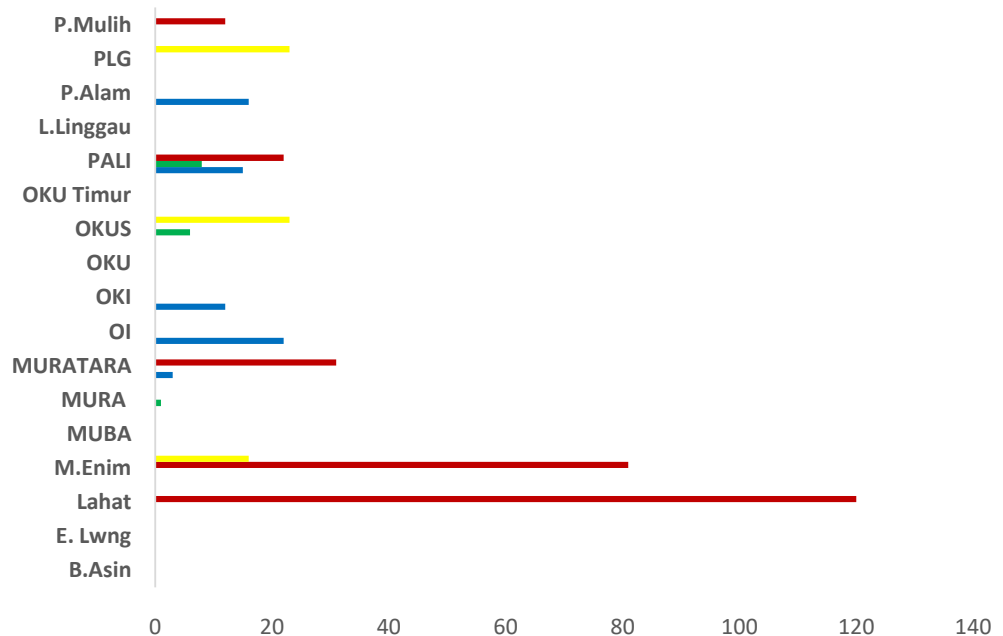


	B.Asin	E. Lwn g	Lahat	M.Enim	MUBA	MURA	MURATARA	OI	OKI	OKU	OKUS	OKU Timur	PALI	L.Linggau	P.Alam	PLG	P.Mulih
Siswa Mundur di SMK Swasta	457	6	149	184	57	104	0	187	167	58	29	230	14	67	0	785	154
Siswa Mundur di SMK Negeri	379	93	76	239	326	55	0	124	1445	64	86	127	28	7	96	9	53
Siswa Dikeluarkan di SMK Swasta	61	6	0	38	1	26	0	0	91	89	6	65	5	15	0	78	39
Siswa Di Keluarkan di SMK Negeri	135	3	95	79	77	0	1	8	61	115	6	48	1	3	0	3	0

f) Jumlah Siswa Dikeluarkan dan Siswa Mundur di SLB pada Tahun 2025

- Total Jumlah Siswa SLB (Negeri dan Swasta) yang Dikeluarkan dari Sekolah di Prov. Sumatera Selatan berjumlah 83 siswa dari SLB Negeri 68 siswa dan SLB Swasta 15 siswa.
- Pada Tahun 2025, Jumlah Siswa SLB (Negeri dan Swasta) yang Mundur di Prov. Sumsel yaitu 328 siswa, terdiri dari 266 orang siswa di SLB Negeri dan 62 orang di SLB Swasta.

Gambar. Jumlah Siswa Dikeluarkan dan Siswa Mundur di SLB Negeri dan Swasta Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



	B.Asin	E. Lwng	Lahat	M.Enim	MUBA	MURA	MURATARA	OI	OKI	OKU	OKUS	OKU Timur	PALI	L.Linggau	P.Alam	PLG	P.Mulih
Siswa Mundur di SLB Swasta	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	0
Siswa Mundur di SLB Negeri	0	0	120	81	0	0	31	0	0	0	0	0	22	0	0	0	12
Siswa Dikeluarkan di SLB Swasta	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	8	0	0	0	0
Siswa Di Keluarkan di SLB Negeri	0	0	0	0	0	0	3	22	12	0	0	0	15	0	16	0	0



3) Tingkat Partisipasi Warga Usia 16 s.d 18 Tahun dalam Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan

- Jumlah Siswa berusia 16-18 tahun di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 171.088 orang sedangkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 98.064 orang siswa. Jumlah Siswa di Madrasah Aliyah (MA) dan Pontren usia 16-18 tahun adalah 54.255, sehingga Total Siswa usia 16-18 tahun di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah 323.407 orang.
- Jumlah Lulusan SMA TA.2024/2025 adalah sebanyak 68.553 orang sedangkan Jumlah Lulusan SMK TA.2024/2025 adalah 39.668 orang. Total Jumlah Siswa usia 16-18 tahun dan Lulusan TA.2024/2025 adalah 431.628 orang.
- Jumlah Penduduk dengan usia 16 - 18 tahun di Prov. Sumsel 432.130 orang.

Tabel.

Data Jumlah Anak yang Sekolah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Pendidikan dari Warga Miskin /Kurang Mampu.

Pendidikan Menengah								
No	Jenjang	Jumlah Siswa	Jumlah Siswa 16-18 Tahun	Jumlah Siswa 16-18 Th dari Warga Miskin	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah Penduduk 16-18 Th dari Warga Miskin	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) /Drop Out(DO)	Jumlah Anak Tidak Sekolah dari Warga Miskin
1.	SMA	229.683	171.088	17.365	432.130	43.861	4.080	5.139
2.	SMK	128.685	98.064	9.953				
Pendidikan Khusus								
No	Jenjang	Jumlah Siswa	Jumlah Siswa 4-18 Tahun	Jumlah Siswa 16-18 Th dari Warga Miskin	Jumlah Penduduk 4-18 Th Penyandang Disabilitas	Jumlah Penduduk 16-18 Th dari Warga Miskin	Jumlah Anak Tidak Sekolah	Jumlah Anak Tidak Sekolah dari Warga Miskin
3.	SLB	3.228	3.228	328	4.009	445	781	80

Sumber : Dapodik - BPS Sumsel - 2025 (diolah)



Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran Tahun 2025 dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024.

Tabel.
 Target Capaian Realisasi SPM 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian		Batas Waktu Capaian
		Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	
1	SPM BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	81,61%	100 %	TAHUN 2025 (1 Tahun)

TARGET Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah 100% . Dengan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Pemenuhan Anggaran serta Realisasi Target Fisik serta Anggaran untuk pelayanan pendidikan diharapkan dapat menjadi tolak ukur pencapaian target hasil capaian SPM Bidang Pendidikan yang lebih baik.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya serta melakukan berbagai langkah Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Menengah (SMA-SMK) dan Pendidikan Khusus, seperti penyediaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan biaya personil untuk siswa sekolah, serta peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dalam hal ini peningkatan mutu para Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dengan mengadakan peningkatan kompetensi dan berbagai seminar/ diklat serta pembinaan secara terencana.



c. Anggaran

Alokasi Anggaran adalah Jumlah Belanja Langsung dan Tidak Langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel.
Capaian Program Kegiatan dan Perubahan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Per Desember 2025

No	Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi per Desember 2025 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.850.095.505.110	1.533.795.204.342	82.90
	I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	695.180.000	364.814.079	54.80
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.840.262.794.000	1.525.701.431.121	72.04
	III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	516.634.260	478.063.270	93.17
	IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	44.000.000	14.000.000	31.82
	V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.210.375.000	757.781.267	50.24
	VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	685.210.000	517.239.050	83.41
	VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1.227.800.000	1.210.963.157	98.59
	VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.961.550.000	2.675.442.648	96.65
	IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.428.461.850	2.075.469.750	60.28
II	PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1.016.962.895.559	637.067/673.545	73.08
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	558.828.485.994	335.189.081.516	73.13
	30	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	777.797.444	693.470.350	89.16
	31	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	899.594.000	731.559.850	81.32
	32	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.134.147.660	534.373.850	47.12
	33	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.348.488.638	2.140.131.950	63.91
	34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.841.183.988	1.617.537.450	87.85
	35	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	1.841.183.988	346.131.750	39.21



	36	Pengadaan Mebel Sekolah	1.845.623.988	1.833.569.440	99.35
	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.176.226.038	651.157.476	55.36
	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.826.621.000	2.676.895.155	94.70
	39	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	186.991.645.250	180.103.157.940	96.32
	40	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	961.125.750	898.954.077	93.53
	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	14.912.852.100	13.770.889.915	92.34
	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	336.690.320.000	125.145.195.363	37.17
	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	87.000.000	86.410.000	99.32
	44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	42.825.000	0	0
	45	Pembangunan Ruang Laboratorium	33.510.000	33.510.000	100
	46	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	323.500.000	150.322.000	46.47
	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.053.275.138	3.775.814.950	93.15
	II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	423.190.456.390	280.196.486.419	85.69
	48	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.444.500.000	1.201.006.350	83.14
	49	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	2.789.186.850	2.404.233.490	86.20
	50	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.019.596.750	1.923.389.750	95.24
	51	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.367.500.000	881.803.950	64.48
	52	Pengadaan Mebel Sekolah	1.876.270.000	1.869.351.756	99.63
	53	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	639.515.000	586.004.200	91.63
	54	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	41.124.000.000	40.337.046.343	98.09
	55	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	164.963.265.140	163.067.625.000	98.85
	56	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.771.365.000	1.430.463.506	80.75
	57	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	358.413.000	262.944.214	73.36
	58	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.671.919.100	1.630.757.964	97.54
	59	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	198.691.056.000	60.433.357.436	30.42
	60	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah kejuruan	78.000.000	77.823.260	99.77
	61	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.300.287.200	2.122.160.450	92.26
	62	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	2.095.582.350	1.968.518.750	93.94
	III	Pengelolaan Pendidikan Khusus	34.943.953.175	21.682.105.610	60.44



	63	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	459.120.000	30.905.000	6.73
	64	Pengadaan Mebel	840.000.000	824.937.220	98.21
	65	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	312.500.000	0	0
	66	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	300.600.000	230.213.800	76.58
	67	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3.000.000.000	2.798.500.000	93.21
	68	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7.599.265.675	6.354.180.708	83.62
	69	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	239.852.000	237.410.170	98.98
	70	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Khusus	7.237.255.500	7.064.551.612	97.61
	71	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	12.065.700.000	3.270.900.000	27.11
	72	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	64.500.000	41.420.000	64.22
	73	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	81.100.000	80.373.000	99.10
	74	Pembangunan Ruang Kelas Baru	937.120.000	279.112.000	29.78
	75	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	996.000.000	322.251.100	32.35
	76	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	365.920.000	112.552.000	30.76
	77	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	445.020.000	34.799.000	7.82
III	C	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	353.503.000	220.152.000	70.03
	78	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	239.400.000	115.290.000	48.16
	79	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	114.103.000	104.862.000	91.90
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		1.468.810.000	1.298.025.372	89.16
	80	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	583.860.000	542.895.000	92.98
	81	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	884.950.000	755.130.372	85.33
Jumlah : 16 Kegiatan 79 Sub Kegiatan			2.868.880.713.669	2.172.381.055.259	75.72

*** Data : Laporan Realisasi Keuangan per Desember 2025**

**d. Dukungan Personil**

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerima dan melakukan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional (JF) guru tahun 2025.

**Tabel. Data Jumlah Pegawai
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	JENIS PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)
1	Dinas Pendidikan	222
2	UPTD BPPK	20
3	UPTD BPIKP	17
4	UPTD Graha Teknologi Sriwijaya	17
5	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.541
6	Pengawas	91
	Jumlah	15.908

Sumber : Renstra 2025-2029

Total Jumlah Pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah 15.908 orang, terdiri dari Pegawai di Dinas Pendidikan berjumlah 222 orang dengan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan di Tingkat Sekolah Menengah (SMA SMK dan SLB) di Provinsi Sumatera Selatan adalah 15.541 orang dan yang telah memenuhi kualifikasi standar minimal memiliki ijazah kualifikasi Sarjana (S1) sudah mencapai 98 persen lebih terdiri dari Guru PNS, PPPK dan berstatus guru honorer dengan Jumlah Pengawas sebanyak 91 orang.

Kelayakan mengajar guru di Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 14, tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No.14/2005). Sumber

daya manusia yang baik dan bermutu menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa khususnya dalam satuan dinas pendidikan serta lingkungan sekolah. Kelayakan mengajar guru menggunakan Undang-undang Nomor 14, tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No.14/2005). Guru layak mengajar di tingkat SD, SMP dan Sekolah Menengah (SM) adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi.

Tabel. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Prov. Sumsel 2025

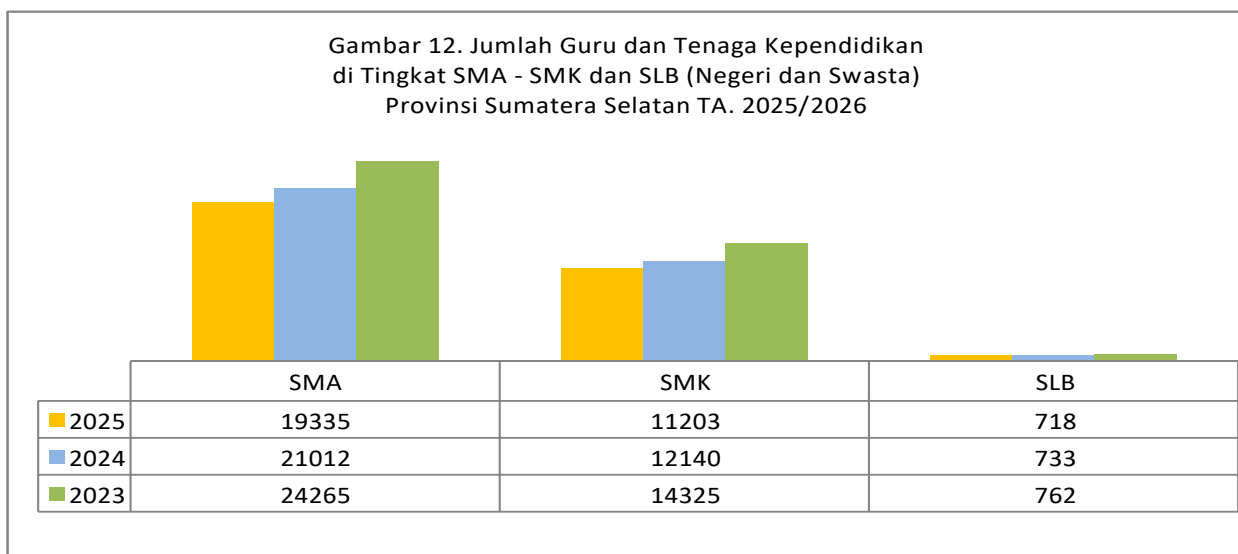
No	Jenjang Pendidikan	Kepala Sekolah	Guru Tersertifikasi	Guru dan Tenaga Kependidikan
1	SMA NEGERI	331	4.256	14.847
2	SMA SWASTA	306	2.305	4.488
3	SMK NEGERI	121	1.519	7.334
4	SMK SWASTA	204	1.208	3.869
5	SLB NEGERI	16	139	424
6	SLB SWASTA	25	7	290
Jumlah Total		1.003	9.434	31.252

Sumber : Dapodik - 2025

- Pada TA. 2025/2026 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Provinsi Sumatera Selatan ada sebanyak 14.847 orang sedangkan di SMA Swasta berjumlah 4.488 orang.
- Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri berjumlah 7.334 orang sedangkan di SMK Swasta berjumlah 3.869 orang. (lihat Gambar 5)
- Jumlah Guru dan Tendik di SLB Negeri adalah 424 orang, sedangkan di SLB Swasta jumlah Guru dan Tendik berjumlah 290 orang.

Pemerintah melalui Dinas Pendidikan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan pemenuhan standar kuantitas Guru dan Pegawai di tiap satuan pendidikan di kabupaten dan kota dengan melakukan penerimaan guru dan pegawai dengan standar minimal memiliki ijazah kualifikasi Sarjana (S1) dan terseleksi sesuai kebutuhan. Adapun guru yang didata tahun ini bersumber dari dapodik dan sudah di verifikasi bahwa guru yang ada tersebut adalah hanya guru yang mengajar dan bertugas di sekolah induk sehingga tidak mendata jumlah guru yang berstatus ganda/mengajar di beberapa sekolah.

- Pada Tahun 2025, Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Provinsi Sumatera Selatan terdata sebanyak 14.847 orang terdiri dari 11.625 Guru dan 3.222 Tendik sedangkan di SMA Swasta ada 4.488 orang yang (3.398 Guru dan 1.090 Tendik), sehingga total berjumlah 19.335 orang Guru dan Tendik.



Sumber : dapodik - Kemendikdasmen Nov 2025

- Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri berjumlah 7.334 orang terdiri dari 5.743 Guru dan 1.591 Tendik. Sedangkan di SMK Swasta ada 3.002 Guru dan 867

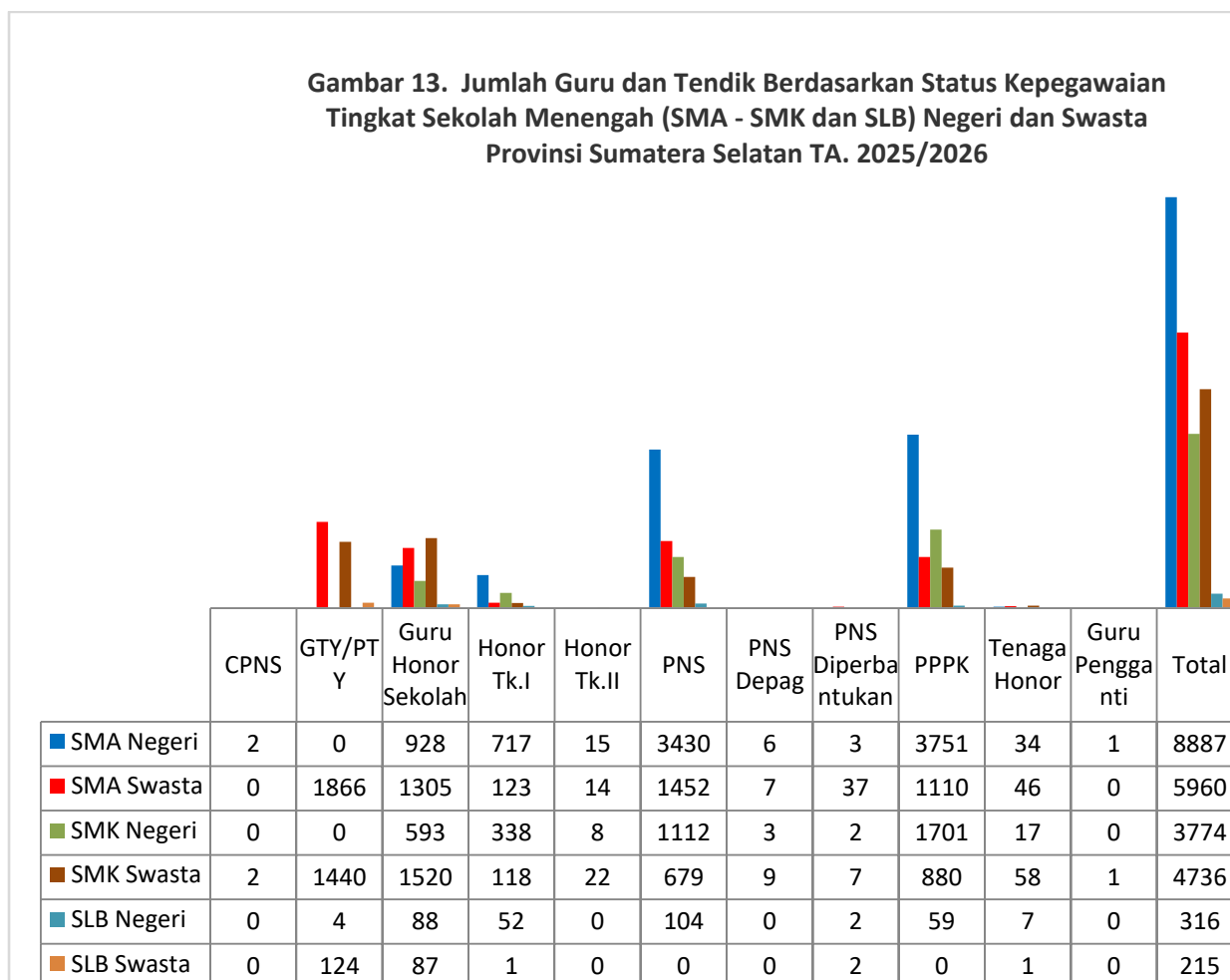
Tendik. Total Jumlah Guru dan Tendik di SMK Negeri dan Swasta adalah 11.203 orang.

- Total Jumlah Guru dan Tendik di SLB Negeri dan Swasta adalah 718 orang.

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

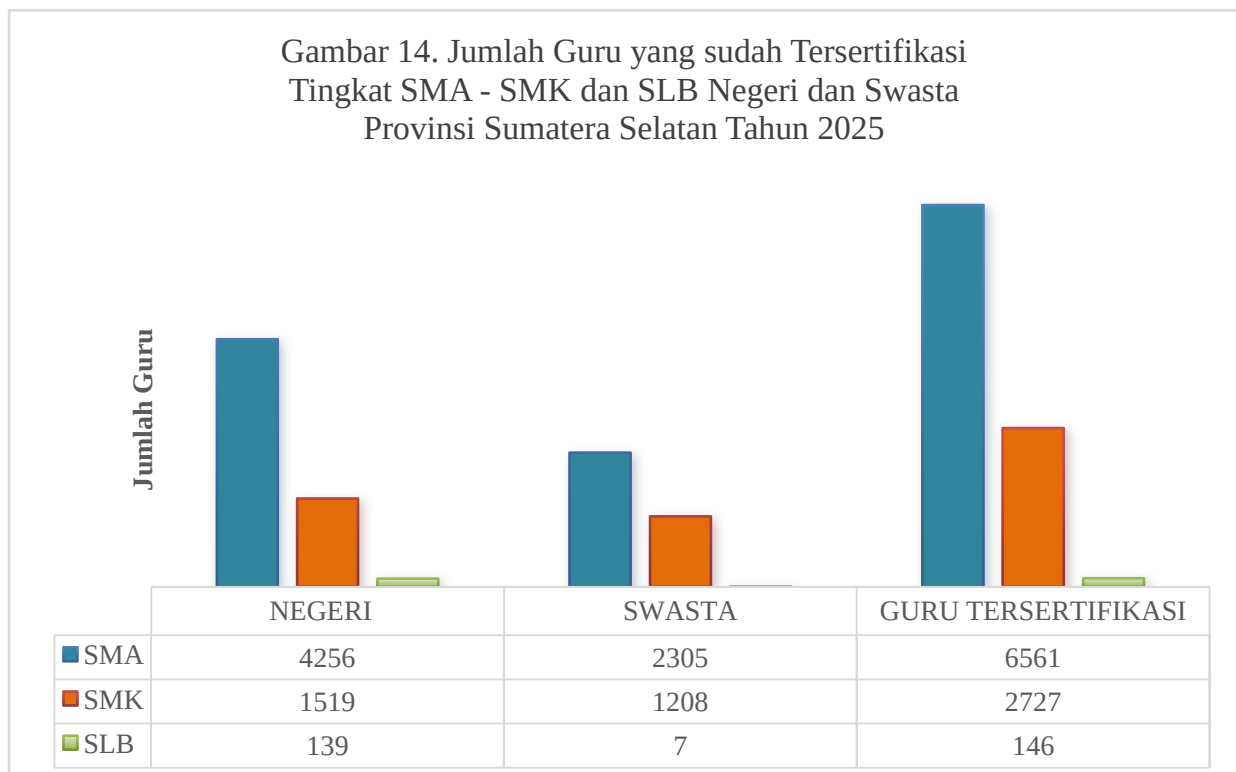
- Pada Tahun 2025, Di SMA Negeri untuk Jumlah Guru CPNS ada 2 orang, Guru Honor Sekolah ada 928 orang, PNS di SMA Negeri 3.430 orang, Guru berstatus Honor Tk.I Provinsi 717 orang, dan sebanyak 15 orang Honor Tk.II, sedangkan Jumlah Guru PPPK di SMA Negeri berjumlah 3.751 orang dan Tenaga Honor Sekolah 34 orang serta Guru Pengganti ada 1 orang .

Gambar 13. Jumlah Guru dan Tendik Berdasarkan Status Kepegawaian Tingkat Sekolah Menengah (SMA - SMK dan SLB) Negeri dan Swasta Provinsi Sumatera Selatan TA. 2025/2026



Di SMK Negeri untuk Jumlah Guru Honor Sekolah ada 593 orang, PNS di SMK Negeri 1.112 orang, Guru berstatus Honor Tk.I Provinsi 338 orang, dan 8 orang Honor Tk.II, PNS Depag ada 3 orang, PNS Diperbantukan 2 orang, Jumlah Guru PPPK di SMK Negeri berjumlah 1.701 orang dan Tenaga Honor Sekolah 17 orang .

- Jumlah Guru yang sudah tersertifikasi untuk sekolah tingkat SMA - SMK dan SLB di Provinsi Sumatera Selatan pada TA.2025/2026 adalah sebagai berikut:
- Jumlah Guru Tersertifikasi di SMA Negeri adalah 4256 guru sedangkan di SMA Swasta guru yang tersertifikasi berjumlah 2.305 orang sehingga total guru Tersertifikasi di SMA Negeri dan Swasta berjumlah 6.561 orang guru.



Sumber : dapodik - Oktober 2025

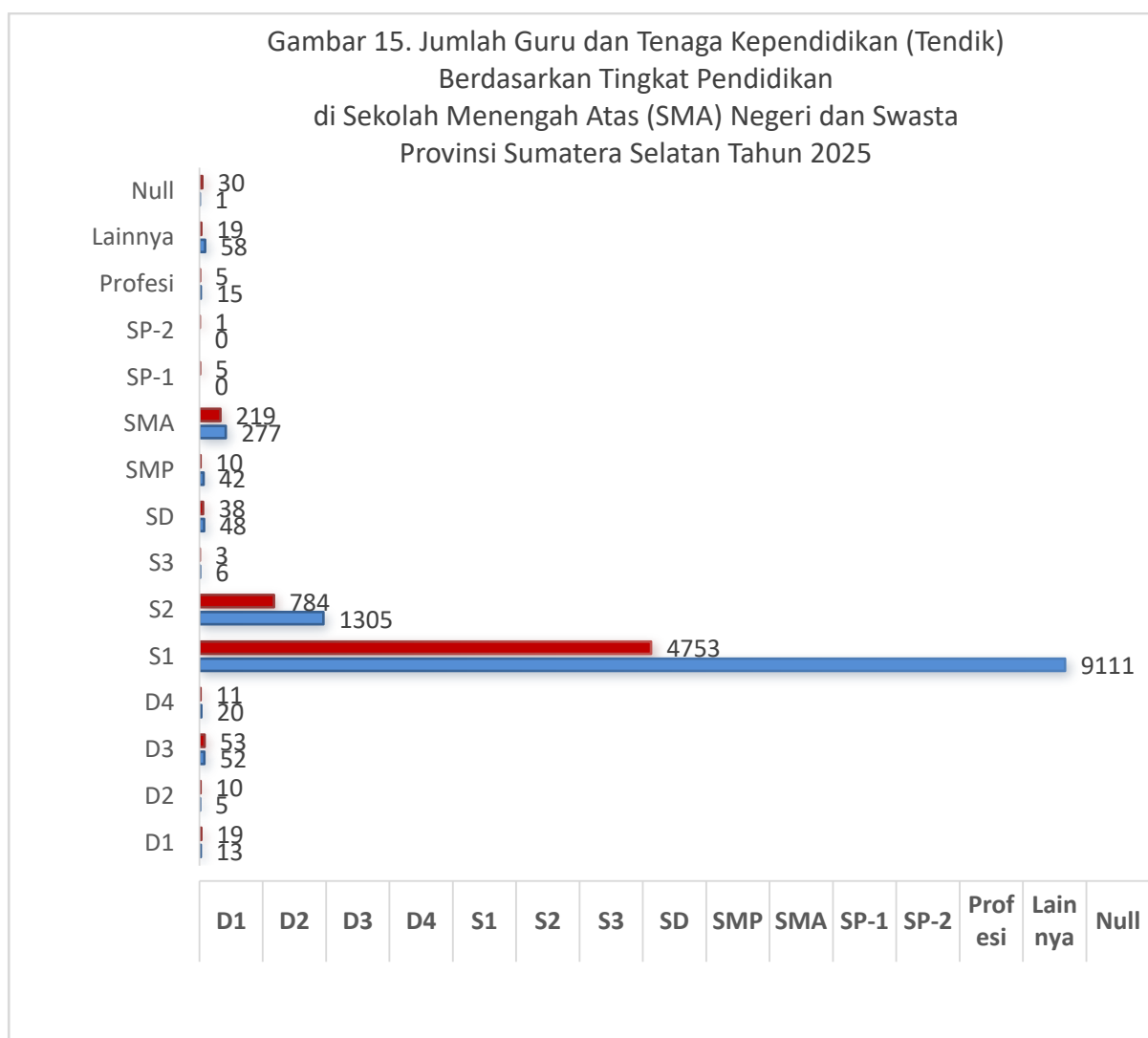
- Jumlah guru tersertifikasi di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri adalah 1.519 guru sedangkan di SMK Swasta guru yang

tersertifikasi berjumlah 1208 orang sehingga total guru Tersertifikasi di SMK berjumlah 2.727 orang guru.

- Jumlah guru tersertifikasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri adalah 139 guru sedangkan di SLB Swasta guru yang tersertifikasi berjumlah 7 orang sehingga total guru Tersertifikasi di SLB berjumlah 146 orang guru.

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

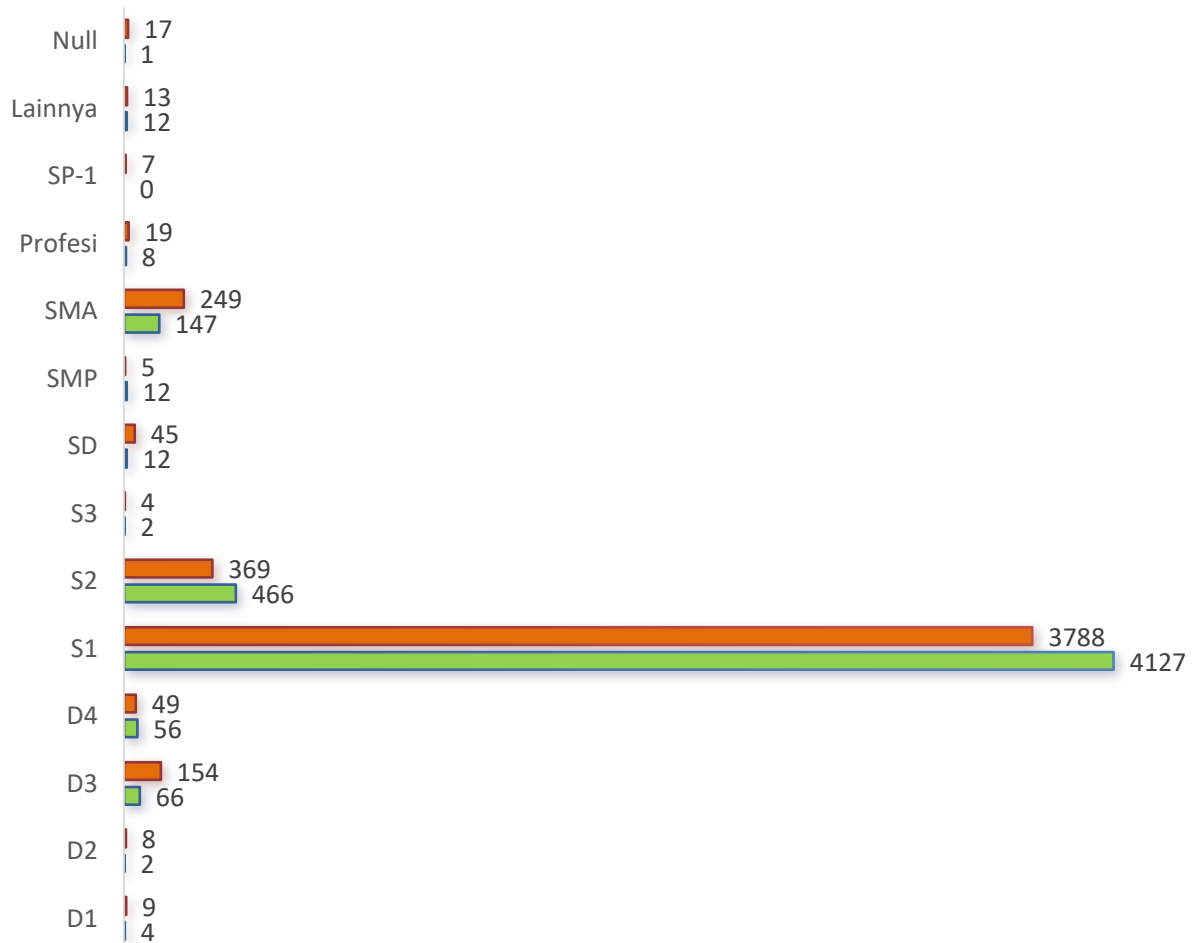
Pada Tahun 2025, Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik) pada tingkat SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :





- ✓ Jumlah Guru dan Tendik di SMA Negeri yang berpendidikan Sarjana (S1) berjumlah 9.111 orang, dan di SMA Swasta ada 4.753 orang. Guru yang Magister (S-2) berjumlah 1.205 orang dan di SMA Swasta berjumlah 784 orang. Guru dan Tendik yang berpendidikan Doktor (S-3) ada 6 orang sedangkan di SMA Swasta guru berpendidikan S-3 ada 3 orang.

Gambar 16. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



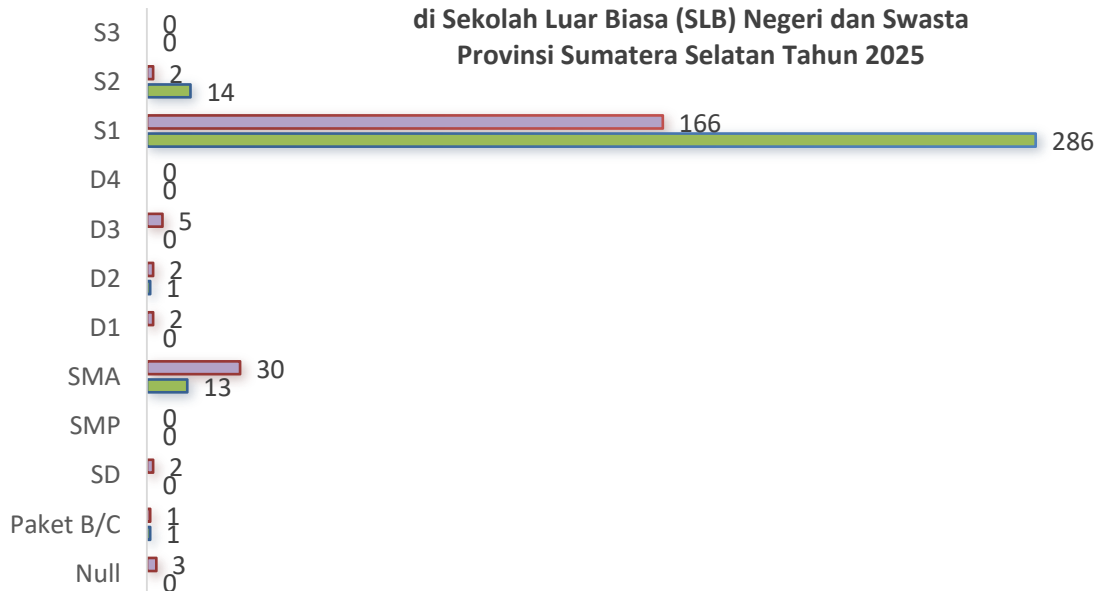
	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	SD	SMP	SMA	Profe si	SP-1	Lainn ya	Null
SMK SWASTA	9	8	154	49	3788	369	4	45	5	249	19	7	13	17

- ✓ Jumlah Guru dan Tendik di SMK Negeri yang berpendidikan Sarjana (S1) berjumlah 4.127 orang, dan di SMK Swasta berjumlah 3.332 orang, berpendidikan Magister (S2) berjumlah 466 orang dan di SMK Swasta berjumlah 286 orang. Sedangkan Guru yang berpendidikan Doktor (S3) berjumlah 2 orang sedangkan di SMK Swasta yang Doktor /S3 ada 4 orang.

Jumlah sumber daya manusia (SDM) Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) berdasarkan tingkat pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan terdata sebagai berikut:

- ✓ Jumlah Guru dan Tendik yang berpendidikan SMA Sederajat di SLB Negeri ada 30 orang sedangkan di SLB Swasta berjumlah 13 orang, yang berpendidikan Sarjana (S1) berjumlah 166 orang, dan di SLB Swasta berjumlah 286 orang. Magister (S2) berjumlah 14 orang dan di SMK Swasta berjumlah 2 orang.

**Gambar 17. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**





c. Hasil Capaian

Tabel.
Data Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Pendidikan Menengah		
Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Sekolah Menengah	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	(%) Capaian SPM Sekolah Menengah
431.628	432.130	99.33
Pendidikan Khusus		
Jumlah Siswa Usia 4-18 Tahun yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Pendidikan Khusus	Jumlah Penduduk Usia 4-18 Tahun Proporsi Disabilitas	(%) Capaian SPM Sekolah Pendidikan Khusus
3.228	4.009	84.10
Provinsi Sumatera Selatan		
Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Sekolah Menengah + Jumlah Siswa Usia 4-18 Tahun yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Pendidikan Khusus	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun + Jumlah Penduduk Usia 4-18 Tahun Proporsi Disabilitas	% Capaian SPM SM & Pendidikan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan
431.950	436.139	91.72

Pemerintah Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi terus berupaya memberikan pelayanan pendidikan terbaik untuk masyarakat seperti selalu menganggarkan dan



menyediakan Dana BOS serta bantuan biaya personil untuk siswa peserta didik di tiap satuan sekolah juga menambah Ruang Kelas Baru serta membangun sarana penunjang pendidikan lainnya seperti Penambahan dan Perbaikan Ruang Laboratorium dan Ruang Perpustakaan di satuan pendidikan/ sekolah.

Tabel.
Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			91.72%	
1 .	Pendidikan Menengah					99.33%	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (16-18 tahun)	Persentase	100	70.79	70.79%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	79.91%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	432130	431628	502	99.88%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.42%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					97.12%	
	SMA (2025)					96.31%	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	67.53	66.93	0.6	99.11%	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	59.84	58.24	1.6	97.33%	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	79.16	70.45	8.71	89.00%	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.01	71.01	1	98.61%	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.26	58.76	1.5	97.51%	
	SMK (2025)					97.94%	



	1 . Kemampuan literasi	Nilai	66.39	65.09	1.3	98.04%	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	59.02	56.82	2.2	96.27%	
	3 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	81.46	80.89	0.57	99.30%	
	4 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	85.6	85.06	0.54	99.37%	
	5 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.27	69.07	1.2	98.29%	
	6 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.55	69.25	1.3	98.16%	
	7 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.33	57.03	2.3	96.12%	
2 .	Pendidikan Khusus					84.10%	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (4-18 tahun) PENYANDANG DISABILITAS	Persentase	0	0	0.00%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	64.42%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4009	3228	781	80.52%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.69%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.43%	
	SDLB (2025)					98.46%	
	1 . Indeks iklim keamanan	Nilai	76.7	76.2	0.5	99.35%	
	2 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.67	70.67	1	98.60%	
	3 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68.3	67	1.3	98.10%	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	59.66	58.06	1.6	97.32%	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	57.25	56.65	0.6	98.95%	
	SMPLB (2025)					98.53%	
	1 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.2	69	1.2	98.29%	
	2 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74.21	72.41	1.8	97.57%	
	3 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	69.52	68.12	1.4	97.99%	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	65.3	64.8	0.5	99.23%	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	57.98	57.73	0.25	99.57%	
	SMALB (2025)					98.29%	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	60.91	60.41	0.5	99.18%	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	57.68	57.18	0.5	99.13%	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75.3	74	1.3	98.27%	



4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.8	70.8	2	97.25%	
5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66.8	65.2	1.6	97.60%	

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran Tahun 2025 dan membandingkannya dengan capaian pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024.

Tabel.
Realisasi Capaian Realisasi SPM 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian		Batas Waktu Capaian
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1	SPM BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	81.61%	91.33%	TAHUN 2025 (1 Tahun)

Pada tahun 2024, Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Khususnya Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan 81.61 % atau Tuntas Madya, sedangkan Pada Tahun 2025 Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pendidikan adalah 91.33% (TUNTAS UTAMA). Dengan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Pemenuhan Anggaran serta Realisasi Target Fisik serta Anggaran untuk pelayanan pendidikan diharapkan dapat menjadi tolak ukur pencapaian target hasil capaian SPM Bidang Pendidikan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya serta melakukan berbagai langkah Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Menengah (SMA-SMK) dan Pendidikan Khusus, seperti penyediaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan biaya personil untuk siswa sekolah, serta peningkatan mutu SDM (Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Penunjang dengan mengadakan peningkatan kompetensi dan berbagai diklat serta pembinaan secara terencana.



d. Permasalahan dan Solusi

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sudah mencapai 91.72% (TUNTAS UTAMA), maka untuk kedepan diperlukan peningkatan pelayanan minimal bidang pendidikan khususnya pada layanan sekolah tingkat Pendidikan Khusus /SLB agar capaian bisa lebih baik. Perlu ditingkatkan kualitas data terkait dengan informasi serta data yang lebih akuntabel untuk pengisian Rapor Pendidikan dan juga diperlukan koordinasi yang lebih intensif antar lembaga/dinas terkait Rapor Pendidikan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan cara sosialisasi, koordinasi perencanaan dan program pemenuhan SPM bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan baik. Semoga target capaian SPM ditahun berikutnya bisa tercapai dan bisa ditingkatkan serta target capaian semua indikator dapat teralisasi 100% pada tahun berikutnya.

2. Bidang Urusan Kesehatan

a. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, pasal 6 bahwa SPM Kesehatan mencakup SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan terdiri dari pelayanan kesehatan pada saat pra krisis kesehatan, yaitu edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana, dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan yang ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan yang meliputi:

- a. Mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan jika diperlukan
- b. Mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan
- c. Mendapatkan layanan gizi darurat
- d. Mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat
- e. Mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial
- f. Mendapatkan penyuluhan kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana di daerah terdampak bencana dalam wilayah kabupaten/kota membutuhkan dukungan baik moril maupun sarana prasarana/logistik kesehatan yang memadai. Dukungan logistik untuk penanggulangan bencana krisis kesehatan adalah bantuan logistik yang diberikan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kesehatan di lapangan. Bantuan logistik ini bisa berupa obat-obatan, alat medis, dan masker. Berikut dukungan logistik yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Dukungan Logistik Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Bencana

No	Jenis	Jumlah	Fungsi
1	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Disesuaikan dengan Kebutuhan	Pendukung pelayanan kesehatan
2	Makanan tambahan / pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, PMT Bumil, pemberian makanan untuk bayi dan anak-anak (PMBA), dll	Disesuaikan dengan kebutuhan	Penambah daya tahan tubuh
3	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (hygiene kit dan family kit)	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana

Untuk menyalurkan bantuan logistik, dilakukan proses yang meliputi:

- Mengidentifikasi kebutuhan logistik
- Mengirimkan surat permintaan logistik
- Menghubungi ekspedisi untuk mengirim barang
- Mengecek kondisi barang
- Mencatat barang dan memasukkannya ke dalam sistem pencatatan
- Menyiapkan dokumen Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima (BAST)

- Menerima laporan posisi barang dari ekspedisi

Mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kejadian bencana adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan, yaitu edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana;
- b. Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi :
 - 1) Mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan;
 - 2) Mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyebaran lingkungan;
 - 3) Mendapatkan layanan gizi darurat;
 - 4) Mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat;
 - 5) Mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial;
 - 6) Mendapatkan penyuluhan kesehatan.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%.

2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB.

Dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB, membutuhkan dukungan logistik kesehatan, dukungan logistik untuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) bisa berupa :



Kelambu berinsektisida, Sembako, Insektisida, Larvasida, Anti nyamuk, Fogging. Dukungan logistik ini bisa digunakan untuk mengatasi berbagai jenis KLB, seperti wabah penyakit menular atau keracunan.

Selain dukungan logistik, penanggulangan KLB juga membutuhkan upaya-upaya lain, seperti:

- Pengobatan yang tepat untuk penderita
- Upaya pencegahan untuk memutus rantai penularan
- Edukasi lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit
- Pemantauan wilayah setempat untuk memantau program pencegahan dan pemberantasan penyakit

Penyakit yang berpotensi KLB biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kasus penyakit meningkat secara cepat, penyakit menular atau keracunan, masa inkubasi cepat, terjadi di daerah padat penduduk. Dukungan logistik yang dibutuhkan untuk penanganan KLB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Dukungan Logistik Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada Kondisi KLB

No	Jenis	Jumlah	Fungsi
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Sesuai dengan jumlah petugas yang turun kelapangan dan kontak kasus	Melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit
2	Profilaksis/Vitamin/Obat/vaksin	Diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko	Untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit
3	Alat pemeriksaan fisik (stetoskop, termometer badan, tensimeter, senter, test diagnosis cepat, dll)	Sesuai jumlah tim yang turun ke lapangan	Untuk membantu penegakan diagnosis
4	Alat dan bahan pengambilan spesimen (tabung, pot, media amies,	Sesuai jumlah kontak dekat kasus	Untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan



	dll) untuk specimen yang berasal dari manusia dan lingkungan sesuai jenis penyakit		laboratorium
5	Wadah pengiriman spesimen (specimen carrier)	Sesuai dengan jumlah spesimen	Untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium
6	Tempat sampah biologis	Sesuai kebutuhan	Sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan
7	Formulir: Form penyelidikan epidemiologi Form/lembar KIE Alat tulis yang diperlukan	1 set	Untuk membantu melakukan investigasi kasus, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko

Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut:

- a. KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota di satu provinsi yang meluas ke kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi
- b. KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota di satu provinsi berpotensi meluas ke kabupaten/kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi
- c. Pemerintah daerah kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada pemerintah daerah provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepala daerah kabupaten/kota terdampak.

**b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 100% setiap tahunnya. SPM merupakan ketentuan yang mengatur jenis dan kualitas pelayanan dasar yang harus diberikan pemerintah daerah kepada warganya. SPM diterapkan untuk mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang tepat sasaran. Selain itu, SPM juga mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah.

Untuk mencapai target SPM, pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD. Rencana pencapaian SPM ini kemudian dijabarkan dalam target tahunan pencapaian. Adapun target pencapaian SPM bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%

Berdasarkan pencapaian indikator jenis pelayanan dasar pada pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi maka presentase penerima layanan dasar atau jumlah total yang harus dilayani dengan jumlah total yang dilayani mencapai 100%, begitupun dengan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar atau jumlah mutu yang harus

dilayani/dipenuhi dengan jumlah mutu yang terlayani/terpenuhi untuk krisis kesehatan mencapai 100%.

Sementara pencapaian indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk presentase pencapaian penerima layanan dasar atau jumlah total yang harus dilayani dengan jumlah total yang dilayani mencapai 100%, untuk persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar atau jumlah mutu yang harus dilayani/dipenuhi dengan jumlah mutu yang terlayani/terpenuhi mencapai 100% dan total pencapaian antara kedua indikator ini sebesar 100% dengan kategori IP-SPM Tuntas Utama

c. Anggaran

Anggaran kesehatan baik yang tertuang dalam dokumen anggaran APBN maupun dokumen pelaksana anggaran APBD 2025 untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2024.

SPM Kesehatan adalah ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang wajib diberikan kepada setiap warga negara. Pelayanan ini bersifat promotif dan preventif, dan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, daerah, maupun swasta.

Fungsi SPM Kesehatan di antaranya:

- Memfasilitasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang tepat kepada masyarakat
- Memberikan instrumen kepada masyarakat untuk mengontrol kinerja pemerintah di bidang pelayanan kesehatan

Berikut adalah sumber anggaran (pagu dan realisasi) anggaran SPM bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang digunakan untuk pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana maupun penanganan kejadian luar biasa dapat dilihat pada table berikut :



Tabel
Pagu dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	761.718.000	319.381.668	41,93%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	906.706.000	9.954.000	1,10%

d. Dukungan Personil

Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana adalah sebagai berikut:

- a) Kebutuhan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan 24 jam di Pos Kesehatan bagi penduduk terdampak yang dapat terbagi dalam beberapa shift disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kejadian yang terjadi pada waktu waktu tertentu dengan pembagian shif terdiri dari :
 - Dokter umum;
 - Perawat;
 - Bidan;
- b) Kebutuhan SDM Kesehatan untuk pengiriman tim penanggulangan krisis kesehatan adalah sebagai berikut :
 - Dokter;
 - Perawat;
 - Bidan;
 - Tenaga Kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain;



- Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa;
- Apoteker dan/atau asisten apoteker;
- Tenaga penyuluh/promosi kesehatan

Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di luar fasilitas layanan kesehatan dan di dalam fasilitas layanan kesehatan:

c) Di luar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat Provinsi (sesuai SK Dinkes Provinsi) yang terdiri dari:

- Dokter
- Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi
- Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan
- Tenaga kesehatan masy. yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi
- Tenaga Laboratorium
- Tenaga penyuluh/promosi kesehatan
- Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi

d) Di fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari:

- Dokter (umum dan spesialis),
- Perawat
- Petugas radiologi
- Petugas laboratorium, dan lain-lain.

Capaian SPM bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan sangat tergantung dari dukungan personil sebagaimana tersebut di atas sebagai pelaksana program/kegiatan pembangunan kesehatan. Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan didukung sejumlah tim kesehatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi



Sumatera Selatan dan kabupaten/kota, rumah sakit dan Puskesmas kabupaten/kota.

Dukungan personil untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan 2025, di antaranya dengan penambahan tenaga farmasi dan gizi yang diatur dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024. Dukungan personil untuk SPM Kesehatan 2025, antara lain: Penambahan tenaga farmasi dan gizi pada beberapa layanan dasar, dan Penyesuaian jumlah dan kualifikasi personil.

e. Hasil Capaian

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen). Pencapaian ini tidak sesuai dengan hasil capaian yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan ada capaian yang belum memenuhi target capaian, dimana persentase capaian mutu minimal layanan dasar (20%) pada pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi mencapai 100%

Secara status pengisian untuk penerapan SPM Provinsi sudah mencapai 100% dengan Indeks Pencapaian SPM “Tuntas Utama” dan total pencapaian sebesar 100%. Sedangkan dilihat dari kategori indeks pencapaian SPM untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana mencapai 100% dengan persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%) mencapai 80% dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%) mencapai 20%.

Capaian pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi mencapai 100% dengan persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%) mencapai 80% dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%) mencapai 20%.



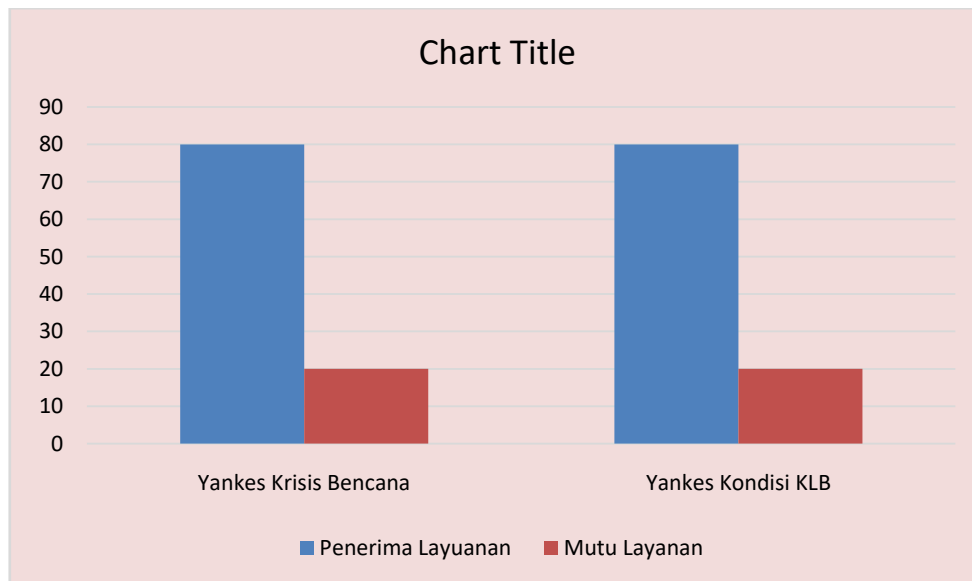
Realisasi Anggaran untuk pelaksanaan penerapan SPM Provinsi, dalam hal ini dinas kesehatan provinsi sumatera selatan mencapai 43,03% dengan total pagu sebesar Rp. 1.668.424.000,- yang terdiri dari:

1. Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana mencapai 41,93% atau 761.718.000 dari pagu
2. Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa mencapai 1,10% atau 9.954.000 dari pagu.

Bila dilihat dari realisasi anggaran berdasarkan data SIPD dan LRA realisasi anggaran untuk program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sub kegiatan bencana hanya mencapai 41,93% dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan tidak adanya SK Bencana Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025, sehingga terjadi bias pada laporan realisasi sub kegiatan bencana.

Berikut capaian penerapan SPM Provinsi dilihat dari indikator pelayanan SPM dan kategori indeks pencapaian SPM serta persentase pencapaian penerima layanan dasar dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar.

Gambar
Total Jumlah Penduduk Yang Harus Dilayani dan Belum Terlayani
Serta Indeks Pencapaian SPM Provinsi Tahun 2025



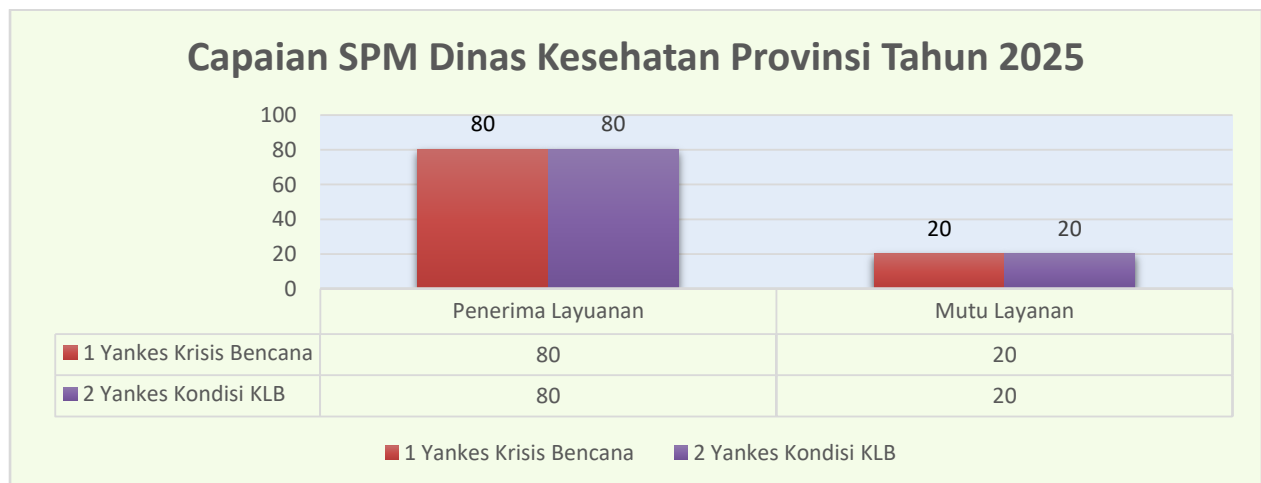
Gambar

IP SPM

**TUNTAS
PARIPURNA**

100%

Gambar
Persentase Penerima dan Mutu Layanan Per Indikator
SPM Provinsi Tahun 2025



Berikut Realisasi dan Pagu Anggaran untuk pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Tahun 2025 sebagai berikut :

Program/Keg	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Keuangan	%
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	761.718.000,-	319.381.668,-	41,93
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	906.706.000,-	9.954.000,-	1,10
Total		1.668.424.000,-	-	43,03

Capaian penerapan SPM provinsi dilihat dari jenis layanan SPM terdiri dari :

1. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

Penghitungan persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pelayanan} \\ \text{Kesehatan bagi} \\ \text{penduduk} \\ \text{terdampak Krisis} \\ \text{Kesehatan akibat} \\ \text{bencana dan/atau} \\ \text{berpotensi} \\ \text{bencana} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk terdampak} \\ \text{krisis kesehatan akibat bencana} \\ \text{dan/atau berpotensi bencana} \\ \text{yang mendapatkan pelayanan} \\ \text{kesehatan dalam kurun waktu} \\ \text{satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk terdampak krisis} \\ \text{kesehatan akibat bencana dan/atau} \\ \text{berpotensi bencana dalam satu} \\ \text{tahun yang sama} \end{array}} \times 100 \%$$

Berikut ini capaian SPM bidang kesehatan dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi tahun 2025 :

Tabel
Capaian SPM Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Bencana
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM	Persentase Capaian SPM
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	248.927 orang	100%

Untuk pengangan krisis bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan secara pelayanan masih di dilaksanakan oleh badan krisis bencana dinas kesehatan provinsi sehingga pelayanan belum maksimal, kabupaten/kota yang terdampak bencana mengalami kesulitan dalam hal pelayanan tanggap darurat bencana dikarenakan anggaran tidak tersedia.



Pada tahun 2025, terdapat 248.927 orang yang terdampak krisis bencana dan/atau berpotensi bencana dan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara rinci jenis krisis bencana dan penduduk yang terdampak dan diobati dipelayanan kesehatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

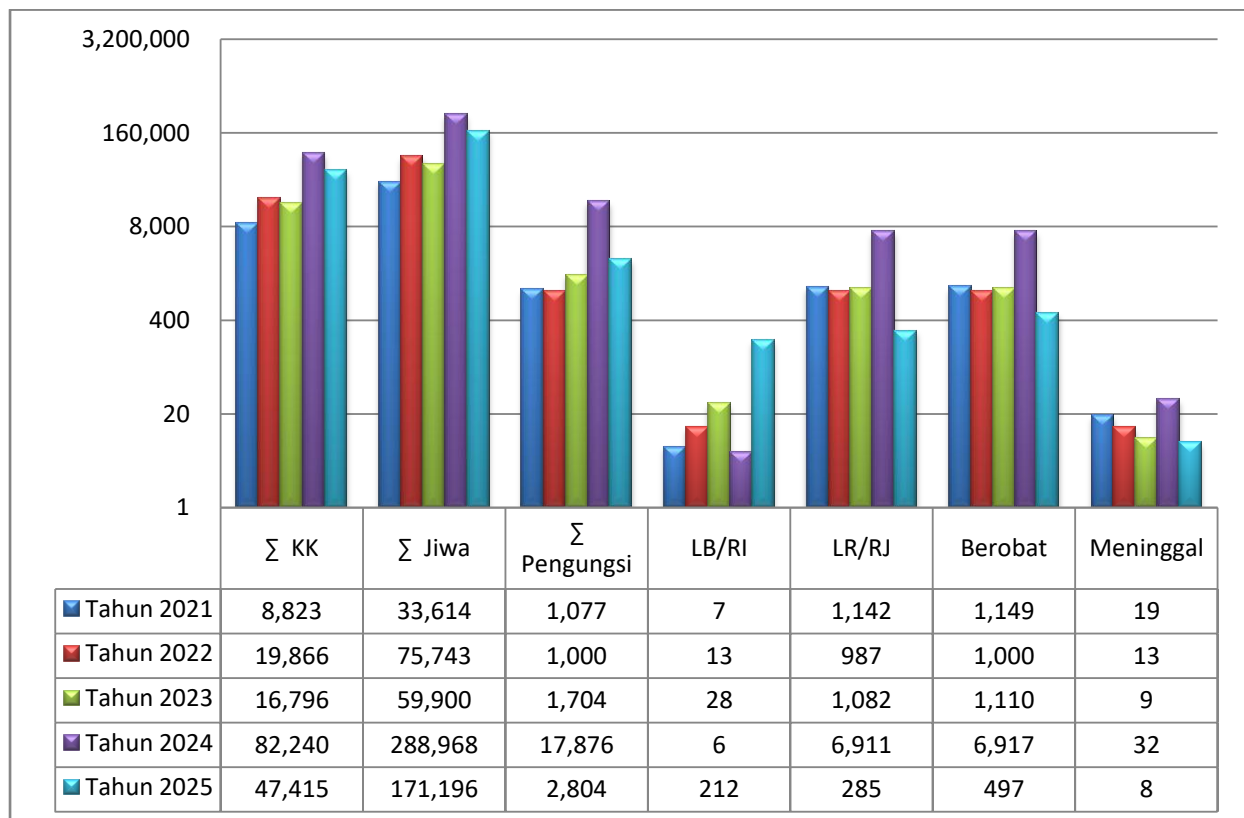
Tabel
Jumlah Penduduk yang Terdampak Krisis Kesehatan
menurut Jenis Krisis Bencana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Jenis Krisis Bencana	Jumlah Penduduk yang Terdampak Bencana (jiwa)	Jumlah Penduduk yang Diobati di Pelayanan Kesehatan (jiwa)
1	ANGIN PUTING BELIUNG	1.256	68
2	BANJIR	167.656	205
3	KARHUTLAH	180	0
4	KEBAKARAN RUMAH PENDUDUK	1.531	206
5	KECELAKAAN LAUT	46	0
6	LONGSOR	477	0
7	SUMUR BOR MELEDAK	50	18
TOTAL		171.196	497

Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk yang terdampak bencana terbanyak adalah akibat bencana banjir sebanyak 167.656 orang, kemudian diikuti oleh bencana kebakaran rumah penduduk yang diperkirakan sebanyak 1.531, sedangkan Angin Puting Beliung sebanyak 1.256, kemudian longsor sebanyak 477, Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 180, Kebakaran akibat sumur BOR meledak sebanyak 50 dan Kecelakaan Laut sebanyak 46 jiwa seperti kecelakaan transportasi air seperti ketek, speedboat, motor laut, jukung dan kapal laut.

Jumlah kejadian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar
Jumlah Penduduk yang Terdampak Krisis yang Diobati
di Pelayanan Kesehatan Tahun 2025



Dari gambar di atas, terlihat bahwa terdata Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 Jumlah Penduduk yang terdampak Krisis Bencana Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Tahun 2025 sebanyak 497 jiwa.

Adapun potensi bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan serta penyakit yang timbul akibat bencana tersebut sebagai berikut:

a. Banjir

Hampir semua daerah, 17 Kabupten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami banjir saat musim hujan, ada 16 kabupaten/kota mengalami kejadian banjir di Provinsi Sumsel,



- 1) Kabupaten Musi Rawas, yang rawan yaitu di Kecamatan Muara Lakitan, Muara Kelingi dan Bulang Tengah Suku Ulu), Musi Rawas,
- 2) Muara Enim, meliputi (Ujan Mas, Gunung Megang, Rambang Dangku, Muara Enim, Benakat dan Belimbing),
- 3) Lahat, kecamatan merapi timur dan Kec. Jarai, Tanjung sakti pumi
- 4) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), meliputi Kecamatan Talang Ubi, Tanah Abang, Penukal dan Penukal Utara,
- 5) Kabupaten Musi Banyuasin, (Kecamatan Batanghari Leko, Babat Toman, Sanga Desa, Plakat Tinggi, Sungai Keruh, Lais, Sekayu dan Lawang Wetan),
- 6) Musi Rawas Utara (Muratara), meliputi Nibung, Rawas Ulu, Ulu Rawas, Karang Jaya, Rupit, Rawas Ilir dan Karang Dapo.
- 7) Empat Lawang, meliputi (Kec. Pasemah air keruh, Pendopo, Talang padang, Tebing tinggi),
- 8) Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi (Kec. Banding agung, Buana pemaca, Buay rawan, Buay sandang aji, Muaradua, Simpang, Sungai are),
- 9) Ogan Komering Ulu Timur, meliputi (Kec. Belitang, Belitang mulya, Buay madang, Buay madang Timur, Buay pemuka peliung, Bunga mayang, Cempaka, Martapura, Semendawai Timur),
- 10) MusI Banyuasin, meliputi (Kec. Babat toman, Lais, Sekayu, Sungai keruh, Sungai lilin).
- 11) Ogan Komering Ilir, meliputi (Kec. Air sugihan, Cengal, Jejawi, Kayuagung, Lempuing jaya, Mesuji, Mesuji raya, Pampangan, Pangkalan lampam, Pedamaran, Pedamaran Timur, Sirah pulau padang, Sungai menang, Tanjung lubuk, Teluk gelam,
- 12) Ogan Ilir, meliputi (Kec. Indralaya, Kandis, Lubuk keliat, Muarakuang, Payaraman, Pemulutan, Pemulutan Selatan, Rantau alai, Sungai pinang) Tulung selapan),



- 13) Ogan Komering Ulu, meliputi (Kec. Baturaja Barat, Baturaja Timur, Lubuk batang, Muarajaya, Pengadonan, Peninjauan, Semidang aji, Ulu Ogan).
- 14) Kota Lubuk Linggau, meliputi (Kec. Lubuklinggau Barat Dua, Lubuklinggau Barat Satu, Lubuklinggau Selatan Dua, Lubuklinggau Selatan Satu, Lubuklinggau Timur Dua, Lubuklinggau Timur Satu, Lubuklinggau Utara Satu)
- 15) Kota Palembang, meliputi (Kec. Gandus, Ilir barat Dua, Ilir barat Satu, Ilir timur Dua, Ilir timur Satu, Kalidoni, Kertapati, Plaju, Sako, Seberang ulu Dua, Seberang ulu Satu, Sematang borang, Sukarami)
- 16) Kota Prabumulih, meliputi (Kec. Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, Prabumulih Utara, Rambang kapak Tengah)
- 17) Banyuasin, meliputi (Kec. Banyuasin Satu, Banyuasin III, Pulau rimau, Rambutan, Rantau bayur, Sembawa, Talang kelapa).

Akibat banjir menyebabkan tercemarnya sumber air warga oleh bakteri penyebab penyakit seperti diare (bakteri V.Cholera, Sallmonella, E.Coli, bakteri leptospira dan bakteri lainnya), kulit, iritasi mata dan penyerta lainnya yang berdampak pada kesehatan masyarakat (korban).

b. Kebakaran (Karhutla dan Kebakaran Rumah Penduduk)

Daerah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan yaitu di 10 kabupaten/kota yaitu, Banyuasin, Prabumulih, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Banyuasin Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu dan Penukal Abab Lematang Ilir, dan daerah terdampak kota Palembang. Jumlah daerah itu lebih banyak dibandingkan kejadian Karhutla tahun sebelumnya, yang hanya terjadi di 9 daerah di Sumsel. Yakni di Muara Enim, Mura, Muba, Muratara, OI, OKI, OKU, PALI dan OKU Selatan, luas Karhutla 246,09 hektare ini jauh lebih rendah dari 2 tahun terakhir (2023 dan 2024). Kota Palembang terdampak asap dan ambang batas ISPU masih standart dan paling tinggi saat musim kemarau ambang batas



ISPU $\leq$ 250 ISPU. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut mengandung berbagai pencemar udara, misalnya partikel debu dengan ukuran partikel kecil (PM 2,5 dan 10), Gas SO₂, NO, CO dan lain-lain, dapat menyebabkan dampak buruk kesehatan berupa gangguan pada saluran pernafasan seperti:

- Penderita ISPA, Iritasi mata, Iritasi kulit dan Asma
- berpengaruh juga pada penyakit lainnya yang ada pada penderita seperti jantung, darah tinggi, DM dan penyakit lainnya.

c. Kecelakaan Laut (Speedboat)

Hampir setiap daerah sering terjadi kecelakaan di perairan, khususnya yang ada daerah aliran sungai, yang paling banyak kecelakaan transportasi air seperti ketek, speedboat, motor laut, jukung dan kapal laut.

d. Angin Puting Beliung

Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km/jam dan membentuk pusaran seperti belalai. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba, Daerah yang paling sering terjadi puting beliung, dari laporan Dinas Kesehatan Kab/kota dan Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Selatan yaitu ada 10 daerah antara lain :

- Kabupaten Banyuasin
- Empat Lawang
- Kota Lubuk Linggau
- Muara Enim
- Musi Banyuasin
- Musi Rawas
- Ogan Ilir
- Ogan Komering Ulu
- Ogan Komering Ulu Selatan

- Kota Prabumulih.

Angin Puting beliung muncul akibat Cuaca ekstrem munculnya awan konvektif dengan penampakannya bergulung-gulung seperti bunga kol. Jika awan ini muncul dengan disertai petir, hujan lebat dan angin kencang berkecepatan 25 knot/jam, ini berpotensi menimbulkan angin puting beliung.

e. Gempa/ Gunung Meletus

Di Sumatera Selatan Gunung api aktif yaitu gunung dempo dan gempa bumi daerah yang rawan adalah disekitar kabupaten Lahat, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, M.Enim dan daerah perbatasan langsung dengan daerah rawan gempa yaitu Provinsi Bengkulu.

2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

Penghitungan persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pelayanan} \\ \text{Kesehatan bagi} \\ \text{penduduk pada} \\ \text{kondisi KLB} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk terdampak} \\ \text{akibat KLB yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan kesehatan dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk terdampak akibat} \\ \text{KLB dalam satu tahun yang sama} \end{array}} \times 100 \%$$

Berikut ini capaian SPM bidang kesehatan dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak KLB Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025:



Tabel
Capaian SPM Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa KLB
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Kondisi Kejadian Luar Biasa	Capaian SPM	Persentase Capaian SPM
Jumlah Penduduk Terdampak Sakit	1.511 Orang	100%
Jumlah Penduduk yang Terdampak dan Beresiko pada Kondisi KLB	98.840 Orang	100%

Pada tahun 2025 terdapat 1.511 jiwa penduduk yang terdampak (sakit) akibat KLB dengan rincian penduduk yang mengalami sakit akibat terkena keracunan makanan sebanyak 1.280 orang, pertusis 168 orang, yang terkena rabies sebanyak 5 orang, terinfeksi tetanus neonatorium sebanyak 1, difteri 1 orang, DBD 4 orang, dan chikungunya sebanyak 52 orang yang tersebar di 15 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sedangkan jumlah penduduk di Sumatera Selatan tahun 2025 yang terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa sebanyak 98.840 jiwa penduduk. Berikut dapat dilihat jumlah penduduk yang terdampak KLB sesuai jenis kejadian di Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel
Jumlah Penduduk yang Terdampak KLB
menurut Jenis Kejadian Luar Biasa
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Jenis Kejadian Luar Biasa	Jumlah Penduduk yang Terdampak (Sakit)	Jumlah Penduduk yang Berdampak dan Beresiko pada Kondisi KLB
1	Keracunan Makanan	1.280	48.804
2	Pertusis	168	37.135
3	Rabies	5	2.592
4	Tetanus Neonatorum	1	115
5	Difteri	1	0
6	DBD	4	7920
7	Chikungunya	52	2.274



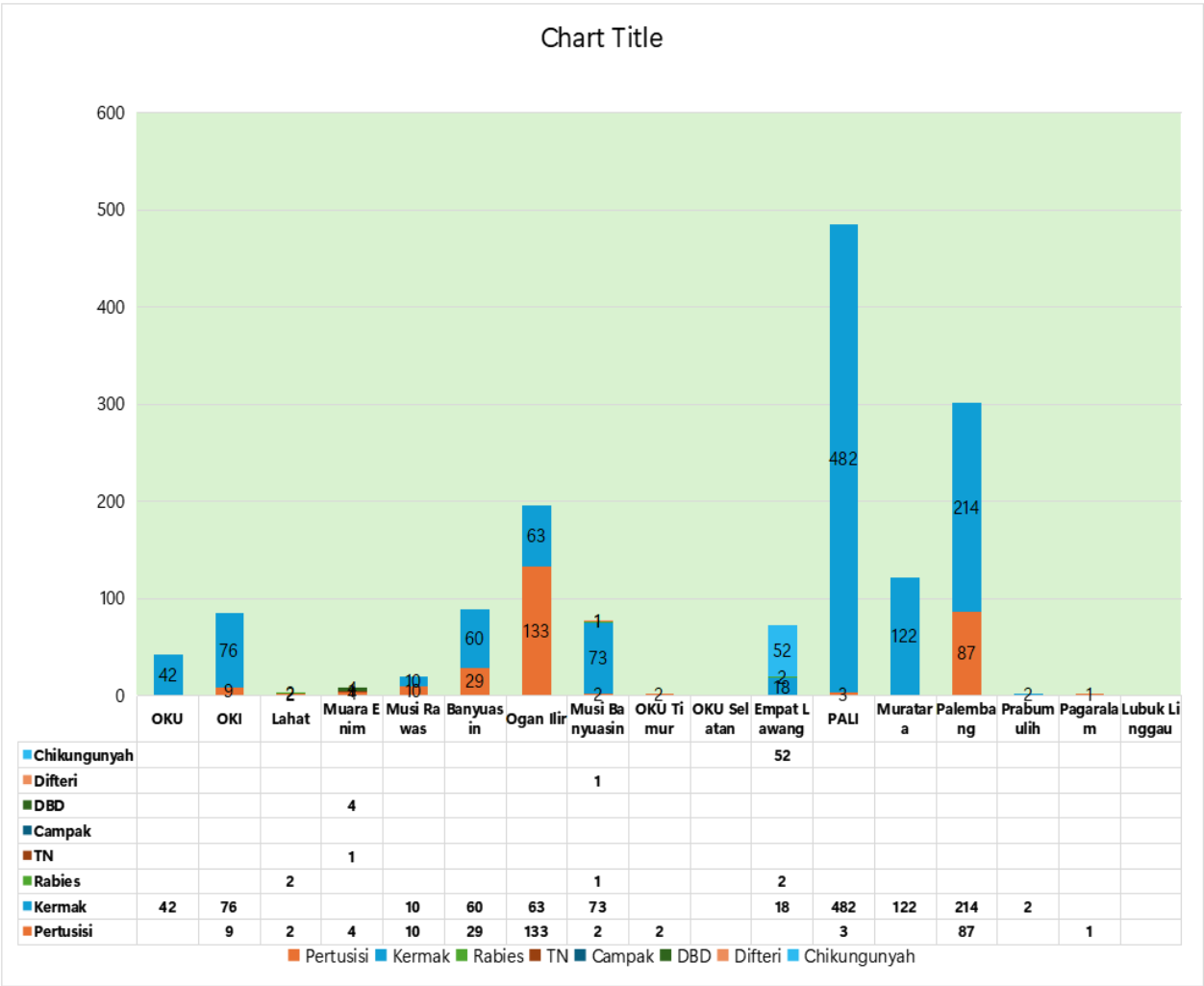
TOTAL

1.511

98.840

Jumlah penduduk yang terdampak (sakit) pada kondisi KLB tahun 2025 adalah sebesar 1.511 jiwa penduduk. Berikut distribusi jumlah jenis kondisi KLB di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025:

Gambar
Jumlah Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB) Pada Jumlah Penduduk yang Terdampak (Sakit) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



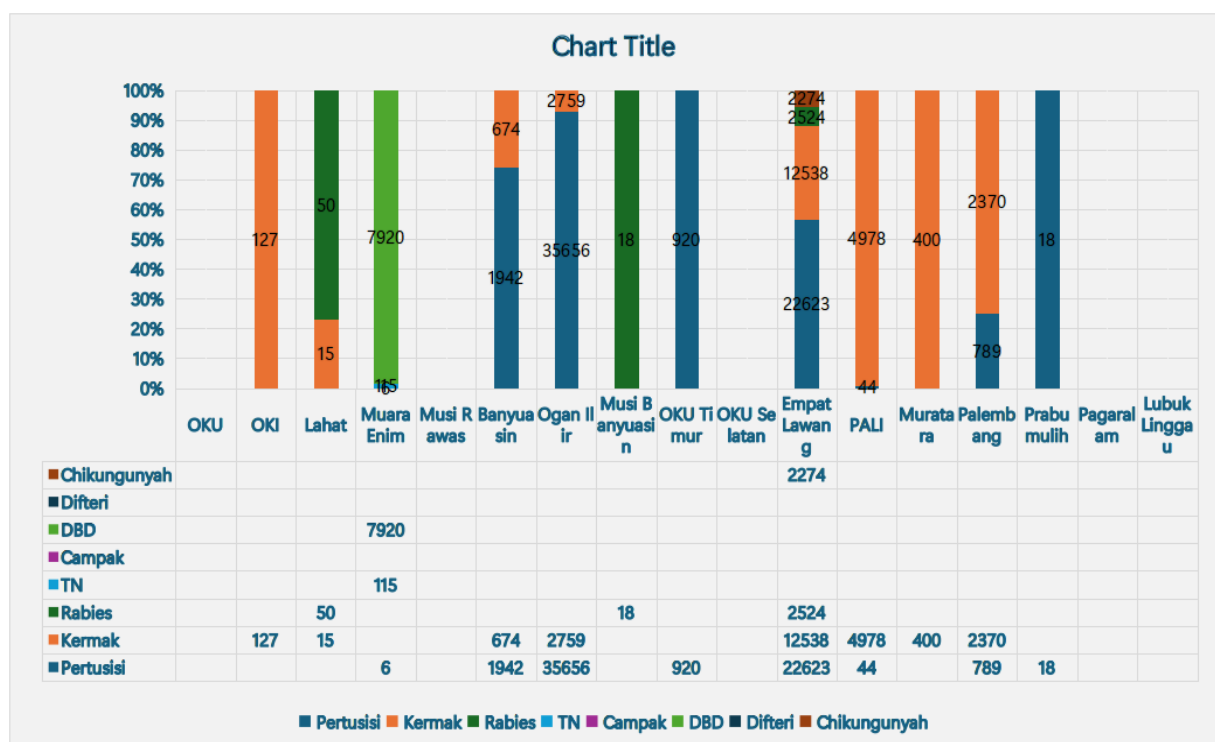
Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah populasi rentan yang beresiko terdampak KLB provinsi pada tahun 2024 tertinggi terjadi di Kabupaten PALI dengan penderita/sakit sebanyak 485 orang, dengan



penduduk yang mengalami keracunan makanan sebanyak 482 orang, dan Pertusis 3 orang. Tertinggi kedua terdapat di Kota Palembang dengan jumlah penderita sakit sebanyak 301 orang dengan jumlah penduduk yang terdampak kejadian keracunan makanan pada anak sekolah sebanyak 214 dan Pertusis sebanyak 87 orang, sedangkan tertinggi ketiga di Kabupaten Ogan Ilir dengan penderita sebanyak 196 orang dengan penduduk yang menderita pertusis sebanyak 133 orang dan keracunan makanan sebanyak 63 orang. Penyebaran kasus kejadian sesuai jenis KLB di kabupaten/kota lainya merata disetiap daerah misalnya kasus pertusis dan keracunan makanan.

Sementara jumlah penduduk yang terdampak dan beresiko pada kondisi KLB tahun 2024 adalah sebesar 98.840 jiwa penduduk. Berikut distribusi jumlah jenis kondisi KLB di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025:

Gambar
Jumlah Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB)
pada Jumlah Penduduk yang Terdampak dan Beresiko KLB
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025





Dari 38.051 orang populasi rentan tersebut, terdapat 39.959 orang penderita di Kabupaten Empat Lawang rentan dengan kasus pertusis dari 22.623 jiwa terdampak kasus pertusis dan Keracunan Makanan sebanyak 12.538 orang, kemudian diikuti Kabupaten Ogan Ilir dengan populasi rentan sebanyak 38.415 orang dengan 35.656 rentan terhadap pertusis dan 2.759 terdampak dengan Keracunan Makanan, Kabupaten Muara Enim merupakan penyumbang ketiga dengan penduduk rentan yaitu sebanyak 8.041 jiwa, begitupun Kabupaten Kota lainnya di Sumatera Selatan yang rentan terhadap 6 (enam) jenis kejadian luar biasa yang dapat dilihat pada gambar grafik diatas, sedangkan ada kurang lebih 5 (lima) Kab/ Kota yang tidak terdampak kejadian dan beresiko KLB yaitu Kab.OKU, OKU Selatan, Musi Rawas, Kota Pagaralam, dan Lubuk Linggau.

Seluruh populasi yang rentan dan beresiko kejadian luar biasa di wilayah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mendapatkan respon pelayanan kesehatan <24 jam dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat baik Puskesmas ataupun Rumah Sakit yang ada di Kabupaten/Kota.

f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Upaya pencapaian target Indikator SPM tahun 2025 memiliki beberapa kendala dan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan masih kurang memberikan daya ungkit langsung terhadap indikator yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :
 - Karena perencanaan disusun tidak berbasis fakta/data sehingga tidak berdasarkan masalah yang dihadapi
 - Sistem penganggaran yang masih menganut 'berapa anggaran yang tersedia' bukan berdasarkan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan program (money follow function)
 - Tenaga perencana di bidang krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan kondisi kejadian luar



biasa provinsi merupakan tenaga teknis yang belum paham dengan perencanaan yang berbasis data .

2. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan SPM bidang kesehatan yang tersedia walaupun masih sangat rendah di bawah 10% namun tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga kegiatan yang urgent dalam penanganan kasus tidak terlaksananya dengan baik.
3. Kebijakan pembangunan daerah lebih mengutamakan fisik, khusus untuk bidang kesehatan masih mengutamakan pelayanan kuratif daripada promotif dan preventif.
4. Penentuan jumlah sasaran, jumlah dan jenis bencana dan KLB serta kebutuhan barang jasa/logistik dan SDM yang masih mengalami kesulitan.
5. Minimnya kemampuan kapasitas sumber daya manusia di lapangan dalam menghadapi bencana, terutama terkait pembinaan dalam pencatatan dan pelaporan
6. Sulitnya menyusun kebutuhan anggaran (unit cost) karena perlu melibatkan lintas sektor, khususnya mekanisme pencairan dana pasca bencana yang sifatnya sewaktu-waktu dan memerlukan pencairan dana yang sifatnya segera.
7. Penanganan bencana yang dilaksanakan oleh tim krisis kesehatan bencana masih terfokus pada pasca bencana.
8. Pelaporan data terkait kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dari kabupaten/kota sering mengalami keterlambatan, data yang dibutuhkan selalu terlambat dan menumpuk diakhir triwulan sehingga capaian untuk kasus KLB melonjak.
9. Realisasi/ Penggunaan Anggaran akan dikeluarkan hanya ketika SK Bencana/ KLB Provinsi Sumatera Selatan dikeluarkan oleh Kepala Daerah.



Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan Tim Penerapan SPM bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sehingga memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan SPM bidang kesehatan.
2. Memanfaatkan sumber dana yang ada untuk penanganan bidang krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan kondisi kejadian luar biasa termasuk Penyelidikan Epidemiologi (PE)
3. Meningkatkan kemampuan kapasitas sumber daya manusia di lapangan dalam menghadapi bencana, terutama terkait pembinaan dalam pencatatan dan pelaporan.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal penyusunan perencanaan dan perhitungan kebutuhan anggaran per unit cost untuk kebutuhan pelaksanaan SPM kesehatan.
5. Tetap melaporkan kejadian Bencana dan KLB Provinsi Sumatera Selatan walaupun tidak ada SK Kejadian Bencana dan KLB dan dicatat sebagai laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang menjadi tugas Dinas perumahan dan kawasan permukiman adalah SPM Pekerjaan Umum. Adapun Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah provinsi terdiri atas:

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum, yaitu :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	
			%	Tahun
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	2025
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	2025

c. Anggaran

Alokasi anggaran dalam pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2025 untuk kegiatan fisik belum dapat dilaksanakan, namun untuk tahapan pendataan dan penyusunan dokumen pada tahap pemenuhan SPM telah dilakukan. Adapun urusan Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebagai berikut :



No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	90.845.346	90.561.070	99,69
2	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	219,729,856	212,264,922	96,60
3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	559,775,149	370,373,305	66,16
4	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	310,608,148	296,890,670	95,58
5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	1,773,624,069	1,102,688,340	62,17

d. Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebanyak 39 orang ASN serta Bidang Perumahan sebanyak 35 orang ASN.

e. Hasil Capaian

Realisasi capaian jenis pelayanan dasar dalam pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan belum dapat terlaksana secara kegiatan fisik mengingat berbagai kendala dan permasalahan namun telah dilakukan tahapan pendataan dan penyusunan dokumen

kebutuhan pemenuhan SPM. Adapun realisasi capaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian SPM 2024	Capaian SPM 2025
			%	%
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	100

Keterangan : Persentase capaian 2 Jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan e-spm adalah sebesar 100% meskipun SPAM regional dan SPALD regional belum ada namun telah dilakukan tahapan pendataan dan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota (terlampir).

f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan rakyat antara lain:

1. SPAM Regional / Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota antara lain :
 - Jarak antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan area lintasan untuk jaringan perpipaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan



perbukitan dinilai kurang efektif untuk dibangunnya SPAM regional;

- Kondisi saat ini pembangunan SPAM Regional dirasakan belum efisien dan efektif mengingat masing-masing kab/kota memiliki PDAM yang dapat mencakup pelayanan wilayahnya serta terdapat sungai/anak sungai yang melintas antar kab/kota yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat setempat;
 - Pelayanan air minum di wilayah regional sebagian masih dapat dilayani Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) yang sudah terbangun di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - Belum jelasnya SDM dan Manajemen dalam pengelolaan SPAM Regional; dan
 - Diperlukan anggaran yang cukup besar untuk merealisasikan pembangunan SPAM Regional.
2. Air Limbah Domestik Regional lintas Kab/Kota antara lain :
- Jarak antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan areal lintasan untuk jaringan perpipaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan perbukitan dinilai kurang efektif untuk dibangunnya IPAL Regional;
 - Tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) yang sudah terbangun di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - Belum jelasnya SDM dan Manajemen dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Regional; dan
 - Diperlukan anggaran yang cukup besar untuk merealisasikan pembangunan Sistem Air Limbah Domestik Regional.



Solusi yang diharapkan untuk memecahkan permasalahan diatas antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota terkait kewenangan, permasalahan dan kendala dalam penerapan dan pencapaian SPM;
2. Menyusun strategi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dalam rangka Pengembangan Air Minum Curah dan Air Limbah Domestik Regional lintas Kabupaten/Kota;

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang menjadi tugas Dinas perumahan dan kawasan permukiman adalah SPM Perumahan Rakyat. Adapun Jenis Pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi terdiri atas :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat, yaitu :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	
			%	Tahun
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	2025
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	2025

c. Anggaran

Alokasi anggaran dalam pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2025 untuk kegiatan fisik belum dapat dilaksanakan, namun untuk tahapan pendataan dan penyusunan dokumen pada tahap pemenuhan SPM telah



dilakukan. Untuk urusan Bidang Perumahan Rakyat dianggarkan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	71.393.717	66,301,770	92,87
2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	19.446.562	0	0
3	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	940.000.000	0	0
4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	971.000.000	0	0

Keterangan : Pada pagu anggaran perubahan TA 2025 untuk sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi, Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana telah dianggarkan masing-masing sebesar Rp. 19.446.562, Rp. 940.000.000, Rp. 971.000.000 hal ini dikarenakan tidak terjadi bencana kewenangan provinsi dan tidak terbitnya SK kepala Daerah yang menyatakan bencana provinsi.

d. Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebanyak 39 orang ASN serta Bidang Perumahan sebanyak 35 orang ASN.



e. Hasil Capaian

Realisasi capaian jenis pelayanan dasar dalam pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan belum dapat terlaksana secara kegiatan fisik mengingat berbagai kendala dan permasalahan namun telah dilakukan tahapan pendataan dan penyusunan dokumen kebutuhan pemenuhan SPM. Adapun realisasi capaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian SPM 2024	Capaian SPM 2025
			%	%
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	100

Keterangan : capaian kegiatan pada jenis pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi serta Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan e-SPM adalah sebesar 100% dengan kegiatan fisik belum dapat dilaksanakan namun telah dilakukan tahapan pengumpulan data.



f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan rakyat antara lain : Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi antara lain adalah kondisi dan letak geografis Sumatera Selatan yang jarang terjadi bencana alam yang dampaknya lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota sehingga jika terjadi bencana jarang ditetapkan sebagai bencana provinsi. Dalam hal ini diwajibkan terbit SK bencana oleh kepala daerah.

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi antara lain adalah kondisi dan letak geografis Sumatera Selatan yang jarang terjadi bencana alam yang dampaknya lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota sehingga jika terjadi bencana jarang ditetapkan sebagai bencana provinsi. Dalam hal ini diwajibkan terbit SK bencana oleh kepala daerah.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi saat ini masih berupa Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan belum melaksanakan penyediaan rumah, dalam hal ini terkait relokasi juga diwajibkan terbit SK relokasi oleh kepala daerah.

Solusi yang diharapkan untuk memecahkan permasalahan diatas antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota dan Instansi terkait seperti Sekretariat Daerah, BPBD, Dinas PUPR dan Dinas Perkim terkait status penetapan bencana, pendataan dan kebutuhan pemenuhan;
2. Melaksanakan penelitian dan kajian lebih mendalam serta melakukan identifikasi, fasilitasi, sosialisasi dan pendataan/survey pendahuluan terkait kegiatan-kegiatan dalam pencapaian SPM.



5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

a. Jenis Pelayanan Dasar

Penetapan dan pengaturan dari Jenis Pelayanan Dasar telah ditentukan dan ditetapkan yakni 6 (enam) SPM yaitu:

- 1) SPM pendidikan;
- 2) SPM kesehatan;
- 3) SPM pekerjaan umum;
- 4) SPM perumahan rakyat;
- 5) SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) SPM sosial.

Untuk keenam SPM tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pelayanan dasarnya.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel
Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
3	Persentase Satlinmas yang Aktif	%	99
4	Mitigasi Daerah Rawan Kebakaran	%	80



Tabel
Target Dan Indikator Standar Pelayanan Minimal
Trantibumlinmas Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun

c. Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran dalam pelaksanaan SPM bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2025 yang terdiri dari :

NO .	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.827.529.200	29.327.832.069	92,14
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.301.379.200	28.803.796.069	92
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.320.313.200	24.824.984.069	90,87
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.981.066.000	3.978.812.000	99,94
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	374.150.000	374.036.000	99,97
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	333.900.000	333.900.000	100,00
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.250.000	40.136.000	99,72
III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.000.000	152.000.000	100
5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.000.000	152.000.000	100
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.984.407.500	1.980.263.211	99,79



NO .	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
IX	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.509.407.500	1.507.846.252	99,90
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	412.564.063	340.469.371	82,53
2.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	178.600.000	177.456.712	99,82
3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	129.804.000	123.360.000	95,04
4.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	257.684.406	255.060.128	99,96
5.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	436.372.893	393.459.358	90,17
X	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	320.836.812	298.801.740	93,13
6	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	89.711.700	86.638.654	96,57
7	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	80.300.000	68.489.150	85,29
8	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	98.370.000	97.862.280	99,48
XI	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	166.750.000	139.190.438	83,47
9	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	76.500.000	49.836.840	65,15
10	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	20.000.000	19.980.000	99,90



d. Dukungan Personil

Sampai akhir tahun 2025 jumlah pegawai atau personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebanyak personil yang terdiri dari 137 orang PNS , 63 orang PPPK dan 121 PPPK Paruh Waktu yang berjumlah 321 orang yang merupakan anggota pada Satuan Pol PP Provinsi Sumatera Selatan.

e. Hasil Capaian

Tabel
Realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95	100	100
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
3	Persentase Satlinmas yang Aktif	%	99	100	100
4	Mitigasi Daerah Rawan Kebakaran	%	80	80	100

Adapun realisasi capaian indikator kinerja tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Memuat Sanksi yang ditegakkan pada Tahun 2025
Jumlah Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Memuat Sanksi yang ditegakkan pada Tahun 2025 adalah sebanyak 12 buah Perda/Perkada yaitu sebagai berikut :



Tabel
Jumlah Keseluruhan Perda/Perkada Yang Memuat Sanksi
Yang Ditegakkan Oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda	Keterangan
1	Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penggunaan Bahan Tambahan yang di Larang di Gunakan Dalam Pangan	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2004	Sanksi Pidana	Penindakan dilakukan Bersama Tim terdiri dari : BPOM, Polda sumsel, Satpol, pp Prov. Sumsel
2	Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013	Pembinaan	Sesuai SOP diberikan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya apabila mengulangi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah
3	Kawasan Tanpa Rokok.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2015	Sosialisasi dan pembinaan	Sosialisasi dan pembinaan kepada siswa SMK 5 Lorok Pakjo Kota Palembang terhadap bahaya rokok bagi kesehatan
4	Ketenagalistrikan	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2015	Tindakan Preventif Non yustisi	Sesuai SOP diberikan surat pernyataan selama tenggang waktu 7 hari untuk segera memenuhi kewajibannya apabila tidak melaksanakan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah
5	Penyelenggaraan Kepariwisata	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9	Pembinaan	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk memperhatikan keselamatan pengunjung dan



		Tahun 2016 tentang		keamanan
6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017	Tindakan Preventif Non yustisi berupa peringatan tertulis	Adanya pelanggaran terhadap pemilik usaha Rumah Makan yang tidak menutup kain tirai guna membatasi pemandangan terhadap makanan/masakan serta aktivitas makan dan minum pada saat bulan puasa. Selanjutnya diberikan teguran tertulis kepada pemilik usaha agar memenuhi ketentuan sesuai ketentuan peraturan daerah dan apabila tidak memenuhi ketentuan akan diberikan sanksi administrasi
7	Pedoman Pegelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018	Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan	Pada pelanggaran Peraturan daerah ini diberikan Peringatan tertulis berupa penghentian sementara kegiatan. Agar segera membuat izin dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan kegiatan
8	Penyelenggaraan Pendidikan	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019	Pembinaan	Agar pihak sekolah memenuhi ketentuan terkait penyelenggaraan Pendidikan sesuai Standar Nasional
9	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023	Pembinaan kepada pemilik usaha dan pendataan alat berat milik perusahaan	Mendata Alat Berat milik perusahaan dan dilakukan pembinaan bahwa mulai tahun 2025 pemilik usaha dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak alat berat



10	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian –Bagian Jalan Provinsi	Pergub Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2020	Pengawasan terhadap jalan provinsi	Melakukan pengawasan jalan provinsi yang mengalami kerusakan
11	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022	Pengawasan dan Pembinaan (tidak ditemukan pelanggaran)	- Petugas melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 terkait Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. - Apabila adanya perizinan yang belum diperpanjang segera untuk melakukan perpanjangan perizinan melalui OSS.
12	Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2023	Pengawasan dan Pembinaan (tidak ditemukan pelanggaran)	Petugas melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



2. Pengamanan asset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam mendukung terciptanya suasana di Sumatera Selatan yang aman dan nyaman, adapun Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

NO.	LOKASI	URAIAN	KETERANGAN	JUMLAH ASET
1.	Jl. Lingkar Istana (samping Griya Agung)	Pendampingan pengamanan dalam rangka Pengukuran lahan	Berkas lahan tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan	1
2.	Jalan H. Husni	Penertiban pedagang kaki lima	Penertiban	1
3.	Jalan Ade Irma Nasution	Penertiban pedagang kaki lima	Penertiban di Koperasi Bina Praja	1

f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Masih banyak masyarakat/aparatur/badan hukum yang melanggar Perda dan Perkada;

Saran :

Untuk meningkatkan kepatuhan pelanggar dalam menindaklanjuti hasil pembinaan yaitu melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang rentan pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, agar mereka memahami dan sadar untuk mematuhi Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BPBD juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

- Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Fungsi

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan



- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	%	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100

c. Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp. 24.024.066.356,- (dua puluh empat milyar dua puluh empat juta enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2025	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	Belanja Pegawai	10.134.030.000	11.307.023.550
2.	Belanja Barang dan Jasa	15.027.470.129	11.498.026.881
3.	Belanja Modal	2.982.260.000	1.219.015.925
TOTAL		28.143.760.129	24.024.066.356



**Alokasi Anggaran Kegiatan SPM
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi/Pagu Anggaran
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)	1.493.400.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	447.580.000
		Penyusunan Rencana Kontijensi	78.000.000,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	411.260.000,00
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1.204.779.525
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	28.000.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.288.960.129
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	27.000.000

d. Dukungan Personil

**Jumlah Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

No.	U r a i a n		Jumlah
1.	Jabatan Struktural	Esselon II	1
		Esselon III	5
		Esselon IV	10
2	Usia	Usia diatas 30-40 Tahun	80
		Usia diatas 41-50 Tahun	40



		Usia diatas 50 Tahun	18
3	Pendidikan	Profesi	6
		Strata 2	11
		Strata 1	80
		D.4	2
		D.3	17
		SMA	28
		SMP	0
		SD	0
4	Jenis Kelamin	Laki-laki	78
		Perempuan	60
5	Golongan / Ruang	Golongan VI	15
		Golongan III	36
		Golongan II	1
		Golongan I	0
		Golongan IX	36
		Golongan VII	8
		Golongan V	17
		PPPK PW	25
	Jumlah Total Pegawai		138

e. Hasil Capaian

Adapun realisasi anggaran sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

N O.	URAIAN	ANGGARAN 2025	
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	Belanja Pegawai	11.307.023.550	10.891.230.242
2.	Belanja Barang dan Jasa	11.498.026.881	10.603.155.256
3.	Belanja Modal	1.219.015.925	1.153.997.640
TOTAL		24.024.066.356,00	22.648.383.138,00



f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM yaitu:

- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur, kondisi existing yang ada masih belum mendukung efektifitas pencegahan dan penanggulangan bencana.
- Cakupan layanan/akses dukungan sumber air untuk penanggulangan kebakaran masih relative rendah.
- Akses jalan dan jarak tempuh menuju tempat kejadian kebakaran terhambat karena luas wilayah dan jalur yang tidak bisa terprediksi.
- Kualitas SDM personil penanggulangan bencana dalam setiap penanganan kebencanaan masih kurang.
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana.
- Adanya rasionalisasi/refocusing anggaran pada BPBD Provinsi Sumsel.
- Masih ada Kab/Kota belum menyusun dokumen kebencanaan dengan alasan dukungan anggaran minim.

Adapun solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut:

- Tersedianya peralatan yang lengkap dan memadai saat terjadi bencana.
- Membangun sarana prasarana, teknologi tepat guna dalam melakukan upaya pemadaman.
- Menggunakan alat dan membangun akses jalan di daerah rawan bencana serta memperkuat kesiapsiagaan.
- Melaksanakan Bimtek dan pelatihan kepada personil penanggulangan bencana yang memadai serta didukung peralatan untuk pelaksanaan tugas di lapangan.
- Terus melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana.



- Menganggarkan kembali tahun depan, anggaran yang dirasionalisasikan dan merencanakan kembali kegiatan yang belum bisa terlaksana di tahun yang akan datang.
- Mendorong Kab/Kota untuk menyusun dokumen kebencanaan melalui rapat koordinasi pusat maupun daerah.

6. Bidang Urusan Sosial

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota telah menetapkan SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas 5 (lima) layanan dasar yaitu :

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial;
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial;
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial;
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Indikator kinerja dan target dari 5 (lima) layanan dasar diatas sebagai berikut :

1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya Dalam Panti ; dengan target 100% (seratus persen)
2. Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya Dalam Panti ; dengan target 100% (seratus persen)
3. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya Dalam Panti ; dengan target 100% (seratus persen)
4. Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya Dalam Panti ; dengan target 100% (seratus persen)
5. Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi, dengan target 100% (seratus persen).



c. Anggaran

Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial yang berasal dari dana APBD, APBN dan CSR dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana APBD

- Belanja Langsung sebesar Rp. 8,827,060,000,-

2. Sedangkan alokasi anggaran dari CSR sendiri tidak berupa uang melainkan dalam bentuk barang.

d. Dukungan Personil

- Dukungan personil untuk UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik sebanyak 24 orang (ASN 6 orang, PPPK 4 Orang dan TKS 8 Orang dan Instruktur 6 Orang).
- Dukungan personil untuk UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus sebanyak 35 orang (ASN 8 orang, PPPK 6 orang dan TKS 21 orang).
- Dukungan personil untuk UPTD Panti Sosial Lanjut Usia sebanyak 38 orang (ASN 8 orang dan PPPK 5 orang dan TKS 25 orang).
- Dukungan personil untuk UPTD Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa sebanyak 27 orang (ASN 10 orang, Non ASN 12 orang dan instruktur 5 orang).
- Dukungan personil untuk bencana alam dan bencana sosial sebanyak 61 orang (ASN 6 orang, PPPK 8 orang, Tagana 27 orang dan Pordam 20 Orang).

e. Hasil Capaian

Berikut ini tabel realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.



Tabel
Realisasi SPM Tahun 2025

N o	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti	100,00	100,00	100,00
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti	100,00	100,00	100,00
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti	100,00	100,00	100,00
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti	100,00	100,00	100,00
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi	100,00	100,00	100,00



Berdasarkan tabel diatas, capaian SPM bidang sosial Provinsi Sumatera Selatan sebesar 100% mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Semua sasaran indikator yang menjadi urusan wajib Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan secara maksimal dan akan ditingkatkan capaiannya.

1. Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya
Dalam Pantti sebanyak 25 orang di UPTD Pantti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik. Klien di pantti sosial milik pemerintah ini merupakan penyandang disabilitas tuna netra. Adapun layanan yang diberikan berupa:

- Permakanan sebanyak 3 (tiga) kali sehari yaitu sarapan pagi, makan siang dan makan malam.
- Penyediaan sandang bagi penyandang disabilitas sensorik
- Penyediaan asrama yang mudah diakses, jarak antara asrama dan tempat pelayanan rehabilitasi sosial berdekatan sehingga mempermudah klien pantti beraktivitas. Pemisahan asrama laki-laki dan wanita serta letak asrama yang berdekatan dengan kamar mandi dan MCK.
- Penyediaan obat-obatan dalam pantti berupa obat-obat generik.
- Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial berupa bimbingan mental, sosial, agama dan fisik setiap hari diberikan kepada klien pantti setelah mereka selesai belajar.
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dilakukan oleh pekerja sosial seperti disiplin seperti membuang sampah pada tempatnya dan belajar hidup bersih.
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi klien pantti selalu dipantau oleh pekerja sosial setiap harinya untuk memastikan mereka mendapatkan layanan tersebut.
- Pekerja Sosial melakukan assesment terhadap klien pantti, apabila klien pantti mengalami permasalahan maka Pekerja Sosial melakukan penelusuran keluarga klien tersebut.



- Dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik, keluarga klien panti selalu dipantau oleh Pekerja Sosial karena jika ada klien panti selama masa rehabilitasi melakukan kesalahan atau memiliki masalah pribadi lainnya maka diperlukan pemanggilan keluarga klien dimaksud.
- Apabila telah habis masa waktu pelayanan rehabilitasi sosial maka akan dilakukan terminasi atau pemulangan kepada keluarga dengan cara melakukan pemanggilan keluarga klien panti untuk diberikan penjelasan. Apabila klien tersebut tidak memiliki keluarga terdekat maka pekerja sosial akan tetap melakukan penelusuran keluarga klien dimaksud.

2. Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti sebanyak 130 orang di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus. Adapun pelayanan yang diberikan kepada klien panti tersebut sebagai berikut:

- Pengasuhan, Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus memiliki tenaga kesejahteraan sosial yang ahli dan berpengalaman dalam pengasuhan anak.
- Penyediaan permakanan, sebanyak 3 (tiga) kali sehari yang memenuhi standar gizi dan jenis makanan sesuai dengan usia dan kebutuhan anak . menu makanan selalu berganti dan variatif.
- Penyediaan sandang berupa pakaian sekolah, pakaian harian, pakaian dalam dan pakaian olah raga diperoleh dari donatur sedangkan pakaian belajar bimbingan keterampilan dan perlengkapan mandi dianggarkan dari Dana APBD.
- Penyediaan Asrama yang mudah diakses, ketersediaan fasilitas berupa, gedung asrama, tempat olahraga, tempat ibadah, ruang makan/dapur cukup memadai, tetapi diperlukan renovasi agar klien merasa lebih nyaman.
- Penyediaan perbekalan kesehatan dalam panti berupa pengadaan obat-obatan untuk penanganan awal cukup tersedia. Selanjutnya untuk



pemeriksaan rutin kesehatan bekerjasama dengan puskesmas terdekat.

- Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial, bentuk pemberian bimbingan ini terjadwal berbentuk bimbingan dalam
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari , Pemberian bimbingan ini berbentuk penugasan yang terjadwal agar anak-anak terkondisi (conditioning behavior).
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

3. Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam Panti sebanyak 200 orang dengan pelayanan yang diberikan sebagai berikut:

- Pemberian makan sebanyak 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan standar gizi dan kondisi kesehatan lanjut usia.
- Penyediaan sandang antara lain berupa pakaian dan perlengkapan mandi.
- Penyediaan asrama yang mudah diakses dan sesuai standar asrama bagi Lanjut Usia Terlantar.
- Penyediaan alat bantu bagi lanjut usia
- Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti antara lain berupa obat-obatan umum, obat-obat khusus, kunjungan dokter, pekerja sosial medis.
- Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial berupa senam lansia yang secara rutin dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pemeriksaan kesehatan, penimbangan berat badan, bimbingan sholat, membaca Alquran, berdoa, membaca Yasin dan Tahlil.
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari untuk mengisi waktu luang seperti keterampilan membuat sapu bulu ayam, keset kaki, merangkai bunga.
- Akses ke layanan kesehatan dasar, bekerja sama dengan Puskesmas terdekat untuk pemeriksaan rutin kesehatan lansia.

4. Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti sebanyak 180 orang di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan,



Pengemis, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Adapun layanan yang diberikan sebagai berikut:

- Pemberian permakanan sebanyak 3 (tiga) kali sehari bagi gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa.
- Pada tahun 2025 penyediaan sandang bagi gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa dianggarkan melalui Dana APBD dan bantuan CSR serta perorangan.
- Penyediaan asrama kategori panti sosial gelandangan , pengemis dan orang dengan gangguan jiwa yang mudah diakses, jarak antara asrama dan tempat pelayanan rehabilitasi sosial berdekatan sehingga mempermudah klien panti beraktivitas. Pemisahan asrama laki-laki dan wanita serta letak asrama yang berdekatan dengan kamar mandi dan MCK.
- Penyediaan obat-obatan dalam panti berupa obat-obat generik. Untuk pelayanan kesehatan rutin dilakukan setiap hari yang dilakukan oleh perawat yang ada dipanti. Sedangkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas setempat setiap 1 (satu) minggu sekali. Untuk pemeriksaan gangguan jiwa dilakukan secara berkala.
- Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial berupa bimbingan mental, sosial, agama dan fisik setiap hari diberikan kepada klien panti setelah mereka selesai belajar. Klien panti diajak senam pagi sebelum sarapan pagi, sedangkan bimbingan agama/spiritual dilakukan dimusholah dalam panti. Untuk pelayanan rehabilitasi masih bersifat pelayanan dasar dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia.
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dilakukan oleh pekerja sosial seperti disiplin seperti membuang sampah pada tempatnya dan belajar hidup bersih.
- Pemberian bimbingan keterampilan dasar berupa menjahit sulam, dan bercocok tanam.
- Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Sosial memberikan pendidikan dan peralatan sekolah bagi anak klien panti. Untuk pelayanan kesehatan klien panti telah



dilakukan MoU dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa berupa pengobatan gratis di Puskesmas.

- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Pendudukan (KTP).

5. Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi sebanyak 2.500 jiwa. Adapun layanan yang telah diberikan kepada korban bencana alam dan sosial sebagai berikut:

- Penyediaan permakanan bagi 2.500 jiwa yang terdampak bencana alam maupun bencana sosial.
- Penyediaan sandang bagi 700 jiwa berupa pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kit.
- Penyediaan tempat penampungan pengungsian 1.200 orang.
- Penanganan Khusus bagi kelompok rentan 800 org.
- Pelayanan Dukungan Psikososial kepada 150 orang korban bencana

f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Sumber Daya Manusia yang terbatas baik secara jumlah maupun kualitas (kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat);
- Penyediaan sarana dan prasarana sosial yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masih kurang jumlahnya;
- Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial mengakibatkan target penanganan juga belum maksimal.

Solusi

- Perlu penambahan dan penguatan kapasitas bagi SDM kesejahteraan sosial;
- Perbaikan/renovasi dan pemenuhan sarana prasarana sosial yang memadai dan sesuai dengan SOP dalam menunjang pelayanan;



- Perlu adanya peraturan yang menyebutkan secara jelas Persentase (%) alokasi anggaran untuk bidang kesejahteraan sosial khususnya untuk SPM.



BAB V

P E N U T U P

Selaku Gubernur Sumatera Selatan, kami telah berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung oleh kinerja seluruh Badan, Dinas, Biro, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta partisipasi aktif masyarakat. Alhamdulillah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menunjukkan adanya perkembangan, kemajuan, serta peningkatan kinerja yang cukup menggembirakan. Capaian tersebut pada hakikatnya merupakan hasil kerja bersama yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan masih dihadapkan pada sejumlah kendala dan keterbatasan, meskipun secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi yang penting dan konstruktif dalam rangka penyempurnaan kebijakan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Atas segala dukungan, kerja sama, dan kontribusi yang telah diberikan, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan. Dukungan tersebut menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk terus bekerja keras dengan dilandasi semangat pengabdian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan atas berbagai saran, masukan, koreksi, dan kritik yang konstruktif, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam mendorong peningkatan kinerja dan percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.



Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, marilah kita terus mewujudkan Sumsel Maju Terus Untuk Semua melalui pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, serta perlindungan-Nya kepada kita semua. Amin.



LAPORAN PENYELENGGARAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat atas pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di tahun Anggaran 2025.

“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”